

KEMENTERIAN PERTANIAN



LAPORAN TAHUNAN BBRMP SUMATERA SELATAN



BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN

2026



www.brmpsumsel.go.id



Jl. Kol. H. Burlan No. 83 Km. 6 Kota Palembang

LAPORAN TAHUNAN

**BALAI PENERAPAN MODERISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN**

TAHUN ANGGARAN 2025



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2025

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya, Laporan Akhir Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Arah Kebijakan pembangunan pertanian nasional tahun 2025 semakin menekankan pentingnya modernisasi pertanian. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi (BRMP) Kementerian Pertanian, BRMP Sumsel kini menjalankan mandat strategis untuk melaksanakan pengembangan, penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi, serta modernisasi pertanian.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai dalam mendukung pencapaian dalam tujuan dan sasaran program Kementerian Pertanian di tingkat daerah, Laporan ini memuat gambaran umum organisasi, pelaksanaan kegiatan, serta capaian kinerja yang telah dilakukan selama periode pelaporan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas dan fungsi BPMP Sumatera Selatan seperti Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan, Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi, dan Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian.

Penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, perencanaan, dan pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas pelaksanaan program, serta akuntabilitas kinerja BPMP Sumatera Selatan ke depan. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana transparansi kepada para pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya yang telah diberikan.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkerjasama dalam pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan ini. Saran maupun kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 31 Desember 2025
Kepala Balai



Dr. Rustam ,SP.,M.Si NIP. 196906071999031001

PENDAHULUAN

1.1. Tugas dan Fungsi

Memasuki tahun 2025, arah kebijakan pembangunan pertanian nasional semakin menekankan pentingnya modernisasi pertanian. Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, BSIP berevolusi menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Sejalan dengan itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025, BBPSIP resmi bertransformasi menjadi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP Penerapan), dan BPSIP Sumsel beralih menjadi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Sumsel.

BPMP Sumsel kini menjalankan mandat strategis untuk melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian dibawah koordinasi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Permentan Nomor 10 Tahun 2025, BPMP Sumatera Selatan atau BRMP Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1) Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian, 2) Pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi serta model pertanian modern, 3) Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber dan penilaian kesesuaian, 4) Pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian, 5) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia. 6) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian, 7) Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta serta modernisasi pertanian, 8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

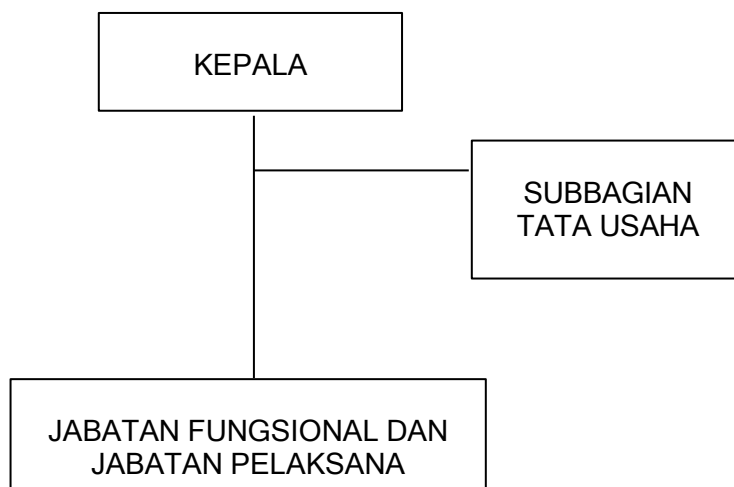
Terhitung tanggal 30 Desember 2025, berdasarkan Permentan RI Nomor 39 Tahun 2025, seluruh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian di Indonesia bertransformasi menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian. Perubahan ini juga menaikkan eselonisasi dari Eselon IIIa menjadi Eselon IIb. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian memiliki tugas utama mengoordinasikan dan melaksanakan penerapan hasil perakitan serta perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, sekaligus mendorong modernisasi pertanian melalui pengujian, diseminasi, pendampingan, dan kerja sama dengan berbagai pihak.

II.SUB BAGIAN TATA USAHA

Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. BRMP Sumatera Selatan dipimpin oleh Kepala dan terdiri atas Sub bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. BRMP Sumatera Selatan secara teknis dibina oleh Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP). Adapun struktur oprganisasi BRMP Sumatera Selatan tersaji pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi BRMP Sumatera Selatan



2.2. Tujuan dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025

2.2.1. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah optimalisasi layanan dukungan manajemen internal BRMP Sumatera Selatan dalam melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian melalui penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana

dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

2.2.2. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan adalah

- a. Terlaksananya pengelolaan BMN.
- b. Terlaksananya layanan kerumahtanggaan dan Umum
- c. Terlaksananya layanan Gaji dan Tunjangan
- d. Terlaksananya layanan operasional dan pemeliharaan kantor
- e. Terlaksananya layanan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W)

Adapun rincian aktivitas keluaran kegiatan Subbagian Tata Usaha BRMP Sumatera Selatan pada Tahun 2025 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tujuan, Keluaran dan Rincian Aktivitas Kegiatan Sub. Bagian Tata Usaha Tahun 2025

No	Tujuan	Keluaran	Rincian Aktivitas
1.	Optimalisasi layanan urusan penatausahaan barang milik/kekayaan negara	Pengelolaan BMN	1) proses administrasi barang milik negara 2) pengelolaan barang milik negara
2.	Optimalisasi layanan urusan tata usaha, rumah tangga, persuratan dan kearsipan	Layanan kerumahtanggaan dan Umum	1) layanan kepegawaian, 2) layanan keuangan 3) layanan ketatausahaan, 4) layanan rumah tangga, 5) layanan kearsipan 6) layanan perlengkapan
3.	Optimalisasi layanan urusan keuangan	layanan Gaji dan Tunjangan	1) pembayaran gaji, 2) pembayaran tunjangan, 3) pembayaran uang makan, 4) pembayaran uang lembur
4.	Optimalisasi	layanan	1) layanan keperluan sehari-hari

	layanan urusan prasarana sarana dan urusan sumber daya manusia	operasional dan pemeliharaan kantor	perkantoran 2) langganan daya dan jasa 3) pemeliharaan kantor 4) pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor 5) pengembangan kompetensi pegawai
5.	Optimalisasi layanan urusan keuangan	layanan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah (UAPPA-W)	1) penyusunan laporan keuangan dan laporan barang milik negara tingkat satker dan wilayah UAPPA/B-W semester II, semester I dan triwulan III, 2) pendampingan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Inspektorat Jenderal 3) pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TL-LHP) BPK maupun Inspektorat Jenderal.

2.3. Prosedur Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan Pengelolaan BMN
 - administrasi serta pengelolaan barang milik negara.
- b. Layanan Kerumahtanggaan dan Umum
 - Layanan kepegawaian
 - ✓ Updating SIM ASN, My ASN, E-Mutasi
 - ✓ Melayani konsultasi layanan kepegawaian
 - ✓ Menyampaikan usulan berkas administrasi kepegawaian seperti penerbitan SK kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, KARPEG, TASPEN, ASKES, KARIS, KARSU, dll.
 - ✓ Mengelola perizinan pegawai seperti cuti, dll
 - ✓ Membuat rekap absensi dan melaporkan ke pimpinan apabila ada indikasi pegawai yang melanggar disiplin
 - ✓ Memproses usulan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai
 - ✓ Memproses DUPAK, usulan pengangkatan, pemberhentian jabatan fungsional
 - ✓ Inventarisasi kebutuhan peningkatan SDM melalui kegiatan diklat dan non diklat.
 - ✓ Kontrak PPNPN
 - ✓ Fasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan SDM.
 - ✓ Mengevaluasi hasil Diklat dan non Diklat
 - ✓ Mensosialisasikan Peraturan-peraturan Kepegawaian
 - ✓ Melakukan Pembinaan Jasmani dan Rohani
 - ✓ Melaksanakan Regrouping dan Menyusun Peta Jabatan
 - ✓ Menyusun Daftar Nominatif Pemangku Jabatan
 - ✓ Menyusun dan Menyediakan Bahan Penilaian Prestasi Pekerjaan berupa Sasaran Kerja Pegawai
 - Layanan keuangan
 - ✓ Penetapan organisasi dan personalia pengelola anggaran
 - ✓ Penetapan mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban anggaran
 - ✓ Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan anggaran
 - ✓ Pencairan anggaran, penerbitan SPM dan SP2D
 - ✓ Mengikuti workshop penyusunan laporan keuangan semester II, I dan triwulan III

- ✓ Pendampingan pemeriksaan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
 - ✓ Rekonsiliasi dengan KPPN, KPKNL
- Layanan ketatausahaan, rumah tangga, kearsipan dan perlengkapan.
 - ✓ Pengiriman surat-surat dinas
 - ✓ Pengumpulan, klasifikasi dokumen dan pelaksanaan pengarsipan
 - ✓ Membuat kuesioner survey kepuasan pelanggan internal serta merencanakan pelaksanaan surveinya
- c. Layanan Gaji dan Tunjangan
- Prosedur Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- Pembuatan daftar gaji dan tunjangan melalui aplikasi gaji web
 - Pengajuan verifikasi ke PPK
 - Pengajuan persetujuan ke PPSMP
 - Pengiriman ADK ke KPPN
 - Pembuatan SPP dan SPM
 - Approval tanda tangan elektronik dan OTP oleh PPSPM untuk penerbitan SP2D.
 - Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai ke rekening masing-masing pegawai
- d. Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- Kebutuhan sehari-hari perkantoran
 - ✓ Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti
 - ✓ Keperluasn sehari-hari perkantoran lebih dari 40 pegawai,
 - ✓ langganan internet/zoom/canva/capcut,
 - ✓ pakaian seragam batik pegawai dan pakaian seragam dinas pegawai.
 - Langganan daya dan jasa
 - ✓ Listrik
 - ✓ Air
 - Pemeliharaan kantor
 - ✓ Pemeliharaan gedung/bangunan (Rumah dinas, rumah tamu/mess, kantor tidak bertingkat, kantor bertingkat, halaman kantor, kantor kebun percobaan)
 - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2, Kendaraan Roda 3, Perpanjangan SNTK roda 4/ roda 3/ roda 2, Mutasi Kendaraan Roda 2, Hand Traktor dan Traktor Roda 4)

- ✓ Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya (Alat Laboratorium, PC, Notebook, CCTV, Perangkat Zoom, Laptop, Sound System, Televisi, AC, Mesin Rumput, Generating Set, Instalasi Listrik/Air/Telepon, Printer dan sarana prasarana Internet.
- Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor
 - ✓ Keperluan perkantoran antara lain konsumsi dalam rangka kegiatan jamuan tamu, pertemuan, rapat, dll serta cetak media informasi dan dekorasi
 - ✓ Honorarium Operasional Satuan kerja antara lain honorarium bendahara pengelola Pnbp, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji tagihan Penandatanganan SPM, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Anggpta/Petugas UAPPA/Barang-EL dan Pejabat pengadaan barang/jasa.
- Pengembangan Kompetensi Pegawai
 - ✓ Identifikasi kebutuhan pendidikan, pelatihan dan magang yang dilakukan oleh tim SDM, selanjutnya dibuat matriks kebutuhan dilakukan oleh analis kepegawaian
 - ✓ Mengusulkan kepada kepala Balai untuk nama-nama nominatif
 - ✓ Mengirimkan usulan calon peserta ke lembaga pendidikan/pelatihan/ magang
 - ✓ Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan/ pelatihan/ magang
 - ✓ Mendokumentasikan kegiatan
 - ✓ Melaksanakan kegiatan internal terkait pengembangan kompetensi pegawai dengan menyediakan Jasa Profesi dan Makan Minum pertemuan
- e. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W)

Tahapan kegiatan masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan mutu manajemen satker
 - Melaksanakan Tinjauan Umum Manajemen
 - Melaksanakan Audit Internal
 - Melaksanakan Audit Resertifikasi ISO 9001:2015
 - Melaksanakan Perbaikan Audit
 - Mengendalikan Dokumen dan Rekaman
2. Administrasi Perkantoran dan Administrasi Kepegawaian
 - Administrasi Perkantoran
 - Menyusun SK Organisasi dan Pengelola Anggaran
 - Melaksanakan Penyusunan Surat Keputusan Kegiatan
 - Menyusun atau Memperbaharui SOP
 - Melaksanakan pengelolaan keuangan belanja dan pendapatan
 - Mengajukan SPP dan SPM
 - Melaksanakan UP, TUP dan GUP
 - Melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN
 - Menatausahakan Surat Menyurat
 - Pembinaan Administrasi Kepegawaian
 - Menyusun Nominatif Tunjangan Kinerja dan Perubahannya
 - Mendokumentasikan Kegiatan
3. Pengelolaan Perlengkapan, Kearsipan dan SAI.
 - Menyusun pengelola anggaran perlengkapan, kearsipan dan SAI
 - Melaksanakan perekaman data transaksi pada aplikasi SAKTI dan membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran
 - Melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL
 - Membuat daftar kearsipan, perbaikan daftar barang ruangan
 - Menyusun dan membuat laporan SAI secara berkala
 - Melaksanakan penatausahaan BMN

2.4. Capaian Kinerja

a. Pelaksanaan Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN yang menjadi tanggung jawab Sub Bagian Tata Usaha adalah proses administrasi serta pengelolaan barang milik negara



Pada bulan September 2025, BRMP Sumsel selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) menerima asistensi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait pengelolaan administrasi dan teknis BMN terutama dalam hal pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan. Tak hanya sebatas asistensi, Tim KPKNL juga sekaligus memonitoring optimalisasi pemanfaatan BMN berupa tanah serta gedung/bangunan milik BRMP agar dapat mendukung penuh kegiatan modernisasi pertanian. Tim KPKNL juga memonitoring tindak lanjut rekomendasi pengelolaan BMN yang telah diberikan sebelumnya untuk memastikan adanya perbaikan berkelanjutan serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan aset negara.

Pada bulan November 2025, BRMP Sumsel melaksanakan fasilitasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan BMN di Provinsi Sumatera Selatan baik dalam bentuk koordinasi langsung ke instansi terkait (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Sembawa, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa

Kabupaten Banyuasin dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan). BRMP Sumsel juga melakukan fasilitasi pengelolaan Barang Milik Negara dalam bentuk Workshop Pengelolaan BMN Lingkup Kementan di Wilayah Sumatera Selatan di BRMP Sumatera Selatan. Workshop ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aset BMN sekaligus memperkuat sinergi antarsatker dalam pengelolaannya dengan menghadirkan narasumber dari Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Pertanian dan KPKNL Palembang.



b. Layanan Kerumahtanggaan dan Umum

o Layanan kepegawaian

Keadaan pegawai BRMP Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Data Pegawai per 31- Desember 2025

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1.	PNS	16	28	44
2.	CPNS	1	2	3
3.	PPPK	2	2	4
4.	PPPK Paruh Waktu	7	5	12
5.	PPNPN	2	0	2
Jumlah		28	37	65

Sepanjang tahun 2025 terdapat 3 (tiga) pegawai yang memasuki masa pensiun Data Pegawai yang dimaksud tersaji pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Daftar Pegawai yang Pensiun Tahun 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tmt Pensiun	Keterangan
1.	I KETUT WARKEN EDI 196506151992031001	PENYULUH PERTANIAN AHLI MADYA	2025.07.01	BUP
2.	RAJULIS 196707271999031001	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	2025.08.01	BUP
3.	SURI EMMA 196509011993032001	PENYULUH PERTANIAN AHLI MADYA	2025.10.01	BUP

Sepanjang tahun 2025 juga terdapat 3 (tiga) pegawai yang naik pangkat, seperti tersaji pada tabel 6 berikut.

Tabel 6. Daftar Pegawai yang Naik Pangkat Tahun 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan	Naik Pangkat	Tmt KP
1.	SUSILAWATI, S.P., M.Si. 197008102003122001	PENYULUH PERTANIAN AHLI MADYA	Pembina TK I / IV/b	01-04-2025
2.	SITI KHUSNIYATI, S.P 197104242005012001	PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA	Penata Muda TK I / III b	01-08-2025
3.	MAULIDA SURAYYA, S.P.,M.Sc 198711142015032001	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	Penata Muda TK I	01-08-2025

Pada tahun 2025 terdapat 35 (Tiga Puluh Lima) Pegawai yang kenaikan gaji berkala (KGB) sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

No	Nama	Gol	KGB Mulai Tanggal
1	ANITA KARLINA, S.E. NIP.198301102007102001	III/c	01/04/2025
2	ANNISA, S.P. NIP.197811182011012005	III/c	01/01/2025

No	Nama	Gol	KGB Mulai Tanggal
3	BUNAIYAH HONORITA, SP, MSi NIP.198905302011012009	III/d	01/01/2025
4	DIAH ISMIA PUSPASARI, S.TP. 'NIP.198304052008012012	III/d	01/12/2025
5	FATHI 'NIP.198106292008121001	II/c	01/01/2025
6	FUADI IRSAN, M.Si. 'NIP.199010272019021001	III/b	01/02/2025
7	HERWENITA, S.P., M.Sc. NIP. 198501172009012005	III/c	01/01/2025
8	I KETUT WARKEN EDI, S.P. NIP. 196506151992031001	IV/b	01/05/2025
9	JOHANES AMIRRULLAH, S.P., M.Si NIP. 198003072011011009	III/c	01/01/2025
10	KOHARUDIN NIP.196812122007011001	II/d	01/03/2025
11	KRISHNA PUSPARINI, SP NIP.198603252009122006	III/d	01/12/2025
12	MUHAMMAD ARIEF SIDIK PURWANTO, S.Hut NIP. 197405142008121001	III/d	01/01/2025
13	MAHDALENA, SP NIP. 196608011994032001	IV/a	01/10/2025
14	MASITO, S.Pt., M.Sc NIP. 198603302009122007	III/c	01/12/2025
15	MAULANA M. YUSUF, S.Si. 199501062022031001	III/a	01/03/2025
16	MAULIDA SURAYYA, S.P.,M.Sc 198711142015032001	III/c	01/03/2025
17	MAYA DHANIA SARI, S.P. 198306292009122005	III/d	01/12/2025
18	MUHTIAR FIKRI, A.Md.,S.H. NIP. 198806092011011004	III/b	01/01/2025
19	MUKSIN NIP. 197109222007011001	II/c	01/10/2025
20	NUR WAHYU SARININGTIAS, S.P. NIP. 199203142019022001	III/b	02/02/2025
21	RAJULIS NIP. 196707271999031001	III/b	01/04/2025
22	RISALLUDIN, S.Si NIP.197608312006041002	III/a	01/04/2025
23	RIZKY WIRASWASTI NOVITASARI, A.Md. NIP. 199111272019022001	II/c	01/02/2025

No	Nama	Gol	KGB Mulai Tanggal
24	ROSIDAH, S.E.,M.M. NIP. 198803022011012012	III/d	01/01/2025
25	SARNI, S.TP NIP. 198106192009012007	III/c	01/01/2025
26	SHERLY, S.E. NIP. 198904162018012001	III/b	01/12/2025
27	SITI KHUSNIYATI, S.P NIP. 197104242005012001	III/c	01/04/2025
28	SRI HARNANIK, M. Si. NIP. 197606222009122001	III/c	01/12/2025
29	SURI EMMA, S.P. 196509011993032001	IV/b	01/07/2025
30	SUSILAWATI, S.P., M.Si. 197008102003122001	IV/b	01/12/2025
31	TRIASTHER AGUSSALIM, S.S. 197409182003122002	III/d	01/12/2025
32	YANTO PANDU ALOPAN PARDAMEAN H, S.P. NIP. 196801271991031001	III/c	01/11/2025
33	YAYAN SURYANA, SST NIP. 198405092015031001	III/c	01/02/2025
34	Dr. YENI ELIZA MARYANA, S.TP, M.Si. NIP. 198101082009012008	III/c	01/01/2025
35	YUANA JUWITA, S.P. NIP. 198309112009122004	III/d	01/12/2025

Pada tahun 2025, juga terdapat 4 (empat) pegawai yang naik jabatan fungsional sebagaimana terlihat pada tabel 7 berikut

\

Tabel 7. Daftar pegawai yang naik jabatan fungsional tahun 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Tanggal Pelantikan
1.	MASITO, S.Pt., M.Sc 198603302009122007	PENGOLAH DATA DAN INFORMAS	ANALIS STANDARDISASI AHLI PERTAMA	22-05-2025
2.	Dr. drh. AULIA EVI SUSANTI, M.Sc 198304022008012016	PENGOLAH DATA DAN INFORMAS	ANALIS STANDARDISASI AHLI PERTAMA	22-05-2025
3.	NURLENA, S.P 197603282005012002	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	22-05-2025
4.	SITI KHUSNIYATI, S.P 197104242005012001	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA	22-05-2025

Pada tahun 2025 juga terdapat pengangkatan PPPK tahap 1 sebanyak 1 orang dan PPPK tahap 2 sebanyak 2 orang sebagaimana ditunjukkan pada tabel 8 berikut:

Tabel 8. Daftar pegawai PPPK Tahap 1 dan PPPK Tahap 2 tahun 2025

Tahap	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Kelas Jabatan
PPPK Tahap I	SURYA ATMAJA NIP.198909132025211009	PPPK / V	Pengadministrasi Perkantoran	5
PPPK Tahap 2	AGUS SETIAWAN, S.I.KOM NIP.199208122025211062	PPPK / IX	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
	SHERLY AGUSTINE, S.T.P. Nip. 198108302025212013	PPPK / IX	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	8

- Layanan keuangan

Kegiatan layanan manajemen keuangan meliputi penyusunan laporan keuangan semester II tahun 2024, penyusunan laporan keuangan semester I dan triwulan III tahun 2025, pertanggungjawaban dan pencairan anggaran tahun 2025, penyusunan laporan penerimaan PNPB.

- c. Gaji dan Tunjangan

Kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan di BRMP Sumatera Selatan mencakup pembayaran gaji pokok, tunjangan, uang makan, dan lembur bagi PNS dan PPPK dari Januari hingga Desember 2025, dengan total realisasi sebesar Rp. 3.871.585.626 atau 98,23 % dari pagu anggaran Rp 3.941.164.000,-, menyisakan anggaran sebesar Rp 69.578.374,-.

- d. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Hasil kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran meliputi :

- Kebutuhan sehari-hari perkantoran

- a. Pembayaran Honor PPNPN

Pada tahun 2025, BRMP Sumatera selatan melakukan pembayaran honor PPNPN untuk 18 Orang Pegawai.

- b. Keperluan sehari-hari perkantoran

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menyusun daftar ajukan kebutuhan tiap bulannya. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melihat kesesuaian bahan/barang/jasa dengan ajukan sebelumnya pada bagian urusan administrasi rumah tangga dan perlengkapan. Keperluan sehari hari ini meliputi pengisian galon air, pengisian gas, alat dan bahan kebersihan dan kebutuhan rumah tangga kantor lainnya.



c. Langganan internet

Di Tahun 2025 dilakukan pergantian provider penyedia layanan internet dari Myrepublic ke PT. Mega Artha Lintas Data untuk mengoptimalkan penyediaan jaringan internet

d. Pengadaan Pakaian seragam dinas pegawai



e. Pengadaan Pakaian seragam batik pegawai



2. Langganan daya dan jasa

Langganan daya dan jasa dalam bentuk langganan Listik PLN dan Langganan Air PDAM

3. Pemeliharaan kantor

○ Pemeliharaan gedung/bangunan rumah Dinas

Pemeliharaan gedung/bangunan rumah dinas di Tahun 2025 dilakukan dalam bentuk pengecatan dinding bagian dalam rumah dan plafon dan pembuatan backdrop televisi, Kisi-Kisi dan Moulding Ruang Tamu





- Kisi-Kisi dan Moulding Ruang Tamu



- Backdrop Televisi

- Pemeliharaan gedung/bangunan rumah tamu/mess



Pengecatan cat kusen pintu dua daun



Pengecatan kusen dan jendela satu daun



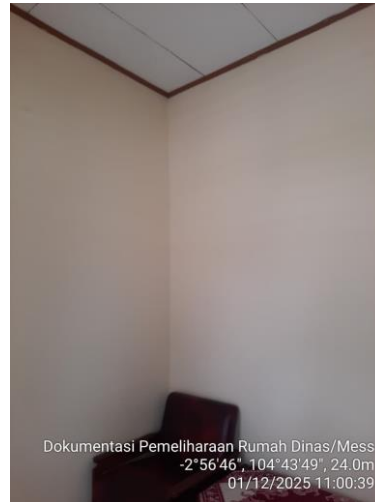
Pengecatan kusen dan jendela dua daun



Pekerjaan Pengecatan dinding luar



Pengecatan cat kusen pintu satu daun



Pekerjaan Pengecatan dinding dalam



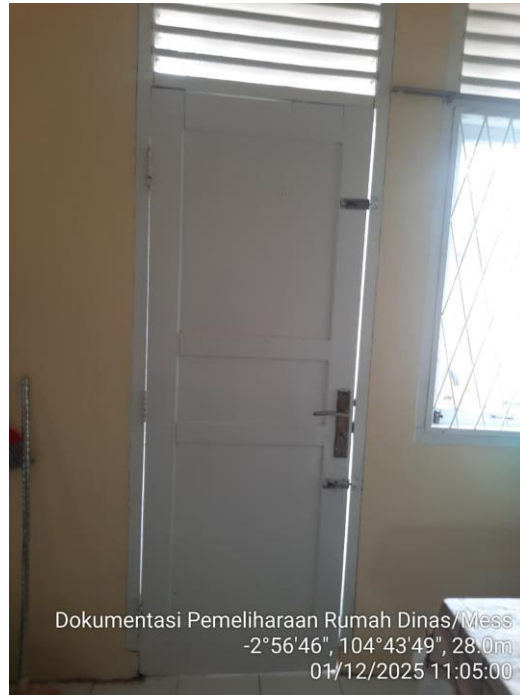
Pengecatan cat kusen pintu satu daun



Pengecatan cat kusen pintu satu daun



Pekerjaan Pengecatan cat boyvenli WC



Pengecatan cat kusen pintu satu daun



Pengecatan kusen dan jendela satu daun



Pengecatan cat kusen pintu satu daun



Pengecatan kusen dan jendela satu daun



Pengecatan kusen dan jendela dua daun



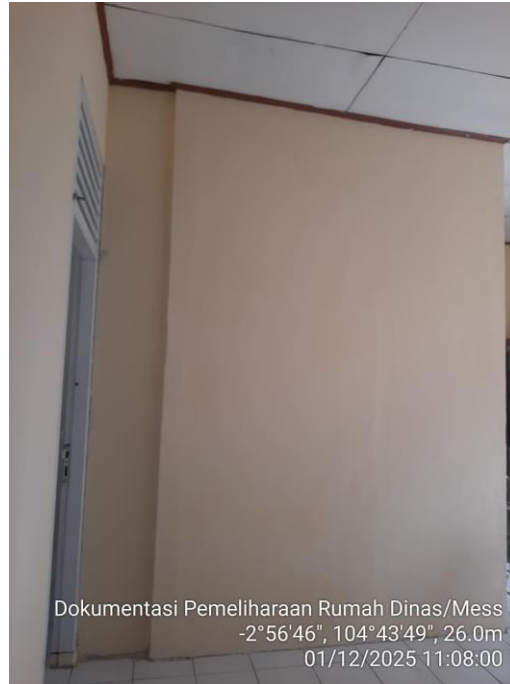
Pengecatan cat kusen pintu satu daun



Pengecatan kusen dan jendela satu daun



Pekerjaan Pengecatan dinding dalam



Pekerjaan Pengecatan dinding dalam



Pengadaan matras bed deluxe



Pengadaan matras bed deluxe



Pengadaan ambal Turkey



Pengadaan guling dan bantal



Pengadaan bed spray

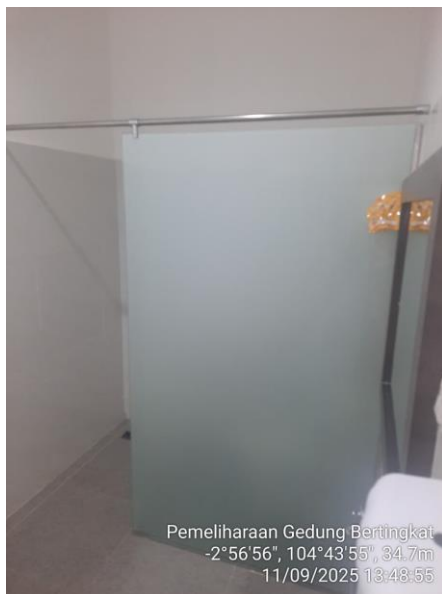
- Pemeliharaan gedung/bangunan kantor bertingkat



Pengerjaan Partisi Dinding Kaca Toilet



Pengerjaan Partisi Dinding Kaca Toilet



Pengerjaan Partisi Dinding Kaca Toilet



Pengerjaan Partisi Dinding Kaca Toilet

- Pemeliharaan gedung/bangunan kantor tidak bertingkat

Pemeliharaan dilakukan dalam bentuk penataan pos satpam dan aula kantor seperti pengecatan

- Pemeliharaan Halaman Kantor

Pemeliharaan halaman yang dilakukan pada tahun 2025 dalam bentuk pengaspalan halaman, pengecatan halaman, pemasangan penutup saluran air, penataan taman halaman (penimbunan, hidroponik, pengelolaan screen house) serta penebangan pohon-pohon tua di lingkungan BRMP Sumatera Selatan



Kondisi Sebelum Pengaspalan Halaman



Kondisi Setelah Pengaspalan Halaman



Penutupan saluran air, dan penimbunan tanah untuk taman kantor



Pengecatan Halaman Kantor



Penebangan Pohon-Pohon Tua di Halaman Kantor



Pemasangan instalasi hidroponik



Pengelolaan Screenhouse

- Pemeliharaan Kebun Percobaan

Pemeliharaan pada Kebun Percobaan berupa perbaikan atap gedung



Kondisi Sebelum Pemeliharaan atap



Kondisi Setelah Pemeliharaan atap

4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin meliputi pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2, Kendaraan Roda 3,



Perpanjangan SNTK roda 4/ roda 3/ roda 2, Mutasi

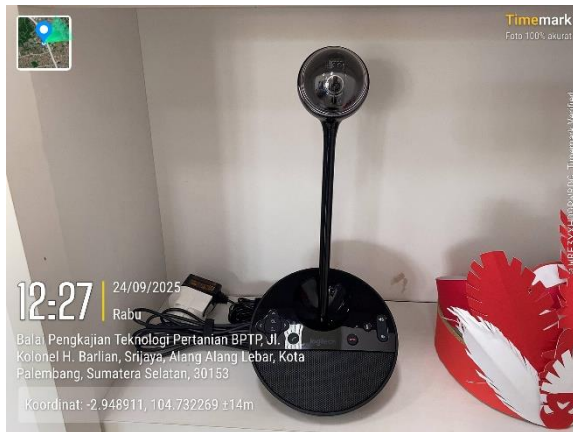
Kendaraan Roda 2, Hand Traktor dan Traktor Roda 4. Pemeliharaan ini dalam bentuk bahan bakar minyak dan perbaikan kendaraan dinas



5. Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya meliputi pemeliharaan Alat Laboratorium, PC, Notebook, CCTV, Perangkat Zoom, Laptop, Sound System, Televisi, AC, Mesin Rumput, Generating Set, Instalasi Listrik/Air/Telepon, Printer dan sarana prasarana Internet.

Pengadaan Kamera Zoom



4. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor

- Konsumsi dalam rangka kegiatan jamuan tamu, pertemuan, rapat, dll





b. Cetak media informasi dan dekorasi.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk cetak spanduk, baliho maupun umbul-umbul



- b. Pembayaran Honorarium Operasional Satuan kerja antara lain honorarium bendahara pengelola Pnbp, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji tagihan Penandatanganan SPM, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Anggpta/Petugas UAPPA/Barang-EL dan Pejabat pengadaan barang/jasa.

5. Pengembangan Kompetensi Pegawai

Dalam rangka meningkatkan kemampuan komunikasi, memperkuat kepercayaan diri, serta memahami teknik penyampaian pesan yang efektif dan inspiratif, khususnya dalam mendukung peran ASN sebagai pelayan publik BRMP Sumsel melaksanakan Workshop Public Speaking dengan tema "Communication and Action, Menguatkan Peran ASN melalui Komunikasi Efektif" pada Senin (24/11/2025) bertempat di Aula BRMP Sumsel. Kegiatan ini menghadirkan H.M. Andriko Okta Pratama, ST., CPS., CHT. sebagai narasumber.



Pada tanggal 4 Desember 2025, BRMP Sumsel juga melaksanakan seminar motivasi dengan menghadirkan Kurniawan, SP., MM. Sebagai narasumber.



BRMP Sumsel juga melakukan peningkatan kompetensi personil laboratorium

melalui Pelatihan Teknis Laboratorium Tanah dan Pupuk pada tanggal 25–28 November 2025 dari para ahli dan mentor BRMP Tanah dan Pupuk.

Selama kegiatan, peserta menerima penjelasan materi teknis, mengikuti demonstrasi metode analisis, dan memperoleh pendampingan dalam penguasaan prosedur kerja laboratorium yang lebih efektif, akurat, dan efisien. Fokus pelatihan meliputi pendalaman teknik analisis tanah dan pupuk, peningkatan akurasi metode pengujian, pemahaman standar mutu, serta penggunaan peralatan laboratorium berbasis teknologi terbaru. Selain itu, peserta juga mempelajari inovasi-inovasi analisis yang mendukung percepatan layanan dan peningkatan kualitas hasil uji.



e. Pelaksanaan Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN yang menjadi tanggung jawab Sub Bagian Tata Usaha adalah proses administrasi serta pengelolaan barang milik negara.

f. UAPPA/B-W

Realisasi kegiatan UAPPA/B-W Menyusun laporan keuangan semester II tahun 2024 tingkat provinsi Sumatera Selatan, laporan keuangan semester I dan triwulan III tahun 2025, pendampingan audit BPK, pendampingan satker dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan bersama Biro Keuangan dan BMN.

III .SEKSI KERJASAMA DAN LAYANAN PENGKAJIAN

3.1. Kerjasama BRMP Sumatera Selatan

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan, yang sebelumnya bernama BPSIP Sumatera Selatan, secara konsisten membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. Kerja sama ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, UK/UPT kementerian/kemba di daerah, perguruan tinggi, sekolah kejuruan, lembaga teknis, dan sektor usaha guna mendukung pengembangan pertanian yang modern, adaptif, dan berbasis kebutuhan spesifik lokasi di Sumatera Selatan. Secara spesifik, Kegiatan Kerjasama di tahun 2025 disajikan pada Tabel X.

Tabel 1. Kegiatan Kerjasama BRMP Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Judul Kerjasama	Mitra	Waktu
1	Sinergi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Layanan dan Pendampingan Teknologi Pertanian Di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	25 April 2022 s/d 25 April 2025
2	Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Di Bidang Pertanian	Universitas Sriwijaya	18 Februari 2022 s/d 18 Februari 2025
3	Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan di BPSIP Sumsel	SMK B. INDO SAINS	11-07-2022 s.d 11-07-2025
4	Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan di BPSIP Sumsel	SMKN 1 Tanjung Lago	18-09-2023 s.d 18-09-2026
5	Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan di BPSIP Sumsel	SMK Xaverius Palembang	18-09-2023 s.d 18-09-2026
6	Sinergi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Standardisasi Instrumen Pertanian	Balai Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Palembang Badan Standardisasi Kebijakan dan Jasa Industri Kementerian Perindustrian	18-09-2023 s.d 18-09-2026
7	Perjanjian Kerjasama	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun	-

		Klimatologi Kelas I Sumatera Selatan	
8	Pendampingan dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian	PT.Kulaku Indonesia Sejahtera	18-09-2023 s.d 18-09-2026
9	Pendidikan, Pelatihan, Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Fakultas Pertanian Universitas Tridinanti	18-09-2023 s.d 18-09-2026
10	Pendidikan, Pelatihan, Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Fakultas Pertanian Universitas Palembang	18-09-2023 s.d 18-09-2026
11	Pendidikan, Pelatihan, Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Universitas UIN Raden Fatah	06-10-2023 s.d 06-10-2026
12	Pendidikan, Pelatihan, Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Prodi Biologi Fakukultas Universitas UIN Raden Fatah	06-10-2023 s.d 06-10-2026
13	Pendampingan dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian	PT. Perkebunan Wak Uban	30-08-2024 s.d 30-08-2027
14	Pendidikan, Pelatihan, Penerapan dan Diseminasi Hasil Perakitan dan Perekayasaan Paket Teknologi Spesifik Lokasi Serta Modernisasi Pertanian	SMK PP Negeri Sembawa	27-05-2025 s.d 27-05-2028
15	Pengelolaan Sarana Prasarana, Jasa Pengujian Laboratorium, Jual Beli Hasil Pertanian Dan Peternakan	KPRI Mitra Berlian Palembang	21-07-2025 s.d 21-07-2028

Pada tahun 2025, BRMP Sumsel melaksanakan 15 (lima belas) kerjasama dalam negeri yang mencakup kerjasama dengan pemerintah daerah, UK/UPT kementerian/kembaga di daerah, perguruan tinggi, sekolah kejuruan, lembaga teknis, dan sektor usaha. Pelaksanaan kerja sama BRMP Sumatera Selatan mencakup kerja sama lanjutan yang telah dirintis pada tahun-tahun sebelumnya serta kerja sama baru yang mulai efektif pada tahun berjalan. Kerja sama lanjutan yang memasuki masa akhir perjanjian pada tahun 2025 antara lain dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyelenggaraan layanan dan pendampingan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, Universitas Sriwijaya dalam pelaksanaan pendidikan dan latihan di bidang pertanian, serta SMK B. INDO SAINS dalam program magang siswa. Melalui kegiatan ini, BRMP Sumsel melaksanakan pendampingan teknologi di lapangan, penempatan mahasiswa dan siswa magang, serta diseminasi hasil teknologi dan penelitian pertanian.

Dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan diseminasi standar instrumen pertanian, BRMP Sumsel melanjutkan kemitraan dengan berbagai institusi pendidikan menengah dan tinggi, yaitu SMKN 1 Tanjung Lago, SMK Xaverius Palembang, Fakultas Pertanian Universitas Tridianti, Fakultas Pertanian Universitas Palembang, Universitas UIN Raden Fatah, serta Program Studi Biologi Fakultas Universitas UIN Raden Fatah. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penugasan dan pendampingan mahasiswa maupun siswa magang di lingkungan BRMP Sumsel, serta kerja sama diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi bagi tenaga pendidik. Melalui kolaborasi ini, terjadi peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian sekaligus penguatan peran BRMP Sumsel sebagai pusat pembelajaran dan rujukan teknologi pertanian.

Kerja sama dalam bidang standardisasi dan penerapan instrumen pertanian juga dilaksanakan bersama Balai Standardisasi Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang Kementerian Perindustrian melalui pembentukan tim sinergi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang standardisasi instrumen pertanian. Selain itu, pendampingan usaha untuk penerapan standar dan perolehan sertifikasi SNI dilakukan bersama PT Kulaku Indonesia Sejahtera dan PT Perkebunan Wak Uban. Kegiatan ini mendukung penerapan standar instrumen pertanian secara terencana, efektif, dan efisien, serta memperkuat mutu dan daya saing produk pertanian dan agroindustri.

Sinergi kelembagaan juga diperkuat melalui perjanjian kerja sama dengan BMKG Stasiun Klimatologi Kelas I Sumatera Selatan, yang mendukung penyediaan informasi iklim dan peringatan dini cuaca ekstrem untuk mengurangi risiko gangguan terhadap kegiatan pertanian. Pada tahun 2025, BRMP Sumsel juga memulai kerja sama baru dengan SMK PP Negeri Sembawa dalam penerapan dan diseminasi hasil perakitan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian, serta dengan KPRI Mitra Berlian Palembang dalam pengelolaan sarana prasarana, jasa pengujian laboratorium, serta pengelolaan hasil pertanian dan peternakan. Kerja sama ini memperluas cakupan layanan BRMP Sumsel hingga aspek operasional, hilirisasi hasil, dan optimalisasi aset.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kerja sama BRMP Sumatera Selatan Tahun 2025 menunjukkan penguatan jejaring kemitraan yang mendukung layanan teknologi pertanian, pengembangan sumber daya manusia, penerapan standar instrumen pertanian, serta pemanfaatan informasi iklim dan sarana pendukung. Kolaborasi dengan berbagai mitra menjadi faktor strategis dalam mendorong terwujudnya pertanian yang maju, mandiri, dan modern di Sumatera Selatan, sekaligus menegaskan peran BRMP Sumsel sebagai simpul kolaborasi teknologi dan standardisasi pertanian di tingkat daerah.

III.PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN EVALUASI

4.1 Penyusunan Rencana Program

Sejalan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja, kegiatan penerapan dan diseminasi yang dilaksanakan oleh BRMP dituntut untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang nyata, dapat dimanfaatkan oleh pengguna, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan institusi. Oleh karena itu, sebelum kegiatan dilaksanakan, hasil dan manfaat yang akan dicapai harus dirumuskan dan dijelaskan secara jelas serta terukur. Proses penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kebutuhan pengguna serta perkembangan dan kecenderungan kemajuan teknologi ke depan. Dalam rangka mendukung pendanaan serta peningkatan kapabilitas BRMP dalam melaksanakan penerapan dan pengembangan inovasi pertanian, sekaligus mensinkronisasikan pelaksanaan penerapan dan diseminasi instrumen pertanian spesifik lokasi, diperlukan perencanaan yang komprehensif serta penyusunan basis data (database) program penerapan dan diseminasi sebagai acuan bagi para pejabat fungsional guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Secara garis besar mekanisme kegiatan ini terdiri dari tiga tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Rincian tahapan sebagai berikut.

1. Menyusun Matriks Program TA 2025 dan RKAKL TA 2025
2. Mengevaluasi dan menyusun Proposal/KAK setiap kegiatan
3. Mengkoordinir pelaksanaan penerapan standar
4. Melaksanakan seminar Proposal dan hasil penerapan
5. Mengikuti Raker/Rakor Badan Perakitan Modernisasi Pertanian/Balai Besar
6. Melaksanakan evaluasi rencana kerja BRMP Sumsel di tingkat Badan Perakitan Modernisasi Pertanian maupun di tingkat rapat regional Sumatera.
7. Melakukan koordinasi program ke stakeholder untuk mendukung kegiatan Penerapan dan diseminasi.

4.2 Dinamika Perubahan Anggaran (Revisi)

Seiring dengan berjalannya kegiatan dan dalam rangka mencapai *Output* maka terjadi beberapa kali revisi POK maupun DIPA. Selain disebabkan dinamika di dalam internal BRMP Sumatera Selatan, revisi dilakukan atas arahan dan intruksi dari BBP2MP. Terdapat 18 (delapan belas) kali revisi yang telah dilakukan pada tahun 2025. Dinamika perubahan anggaran tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2. Dinamika Perubahan Anggaran Tahun 2025

REVISI KE-	TANGGAL	PERUBAHAN
1	06 Februari 2025	Penyesuaian Halaman III DIPA (Perubahan Rencana Penarikan Dana/RPD). Pertimbangan Revisi: - Menjaga nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker khususnya untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA. - Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja satker.
2	21 Februari 2025	Efisiensi Anggaran BRMP Sumsel pada 3 Output dengan total sebesar Rp252.055.000. Terdiri dari: - Layanan BMN (Rp.6.102.000): Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan BMN, Pengelolaan/Pemberdayaan KP Karang Agung dan Kayu Agung - Layanan Umum (Rp.108.809.000): Penyusunan Program dan Anggaran, Monev dan UPG, SPI dan MRI, Pengelolaan Informasi Publik, Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standarisasi, Layanan Kepegawaian, Layanan Keuangan, Layanan Ketatausahaan, Sinkronisasi Kegiatan, 002:Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Rp137.144.000): Pemeliharaan Kantor, Pembayaran terkait Operasional Kantor. Pertimbangan Revisi: - Karena adanya instruksi dari Kementerian Keuangan terkait Efisiensi Anggaran, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Tujuannya adalah mendukung program prioritas Presiden Prabowo. - Efisiensi Anggaran BRMP Sumsel dilakukan pada 3 Output dengan total sebesar Rp252.055.000.

3	25 Maret 2025	Pengembalian pagu efisiensi anggaran dukman (Layanan BMN, Layanan Umum dan 002) ke semula, serta Penambahan anggaran pendampingan Rp.1.650.000.000 (status blokir). Pertimbangan Revisi: Sesuai arahan Tim Program dan Evaluasi BBPPMP (Hasil Telaah DJA): - Mengembalikan pagu kegiatan pendampingan program strategis Kementan di POK. - Anggaran pendampingan program strategis Kementan di blokir kode 2 dengan catatan detail belanja tidak relevan dengan RO (blokir di semua akun).
4	14 April 2025	Penyesuaian Halaman III DIPA (Perubahan Rencana Penarikan Dana/RPD). Pertimbangan Revisi: - Penambahan anggaran. - Menjaga nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker khususnya untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA. - Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja satker.
5	30 April 2025	- Penyesuaian RO/KRO BRMP (Mengupdate dokumen sesuai nomenklatur terbaru). - Penambahan Pagu; Kegiatan Perbenihan Padi senilai Rp.2.328.900.000 target 150 Ton SS. - Blokir Anggaran Kegiatan: a. Pendampingan: Perjalanan & ATK, b. Perbenihan: ATK, c. Dukman: Perjalanan, d. Kegiatan SPI, Monev, Informasi publik: semua akun. Pertimbangan Revisi: - Dalam rangka menyesuaikan perencanaan dan penganggaran dengan kebijakan serta struktur organisasi terbaru, diperlukan penyesuaian RO/KRO BRMP agar selaras dengan nomenklatur yang berlaku saat ini, sehingga dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat digunakan secara akurat dan konsisten. - Penambahan pagu anggaran pada kegiatan Perbenihan Padi sebesar Rp2.328.900.000 diperlukan untuk mendukung pencapaian target produksi benih padi 150 ton SS, seiring dengan peningkatan kebutuhan benih bermutu serta untuk menjamin keberlanjutan

		pelaksanaan kegiatan perbenihan sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Adanya blokir anggaran pada beberapa kegiatan, meliputi: - Kegiatan Pendampingan (akun Perjalanan dan ATK), - Kegiatan Perbenihan (akun ATK), - Kegiatan Dukungan Manajemen (akun Perjalanan), - Kegiatan SPI, Monitoring dan Evaluasi, serta Informasi Publik (seluruh akun), menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dan penataan kembali anggaran agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan prioritas program dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6	04 Juni 2025	Revisi POK: 6 Kegiatan 1. Benih Sumber Padi 150 Ton SS (018.09.HA.7912.RAG.102.051.A) ✓ Akun Belanja Bahan (521211) ✓ Penambahan Akun Belanja Barang Persediaan Bahan Baku (521821). ✓ Akun Belanja Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) ✓ Akun Belanja Sewa (522141) ✓ Akun Belanja Jasa Profesi (522151) ✓ Akun Belanja Jasa Lainnya (522191) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 2. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian (018.09.WA.6918.AEA.101.051.A). ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) 3. Pembayaran gaji dan tunjangan (018.09.WA.6918.EBA.994.001.A) ✓ Akun Belanja Gaji Pokok PNS (521111) ✓ Akun Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119) ✓ Akun Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (511121) ✓ Akun Belanja Tunj. Anak PNS (511122) ✓ Akun Belanja Tunj. Beras PNS (511126) ✓ Akun Belanja Uang Makan PNS (511129) ✓ Akun Belanja Tunjangan Umum PNS (511151) ✓ Akun Belanja Gaji Pokok PPPK (5111611) ✓ Akun Belanja Gaji Pokok PPPK (5111619)

		✓ Akun Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (5111621) ✓ Akun Belanja Tunjangan Anak PPPK 5111622) ✓ Akun Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (5111624) ✓ Akun Belanja Tunjangan Beras PPPK (5111625) ✓ Akun Belanja Uang Makan PPPK (5111628) 4.Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran (018.09.WA.6918.EBA.994.002.A) ✓ Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) 5.Pemeliharaan kantor (018.09.WA.6918.EBA.994.002.C) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) 6.Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor (018.09.WA.6918.EBA.994.002.D). ✓ Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) Pertimbangan Revisi: Produksi Benih Sumber Padi 150 Ton SS Perubahan redaksi dan Pergeseran anggaran antar akun dalam sub komponen karena adanya kebutuhan penyesuaian baik detail, volume maupun satuan sesuai hasil diskusi atau arahan pengawalan Inspektorat Jendral Kementan pada Kegiatan Perbenihan di BRMP Sumsel. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian Perubahan redaksi dan Pergeseran anggaran antar akun dalam sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran Sekretariat Provinsi Sumatera Selatan untuk memfasilitasi perjalanan ke lokasi yang bukan menjadi tanggung jawab BRMP Sumsel. Pembayaran gaji dan tunjangan Pergeseran anggaran antar akun dalam sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan PPPK (penambahan pegawai PPPK BRMP Sumsel sejumlah satu orang) Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran Penambahan detail serta pergeseran anggaran dalam satu akun pada sub komponen karena adanya kebutuhan belanja Pakaian Seragam Batik Pegawai dan Pakaian Seragam Dinas.
--	--	--

		Pemeliharaan kantor; Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor. Pergeseran anggaran antar akun antar sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada Sub Komponen Pemeliharaan kantor, Akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) detail Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Sumatera Selatan) serta Sub Komponen Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor, Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111), detail Konsumsi dalam rangka kegiatan jamuan tamu, pertemuan, rapat, dll.
7	10 Juli 2025	Penyesuaian Halaman III DIPA (Perubahan Rencana Penarikan Dana/RPD). Pertimbangan Revisi: a. Menjaga nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker khususnya untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA. b. Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja satker.
8	23 Juli 2025	Revisi POK; 10 Kegiatan 1. Produksi Benih Sumber Padi 150 Ton SS (018.09.HA.7912.RAG.102.051.A). ✓ Akun Belanja Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) 2. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian (018.09.WA.6918.AEA.101.051.A). ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 3. Pengelolaan Administrasi dan Barang Milik Negara (018.09.WA.6918.EBA.956.051.A). ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 4. Layanan Keuangan (018.09.WA.6918.EBA.962.051.G). ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 5. Layanan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kearsipan dan Perlengkapan (018.09.WA.6918.EBA.962.051.H). ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 6. Sinkronisasi Kegiatan (018.09.WA.6918.EBA.962.051.I). ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)

		7. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran (018.09.WA.6918.EBA.994.002.A). ✓ Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) 8. Pemeliharaan kantor (018.09.WA.6918.EBA.994.002.C). ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523129) 9. Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor (018.09.WA.6918.EBA.994.002.D). ✓ Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) 10. Pengelolaan Laboratorium (018.09.WA.6918.EBA.994.002.G). ✓ Akun Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) ✓ Penambahan Akun Belanja Jasa Lainnya (522191) Pertimbangan Revisi: Produksi Benih Sumber Padi 150 Ton SS Perubahan redaksi karena keperluan penghapusan "pemupukan dasar". Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian Pergeseran anggaran dalam satu akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada Sekretariat Provinsi Sumatera Selatan. Pengelolaan Administrasi dan Barang Milik Negara Pergeseran anggaran dalam satu akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi. Layanan Keuangan Pergeseran anggaran dalam satu akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada Satuan biaya transportasi dan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas. Layanan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kearsipan dan Perlengkapan Pergeseran anggaran dalam satu akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada Satuan biaya transportasi.
--	--	---

		Sinkronisasi Kegiatan geseran anggaran dalam satu akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada Biaya Penginapan Perjalanan Dinas, Satuan biaya transportasi dan Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi. Ouput Layanan Perkantoran: Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran, Pemeliharaan Kantor, Pembayaran terkait, Pelaksanaan Operasional Kantor, Pengelolaan Laboratorium. Pergeseran anggaran antar akun antar sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada; • Pakaian Seragam Batik Pegawai, Pakaian Seragam Dinas; karena penambahan pegawai. • Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor, Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Kebun • Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (Sumatera Selatan) • Cetak Media informasi dan dekorasi. • Bahan Pendukung Kegiatan Laboratorium dan Jasa Kalibrasi.
9	02 September 2025	Penghapusan Pagu blokir, Pembukaan Pagu Blokir, Pengurangan Pagu Belanja Pegawai, dan Penyesuaian RO Kegiatan. ✓ Penghapusan Blokir di kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian (Koordinasi Program Strategis Kementerian Pertanian Blokir, Pelaksanaan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian Blokir, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Blokir) ✓ Pembukaan Blokir; Beberapa kegiatan di Layanan Dukungan Manajemen Internal ✓ Pengurangan pagu di Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor) ✓ Penyesuaian RO di Kegiatan 1) Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi, 2) Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko Indeks, dan 3) Pengelolaan Informasi Publik.
10	19 September 2025	Penurunan pagu/target PNB 73% dan pembukaan blokir PNB. Kegiatan PNB: Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Penguatan dan Sarana Laboratorium. Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap, penurunan

		anggaran dari Rp82.165.000 menjadi Rp59.500.00, target 206 orang menjadi 149 orang, Penguatan Sarana Laboratorium.
11	22 September 2025	Revisi POK; 7 Kegiatan 1. Produksi Benih Sumber Padi 150 Ton SS (018.09.HA.7912.RAG.102.051.A). ✓ Akun Belanja Belanja Bahan (521211) ✓ Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) ✓ Akun Belanja Barang Persediaan Bahan Baku (521821) ✓ Akun Belanja Jasa Lainnya (522191) 2. Program Strategis Kementerian Pertanian (018.09.WA.6918.AEA.101.051.A). ✓ Akun Belanja Bahan (521211) ✓ Akun Belanja Sewa (522141) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) 3. Pembayaran gaji dan tunjangan (018.09.WA 6918.EBA.994.001.A) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) ✓ Akun Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119) ✓ Akun Belanja Uang Makan PNS ✓ Akun Belanja Uang Lembur (512211) 4. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran (018.09.WA 6918.EBA.994.002.A) ✓ Akun Belanja Belanja Keperluan Perkantoran (521111) 5. Pemeliharaan kantor (018.09.WA 6918.EBA.994.002.C) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111). ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523129) 6. Layanan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kearsipan dan Perlengkapan Sub Komponen Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor (018.09.WA 6918.EBA.994.002.D) ✓ Akun Belanja Belanja Keperluan Perkantoran (521111)

		7. Penambahan Sub Komponen; Pengembangan Kompetensi Pegawai (018.09.WA 6918.EBA.994.002.H) ✓ Akun Honorarium Narasumber (522151) Pertimbangan Revisi: Produksi Benih Sumber Padi 150 Ton SS Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada Akun Belanja Belanja Bahan (521211) detail belanja fotokopi; Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) detail kegiatan Pemeliharaan III, Biaya Pengangkutan Hasil Panen, Biaya penjemuran dan pemilahan benih, Biaya penyusunan, pengemasan dan pelabelan benih; dan Akun Belanja Barang Persediaan Bahan Baku (521821) detail Bahan Penunjang, Ember. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada Akun Belanja Bahan (521211) detail Fotocopy, Konsumsi Pelaksanaan Pendampingan; Akun Belanja Sewa (522141) detail Sewa Kendaraan Roda 4, Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) detail Sekretariat Provinsi Sumatera Selatan, detail Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota, Biaya Penginapan Perjalanan Dinas, Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP); Akun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) detail Perjalanan Pendek Pembayaran gaji dan tunjangan Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada Akun Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119) detail Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13), Akun Belanja Uang Makan PNS (511129), dan Akun Belanja Uang Lembur (512211) Operasional dan Pemeliharaan Kantor; Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran, Pemeliharaan kantor, Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor, Pengembangan Kompetensi Pegawai Pergeseran anggaran antar akun antar sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada; 1. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran, Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111), detail Langganan Internet/zoom/canva/capcut. 2. Pemeliharaan kantor, Akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111), detail Pemeliharaan Gedung/Bangunan Rumah Dinas Kepala Balai Tidak Bertingkat, detail Pemeliharaan Gedung/Bangunan
--	--	--

		Rumah Tamu/Mess Tidak Bertingkat, detail Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor; Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) detail Perpanjangan STNK kendaraan roda 2; Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523129), detail Pemeliharaan Personal Computer/Notebook/CCTV/Perangkat Zoom/Laptop/Soundsystem. 3. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor, Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) detail Cetak Media informasi dan dekorasi. 4. Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Pegawai.
12	11 Oktober 2025	Realokasi (penambahan) anggaran perjalan dinas Rp.50.000.0000 pada kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementan.
13	17 Oktober 2025	Revisi POK (7 Kegiatan) dan Halaman III DIPA 1.Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2025 (018.09.EC.7911.AEF.109.051.A) ✓ Akun Belanja Barang Persediaan Bahan Baku (521821) 2.Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian (018.09.WA.6918.AEA.101.051.A). ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 3.Penyusunan Program dan Anggaran (018.09.WA 6918.EBA.962.051.A) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 4.Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran (018.09.WA 6918.EBA.994.002.A) ✓ Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) 5. Langganan Daya dan Jasa (018.09.WA 6918.EBA.994.002.B) ✓ Akun Belanja Langganan Listrik (522111) ✓ Akun Belanja Langganan Air (522113) 6. Pemeliharaan kantor (018.09.WA 6918.EBA.994.002.C) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523129) 7. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor

		(018.09.WA.6918.EBA.994.002.D) ✓ Akun Belanja Belanja Keperluan Perkantoran (521111) Pertimbangan Revisi: a. Kebutuhan anggaran pada beberapa Akun b. Menjaga nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker khususnya untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA. c. Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja satker.
14	30 Oktober 2025	Buka Blokir ATK dan Komputer Supplies; 2 Kegiatan 1. Produksi Benih Sumber Padi 150 Ton SS 2. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian
15	03 November 2025	Revisi POK; 11 Kegiatan 1. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2025 (018.09.EC.7911.AEF.109.051.A) ✓ Akun Belanja Barang Persediaan Bahan Baku (521821) 2. Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi (018.09.HA.7912.RAG.102.051.A) ✓ Akun Belanja Bahan (521211) ✓ Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) ✓ Akun Belanja Barang Persediaan Bahan Baku (521821) ✓ Akun Belanja Sewa (522141) ✓ Akun Belanja Jasa Profesi (522151) ✓ Akun Belanja Jasa Lainnya (522191) 3. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian (018.09.WA.6918.AEA.101.051.A). ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) 4. Sinkronisasi Kegiatan (018.09.WA.6918.EBA.962.051.I) ✓ Akun Belanja Jasa Profesi (522151) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 5. Pembayaran gaji dan tunjangan (018.09.WA.6918.EBA.994.001.A) ✓ Akun Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (511121) ✓ Akun Belanja Uang Lembur (512211)

		6.Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran (018.09.WA 6918.EBA.994.002.A) ✓ Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) 7.Langganan Daya dan Jasa (018.09.WA 6918.EBA.994.002.B) ✓ Akun Belanja Langganan Listrik (522111) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523129) 8.Pemeliharaan Kantor (018.09.WA 6918.EBA.994.002.C) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Kantor (523111) 9.Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor (018.09.WA 6918.EBA.994.002.D) ✓ Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) 10.Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi (018.09.WA 6918.EBD.953.051.A) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 11.Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko Indeks (018.09.WA 6918.EBD.953.051.B) ✓ Akun Belanja Bahan (521211) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) Pertimbangan Revisi: Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Pergeseran anggaran dalam satu akun satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pembelian bahan sarana produksi lainnya untuk pelaksanaan demplot kegiatan. Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi Pergeseran anggaran antar akun satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Plastik kemasan (5 kg sablon), sealer, palet kayu, dan Timbangan Digital, Sewa Kendaraan untuk angkut saprodi dan benih, dan Honor Moderator. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota, Biaya Penginapan Perjalanan Dinas, dan Penggantian Transpor
--	--	--

		pelaksanaan kegiatan untuk penangkar benih, petani, penyuluh dan pendamping lapang lainnya yang mendapatkan. Sinkronisasi Kegiatan Pergeseran anggaran dalam akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Honorarium Moderator, Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dan Satuan biaya transportasi. Komponen Pembayaran gaji dan tunjangan Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran Belanja Uang Lembur. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan Kantor, Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor Pergeseran anggaran antar akun antar sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Pemeliharaan Gedung/Bangunan Rumah Dinas Kepala Balai. Perawatan kendaraan roda 4, Perawatan kendaraan roda 2, Mutasi Kendaraan roda 2, Pemeliharaan Personal Computer/Notebook/CCTV/Perangkat Zoom/Laptop/Soundsystem/Televisi, Instalasi Listrik, Air dan Telepon, Pemeliharaan Gedung/Bangunan Rumah Dinas Kepala Balai dan Konsumsi dalam rangka kegiatan jamuan tamu, pertemuan, rapat, dll. Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi Pergeseran anggaran dalam akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota. Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko Indeks Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Fotocopy, Jilid, cetak dan dokumentasi, Papan nama hak milik tanah, Satuan biaya transportasi, dan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota.
16	24 November 2025	Revisi POK; 11 Kegiatan 1. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2025 (018.09.EC.7911.AEF.109.051.A). ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)

		2. Pengelolaan Informasi Publik (018.09.WA.6918.EBA.958.051.A). ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 3. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian (018.09.WA.6918.AEA.101.051.A). ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 4. Penyusunan Anggaran (018.09.WA 6918.EBA.962.051.A) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 5. Layanan Kepegawaian (018.09.WA 6918.EBA.962.051.F) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 6. Pembayaran gaji dan tunjangan (018.09.WA 6918.EBA.994.001.A) ✓ Akun Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (511121) ✓ Akun Belanja Tunj. Anak PNS (511122) ✓ Akun Belanja Tunjangan Fungsional PNS (511124) ✓ Akun Belanja Tunj Beras PNS (511126) ✓ Akun Belanja Uang Makan PNS (511129) ✓ Akun Belanja Gaji Pokok PPPK (511611) ✓ Akun Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (511621) ✓ Akun Belanja Tunjangan Anak PPPK (511622) ✓ Akun Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (511624) ✓ Akun Belanja Tunjangan Beras PPPK (511625) 7. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran (018.09.WA 6918.EBA.994.002.A) ✓ Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) 8. Daya dan Jasa (018.09.WA 6918.EBA.994.002.B) ✓ Akun Belanja Langganan Listrik (522111) 9. Pemeliharaan Kantor (018.09.WA 6918.EBA.994.002.C) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Kantor (523111) ✓ Akun Belanja Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523129) 10. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor (018.09.WA 6918.EBA.994.002.D)
--	--	--

		✓ Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) ✓ Akun Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (521115) 11.Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko Indeks (018.09.WA 6918.EBD.953.051.B) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) Pertimbangan Revisi: Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dan detail Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Pengelolaan Informasi Publik Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dan detail Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dan detail Biaya Penginapan Perjalanan Dinas. Penyusunan Anggaran Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Satuan Biaya Transportasi dan Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Layanan Kepegawaian Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Satuan Biaya Transportasi, detail Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dan detail Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Pembayaran gaji dan tunjangan Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran detail Belanja Uang Makan PNS, Belanja Gaji Pokok PPPK, detail Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK, detail Belanja Tunjangan Anak PPPK, detail Belanja Tunjangan Fungsional PPPK, dan detail Belanja Tunjangan Beras
--	--	--

		PPPK. Operasional dan Pemeliharaan Kantor; Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan Kantor, Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor geseran anggaran antar akun antar sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Honorarium Petugas Kebersihan, detail Pemeliharaan Gedung/Bangunan Rumah Dinas Kepala Balai Tidak Bertingkat, detail Pemeliharaan Gedung/Bangunan Rumah Tamu/Mess Tidak Bertingkat, Penambahan detail Mutasi Kendaraan Roda 2, detail Pemeliharaan Personal Computer/Notebook/CCTV/Perangkat Zoom/Laptop/Soundsystem/Televisi, detail Perawatan Mesin Rumput, detail Pemeliharaan Printer, detail Konsumsi dalam rangka kegiatan jamuan tamu, pertemuan, rapat, dll. dan detail Cetak Media informasi dan dekorasi. Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko Indeks Pergeseran anggaran dalam akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dan detail Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota.
17	02 Desember 2025	Revisi PNBP & POK Revisi PNBP; Usulan revisi kelebihan target TA. 2025: Target Awal Rp109.500.000, Target Revisi Rp156.539.000. Revisi POK; 5 Kegiatan 1.Penyusunan Program dan Anggaran (018.09.WA 6918.EBA.962.051.A) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 2.Pembayaran gaji dan tunjangan (018.09.WA 6918.EBA.994.001.A) ✓ Akun Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (511624) 3.Langganan Daya dan Jasa (018.09.WA 6918.EBA.994.002.B) ✓ Akun Belanja Langganan Air (522113) 4.Pemeliharaan Kantor (018.09.WA 6918.EBA.994.002.C) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) ✓ Akun Belanja Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121)

		✓ Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523129) 5. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor (018.09.WA 6918.EBA.994.002.D) ✓ Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) Pertimbangan Revisi: Revisi PNB Usulan revisi PNB diajukan dengan tujuan untuk Mengoptimalkan realisasi belanja, meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pemberdayaan di 2 (dua) Kebun Percobaan yaitu di Kab. Banyuasin dan Kab. OKI. Revisi POK Penyusunan Program dan Anggaran Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas. Pembayaran gaji dan tunjangan Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran detail Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Operasional dan Pemeliharaan Kantor; Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan Kantor, Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran detail PAM, Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat, Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat, Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor, dan Pemeliharaan Personal Computer/Notebook/CCTV/Perangkat Zoom/Laptop/Soundsystem/Televisi.
18	11 Desember 2025	Revisi Perubahan Target PNB

4.2. Monitoring Evaluasi Dan Unit Pengelola Gratifikasi 2025

4.2.1. Pendahuluan

4.2.1.1. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan pertanian nasional, Unit Pelaksana Teknis di bidang pertanian memiliki peran strategis sebagai sumber inovasi, teknologi, dan rekomendasi kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas serta kesejahteraan petani. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang berperan penting dalam mengoordinasikan penerapan hasil-hasil penelitian, inovasi teknologi, dan pengembangan sistem pertanian berkelanjutan di wilayah Sumatera Selatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BRMP tidak hanya dituntut menghasilkan keluaran kebijakan, rekomendasi dan diseminasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap program dan sumber daya yang digunakan dikelola secara transparan, efisien, serta berintegritas tinggi sesuai prinsip *good governance* (Sedarmayanti, 2018).

Kinerja kelembagaan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) sebagai instrumen utama pengendalian kinerja dan peningkatan akuntabilitas publik. Monev berfungsi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana, capaian target, serta memberikan umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Menurut Mahmudi (2020), sistem monev yang baik akan memperkuat transparansi, efisiensi penggunaan anggaran, dan efektivitas kinerja lembaga. Pelaksanaan monev juga merupakan bagian dari *performance-based management*, yaitu pendekatan pengelolaan yang berorientasi pada hasil (output dan outcome), bukan hanya pada aktivitas. Oleh karena itu, penerapan monev di BRMP Sumatera Selatan menjadi sarana penting untuk memastikan keberlanjutan hasil riset dan relevansi kegiatan dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pertanian nasional.

Di sisi lain, peningkatan akuntabilitas kelembagaan tidak akan optimal tanpa dibarengi dengan penguatan integritas dan pencegahan gratifikasi. Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional, pemerintah menekankan pentingnya upaya pencegahan korupsi melalui pengendalian gratifikasi di seluruh instansi pemerintah. Salah satu mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah pembentukan dan penguatan Unit Pengelola Gratifikasi (UPG). Unit ini bertugas menerima, mencatat, mengelola, serta menindaklanjuti laporan gratifikasi yang diterima oleh pegawai, baik yang wajib dilaporkan maupun yang dapat dianggap sah (Kementan, 2019).

Dalam konteks BRMP Sumatera Selatan, kegiatan penerapan modernisasi pertanian dan pendampingan lapangan yang melibatkan banyak pihak eksternal, seperti petani, pelaku usaha, dan mitra lembaga, membuka potensi terjadinya gratifikasi, baik disengaja maupun tidak. Berdasarkan pedoman Komisi Pemberantasan Korupsi (2023), gratifikasi sering muncul dari relasi kerja yang bersifat

transaksional, pemberian hadiah, atau kompensasi atas pelayanan publik. Untuk mencegah hal tersebut, UPG berfungsi tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pembinaan moral pegawai melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pelaporan berkala.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan implementasi nyata dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah agar memiliki mekanisme pengawasan internal yang dapat memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan patuh terhadap peraturan. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan UPG di BRMP Sumatera Selatan menjadi bagian dari penguatan sistem pengawasan tersebut dengan dua pendekatan utama: pengawasan berbasis data (*data-driven monitoring*) dan pengendalian integritas berbasis nilai (*value-driven integrity control*).

Kegiatan ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menekankan pentingnya pembinaan pegawai berbasis integritas, profesionalisme, dan nilai dasar ASN. Pelaksanaan kegiatan monev dan UPG secara terpadu akan membentuk lingkungan kerja yang mendukung budaya antikorupsi serta tanggung jawab moral setiap pegawai terhadap lembaga. Sebagaimana dinyatakan oleh KPK (2022), upaya pencegahan gratifikasi tidak hanya menekankan pada pelaporan, tetapi juga pada perubahan budaya organisasi agar nilai-nilai kejujuran, akuntabilitas, dan kepatuhan menjadi perilaku kerja sehari-hari.

Dengan demikian, kegiatan Monitoring Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) di BRMP Sumatera Selatan merupakan langkah strategis dalam mendukung penguatan tata kelola kelembagaan pertanian yang bersih dan berintegritas. Pelaksanaan monev secara berkala akan menghasilkan data yang akurat untuk pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy making*), sedangkan fungsi UPG akan memastikan seluruh aktivitas organisasi berlangsung sesuai nilai-nilai etika dan hukum. Sinergi antara dua pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kelembagaan sekaligus membangun citra BRMP Sumatera Selatan sebagai lembaga riset pertanian yang profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik gratifikasi.

Dalam jangka panjang, kegiatan ini akan memberikan dampak berkelanjutan terhadap budaya organisasi. Pegawai akan terbiasa dengan praktik pelaporan yang terbuka, sistem pengawasan yang transparan, serta pembiasaan etika kerja yang baik. Hal ini mendukung terwujudnya *Zona Integritas* di lingkungan BRMP Sumatera Selatan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta memperkuat kontribusi lembaga terhadap upaya nasional membangun sektor pertanian yang berkelanjutan, modern, dan berintegritas tinggi.

4.2.1.2. Tujuan dan Sasaran

4.2.1.3. Tujuan

Tujuan Tahun 2025

1. Menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
2. Menyusun rekomendasi strategis perbaikan sistem kerja berdasarkan hasil evaluasi.
3. Meningkatkan kesadaran pegawai terhadap pentingnya pelaporan gratifikasi dan etika kedinasan.
4. Mengidentifikasi dan menilai potensi risiko gratifikasi pada unit kerja BRMP Sumatera Selatan.

4.2.1.4. Tujuan Akhir

Mewujudkan unit kerja yang efektif. Akuntabel, dan berintegritas tinggi melalui penguatan sistem pengawasan interna, peningkatan transparansi pelaksanaan program, serta pembudayaan nilai – nilai antikorupsi di BRMP Sumatera Selatan.

4.2.1.5. Sasaran ,Indikator dan Target

Sasaran

1. Kuatnya sistem tata kelola lembaga.
2. Meningkatnya akuntabilitas program.
3. Dibangunnya budaya integritas di seluruh lapisan organisasi.

Indikator

Penerapan monitoring evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) di BRMP Sumatera Selatan

Target

1. Pejabat dan pegawai di lingkungan BRMP Sumatera Selatan.
2. Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) BRMP Sumatera Selatan.
3. Tim Reformasi Birokrasi dan Satuan Pengawasan Internal (SPI).
4. Unit kerja teknis yang berpotensi memiliki risiko gratifikasi atau konflik kepentingan.

4.2.1.6. Keluaran

4.2.1.7. Keluaran

Keluaran Tahun 2025

1. Data/informasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
2. Rekomendasi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.
3. Meningkatnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya pelaporan gratifikasi dan etika kedinasan.
4. Peta risiko gratifikasi (*Gratification Risk Map*) pada unit kerja BRMP Sumatera Selatan.

Keluaran Akhir

Terwujudnya unit kerja yang efektif, akuntabel, dan berintegritas tinggi melalui penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan transparansi pelaksanaan program, serta pembudayaan nilai-nilai antikorupsi di BRMP Sumatera Selatan.

4.2.1.8. KRO,RO, Komponen dan Subkomponen

KRO	: Layanan Manajemen Kinerja Internal
RO	: Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Komponen	: Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
Subkomponen	: Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengeolah Gravitasi

Manfaat, Lokasi dan Dampak

Manfaat

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan kegiatan BRMP Sumatera Selatan secara akuntabel.
2. Memperkuat sistem pengawasan internal lembaga.
3. Menumbuhkan budaya pelaporan gratifikasi dan integritas pegawai.
4. Mendukung pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.
5. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap BRMP Sumatera Selatan.

Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten OKU Timur, Penukal Abab Lematang Ilir dan Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Perkiraan Dampak

1. Efektivitas pelaksanaan program meningkat melalui evaluasi berbasis data.
2. Potensi gratifikasi menurun melalui penerapan pelaporan aktif.
3. Kepercayaan publik dan mitra terhadap BRMP Sumatera Selatan meningkat.
4. Terbangunnya model kelembagaan pertanian yang bersih dan transparan

4.2.1.9. Prosedur Kerja

4.2.1.10. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan pemerintah, termasuk di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan, menuntut adanya tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan berintegritas. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan sistem pengawasan internal yang kuat melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) serta pengendalian integritas melalui Unit Pengelola Gratifikasi (UPG).

Monitoring dan evaluasi merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi guna menilai efektivitas program serta memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sementara itu, keberadaan

UPG menjadi bagian integral dalam penguatan budaya antikorupsi dan penerapan *good governance*, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan KPK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Gratifikasi.

Dalam konteks BRMP Sumatera Selatan, kedua kegiatan tersebut saling berkaitan dan mendukung. Monev berfungsi memastikan capaian program riset dan pengembangan pertanian berjalan sesuai tujuan, sementara UPG memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik gratifikasi. Dengan demikian, kedua pendekatan ini berperan penting dalam membangun sistem tata kelola yang berintegritas dan akuntabel di lingkungan lembaga riset pertanian.

Kerangka pemikiran kegiatan ini berakar pada tiga prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*):

1. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban lembaga atas pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya publik.
2. Transparansi, yaitu keterbukaan informasi dan proses kerja yang dapat diakses dan dinilai oleh pihak internal maupun eksternal.
3. Integritas, yaitu penerapan nilai-nilai kejujuran, etika, dan kepatuhan terhadap peraturan untuk mencegah penyimpangan, termasuk gratifikasi.

Monev berperan memastikan pelaksanaan program sesuai indikator kinerja utama (IKU), sedangkan UPG berfungsi memperkuat sistem pengendalian internal dan budaya pelaporan gratifikasi. Hubungan keduanya bersifat komplementer, di mana monev memantau kinerja kegiatan, dan UPG menjamin integritas pelaksanaannya.

4.2.2. Ruang Lingkup Aktivitas

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan dan penerapan modernisasi pertanian.
2. Pengumpulan data capaian kegiatan, laporan gratifikasi, dan indikator kinerja.
3. Survei pemahaman pegawai terhadap kebijakan antigratifikasi.
4. Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi berikut rekomendasi perbaikan.

4.2.2.1. Prosedur Pelaksanaan

Tempat dan Waktu

Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan dan *Monev On-Going* dilaksanakan di 3 (tiga) kabupaten tersampling, yakni (1) Kabupaten OKU Timur; (2) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI); (3) Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025. Pemilihan lokasi kegiatan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, sumber daya manusia (SDM), serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi.

4.2.2.2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan kegiatan Monitoring Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi terdiri dari:

(1) Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan BRMP Sumatera Selatan, baik dari sisi administrasi, keuangan, maupun pelaporan gratifikasi.

(2) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) dan observasi lapangan, berupa *money ex ante*, *money on going* dan *post evaluation*.

Money Tahap Pelaksanaan Kegiatan (*On Going*)

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi tahap pelaksanaan kegiatan (*On Going*) adalah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan dan penerapan modernisasi pertanian di Provinsi Sumatera Selatan.

Tahapan Pelaksanaan

1. Mempelajari/mencermati dan memeriksa kelengkapan dokumen (proposal, juknis, dll).
2. Melaksanakan peninjauan lapangan.

Melakukan diskusi serta klarifikasi dengan penanggung jawab kegiatan, petani kooperator/responden, *stakeholders* terkait tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

Money Tahap Evaluasi Akhir (*Post Evaluation*)

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi tahap evaluasi akhir (*post evaluation*) adalah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kemanfaatan kegiatan pendampingan dan penerapan terpilih.

Tahapan Pelaksanaan

1. Memilih kegiatan yang akan di evaluasi akhir.
2. Melakukan evaluasi melalui seminar akhir.

(3) Sosialisasi Unit Pengelola Gratifikasi

Sosialisasi dilaksanakan melalui dua bentuk kegiatan utama:

1. Sosialisasi Tatap Muka

- o Dilakukan dalam bentuk pertemuan.
- o Narasumber berasal dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

2. Sosialisasi Berbasis Digital

- o Penyebaran informasi melalui media sosial resmi BRMP Sumsel.
- o Penggunaan infografis untuk memperkuat pesan visual.

3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

- Pelaksanaan evaluasi pasca-sosialisasi dengan mengedarkan kuesioner tingkat pemahaman peserta.
- Analisis Hasil Survei untuk mengetahui peningkatan pengetahuan pegawai
- Hasil Sosialisasi dilaporkan ke pimpinan BRMP sumsel dan menjadi bagian dari laporan tahunan.

1.4.3.3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.4.3.4. Menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan

1.4.3.5. Monev Tahap Perencanaan (Monev Ex-Ante)

A. Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementan

1) Outline Proposal

Proposal Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementan telah sesuai outline proposal, telah memuat cover, lembar pengesahan, ringkasan, pendahuluan, prosedur kerja, manajemen resiko, tenaga dan organisasi pelaksanaan, serta daftar pustaka.

2) Kesesuaian Isi per Bab

Hasil penilaian kesesuaian isi per bab menunjukkan bahwa telah sesuai, tinggal menambahkan lokasi kegiatan. Prosedur Kerja proposal telah memuat pendekatan (kerangka pemikiran), ruang lingkup aktivitas, dan prosedur pelaksanaan. Pada proposal kegiatan telah menampilkan permasalahan akan tetapi belum membahas langkah-langkah mitigasi dari permasalahan yang ada. Tenaga dan organisasi pelaksana belum disampaikan pada proposal, yang mencakup tenaga yang terlibat, jangka waktu aktivitas, indikator capaian pada setiap kegiatan serta pembiayaan.

3) Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan penilaian kesesuaian rencana dan metodologi dalam proposal telah sesuai akan tetapi belum memuat perubahan yang terjadi.

4) Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil monev terhadap dokumen Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementan tahun anggaran 2025, tim monev mencatat bahwa secara umum proposal telah memenuhi komponen utama, mencakup kelengkapan administrasi, kesesuaian struktur isi per bab, serta keterpaduan antara tujuan, sasaran, dan keluaran kegiatan. Seluruh elemen penting seperti pendahuluan, prosedur kerja, manajemen risiko, dan tenaga pelaksana telah disusun dengan baik dan sesuai pedoman yang berlaku.

Namun demikian, tim monev memberikan beberapa catatan penting untuk penyempurnaan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan ke depan. Pertama, evaluasi kegiatan sebaiknya dimasukkan dalam laporan akhir agar dapat menggambarkan secara menyeluruh Tingkat pencapaian output dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Kedua, deskripsi kegiatan perlu dibuat lebih rinci, terutama pada bagian lokasi pelaksanaan, guna memudahkan proses pemantauan dan verifikasi lapangan.

B.Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi (150 Ton Benih Padi SS)

1) Outline Proposal

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Ex Ante, dokumen proposal kegiatan perbenihan padi telah disusun secara lengkap dan memenuhi outline proposal yang dipersyaratkan. Seluruh komponen utama proposal telah tersedia, meliputi cover, lembar pengesahan, ringkasan, pendahuluan, prosedur kerja, manajemen risiko, tenaga dan organisasi pelaksana, serta daftar pustaka. Ketersediaan seluruh elemen tersebut menunjukkan bahwa penyusunan proposal telah mengikuti kaidah perencanaan kegiatan teknis yang berlaku dan mencerminkan kesiapan administrasi serta perencanaan awal yang memadai.

2) Kesesuaian Isi per Bab

Hasil penilaian terhadap kesesuaian isi per bab menunjukkan bahwa substansi proposal telah disusun selaras antara satu bagian dengan bagian lainnya. Pada Bab Pendahuluan, latar belakang dan dasar pertimbangan, tujuan dan sasaran, keluaran, manfaat dan dampak, serta lokasi kegiatan telah diuraikan secara jelas. Sasaran kegiatan berupa tersedianya benih padi bermutu dan terstandar sebanyak 150 ton benih padi kelas sebar (SS) telah sesuai dengan keluaran yang direncanakan, sehingga tidak terdapat perbedaan antara sasaran dan hasil yang ingin dicapai.

Bab Prosedur Kerja telah memuat pendekatan atau kerangka pemikiran, ruang lingkup aktivitas, serta prosedur pelaksanaan kegiatan secara jelas dan terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa alur kegiatan perbenihan padi telah dirancang secara operasional dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan di lapangan.

Pada Bab Manajemen Risiko, identifikasi permasalahan telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021, meskipun masih dalam bentuk yang disederhanakan. Bab Tenaga dan Organisasi Pelaksana juga telah menguraikan tenaga yang terlibat, jangka waktu kegiatan, indikator capaian pada setiap tahapan, serta pembiayaan, sehingga mencerminkan kesiapan sumber daya dan dukungan anggaran.

3) Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil Monev Ex Ante, kesesuaian antara rencana, metodologi, dan potensi pelaksanaan kegiatan dinilai cukup baik. Rencana kegiatan telah disusun secara realistis dan dapat dilaksanakan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Tim Monev mencatat bahwa kemungkinan adanya perubahan dalam pelaksanaan telah diantisipasi sejak tahap perencanaan, sehingga memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi pencapaian target utama.

Peluang penyelesaian kegiatan hingga penyusunan laporan akhir dinilai cukup besar, dengan catatan diperlukan pengendalian pelaksanaan secara berkala agar setiap kendala yang muncul dapat segera ditangani. Secara umum, kegiatan perbenihan padi dinilai layak untuk dilanjutkan dan berpotensi memberikan hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4) Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Ex Ante, kegiatan perbenihan padi dinilai telah memiliki kesiapan perencanaan yang baik dan layak untuk dilaksanakan. Outline proposal telah terpenuhi, kesesuaian isi per bab telah terjaga, serta rencana dan metodologi kegiatan dinilai realistis dan mendukung pencapaian sasaran. Sasaran dan keluaran kegiatan berupa produksi benih padi bermutu dan terstandar sebanyak 150 ton benih kelas sebar (SS) telah dirumuskan secara jelas dan selaras, sehingga memberikan arah pelaksanaan kegiatan yang terukur.

Namun demikian, besarnya target output tersebut menjadikan kegiatan ini memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi, baik dari aspek teknis, manajerial, maupun pengendalian mutu. Risiko teknis yang berpotensi muncul meliputi ketidaksesuaian kondisi agroklimat, serangan organisme pengganggu tanaman, ketidaktepatan waktu tanam dan panen, serta penurunan mutu benih pada tahap pascapanen. Di sisi lain, risiko manajerial dapat berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antar pelaksana, serta pengelolaan waktu dan anggaran yang belum optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar pada tahap pelaksanaan dilakukan penguatan strategi mitigasi risiko sejak awal, antara lain melalui pembagian lokasi produksi secara proporsional, penetapan jadwal kegiatan yang realistis dan adaptif terhadap kondisi lapangan, serta peningkatan pengawasan dan pengendalian mutu pada setiap tahapan proses perbenihan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendampingan teknis dan koordinasi yang lebih intensif antar pelaksana juga perlu menjadi perhatian utama. Selain itu, monitoring dan evaluasi internal secara berkala perlu diperkuat sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi permasalahan, sehingga target produksi 150 ton benih padi bermutu dan terstandar dapat dicapai secara optimal sesuai standar mutu, ketepatan waktu, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

C. Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerapan Standar dalam Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

1) Outline Proposal

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Ex Ante, proposal kegiatan Penguatan Kapasitas Penerapan Standar dalam Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan telah disusun secara sistematis dan memenuhi outline proposal yang dipersyaratkan. Seluruh komponen utama proposal, meliputi cover, lembar pengesahan, ringkasan, pendahuluan, prosedur kerja, tenaga dan organisasi pelaksana, pembiayaan, serta daftar pustaka telah tersedia dan tersaji secara lengkap.

Kelengkapan outline proposal tersebut menunjukkan bahwa secara administratif dan struktural, perencanaan kegiatan telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perencanaan kegiatan teknis di lingkungan BRMP. Namun demikian, berdasarkan format Monev Ex Ante yang digunakan, proposal belum memuat bab khusus mengenai manajemen risiko sebagaimana dipersyaratkan mengacu

pada Permen Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 (disederhanakan). Aspek ini menjadi catatan penting yang perlu segera ditindaklanjuti sebelum kegiatan dilaksanakan.

2) Kesesuaian Isi per Bab

Hasil penilaian terhadap kesesuaian isi per bab menunjukkan bahwa substansi proposal secara umum telah selaras antara satu bagian dengan bagian lainnya. Pada Bab Pendahuluan, latar belakang dan dasar pertimbangan kegiatan disusun sangat komprehensif dan kuat secara kebijakan, dengan mengacu pada regulasi nasional, program UPSUS, serta tugas dan fungsi BRMP. Tujuan, sasaran, dan keluaran kegiatan telah dirumuskan secara jelas dan saling mendukung, sehingga arah kegiatan mudah dipahami dan terukur.

Namun demikian, pada Bab Pendahuluan belum disajikan evaluasi pelaksanaan kegiatan sejenis atau kondisi awal (*baseline*) penerap standar di lokasi kegiatan, sehingga gambaran kebutuhan dan tingkat urgensi kegiatan belum tergambarkan secara kuantitatif. Selain itu, masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam penyebutan standar yang digunakan, khususnya terkait rujukan SNI 6233, sehingga perlu dilakukan penyeragaman agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi.

Pada Bab Prosedur Kerja, pendekatan, ruang lingkup aktivitas, dan prosedur pelaksanaan telah diuraikan secara rinci dan operasional, khususnya pada kegiatan bimbingan teknis dan demplot. Namun demikian, uraian tersebut belum sepenuhnya dikaitkan dengan indikator capaian pada setiap tahapan kegiatan, sehingga perlu penguatan agar memudahkan proses pemantauan dan evaluasi selama pelaksanaan.

Bab Tenaga dan Organisasi Pelaksana telah memuat daftar SDM yang terlibat dengan latar belakang dan kompetensi yang relevan. Jangka waktu pelaksanaan dan pembiayaan juga telah direncanakan dengan jelas. Akan tetapi, pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing tenaga pelaksana serta indikator capaian per tahapan kegiatan belum dirumuskan secara eksplisit.

3) Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil Monev Ex Ante, kesiapan pelaksanaan kegiatan dinilai cukup baik dan kegiatan layak untuk dilaksanakan. Kesesuaian antara rencana kegiatan dan metodologi pelaksanaan dinilai realistis serta didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran. Lokasi kegiatan telah ditetapkan dengan jelas dan didukung oleh sarana pendukung kegiatan.

Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki potensi risiko yang cukup tinggi mengingat jumlah penerap yang terlibat relatif besar dan adanya kegiatan demplot penerapan standar. Potensi perubahan kondisi lapangan, seperti faktor cuaca, jadwal tanam, serta kesiapan peserta, belum sepenuhnya diantisipasi dalam dokumen perencanaan. Oleh karena itu, penguatan kesiapan pelaksanaan perlu dilakukan melalui penyusunan manajemen risiko, penetapan langkah-langkah mitigasi, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi internal selama kegiatan berlangsung.

Secara umum, peluang penyelesaian kegiatan hingga penyusunan laporan akhir dinilai cukup besar, dengan catatan dilakukan pengendalian pelaksanaan secara berkala dan koordinasi intensif antar pelaksana dan pemangku kepentingan terkait.

4) Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Ex Ante, dapat disimpulkan bahwa proposal kegiatan telah disusun dengan baik, memenuhi outline proposal, serta memiliki kesesuaian substansi antar bab yang cukup kuat. Kegiatan dinilai layak untuk dilaksanakan dan berpotensi mendukung pencapaian tujuan penguatan kapasitas penerap standar dalam mendukung UPSUS percepatan tanam dan peningkatan produksi tanaman pangan.

Namun demikian, terdapat beberapa aspek penting yang perlu mendapat perhatian sebelum pelaksanaan kegiatan, khususnya terkait belum tersusunnya bab manajemen risiko, belum adanya evaluasi awal (baseline) penerap standar, serta belum dirumuskannya indikator capaian kegiatan secara jelas pada setiap tahapan. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan penyempurnaan proposal melalui penambahan bab manajemen risiko sesuai Permen Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 (disederhanakan), penajaman indikator capaian, serta penyeragaman rujukan standar yang digunakan. Dengan penyempurnaan tersebut, pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan akuntabel.

1.4.3.6. Monev Tahap Pelaksanaan (*Monev On – Going*)

A.Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi (150 Ton Benih Padi SS)

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi On-Going kegiatan perbenihan padi BRMP Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan untuk menilai efektivitas, kesesuaian, dan kualitas pelaksanaan kegiatan mulai tahap persiapan hingga pasca panen. Monev dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan petani dan penyuluh, pengecekan dokumen, serta evaluasi bersama stakeholder. Hasil Monev kemudian dibandingkan dengan temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai pengawasan eksternal untuk memperkuat akuntabilitas dan tata kelola kegiatan. Monev On Going dilaksanakan di dua kabupaten yakni: (1) Desa Suka Negara dan Desa Ganti Warno Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur dan (2) IP2SIP Karang Agung Kabupaten Banyuasin.

1) Hasil Pelaksanaan Kegiatan Perbenihan di Kabupaten OKU Timur

a. Aspek Input (Masukan)

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan kesiapan sumber daya manusia dan dukungan lintas instansi yang baik. Sosialisasi dilakukan secara cukup intensif melalui pertemuan rutin dan kunjungan lapangan

yang melibatkan BRMP Sumsel, BPSB, POPT, dan penyuluh. Materi mencakup seluruh rangkaian proses perbenihan, seperti:

- perlakuan benih awal,
- penentuan lokasi,
- pemeliharaan tanaman,
- pengendalian OPT,
- rouging,
- pengendalian PL 1–3.

Kegiatan berlangsung sesuai rencana meskipun terdapat hambatan waktu akibat keterlambatan musim tanam. Secara keseluruhan, aspek input bernilai baik hingga sangat baik dengan skor rata-rata 4,6 (range 4–5).

b. Aspek Proses Pelaksanaan

Koordinasi dan sinergi antar pelaksana dinilai kuat dan berjalan efektif. Pendampingan teknis dilakukan secara terencana melalui kunjungan lapangan dan komunikasi *online*. Lokasi pertanaman sesuai standar (irigasi baik, pengalaman petani sebagai penangkar cukup tinggi). Beberapa catatan penting:

- Penyaluran sarana produksi (saprodi) cenderung mendekati waktu tanam, sehingga waktu operasional menjadi padat.
- Tantangan teknis seperti serangan hama masih muncul, tetapi dapat ditangani melalui pendekatan pengendalian kimia memperhatikan ambang batas.

Proses pelaksanaan memperoleh skor 4–5 (rata-rata 4,67), menunjukkan bahwa seluruh tahapan telah berjalan sesuai standar SIP dan SOP teknis perbenihan.

c. Aspek Output (Luaran)

Output kegiatan perbenihan menunjukkan capaian optimal yakni produksi benih sumber padi di Kab. OKU Timur mencapai target sampai dengan proses penyimpangan di gudang dan akan dilanjutkan dengan uji lab mutu benih dengan rincian sebagai berikut:

- Desa Suka Negara: 50 ton menjadi benih bersih dan 25 ton masih kotor, belum di blower. Sekitar 1 minggu kedepan selesai.
- Desa Ganti Warno: benih bersih sebanyak 20 ton dan 50 ton masih dalam proses blower.
- Benih yang sudah lulus uji berdasarkan Sertifikat Hasil Uji dari BPSB adalah 7,5 ton Inpari 32.

Meskipun terjadi keterlambatan awal musim tanam, sinergi antar pelaksana dan komitmen petani penangkar mendukung pencapaian target output. Benih sudah mulai masuk tahapan pasca panen dan sebagian telah disimpan di gudang serta sedang masuk pada tahapan uji di BPSB.

d. Aspek Outcomes (Manfaat)

Kegiatan perbenihan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kapasitas petani:

- Pengetahuan petani mengenai prosedur perbenihan berada pada kategori baik dengan skor rata-rata 0,7.

- Minat petani untuk menjadi penangkar meningkat, dengan 13 petani kooperator aktif terlibat penuh dalam proses produksi benih.
- Sebesar 77% petani berminat melanjutkan penerapan standar perbenihan padi pada musim berikutnya.
- Kelompok tani semakin memahami pentingnya proses pasca panen seperti pengeringan, penurunan kadar air, dan sistem penyimpanan yang benar.

Manfaat kegiatan ini berkontribusi pada penguatan kelembagaan petani dalam usaha perbenihan mandiri.

2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Perbenihan di IP2MP Karang Agung Kabupaten Banyuasin

a. Pelaksanaan di Lapangan

Berdasarkan hasil Monev On Going, aspek pelaksanaan di lapangan menunjukkan kinerja yang baik hingga sangat baik. Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan secara langsung melalui kunjungan kelompok tani dan petani ke lokasi demplot, sehingga mampu meningkatkan pemahaman petani terhadap pentingnya penerapan standar dalam produksi benih padi. Standar yang didiseminasikan dinilai telah sesuai dengan kebutuhan petani, khususnya terkait penerapan varietas unggul baru (VUB) dan SOP processing benih.

Pelaksanaan diseminasi juga didukung oleh keterlibatan tim interdisiplin yang terdiri dari tenaga agronomi, biofisik lahan, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan teknis yang digunakan telah komprehensif dan saling melengkapi. Selain itu, pelaksanaan kegiatan dinilai telah sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang direncanakan sejak awal.

Koordinasi dengan stakeholder terkait, seperti BPSB, Dinas Pertanian, dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), juga berjalan dengan sangat baik. Koordinasi ini berkontribusi positif terhadap kelancaran kegiatan di lapangan dan menjamin kesesuaian pelaksanaan dengan standar perbenihan yang berlaku. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan di lapangan telah mendukung pencapaian tujuan kegiatan secara optimal.

b. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Aspek proses pelaksanaan kegiatan memperoleh penilaian sangat baik, yang mencerminkan kuatnya koordinasi dan keterlibatan para pihak terkait. Persiapan kegiatan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan petani, ketua kelompok tani, penyuluh, aparat pertanian tingkat kecamatan, Dinas Pertanian setempat, serta BPSB. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan perencanaan telah disusun secara partisipatif dan inklusif.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan juga dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan dua kelompok tani, yaitu Kelompok Tani Sumber Rezeki dan Jaya Mukti. Keterlibatan kelompok tani ini menunjukkan adanya dukungan kelembagaan petani yang cukup kuat dalam pelaksanaan kegiatan produksi benih padi sumber.

Dari sisi kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, hasil Monev menunjukkan tingkat akurasi yang baik. Lokasi kegiatan, skala pelaksanaan, jumlah petani yang terlibat, serta jadwal kegiatan dinilai telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan minor untuk meningkatkan ketepatan teknis pada beberapa tahapan. Secara umum, proses pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan mendukung pencapaian luaran kegiatan.

c. Luaran / Output Kegiatan

Aspek luaran/output menunjukkan capaian yang cukup baik hingga sangat baik. Dari sisi jumlah produksi, target produksi benih sebesar 5 ton berhasil terlampaui dengan perkiraan hasil mencapai sekitar 6,5 ton. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan produksi benih padi sumber telah berjalan produktif.

Namun demikian, benih yang dihasilkan pada saat Monev On Going belum seluruhnya melalui tahapan uji mutu resmi (uji daya tumbuh, kemurnian, kadar air, dan kebersihan fisik). Meskipun demikian, berdasarkan pengamatan visual, kondisi fisik benih dinilai baik dan layak untuk diproses lebih lanjut sesuai standar perbenihan. Terkait pendampingan teknis, karena lokasi kegiatan berada di kebun percobaan (KP), pendampingan kepada petani penangkar dilakukan secara internal melalui rapat dan koordinasi tim.

d. Manfaat/ Outcomes Kegiatan

Hasil Monev menunjukkan bahwa aspek manfaat (*outcomes*) kegiatan berada pada kategori baik hingga sangat baik. Kegiatan produksi benih padi sumber terbukti membantu meningkatkan ketersediaan benih unggul di wilayah setempat dan wilayah sekitarnya. Hal ini sangat strategis mengingat di Kecamatan Tungkal Ilir saat ini hanya IP2MP Karang Agung yang secara konsisten menjadi penangkar benih padi sejak tahun 2021.

Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan teknis pelaku perbenihan, khususnya dalam memahami tahapan produksi benih padi sesuai standar. Dampak tidak langsung yang cukup signifikan adalah meningkatnya minat petani di sekitar demplot IP2MP untuk belajar dan terlibat sebagai calon penangkar benih padi.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa ketersediaan benih unggul, tetapi juga berpotensi memperkuat kemandirian benih lokal melalui peningkatan kapasitas dan minat petani dalam usaha perbenihan padi.

3. Integrasi Temuan Dan Evaluasi Inspektorat Jendral

Evaluasi Irjen memperkuat hasil Monev dengan menunjukkan bahwa BRMP Sumsel memiliki lingkungan pengendalian yang kuat (93,83% – Zona Hijau). Namun, Irjen mengidentifikasi beberapa risiko yang sangat relevan dengan kondisi lapangan, di antaranya:

1. Risiko gagal panen akibat OPT dan iklim (peringkat risiko tertinggi).
2. Risiko keterlambatan tanam karena pencairan anggaran.
3. Risiko kualitas benih menurun karena fasilitas penyimpanan terbatas.

4. Risiko kontaminasi varietas dan kadar air tidak sesuai standar.
 5. Risiko benih tidak terdistribusi dengan baik karena tidak sinkron dengan musim tanam pengguna.
- Irjen juga mencatat bahwa dokumen Manajemen Risiko belum lengkap pada awal pengawalan dan Unit Pengelola Risiko (UPR) perbenihan belum ditetapkan secara khusus. Temuan-temuan ini sangat sejalan dengan hasil Monev On Going di lapangan dan menjadi dasar penyusunan rekomendasi.

4).Permasalahan yang Diidentifikasi

Berdasarkan seluruh hasil Monev On Going dan evaluasi Irjen, beberapa permasalahan utama yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Permasalahan Teknis di Lapangan
 - Serangan hama penyakit masih ditemukan di beberapa fase pertumbuhan.
 - Pengendalian OPT masih belum sepenuhnya menggunakan pendekatan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
 - Beberapa petani belum sepenuhnya memahami standar pasca panen (penjemuran, kadar air).
- b) Permasalahan Administratif dan Waktu
 - Keterlambatan pencairan anggaran akan berdampak pada keterlambatan tanam.
 - Penyaluran saprodi yang mendekati waktu tanam akan menyebabkan waktu pelaksanaan menjadi sempit.
- c) Permasalahan Fasilitas dan Infrastruktur
 - Kapasitas gudang penyimpanan benih masih terbatas.
 - Fasilitas pengeringan belum optimal untuk penurunan kadar air secara merata.
- d) Permasalahan Manajemen Risiko
 - UPR perbenihan belum ditetapkan secara formal.
 - Dokumen MR belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pegawai.
 - Pemantauan risiko (*risk monitoring*) belum berjalan karena *risk treatment* baru disusun.
- e) Permasalahan Distribusi dan Pemanfaatan
 - Benih berpotensi terlambat terdistribusi jika tidak langsung terserap setelah sertifikasi.
 - Koordinasi kebutuhan benih dengan pengguna (kabupaten/kota) belum dilakukan sejak awal.

5.Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan memastikan keberlanjutan kegiatan, beberapa rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Tindak Lanjut Teknis
 - Penguatan pengendalian OPT melalui pelatihan PHT dan penerapan refugia di lahan perbenihan.

- Menyusun SOP pasca panen yang lebih rinci, khususnya terkait pengeringan dan penyimpanan benih.
 - Menyusun jadwal pendampingan teknis intensif pada fase kritis (vegetatif–generatif).
- b) Percepatan Administrasi dan Koordinasi Anggaran
- Mendorong sinkronisasi pencairan anggaran dengan kalender tanam.
 - Menjalin komunikasi intensif dengan bagian keuangan untuk percepatan penyaluran saprodi.
- c) Peningkatan Sarana Pasca Panen
- Penambahan rak gudang, ventilasi, dan fasilitas pengeringan.
 - Pembuatan sistem rotasi stok benih untuk mencegah penurunan kualitas.
- d) Memperkuat Manajemen Risiko
- Menetapkan Unit Pengelola Risiko (UPR) khusus kegiatan perbenihan.
 - Melakukan sosialisasi internal dokumen MR kepada seluruh pegawai.
 - Mengimplementasikan *risk treatment* sesuai jadwal, serta melakukan monitoring secara triwulan.
- e) Peningkatan Sinkronisasi Distribusi Benih
- Menyampaikan estimasi hasil produksi kepada pengguna sejak awal kegiatan.
 - Membuat rencana distribusi bersama Dinas Pertanian kabupaten/kota.
 - Menghubungkan penangkar dengan potensi pengguna lain untuk mencegah penumpukan stok.

B. Kegiatan penguatan Kapasitas Penerap Standar dalam Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Hasil Monev On Going pada aspek masukan/ input menunjukkan bahwa kegiatan Penguatan Kapasitas Standar telah dilaksanakan dengan kinerja cukup baik hingga sangat baik, namun evaluasi pada tahap ini baru dapat dilakukan sampai aspek input. Hal tersebut disebabkan kegiatan inti belum sepenuhnya dilaksanakan karena adanya blokir anggaran, sehingga tahapan proses, output, dan outcome belum dapat dinilai secara komprehensif pada periode Monev ini.

Sosialisasi terkait pentingnya penerapan standar telah dilaksanakan secara internal oleh tim pelaksana sebagai langkah awal penguatan pemahaman terhadap substansi kegiatan. Sosialisasi ini difokuskan pada penyamaan persepsi internal dan kesiapan teknis pelaksana kegiatan. Sementara itu, sosialisasi eksternal kepada pemangku kepentingan dan sasaran kegiatan direncanakan akan dilaksanakan pada minggu ketiga November 2025, seiring dimulainya pelaksanaan kegiatan secara penuh.

Standar yang digunakan dalam kegiatan ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penguatan kapasitas, dengan mengacu pada SNI Benih Padi Inbrida (SNI 6233:2015) dan SNI Indonesian Good Agricultural Practices (IndoGAP) – Cara Budidaya Tanaman Pangan yang Baik (SNI 8969:2021). Pemilihan standar tersebut menunjukkan bahwa secara substansi, masukan kegiatan telah dirancang selaras dengan regulasi dan pedoman teknis yang berlaku.

Dukungan pelaksana kegiatan juga dinilai baik, ditunjukkan dengan keterlibatan tim yang bersifat interdisiplin, terdiri dari agronomis, dan PMHP. Keterlibatan lintas disiplin ini menjadi modal penting pada tahap input untuk memastikan kesiapan teknis dan kualitas pelaksanaan kegiatan ke depan.

Pelaksanaan kegiatan pada tahap persiapan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang tertuang dalam proposal. Selain itu, koordinasi awal dengan stakeholder terkait, seperti BPSB dan BPTPH, telah dilaksanakan sebagai bagian dari pemenuhan aspek input dan penguatan sinergi kelembagaan.

Secara keseluruhan, aspek masukan/ input menunjukkan bahwa kegiatan telah memiliki kesiapan awal yang memadai. Namun demikian, penilaian Monev On Going masih terbatas pada tahap input karena kegiatan baru mulai dilaksanakan.

C. Kegiatan Pendampingan Program Strategis kementan

1) Aspek Pelaksanaan di Lapangan

Pelaksanaan kegiatan pendampingan Program Strategis Swasembada Pangan di Kabupaten PALI pada aspek pelaksanaan di lapangan menunjukkan kinerja baik hingga sangat baik. Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan secara efektif melalui pertemuan koordinatif yang melibatkan Dinas Pertanian Kabupaten PALI, penyuluh pertanian, aparat kecamatan, serta petani pelaksana kegiatan OPLA dan CSR. Sosialisasi ini berkontribusi pada peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terhadap tujuan program, tahapan pelaksanaan, serta pentingnya penerapan standar teknis pertanian sebagai upaya peningkatan produktivitas dan keberlanjutan lahan.

Standar teknis yang didiseminasikan dinilai telah sesuai dengan kebutuhan lapangan, khususnya terkait optimasi pengelolaan air, pembukaan lahan, dan persiapan tanam. Namun demikian, penerapan standar tersebut masih menghadapi kendala adaptasi pada beberapa lokasi dengan kondisi biofisik lahan berupa semak belukar lebat dan wilayah rawan genangan, sehingga implementasinya belum sepenuhnya optimal di seluruh area kegiatan.

Dukungan pelaksana kegiatan bersifat interdisiplin dan melibatkan berbagai unsur, antara lain BRMP Sumatera Selatan, Dinas Pertanian Kabupaten PALI, penyuluh pertanian, TNI, perguruan tinggi, serta unsur pemerintah daerah. Sinergi lintas sektor ini menjadi faktor kunci dalam mendukung pendampingan dan pengawalan kegiatan strategis swasembada pangan di wilayah tersebut.

Pelaksanaan kegiatan secara umum berjalan cukup baik, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah kendala, terutama pada kegiatan CSR. Keterbatasan jumlah alat berat, kondisi alat yang mengalami kerusakan, serta karakteristik lahan yang sulit diolah menyebabkan perlambatan pembukaan lahan. Hingga pelaksanaan Monev, realisasi kegiatan OPLA telah mencapai 88,62%, CSR kontrak tahap I sebesar 99,71%, sementara CSR kontrak tahap II masih rendah yaitu 6,19%.

Koordinasi antar pihak terkait dinilai sangat baik, tercermin dari pelaksanaan rapat koordinasi rutin, verifikasi capaian, serta peninjauan lapangan bersama yang responsif terhadap permasalahan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan.

2)Aspek Proses

Dari sisi proses, persiapan kegiatan telah dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan petani, ketua kelompok tani, penyuluh pertanian, aparat pertanian tingkat kecamatan, Dinas Pertanian Kabupaten PALI, serta instansi terkait lainnya. Koordinasi awal ini berperan penting dalam membangun kesepahaman serta mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Pada tahap pelaksanaan, komunikasi dan koordinasi antar pihak berlangsung intensif, baik dalam pelaksanaan kegiatan fisik maupun dalam pengambilan keputusan terkait kendala teknis yang dihadapi selama pelaksanaan OPLA dan CSR. Mekanisme koordinasi yang berjalan efektif memungkinkan penyesuaian langkah secara cepat terhadap dinamika kondisi lapangan.

Secara umum, tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana dinilai cukup tinggi, baik dari sisi lokasi, skala kegiatan, jumlah petani yang terlibat, maupun jadwal pelaksanaan. Namun, terdapat penyesuaian lokasi pada kegiatan CSR, yaitu pemindahan lokasi dari Desa Betung ke Desa Betung Barat, sebagai respons terhadap kondisi lahan awal yang rawan tergenang dan berpotensi menghambat keberhasilan kegiatan. Penyesuaian ini menunjukkan adanya fleksibilitas pelaksanaan tanpa mengurangi substansi tujuan program.

3)Aspek Luaran/Output

Pada aspek luaran, kegiatan pendampingan dan sosialisasi standar pertanian melalui OPLA dan CSR telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas petani dan pelaksana lapangan, khususnya dalam hal pengetahuan dan sikap terhadap penerapan standar pengelolaan lahan dan air secara berkelanjutan. Meskipun demikian, peningkatan kapasitas ini masih memerlukan penguatan melalui pendampingan lanjutan agar perubahan perilaku dapat berlangsung secara konsisten.

Replikasi atau adopsi hasil demplot oleh petani lain di sekitar lokasi kegiatan belum terlihat secara merata. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pembelajaran dari demplot masih bersifat terbatas dan membutuhkan waktu serta pendampingan berkelanjutan agar praktik baik dapat diadopsi lebih luas oleh petani di wilayah sekitar.

4)Aspek Manfaat/Outcomes (Bobot 15)

Pada aspek manfaat, pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi standar pertanian dinilai telah meningkatkan kemampuan peserta, khususnya anggota Brigade Pangan, dalam memahami dan menerapkan praktik pertanian sesuai standar teknis yang dianjurkan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana.

Kegiatan demplot telah berfungsi sebagai contoh nyata penerapan praktik pertanian yang lebih efektif dan efisien. Namun, manfaat jangka panjangnya masih perlu diukur melalui tingkat adopsi berkelanjutan oleh petani, baik peserta langsung maupun petani lain di sekitarnya.

Lokasi OPLA dan CSR memiliki potensi sebagai sarana pembelajaran lintas kelompok tani, meskipun pemanfaatannya sebagai media pembelajaran bersama belum sepenuhnya optimal. Selain itu, indikator peningkatan jumlah responden yang menerapkan standar pertanian belum dapat diukur secara kuantitatif pada saat Monev berlangsung dan memerlukan evaluasi lanjutan pada tahap *post-evaluation*.

1.4.4. Monev Tahap Akhir (*Monev Post Evaluation*)

Monitoring dan evaluasi tahap akhir (*monev post evaluation*) dilaksanakan melalui bagian dari penyelenggaraan Seminar Hasil sebagai forum pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, penilaian ketercapaian output dan outcome, serta identifikasi perbaikan substantif terhadap laporan dan pelaksanaan kegiatan. Seminar hasil juga menjadi instrumen evaluasi kualitas data, kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan, serta kontribusi kegiatan terhadap pencapaian target strategis Kementerian Pertanian, khususnya mendukung swasembada pangan.

A. Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementan

Hasil monitoring dan evaluasi tahap akhir menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan program strategis telah dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota sasaran dan mencakup berbagai komponen program Kementerian Pertanian, antara lain LTT reguler, padi gogo, oplah, CSR, Brigade Pangan dan kegiatan pendukung lainnya yang secara kebijakan telah memiliki dasar Surat Keputusan Menteri Pertanian. Pendampingan yang dilakukan merupakan hasil sinergi berbagai instansi, sehingga kontribusi BRMP lebih bersifat koordinatif, fasilitatif, dan penguatan teknis di lapangan.

Namun demikian, evaluasi pasca pelaksanaan mengidentifikasi masih adanya keterbatasan dalam pengukuran keberhasilan pendampingan secara kuantitatif. Hal ini terutama disebabkan oleh belum terpetakannya aktivitas pendampingan dan capaian hasil secara rinci per kabupaten. Oleh karena itu, dalam *post evaluation* disarankan agar pelaporan akhir disusun dengan pendekatan per kabupaten, sehingga setiap aktivitas pendampingan dapat dipotret secara jelas beserta hasil yang diperoleh.

Selain itu, ditemukan perbedaan data antar level pelaporan, baik antara kabupaten, provinsi, maupun pusat, khususnya pada data luas tanam, oplah, dan realisasi produksi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh perbedaan waktu penarikan data serta perbedaan asumsi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dalam konteks oplah, evaluasi mencatat adanya perbedaan persepsi terkait dampaknya terhadap Indeks Pertanaman (IP), di mana di lapangan oplah lebih banyak berfungsi sebagai perbaikan jaringan irigasi tanpa peningkatan IP. Temuan ini menjadi catatan penting dalam post evaluation sebagai dasar perlunya penyamaan persepsi dan sinkronisasi data lintas instansi pada periode berikutnya.

B. Produksi Benih Sumber Padi 150 Ton SS

Monitoring dan evaluasi tahap akhir pada kegiatan produksi benih sumber padi menunjukkan bahwa seluruh tahapan kegiatan telah dilaksanakan, mulai dari penetapan CPCL, persiapan lahan, tanam, pemeliharaan, hingga panen dan proses sertifikasi benih. Kegiatan ini dinilai strategis dalam mendukung pemenuhan kebutuhan benih di Provinsi Sumatera Selatan dan mengurangi ketergantungan pasokan benih dari luar daerah.

Namun demikian, hasil post evaluation menekankan perlunya penyempurnaan substansi laporan, terutama pada penyajian data produksi dan sertifikasi. Data hasil kegiatan disarankan disajikan dalam bentuk tabulasi yang memuat varietas, luas tanam, hasil panen per hektare, total produksi, serta status kelulusan sertifikasi benih. Penyajian ini dinilai penting agar alur produksi benih dan kontribusi petani dapat tergambarkan secara transparan, termasuk informasi terkait pembagian hasil antara alokasi kegiatan dan hak petani.

Evaluasi juga mengidentifikasi bahwa sebagian benih belum lulus sertifikasi, yang sebagian besar disebabkan oleh faktor pascapanen dan penyimpanan, seperti daya tumbuh dan kadar air benih. Kondisi fasilitas gudang yang belum memenuhi standar menjadi salah satu faktor kritis yang memengaruhi mutu benih. Dalam konteks post evaluation, temuan ini menjadi pembelajaran penting bahwa keberhasilan kegiatan perbenihan tidak hanya ditentukan oleh budidaya, tetapi juga oleh manajemen pascapanen dan sarana pendukung. Oleh karena itu, laporan akhir perlu memuat narasi lengkap terkait proses sertifikasi, hasil uji laboratorium, kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan dan tindak lanjut ke depan.

C. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2025

Hasil monitoring dan evaluasi tahap akhir menunjukkan bahwa kegiatan penguatan kapasitas telah dilaksanakan melalui dua bentuk kegiatan utama, yaitu bimbingan teknis dan demonstrasi plot (demplot). Kegiatan bimbingan teknis ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas penerap standar pertanian, sedangkan demplot berfungsi sebagai sarana pembelajaran langsung penerapan standar di lapangan.

Namun demikian, post evaluation mencatat bahwa pengukuran capaian peningkatan kapasitas peserta masih perlu diperkuat. Disarankan agar target produksi yang ingin dicapai melalui kegiatan demplot perlu dinyatakan secara eksplisit dalam laporan agar outcome kegiatan dapat dievaluasi secara lebih jelas. Evaluasi juga menekankan perlunya penyederhanaan dan pemfokusan materi diseminasi agar pesan utama kegiatan dapat tersampaikan secara efektif. Dengan demikian, kegiatan penguatan kapasitas tidak hanya menghasilkan output berupa pelaksanaan kegiatan, tetapi juga outcome berupa peningkatan kapasitas penerap standar yang terukur dan berkontribusi pada percepatan tanam dan peningkatan produksi

4.3. Menyusun Rekomendasi Strategis Perbaikan Sistem Berdasarkan Hasil Evaluasi

Berdasarkan rangkaian hasil monitoring dan evaluasi pada tahap perencanaan (*ex-ante*), pelaksanaan (*on-going*), dan tahap akhir (*post evaluation*), diperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas, efisiensi, serta tantangan sistem kerja dalam pelaksanaan kegiatan BRMP Sumatera Selatan. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi strategis yang bersifat sistemik dan lintas tahapan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan ke depan. Rekomendasi strategis perbaikan sistem kerja berdasarkan hasil evaluasi, secara rinci disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekomendasi Strategis Perbaikan Sistem Kerja Berdasarkan Hasil Evaluasi

No.	Strategi Perbaikan Sistem Kerja	Permasalahan Utama yang Ditemukan	Rekomendasi Strategis
1.	Penguatan Perencanaan Berbasis Risiko dan Baseline	Proposal belum memuat baseline, indikator capaian rinci, dan manajemen risiko secara konsisten	- Wajib menyusun baseline kuantitatif - Menambahkan bab Manajemen Risiko sesuai Permen 38/2021 - Menetapkan indikator output–outcome per tahapan
2.	Penyelarasan Perencanaan dengan Dinamika Anggaran dan Kalender Tanam	Keterlambatan pencairan anggaran berdampak pada keterlambatan tanam dan pelaksanaan kegiatan	- Menyusun rencana kerja adaptif berbasis kalender tanam - Koordinasi awal dengan pengelola keuangan - Menyediakan buffer time pelaksanaan
3.	Standardisasi Sistem Pendampingan Teknis	Variasi pemahaman petani terhadap standar, khususnya PHT dan pascapanen	- Menyusun SOP pendampingan teknis per fase - Penguatan PHT melalui pelatihan dan demplot - Pendampingan terpadu lintas disiplin
No.	Strategi Perbaikan Sistem Kerja	Permasalahan Utama yang Ditemukan	Rekomendasi Strategis
4.	Penguatan Manajemen Pascapanen dan Infrastruktur	Penurunan mutu benih akibat fasilitas pengeringan dan gudang terbatas	- Menyusun SOP pascapanen rinci - Peningkatan kapasitas gudang dan ventilasi - Penerapan sistem rotasi stok benih
5.	Penetapan dan Penguatan Unit Pengelola Risiko (UPR)	UPR perbenihan belum ditetapkan dan risk monitoring belum berjalan	- Menetapkan UPR khusus kegiatan strategis - Sosialisasi dokumen MR internal - Monitoring risiko secara triwulanan

6.	Penguatan Sistem Pelaporan Berbasis Data dan Wilayah	Data pelaporan belum terpetakan per kabupaten dan belum seragam lintas level	• Pelaporan berbasis kabupaten/kota • Penyajian data dalam tabulasi standar • Sinkronisasi data pusat–daerah
7.	Penguatan Orientasi Outcome dan Dampak	Evaluasi masih dominan pada output, outcome belum terukur optimal	• Menetapkan indikator outcome terukur • Mengaitkan demplot dengan target produksi • Melakukan evaluasi pasca kegiatan
8.	Integrasi Monev Internal dengan Temuan Irjen	Dokumen MR dan pengendalian risiko belum optimal sejak awal kegiatan	• Menjadikan temuan Irjen sebagai dasar perbaikan sistem kerja • Integrasi Monev internal dan pengawasan eksternal
9.	Penguatan Sinkronisasi Distribusi dan Pemanfaatan Benih	Risiko keterlambatan distribusi dan penumpukan stok benih	• Menyusun rencana distribusi sejak awal • Koordinasi kebutuhan benih dengan kabupaten/kota • Menghubungkan penangkar dengan calon pengguna
10.	Penyempurnaan Substansi Laporan Akhir	Laporan belum menyajikan alur produksi, sertifikasi, dan pembagian hasil secara rinci	• Penyajian data produksi dan sertifikasi secara transparan • Narasi kendala dan tindak lanjut dalam laporan akhir

4.6 Peningkatkan Kesadaran Pegawai Terhadap Pentingnya Pelaporan Gratifikasi dan Etika Kedinasan

Peningkatan kesadaran pegawai terhadap pentingnya pelaporan gratifikasi dan etika kedinasan, dilakukan melalui pelaksanaan sosialisasi dan dievaluasi menggunakan kuesioner sebelum (*pre test*) dan setelah (*post test*) dilaksanakannya sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi pengendalian gratifikasi dan pengelolaan benturan kepentingan menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman pegawai, sebagaimana tercermin dari hasil pengukuran *pre-test* dan *post-test*. Secara umum, hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pada seluruh aspek yang disosialisasikan, meskipun dengan tingkat peningkatan yang bervariasi pada masing-masing indikator.

4.7 Pengetahuan Terhadap Pengelolaan Benturan Kepentingan

Pada aspek pengelolaan benturan kepentingan, rata-rata peningkatan pemahaman pegawai sebesar 9,50% (secara rinci disajikan pada Tabel 2 dan Gambar 1), yang menunjukkan bahwa sosialisasi dinilai cukup efektif dalam memperkuat pemahaman konsep, mekanisme, dan peran pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan kerja. Pemahaman pegawai terhadap definisi konflik kepentingan, sumber konflik kepentingan, serta mekanisme pengawasan sudah tergolong tinggi sejak sebelum sosialisasi dan mengalami peningkatan lebih lanjut pada saat setelah sosialisasi dilaksanakan (*post-test*).

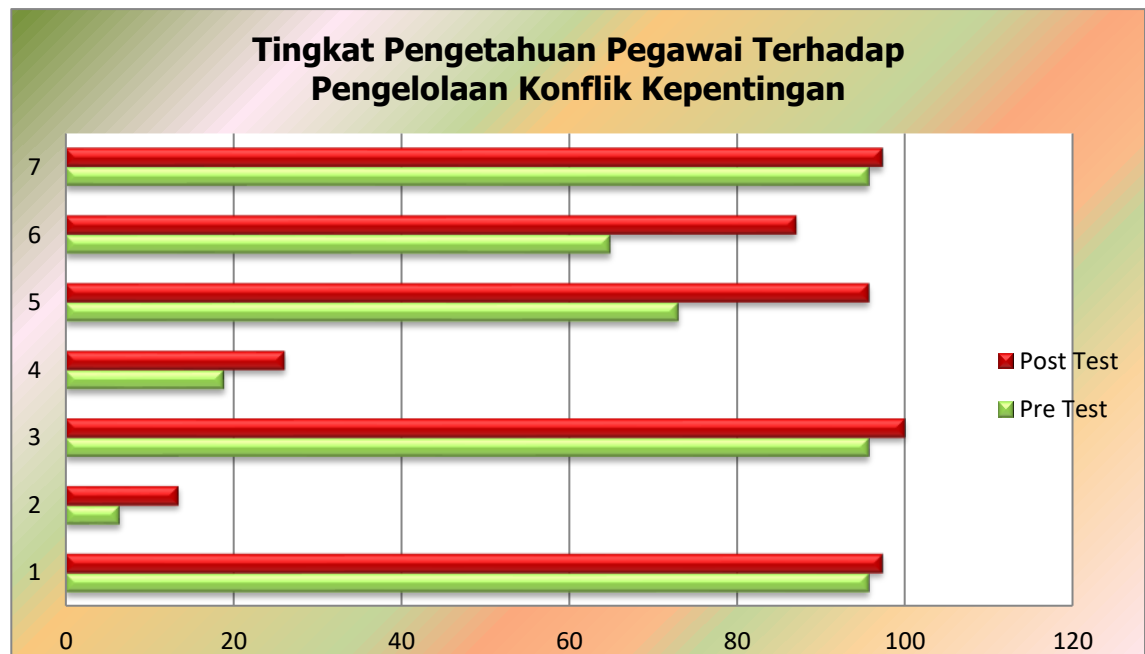
Tabel 2. Tingkat Pengetahuan Pegawai Terhadap Pengelolaan Konflik Kepentingan

No	Pernyataan	Pre Test	Post Test	Peningkatan (%)
1	Konflik kepentingan terjadi ketika pejabat pemerintah memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan yang diambilnya.	95,70	97,30	1,60
2	Pengelolaan konflik kepentingan hanya diperlukan di instansi pusat, tidak berlaku untuk instansi daerah.	6,50	13,50	7,00
3	Salah satu sumber konflik kepentingan adalah hubungan keluarga, bisnis, atau jabatan ganda.	95,70	100,00	4,30
4	Pejabat pemerintah tidak wajib mendeklarasikan konflik kepentingan yang dihadapinya.	18,90	26,10	7,20
5	Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan memiliki tugas membantu pengawasan dan pengendalian situasi benturan kepentingan di instansinya.	73,00	95,70	22,70
6	Cooling off period atau masa tunggu merupakan salah satu mekanisme pengendalian konflik kepentingan bagi pejabat yang berpindah jabatan.	64,90	87,00	22,10
No	Pernyataan	Pre Test	Post Test	Peningkatan (%)
7	Pengawasan konflik kepentingan dilakukan oleh atasan langsung pejabat dan dapat melalui mekanisme pengaduan.	95,70	97,30	1,60
Rata-Rata		64,34	73,84	9,50

Sumber: Data primer diolah (2025)

Peningkatan signifikan terlihat pada pemahaman terkait cakupan pengelolaan konflik kepentingan yang berlaku tidak hanya di instansi pusat tetapi juga di instansi daerah, yang mengindikasikan adanya koreksi terhadap miskonsepsi awal pegawai. Selain itu, pemahaman mengenai peran Pejabat Pengelola Konflik Kepentingan serta penerapan *cooling off period* sebagai mekanisme pengendalian juga meningkat secara nyata, mencerminkan bertambahnya kesadaran pegawai terhadap instrumen pengendalian yang bersifat preventif.

Namun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan masih adanya sebagian pegawai yang belum sepenuhnya memahami kewajiban deklarasi konflik kepentingan. Temuan ini menjadi catatan penting bahwa sosialisasi lanjutan perlu lebih menekankan aspek kewajiban pelaporan dan konsekuensi administratif agar pengelolaan benturan kepentingan dapat diterapkan secara konsisten.



Gambar 1. Tingkat Pengetahuan Pegawai Terhadap Pengelolaan Konflik Kepentingan

- 1 : Konflik kepentingan terjadi ketika pejabat pemerintah memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan yang diambilnya.
- 2 : Pengelolaan konflik kepentingan hanya diperlukan di instansi pusat, tidak berlaku untuk instansi daerah.
- 3 : Salah satu sumber konflik kepentingan adalah hubungan keluarga, bisnis, atau jabatan ganda.
- 4 : Pejabat pemerintah tidak wajib mendeklarasikan konflik kepentingan yang dihadapinya.
- 5 : Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan memiliki tugas membantu pengawasan dan pengendalian situasi benturan kepentingan di instansinya.
- 6 : Cooling off period atau masa tunggu merupakan salah satu mekanisme pengendalian konflik kepentingan bagi pejabat yang berpindah jabatan.
- 7 : Pengawasan konflik kepentingan dilakukan oleh atasan langsung pejabat dan dapat melalui mekanisme pengaduan.

4.8 Pengetahuan Terhadap Gratifikasi

Pada aspek pengetahuan tentang gratifikasi, rata-rata peningkatan pemahaman pegawai mencapai 7,03% (Tabel 3 dan Gambar 2), yang menunjukkan adanya perbaikan pemahaman substansial setelah sosialisasi. Pemahaman mengenai definisi gratifikasi, kewajiban pelaporan gratifikasi, serta tata cara pelaporan telah berada pada tingkat sangat baik pada hasil post-test, dengan sebagian indikator mencapai tingkat pemahaman penuh.

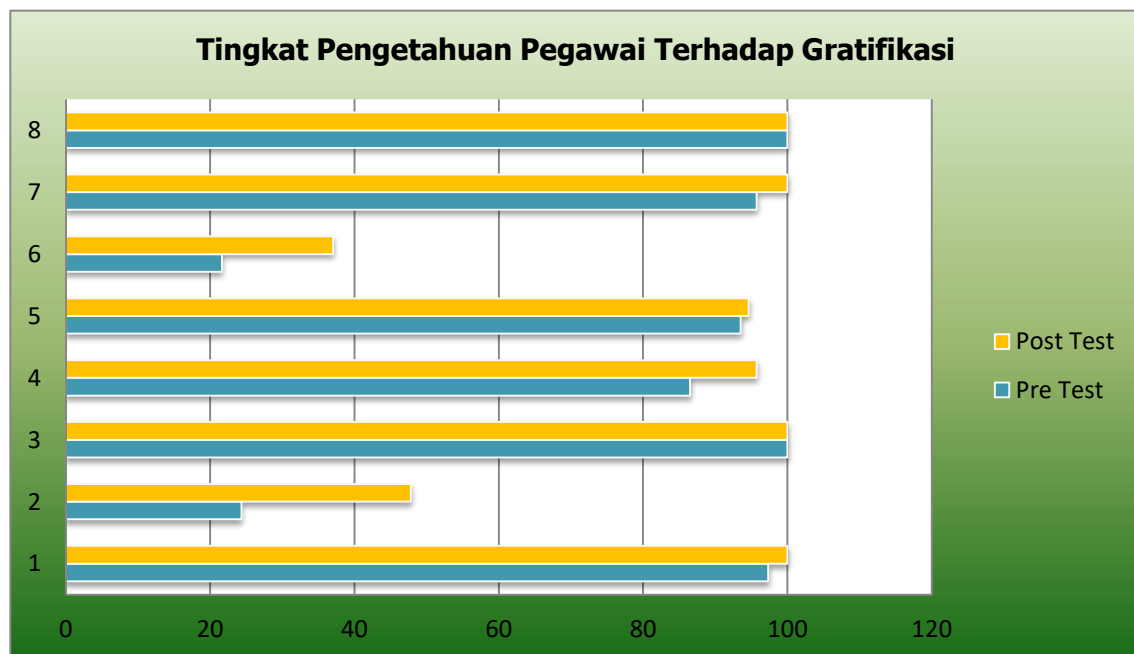
Tabel 3. Tingkat Pengetahuan Pegawai Terhadap Gratifikasi

No	Pernyataan	Pre Test	Post Test	Peningkatan (%)
1	Gratifikasi mencakup pemberian uang, barang, tiket perjalanan, fasilitas, atau manfaat lain yang diterima karena jabatan.	97,30	100,00	2,70
2	Semua bentuk pemberian kepada ASN dianggap suap dan tidak boleh diterima.	24,30	47,80	23,50
3	Pegawai negeri wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau KPK.	100,00	100,00	0,00
4	Hadiah dari keluarga dekat seperti orang tua, saudara kandung, atau menantu tidak termasuk gratifikasi sepanjang tidak ada konflik kepentingan.	86,50	95,70	9,20
5	Pemberian cenderamata atau plakat kepada instansi dalam kegiatan resmi kenegaraan tidak wajib dilaporkan selama tidak ditujukan kepada individu.	93,50	94,60	1,10
6	Pemberian dalam bentuk barang dari rekan kerja pada acara ulang tahun dengan nilai di bawah Rp300.000 termasuk gratifikasi yang wajib dilaporkan.	21,60	37,00	15,40
No	Pernyataan	Pre Test	Post Test	Peningkatan (%)
7	Pelaporan gratifikasi wajib memuat identitas penerima, pemberi, waktu, tempat, jenis, nilai, dan kronologis pemberian.	95,70	100,00	4,30
8	Pegawai yang menolak pemberian gratifikasi dengan sopan telah menjalankan salah satu bentuk pengendalian gratifikasi.	100,00	100,00	0,00
Rata-Rata		77,36	84,39	7,03

Sumber: Data primer diolah (2025)

Peningkatan paling menonjol terjadi pada pemahaman bahwa tidak semua bentuk pemberian kepada ASN merupakan suap, serta pada pemahaman mengenai jenis pemberian tertentu yang termasuk gratifikasi dan wajib dilaporkan, seperti pemberian barang dalam konteks nonkedinasan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi berhasil meluruskan persepsi keliru yang sebelumnya cukup dominan di kalangan pegawai.

Di sisi lain, indikator-indikator yang sejak awal telah dipahami dengan baik, seperti kewajiban melaporkan gratifikasi dan sikap menolak gratifikasi secara sopan sebagai bentuk pengendalian, menunjukkan peningkatan yang relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi berfungsi lebih sebagai penguatan dan penegasan terhadap pemahaman yang telah ada.



Gambar 2. Tingkat Pengetahuan Pegawai Terhadap Gratifikasi

Keterangan :

- 1 Gratifikasi mencakup pemberian uang, barang, tiket perjalanan, fasilitas, atau manfaat lain yang diterima karena jabatan.
- 2 Semua bentuk pemberian kepada ASN dianggap suap dan tidak boleh diterima.
- 3 Pegawai negeri wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau KPK.
- 4 Hadiah dari keluarga dekat seperti orang tua, saudara kandung, atau menantu tidak termasuk gratifikasi sepanjang tidak ada konflik kepentingan.
- 5 Pemberian cenderamata atau plakat kepada instansi dalam kegiatan resmi kenegaraan tidak wajib dilaporkan selama tidak ditujukan kepada individu.
- 6 Pemberian dalam bentuk barang dari rekan kerja pada acara ulang tahun dengan nilai di bawah Rp300.000 termasuk gratifikasi yang wajib dilaporkan.
- 7 Pelaporan gratifikasi wajib memuat identitas penerima, pemberi, waktu, tempat, jenis, nilai, dan kronologis pemberian.
- 8 Pegawai yang menolak pemberian gratifikasi dengan sopan telah menjalankan salah satu bentuk pengendalian gratifikasi.

4.9 Pengetahuan Terhadap *Whistleblowing System (WBS)*

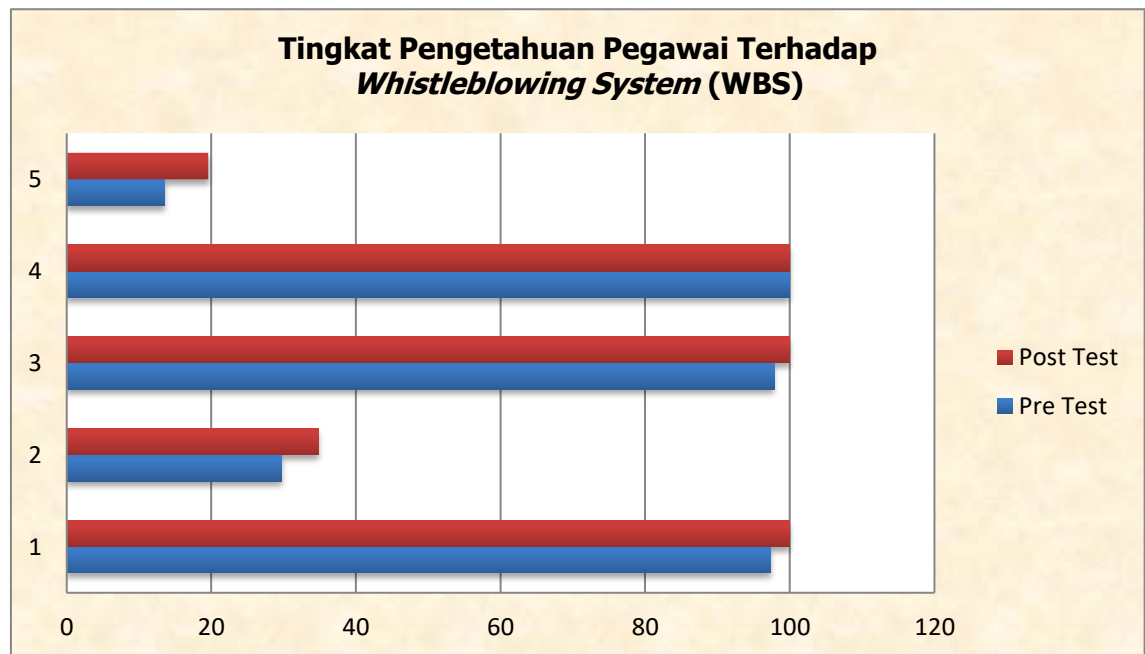
Pada aspek Whistleblowing System (WBS), rata-rata peningkatan pemahaman pegawai tercatat sebesar 3,22%, yang relatif lebih rendah dibandingkan dua aspek lainnya. Hal ini disebabkan oleh tingkat pemahaman awal pegawai yang sudah cukup tinggi terhadap konsep dasar WBS, seperti definisi, tujuan, dan cakupan pelaporan (Tabel 4).

Tabel 4. Tingkat Pengetahuan Pegawai Terhadap *Whistleblowing System (WBS)*

No	Pernyataan	Pre Test	Post Test	Peningkatan (%)
1	Whistleblowing System (WBS) adalah sistem yang digunakan untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan kerja	97,30	100,00	2,70
2	WBS hanya dapat digunakan oleh pegawai internal instansi	29,70	34,80	5,10
3	Tujuan utama WBS adalah mendorong partisipasi pegawai dan masyarakat dalam mengungkap pelanggaran secara bertanggung jawab	97,80	100,00	2,20
4	Pelaporan melalui WBS dapat mencakup dugaan pelanggaran integritas, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan korupsi	100,00	100,00	0,00
5	Pelapor (whistleblower) dapat dikenai sanksi disiplin karena melaporkan dugaan pelanggaran	13,50	19,60	6,10
Rata-Rata		67,66	70,88	3,22

Sumber: Data primer diolah (2025)

Meskipun demikian, peningkatan signifikan terlihat pada pemahaman bahwa pelapor tidak dikenai sanksi disiplin karena melaporkan dugaan pelanggaran, serta pada pemahaman bahwa WBS tidak hanya dapat digunakan oleh pegawai internal. Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi berperan penting dalam meningkatkan rasa aman dan kepercayaan pegawai terhadap mekanisme pelaporan pelanggaran (Gambar 3).



Gambar 3. Tingkat Pengetahuan Pegawai Terhadap *Whistleblowing System* (WBS)

Keterangan:

- 1 Whistleblowing System (WBS) adalah sistem yang digunakan untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan kerja
- 2 WBS hanya dapat digunakan oleh pegawai internal instansi
- 3 Tujuan utama WBS adalah mendorong partisipasi pegawai dan masyarakat dalam mengungkap pelanggaran secara bertanggung jawab
- 4 Pelaporan melalui WBS dapat mencakup dugaan pelanggaran integritas, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan korupsi
- 5 Pelapor (whistleblower) dapat dikenai sanksi disiplin karena melaporkan dugaan pelanggaran

Masih terbatasnya peningkatan pada beberapa indikator WBS menunjukkan perlunya penguatan sosialisasi lanjutan yang lebih aplikatif, khususnya melalui contoh kasus dan simulasi pelaporan, agar pemahaman pegawai tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga operasional.

4.10 Implikasi Hasil Sosialisasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pengendalian gratifikasi dan pengelolaan benturan kepentingan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman pegawai. Peningkatan pemahaman ini diharapkan berkontribusi pada penguatan budaya integritas, pencegahan praktik korupsi, serta peningkatan kepatuhan terhadap sistem pengendalian internal pemerintah.

Namun demikian, variasi tingkat peningkatan pada masing-masing aspek menunjukkan perlunya strategi sosialisasi berkelanjutan dan lebih terfokus, khususnya pada materi yang masih memiliki tingkat pemahaman relatif rendah. Dengan demikian, upaya pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan dapat diterapkan secara konsisten dan efektif di lingkungan kerja BRMP Sumatera Selatan.

4.10 Peta Risiko Gratifikasi (*Gratification Risk Map*) pada Unit Kerja BRMP Sumatera Selatan

Dalam rangka memperkuat penerapan tata kelola yang baik, pengendalian intern, dan budaya integritas pada pelaksanaan kegiatan BRMP Sumatera Selatan, dilakukan penyusunan Matriks Risiko Gratifikasi (*High Level*). Matriks ini disusun sebagai bagian dari integrasi hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahap perencanaan (*ex-ante*), pelaksanaan (*on-going*), dan tahap akhir (*post evaluation*), serta memperhatikan temuan evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Tabel 5).

Penyusunan matriks risiko gratifikasi difokuskan pada identifikasi risiko strategis yang berpotensi muncul pada kegiatan dengan intensitas interaksi tinggi dengan pihak eksternal, pengambilan keputusan teknis, serta tahapan penilaian dan verifikasi hasil kegiatan. Pendekatan high level digunakan untuk memastikan bahwa risiko-risiko utama yang berdampak signifikan terhadap integritas, akuntabilitas, dan reputasi unit kerja dapat dikelola secara efektif dan berkelanjutan.

Tabel 5. Matriks Risiko Gratifikasi BRMP Sumatera Selatan

No.	Risiko Utama Gratifikasi	Tahap Kegiatan	L	I	Level Risiko	Strategi Pengendalian Utama
1.	Penerimaan fasilitas/jamuan dari mitra atau petani selama pendampingan dan kegiatan lapangan	On-Going	3	4	12 (sedang)	Sosialisasi gratifikasi, pengawasan melekat, penegasan larangan sebelum kegiatan
2.	Gratifikasi terkait penilaian, verifikasi, atau sertifikasi hasil kegiatan	On-Going – Post	2	5	10 (Sedang)	Tim kolektif, SOP teknis, dokumentasi hasil dan berita acara
3.	Konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan teknis (lokasi, jadwal, distribusi hasil)	Ex-Ante – Post	3	4	12 (sedang)	Pemisahan peran, koordinasi lintas instansi, transparansi dasar keputusan
4.	Risiko gratifikasi akibat belum optimalnya manajemen risiko di awal kegiatan	Ex-Ante	2	4	8 (Rendah–Sedang)	Penyusunan MR, penetapan UPR, monitoring risiko berkala

Berdasarkan Matriks Risiko Gratifikasi (*High Level*), potensi risiko gratifikasi pada unit kerja BRMP Sumatera Selatan secara umum berada pada kategori rendah hingga sedang, dengan tingkat dampak yang relatif tinggi pada beberapa tahapan kegiatan. Risiko dengan tingkat prioritas tertinggi terdapat pada kegiatan yang melibatkan interaksi langsung di lapangan, khususnya dalam pendampingan program strategis, koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta proses penilaian dan verifikasi hasil kegiatan.

Risiko penerimaan fasilitas atau jamuan selama kegiatan lapangan dan potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan teknis berada pada kategori kemungkinan sedang dengan dampak tinggi, sehingga memerlukan pengendalian yang konsisten melalui pengawasan melekat, penegasan larangan gratifikasi, serta transparansi dasar pengambilan keputusan. Sementara itu, risiko gratifikasi yang berkaitan dengan penilaian, verifikasi, dan sertifikasi hasil kegiatan memiliki kemungkinan relatif rendah, namun berdampak sangat signifikan terhadap kredibilitas dan reputasi unit kerja apabila tidak dikelola dengan baik.

Selain itu, hasil Monev ex-ante menunjukkan bahwa belum optimalnya manajemen risiko pada tahap awal kegiatan berpotensi meningkatkan eksposur risiko gratifikasi. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan manajemen risiko sejak tahap perencanaan, termasuk penetapan Unit Pengelola Risiko (UPR), penyusunan dokumen manajemen risiko yang komprehensif, serta integrasi pengendalian gratifikasi ke dalam seluruh siklus pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, Matriks Risiko Gratifikasi (*High Level*) menjadi instrumen strategis bagi BRMP Sumatera Selatan dalam menentukan prioritas pengendalian, memperkuat budaya integritas, dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik gratifikasi, sejalan dengan prinsip SPIP dan Zona Integritas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan penguatan Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) pada BRMP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan BRMP Sumatera Selatan secara umum berada pada kategori baik hingga sangat baik.** Hasil monev menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan strategis, telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, petunjuk teknis, dan standar yang ditetapkan. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis, administratif, dan waktu, kegiatan tetap mampu mencapai target utama melalui koordinasi lintas pihak, pendampingan teknis, serta penyesuaian adaptif terhadap dinamika lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan kegiatan relatif efektif dan efisien, serta didukung oleh komitmen pelaksana di lapangan.
2. **Monitoring dan evaluasi telah menghasilkan rekomendasi strategis perbaikan sistem kerja yang bersifat komprehensif dan lintas tahapan.** Rekomendasi yang dihasilkan menitikberatkan pada penguatan perencanaan berbasis risiko dan baseline, penyelarasan

perencanaan dengan dinamika anggaran dan kalender tanam, standardisasi pendampingan teknis, penguatan manajemen pascapanen, serta penyempurnaan sistem pelaporan berbasis data dan wilayah.

3. **Pelaksanaan sosialisasi pengendalian gratifikasi dan etika kedinasan terbukti meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai.** Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pegawai terhadap pengelolaan gratifikasi dan benturan kepentingan, baik dari aspek definisi, kewajiban pelaporan, maupun mekanisme pengendaliannya. Meskipun tingkat pemahaman awal pegawai relatif sudah baik, sosialisasi mampu memperkuat kesadaran preventif dan membentuk sikap yang lebih patuh terhadap ketentuan pelaporan gratifikasi. Hal ini menegaskan bahwa fungsi edukatif UPG berjalan efektif sebagai bagian dari pembudayaan integritas di lingkungan BRMP Sumatera Selatan.
4. **Potensi risiko gratifikasi pada unit kerja BRMP Sumatera Selatan telah teridentifikasi dan dinilai secara sistematis.** Melalui penyusunan Matriks Risiko Gratifikasi (*High Level*), diketahui bahwa risiko gratifikasi pada BRMP Sumatera Selatan berada pada kategori rendah hingga sedang, dengan dampak potensial yang relatif tinggi pada kegiatan yang melibatkan interaksi lapangan, pengambilan keputusan teknis, serta proses penilaian dan verifikasi hasil kegiatan. Hasil ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian secara umum telah berjalan dengan baik, namun tetap memerlukan penguatan pengendalian preventif, pengawasan melekat, dan integrasi manajemen risiko sejak tahap perencanaan.

II.KINERJA HASIL KEGIATAN

5.1 Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan tujuh belas program prioritas 2024 hingga 2029 yang salah satunya adalah mencapai swasembada pangan, energi dan air yang mendukung Asta Cita Presiden yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti program prioritas tersebut dengan melakukan program swasembada pangan nasional dengan melaksanakan cetak sawah 3 juta Ha, optimalisasi lahan, pompanisasi, penggunaan benih unggul, melibatkan Petani Milenial, transformasi pertanian modern dan beberapa program lainnya.

Dampak perubahan iklim dan perang dunia menyebabkan harga pangan melambung di beberapa negara sehingga guna mengatasi penurunan produksi pangan dan sekaligus menghadapi tantangan darurat pangan, Kementerian Pertanian melakukan percepatan peningkatan produksi padi melalui luas tambah tanam, optimalisasi lahan, cetak sawah rakyat, brigade pangan, dan penanaman padi gogo yang di sebar ke 38 Provinsi. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Pertanian telah menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian telah mengimplementasikan beberapa upaya strategis untuk mencapai swasembada pangan salah satunya adalah program Oplah dan cetak sawah yang bertujuan untuk meningkatkan luas sawah dan produksktivitas pertanian, dan pemerintah juga telah meluncurkan program padi Gogo yang bertujuan meningkatkan produksi padi dilahan perkebunan, Semua program ini diiringi dengan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, akademisi, dan petani untuk percepatan tanam dan pengawasan harian guna menjamin tercapainya target produksi padi nasional.

Provinsi Sumsel yang merupakan Provinsi penyangga/pendukung dalam pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian berperan dalam mendukung tercapainya target program strategis Kementerian Pertanian. Provinsi Sumsel pada Tahun 2024 memiliki luas baku sawah seluas 519.482 Ha, dimana pada tahun 2024 produksi padi sebesar 52,66 juta ton GKG, pada tahun 2023 tercatat sebesar 53,98 juta ton GKG, dimana adanya penurunan lebih kurang 1,32 juta ton GKG atau sekitar 2,45%. Guna menangani penurunan produksi tersebut dan mendorong peningkatan produksi padi di Tahun 2025 dilakukan upaya peningkatan luas tanam di Tahun 2025 dengan melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap program – program strategis Kementerian Pertanian di Provinsi Sumsel yang dilakukan secara

bersama-sama dengan *stakeholder* terkait di Provinsi Sumsel. Terdapat 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel yang menjadi target pendampingan dalam rangka mencapai swasembada pangan melalui peningkatan dan perluasan Luas Tambah Tanam (LTT) yaitu Kabupaten Penukal Lematang Abab Ilir (PALI), Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kabupaten Musirawa, Kabupaten Musirawas Utara, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Lahat, Kota Palembang, dan Kota Prabumulih,

Luas lahan sawah di 11 kabupaten/kota tersebut adalah seluas 65.712 Ha. Adapaun secara rinci luas pendampingan masing-masing kabupaten/kota tersebut adalah sebagai berikut : 1) Kabupaten OKU seluas 3.561 Ha, 2) Kabupaten Lahat seluas 12.652 Ha, 3) Kabupaten Musi Rawas seluas 14.969 Ha, 4) Kab. OKU Selatan seluas 8.821 Ha, 5) Kab. Empat lawang seluas 9.432 Ha, 6) Kab PALI seluas 6.399 Ha, 7) Kabupaten Muratara seluas 2.201 Ha, 8) Kota Palembang seluas 3.295 9) Kota Prabumulih seluas 165 ha, 10) Kota Pagar Alam seluas 3.088 ha dan 11) Kota Lubuk Linggau seluas 1.129 Ha.

Dari luas baku sawah tersebut pada Tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan Luas Tambah Tanam (LTT) seluas 1.154.483 Ha berupa LTT Reguler 1.006.112 Ha, LTT Oplah tahun 2024 seluas 67.693 Ha, LTT Opla tahun 2025 seluas 50,356 Ha, LTT Cetak Sawah 48.000, LTT dan LTT Padi Gogo seluas 30.324 Ha, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 808/Kpts./KP.250/A/09/2025, tanggal 9 September 2025 Tentang Kegiatan Swasembada Pangan yang mengatur tentang penunjukan penanggung jawab kegiatan dalam mendukung swasembada, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumsel dalam keputusan tersebut mendapat penugasan untuk melakukan pendampingan dan pengawalan program swasembada pangan lewat peningkatan dan perluasan Luas Tambah Tanam (LTT) di Provinsi Sumsel. Berdasarkan tersebut, maka akan dilakukan pendampingan dan pengawalan peningkatan dan perluasan LTT di Sumsel dengan mendorong penerapan IP 300 dan IP 400 guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian. Guna melaksanakan pengawalan dan pendampingan tersebut perlu dilakukan langkah - langkah strategis yaitu: 1) Koordinasi dengan stakeholder untuk memastikan tercapainya kemandirian pangan secara efektif dan efisien; 2) Memberikan pendampingan, sosialisasi, bagi petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan kelembagaan ekonomi petani dalam menerapkan pertanian modern pada usahatani untuk mencapai swasembada pangan; 3) Monitoring dalam rangka untuk memastikan penerapan pertanian modern dan pencapaian swasembada pangan. Diharapkan dengan dilakukannya pengawalan dan pendampingan dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan di lapangan, sehingga dapat mendorong peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi padi dan tercapainya swasembada pangan.

1.2. Dasar Pertimbangan

Dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Undang – undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
- b. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
- c. Undang – undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
- d. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan
- e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman
- f. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
- g. Peraturan Presiden No 192 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pertanian
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntanso dan Pelaporan Keuangan
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Bidang Pertanian
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/TP.020/4/2018 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Tanaman
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- l. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 465/HK.220/C/02/2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
- m. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 243/KPTS/OT.050/M/04/2024 tentang Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan;
- n. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 Tentang Kegiatan Swasembada Pang

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan tahunan dari kegiatan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian guna mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan secara efektif dan efisien.
2. Memberikan pendampingan dan sosialisasi kepada petani dalam kegiatan optimalisasi lahan rawa, cetak sawah, LTT padi reguler, dan LTT padi gogo untuk mendorong produktivitas serta mendukung pencapaian target tanam program swasembada pangan.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan optimalisasi lahan rawa, cetak sawah, LTT padi reguler, dan LTT padi gogo, guna memastikan kesesuaian pelaksanaan di lapangan agar tercapai target tanam pada program swasembada pangan.

Tujuan jangka Panjang kegiatan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian adalah tercapainya peningkatan produksi dan produktivitas untuk mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan.

Sasaran kegiatan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian mencakup 2 pihak. Pertama, pihak internal BPRMP Sumsel yang berhubungan dengan pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian. Kedua, pihak eksternal baik lingkup Kementerian Pertanian maupun lintas lembaga yang terlibat dalam pengembangan pertanian dan pencapaian swasembada pangan.

1.4 Keluaran

Keluaran tahunan dari kegiatan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian adalah:

1. Terlaksananya koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian di daerah guna memperkuat kolaborasi dan percepatan pencapaian swasembada pangan.
2. Terlaksananya pendampingan dan sosialisasi kepada petani pelaksana kegiatan optimalisasi lahan rawa, cetak sawah, LTT padi reguler, dan LTT padi gogo, yang berdampak pada meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas petani dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan optimalisasi lahan rawa, cetak sawah, LTT padi reguler, dan LTT padi gogo, sehingga dapat memastikan kesesuaian pelaksanaan di lapangan dan tercapainya target tanam sesuai program swasembada pangan.

Keluaran jangka Panjang kegiatan koordinasi penyusunan program dan anggaran adalah peningkatan produksi dan produktivitas mencapai swasembada pangan.

KRO : Koordinasi

RO : Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementeria Pertanian

Komponen	: Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian
Subkomponen	: Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian

1.4 Manfaat , Lokasi Dan Dampak

Memperkuat sinergi antara pemerintah dan stakeholder pertanian, meningkatkan kapasitas petani dalam pelaksanaan kegiatan pada kegiatan optimalisasi lahan rawa, cetak sawah, LTT padi reguler, dan LTT padi gogo, serta menghasilkan data monitoring pelaksanaan di lapangan yang berdampak pada meningkatnya produktivitas dan luas tanam padi guna mendukung pencapaian target swasembada pangan nasional.

II. PROSEDUR KERJA

2.1 Pendekatan (Kerangka Pemikiran)

Menjalankan fungsi pendampingan program strategis Kementerian Pertanian dibutuhkan konsep dan perencanaan yang kuat. Pencapaian output kegiatan dan pelaksanaan fungsi lembaga menjadi dasar yang harus diperhatikan dengan baik. Adapun kerangka pemikiran dalam kegiatan ini adalah dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder pertanian untuk pencapaian swasembada pangan, melaksanakan pendampingan dan sosialisasi bagi petani, kelompok tani, gapoktan, dan kelembagaan kelompok tani dalam menerapkan pertanian modern pada kegiatan usaha tani untuk mencapai swasembada pangan, dan melakukan monitoring dalam rangka untuk memastikan penerapan pertanian modern dan pencapaian swasembada pangan.

2.2 Ruang Lingkup Aktivitas

Ruang lingkup kegiatan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian terdiri dari proses: koordinasi dengan stakeholder pertanian terkait swasembada pangan, pelaksanaan pendampingan dan sosialisasi untuk petani, kelompok tani, Gapoktan dan kelembagaan kelompok tani lainnya, pelaporan LTT, dan monitoring pelaksanaan kegiatan

2.3 Prosedur Pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu koordinasi, pendampingan dan peningkatan kapasitas, serta monitoring pelaksanaan kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Koordinasi

Kegiatan koordinasi dilakukan dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah daerah, dinas pertanian/perkebunan provinsi dan kabupaten/kota, lembaga di bawah Kementerian Pertanian, penyuluh pertanian, dan kelompok tani. Koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, merumuskan langkah strategis, serta memastikan keterpaduan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target tanam dan swasembada pangan. Melalui koordinasi, diperoleh data, informasi, serta dukungan teknis dan kelembagaan untuk memperlancar pelaksanaan di lapangan.

b. Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Petani

Pendampingan dilakukan secara langsung kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), dan kelembagaan petani lainnya yang terlibat dalam kegiatan optimalisasi lahan rawa, cetak sawah, LTT padi reguler, LTT padi gogo dan brigade pangan. Kegiatan ini mencakup sosialisasi, konsultasi lapangan, dan penyelesaian permasalahan teknis, sosial, maupun kelembagaan yang dihadapi petani. Selain itu, dilakukan edukasi terkait penerapan pertanian modern serta pelaksanaan kegiatan Opla, CSR, LTT padi reguler, LTT padi gogo, dan Brigade Pangan, agar petani mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha taninya dalam mendukung pencapaian swasembada pangan.

c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Monitoring dilaksanakan secara berkala untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan target tanam yang telah ditetapkan. Kegiatan ini meliputi pemantauan terhadap pelaksanaan luas tambah tanam (LTT) di Provinsi Sumatera Selatan serta efektivitas pendampingan di lapangan.

III. MANAJEMEN RESIKO

3 1. Resiko Kegiatan

Risiko kegiatan merupakan daftar risiko kegiatan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian (Tabel 1)

Tabel 1. Daftar Risiko Kegiatan

No	Risiko	Penyebab	Dampak
1	Kurangnya efektivitas koordinasi dengan stakeholder	- Jadwal koordinasi tidak sinkron antar lembaga - Kurangnya komitmen dan komunikasi antar pihak terkait	Terhambatnya sinergi pelaksanaan kegiatan dan keterlambatan pencapaian target tanam
2	Rendahnya partisipasi petani dalam kegiatan pendampingan	- Kurangnya motivasi dan pemahaman petani terhadap manfaat program - Terbatasnya waktu dan akses informasi	Penerapan teknologi pertanian modern tidak optimal dan produktivitas tidak meningkat

No	Risiko	Penyebab	Dampak
3	Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pendampingan	Keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta dukungan logistik di lapangan	Pelaksanaan kegiatan tidak efisien dan target pendampingan tidak tercapai
4	Tidak terlaksananya monitoring dan evaluasi secara menyeluruh	- Jumlah lokasi pendampingan melebihi kapasitas SDM pendamping - Keterbatasan waktu dan transportasi lapangan	Data hasil kegiatan tidak akurat dan tidak menggambarkan kondisi aktual di lapangan
5	Gagal tanam akibat faktor lingkungan	- Perubahan iklim ekstrem, banjir, atau kekeringan - Serangan hama dan penyakit tanaman	Target tanam dan produksi padi tidak tercapai, berpengaruh terhadap program swasembada pangan

IV.ORGANISASI PELAKSANA DAN ANGGARAN

4.1 Tenaga Yang Terlibat dalam Kegiatan

Pentingnya akan manajemen pelaksanaan kegiatan perlu dilengkapi dengan susunan tenaga, jangka waktu, dan pembiayaan. Susunan tim dalam kegiatan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian di BPRMP Sumsel tertera pada Tabel 3.

Tabel 3.Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Kegiatan	Uraian Tugas
1.	Dr. Rustam, S.P., M.Si	Penanggung Jawab Kegiatan/ Kepala Balai	Pengarah, Pengendali, Supervisor dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
2.	Rosidah, SE, MM	Sekretaris/Kasubag TU	Membantu mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
3.	Susilawati, S.P., M.Si	Koordinator Teknis dan Pelaporan/ Katimker Layanan Kerja Sama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian	Membantu mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
4.	Rizky Wiraswati N, A.Md	Petugas Entry Data dan Pelaporan Oplah24, Oplah25 dan Brigade Pangan	Membantu mengkoordinir pelaksanaan Kegiatan
5.	Krishna Pusparini, SP	Petugas Entry Data dan Pelapora Padi Gogo dan Jagung	Membantu mengkoordinir pelaksanaan Kegiatan
6.	Gitalia Dhamayanti, S.Tr.p	Petugas Entry Data dan Pelapora LTT Padi Reguler	Membantu mengkoordinir pelaksanaan Kegiatan

7.	Maulida Surayya, SP.,M.Sc	Petugas Entry Data dan Pelapora Cetak Sawah	Membantu mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
Penanggung Jawab dan Tim Program Startegis Swasembada Pangan			
8.	Dr. Rustam, SP, M.Si Johanes Amirullah, SP, M.Si Bunaiyah Honorita, SP,M.Si Rizky Wiraswaty, AMd	Penanggung/ Anggota Tim Kab. PALI	Membantu mengkoordinir pelaksanaan Kegiatan
No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Kegiatan	Uraian Tugas
9.	Sri Harnanik, S.TP., M.So Yuana Juwita, SP Diah Ismia Pusparini, SP	Penanggung/ Anggota Tim Kota Palembang	Membantu mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
10.	Maya Dhanisa Sari, SP Gitalia Dhamayanti, S.Tr.P Vinna Septiana, SE	Penanggung/ Anggota Tim Kota Prabumulih	Membantu mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
11.	Ir. Dedeh adiyanti, M.Si Krisna Pusparini, SP	Penanggung/ Anggota Tim Kota Pagar Alam	Membantu mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
12	Ridwan, S.Tr.P Fuadi Irsan, M.Si	Penanggung/ Anggota Tim Kota Lubuk Linggau	Membantu mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
13.	Sarni, STP Juwedi Annisa, SP	Penanggung/ Anggota Tim Kab. Empat Lawang	Membantu mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
14.	Yayan Suryana, S,ST Maulana M.Yusuf, S.Si Koharudin	Penanggung/ Anggota Tim Kab. Musirawas Utara (Muratara)	Membantu mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
17.	Siti Khusniyati, SP Susilawati, SP, M.Si Yanto Pandu Alopun, SP	Penanggung/ Anggota Tim Kab. Musirawas	Membantu mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
18.	Maulida Surayya, SP, M.Sc Yenni Eliza, STP, M.Si Nur Wahyu Sariningtias, SP	Penanggung/ Anggota Tim Kab. Lahat	Membantu mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
19.	Joni Karman, S.Si., MP M. Arief Sidik Purwanto, S,Hut Risaluddin, S.Si	Penanggung/ Anggota Tim Kab. OKU Selatan	Membantu mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
Liasion Officer (LO) Program Stategis Swasembada Pangan			
20.	Susilawati, SP, M.Si	LO Kab Ogan Komering Ilir (OKI)	Membantu mengkoordinir pelaksanaan Kegiatan

22.	Herwenita, SP., M.Sc	LO Kab Ogan Ilir (OI)	Membantu mengkoordinir pelaksanaan Kegiatan
22.	Bunaiyah Honorita, SP, M.Si	LO Kab Ogan Komering Ulu Timur (OKUT)	Membantu mengkoordinir pelaksanaan Kegiatan
23.	Yanto Pandu Alopun, SP	LO Kab Banyuasin	Membantu mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Kegiatan	Uraian Tugas
24	Johanes Amirullah, SP, M.Si	LO Kab MUBA	Membantu mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
25.	Anissa, SP	LO Kab Muara Enim	Membantu mengkoordinir pelaksanaan kegiatan

4.2 Jangka Waktu Aktifitas

Tabel 4. Jangka Waktu Aktivitas

No	Uraian Kegiatan	Fisik (%)	Bulan										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	PERENCANAAN	10											
1	Penyusunan berkas perencanaan (Proposal, RPD, RAB, dll)	8											
2	Rapat awal tahun kegiatan	2											
B.	PERSIAPAN	15											
1	Penyiapan sarana dan perlengkapan kegiatan	2											
C	PELAKSANAAN	75											
1	Koordinasi	10											
2	Pendampingan	10											
3	Bimtek	15											
4	Monitoring penerapan pertanian modern	15											
5	Pelaporan bulanan	20											
6	Pelaporan akhir tahun	5											

Pembiayaan :

Biaya yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah Rp. 850.000.000,- dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pada Tabel 6.

Tabel 5. Pembiayaan Kegiatan

Akun	Uraian	Jumlah
018.09.WA.6918.AEA	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	890.000.000
A	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	890.000.000
521211	Belanja Bahan	66.750.000
522141	Belanja Sewa	233.250.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	503.150.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kota	86.850.000

V.HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1 PENDAMPINGAN LUAS TAMBAH TANAM (LTT) REGULER

5.1.1 Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)

Program Swasembada Pangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada tahun 2025 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam upaya meningkatkan produksi padi melalui kegiatan penambahan luas tanam (LTT). Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 808/Kpts./KP.250/A/09/2025 tentang Perubahan Kedua Atas keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota Pada Kegiatan Swasembada Pangan, target LTT padi Kabupaten OKU pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 6.794 hektar. Kabupaten OKU memiliki total Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 3.561 hektar, dengan 2.621 hektar di antaranya tergolong LBS aktif, sementara 940 hektar lainnya masih belum tergarap atau masuk kategori tidak aktif. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi optimalisasi pertanaman di wilayah tersebut.

Hingga tanggal Desember 2025, realisasi LTT Padi Reguler Kab. OKU mencapai 2.650,8 hektar atau sekitar 39,02% dari target tahunan. Capaian ini menunjukkan adanya selisih cukup besar antara target dan realisasi, yang menjadi perhatian dalam evaluasi program dan penyusunan strategi tahun berikutnya. Target dan Realisasi LTT Padi Kab. OKU Tahun 2025 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 6. Target dan Capaian Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Kab. OKU Tahun 2025

Kab	LBS (ha)	LBS Aktif (ha)	LBS Tidak Aktif (ha)	Target Kepmentan 808 Ta 2025 (ha)	Realisasi LTT (ha)
OKU	3.561	2.621	940	6.794	2.650,8

Realisasi Luas Tambah Tanam Padi Tahun 2025

Realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025 merupakan akumulasi capaian kegiatan tanam sejak Bulan Januari sampai dengan Desember. Berdasarkan hasil rekapitulasi, total realisasi LTT tercatat sebesar 2.650,8 hektar dari target tahunan sebesar 6.794 hektar. Dengan demikian, capaian LTT Tahun 2025 baru mencapai sekitar 39,02% dari target, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program LTT masih berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 7. Data breakdown Realisasi LTT per Kecamatan Triwulan IV 2025

No	Kecamatan	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Lengkiti	83	12	0	45	140
2	Sosoh Buay Rayab	70	52	10	43	175
3	Pengandonan	154	84,5	154,5	11	404
4	Muara Jaya	117	0	116	0	233
5	Semidang Aji	109,8	111,35	8	227,15	456,3
6	Ulu Ogan	10	0	0	23	33
7	Peninjauan	7	7	0	5,5	19,5
8	Sinar Peninjauan	118	195	43	177,5	533,5
9	Lubuk Raja	26	21	5	103	155
10	Lubuk Batang	80	0	96	67	243
11	Baturaja Timur	84	42,75	3,75	92,5	223
12	Baturaja Barat	10	13	0	4,5	27,5
13	Kedaton Peninjauan Raya	0	4	1	3	8
		868,8	542,6	437,3	802,15	2650,8

Berdasarkan Tabel 2, realisasi LTT padi per kecamatan menunjukkan dinamika dan fluktuasi yang cukup signifikan antar triwulan. Pada Triwulan I, realisasi LTT mencapai 868,8 hektar, menjadi capaian tertinggi sepanjang tahun. Tingginya realisasi pada triwulan ini didorong oleh optimalisasi musim tanam awal tahun, dengan kontribusi terbesar berasal dari Kecamatan Pengandonan (154 ha), Sinar Peninjauan (118 ha), Muara Jaya (117 ha), dan Semidang Aji (109,8 ha).

Memasuki Triwulan II, realisasi LTT menurun menjadi 542,6 hektar. Penurunan ini terjadi hampir di seluruh kecamatan, meskipun beberapa wilayah masih mencatatkan capaian relatif tinggi, seperti Sinar Peninjauan (195 ha) dan Semidang Aji (111,35 ha). Pada triwulan ini, beberapa kecamatan tidak mencatatkan realisasi tanam, antara lain Muara Jaya, Ulu Ogan, dan Lubuk Batang, yang mengindikasikan adanya kendala baik dari sisi ketersediaan air, kesiapan lahan, maupun faktor teknis lainnya.

Pada Triwulan III, realisasi LTT kembali mengalami penurunan dan menjadi yang terendah sepanjang tahun, yaitu sebesar 437,3 hektar. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh minimnya aktivitas tanam di sebagian besar kecamatan. Namun demikian, Kecamatan Pengandonan (154,5 ha) dan Muara Jaya (116 ha) masih mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan, yang

menunjukkan adanya perbedaan pola tanam dan kondisi lahan antar wilayah.

Selanjutnya pada Triwulan IV, realisasi LTT menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan menjadi 802,15 hektar. Peningkatan ini menandakan adanya percepatan tanam menjelang akhir tahun. Kecamatan Semidang Aji menjadi penyumbang terbesar dengan capaian 227,15 hektar, diikuti oleh Sinar Peninjauan (177,5 ha), Lubuk Raja (103 ha), dan Baturaja Timur (92,5 ha). Capaian pada triwulan ini menunjukkan adanya upaya optimalisasi lahan serta dukungan kegiatan tanam yang lebih intensif dibandingkan triwulan sebelumnya.

Secara kumulatif selama Tahun 2025, kecamatan dengan total realisasi LTT tertinggi adalah Sinar Peninjauan (533,5 ha), Semidang Aji (456,3 ha), dan Pengandonan (404 ha). Sementara itu, kecamatan dengan kontribusi terendah adalah Kedaton Peninjauan Raya (8 ha), Peninjauan (19,5 ha), dan Ulu Ogan (33 ha). Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian LTT antar kecamatan masih belum merata dan masih terpusat pada wilayah tertentu.

Secara keseluruhan, realisasi LTT padi Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025 yang masih berada jauh di bawah target tahunan mengindikasikan adanya berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain keterbatasan ketersediaan air irigasi, kondisi iklim yang kurang mendukung, alih fungsi lahan pertanian, keterbatasan sarana dan prasarana produksi, serta belum optimalnya perencanaan dan sinkronisasi jadwal tanam di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan perencanaan tanam, peningkatan pendampingan teknis kepada petani, serta optimalisasi potensi lahan yang tersedia agar capaian LTT pada tahun berikutnya dapat meningkat dan lebih mendekati target yang telah ditetapkan.

Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Realisasi Luas Tambah Tanam Padi Tahun 2025

Total capaian realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025 merupakan akumulasi realisasi sejak Bulan Januari sampai dengan Desember, yaitu seluas 2.650,8 hektar dari target tahunan sebesar 6.794 hektar. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi LTT masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Rendahnya capaian LTT padi tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tanam padi di lapangan, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Kendala tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten OKU dengan tingkat dan karakteristik permasalahan yang beragam.

Hambatan Teknis Pelaksanaan Luas Tambah Tanam Padi

Pelaksanaan kegiatan tanam padi di Kabupaten OKU menghadapi hambatan teknis yang cukup kompleks, terutama yang berkaitan dengan faktor alam, infrastruktur pertanian, dan ketersediaan sarana produksi. Curah hujan yang tidak menentu menyebabkan mundurnya jadwal tanam pada beberapa musim tanam. Kondisi ini diperparah oleh dampak banjir besar pada tahun 2024 yang mengakibatkan kerusakan lahan sawah, bendungan, serta jaringan irigasi di sejumlah kecamatan. Selain itu, banjir juga menyebabkan terputusnya akses jalan menuju areal persawahan dan menumpuknya material banjir di lahan, sehingga ratusan hektar sawah tidak dapat diolah dan ditanami.

Berkurangnya debit air sungai serta rusaknya bendungan dan saluran irigasi menyebabkan distribusi air tidak optimal ke lahan sawah. Di beberapa wilayah, kerusakan jaringan irigasi mengakibatkan lahan sawah seluas puluhan hingga ratusan hektar tidak mendapatkan suplai air yang memadai, sehingga tidak dapat ditanami sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Keterbatasan alat mesin pertanian (alsintan), khususnya traktor dan pompa air, juga menjadi kendala utama. Jumlah alsintan yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan, ditambah dengan kondisi sebagian alsintan yang mengalami kerusakan. Proses pengolahan lahan harus dilakukan secara bergiliran dan seringkali tidak sesuai dengan ketersediaan air. Kondisi ini berdampak langsung pada keterlambatan tanam dan menurunnya intensitas pertanaman.

Hambatan Non Teknis dan Sosial Ekonomi Petani

Selain kendala teknis, pelaksanaan LTT padi juga dipengaruhi oleh faktor nonteknis yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi petani. Kekurangan tenaga kerja pertanian menjadi salah satu permasalahan yang cukup dominan. Sebagian besar petani harus mengupah tenaga kerja mulai dari pengolahan lahan, penanaman, hingga panen, yang menyebabkan biaya produksi menjadi lebih tinggi dan membutuhkan modal yang lebih besar.

Di beberapa wilayah, kegiatan tanam padi juga berbarengan dengan musim panen komoditas perkebunan, seperti kopi dan karet. Kondisi ini menyebabkan tenaga kerja dan operator alsintan lebih memilih bekerja pada sektor perkebunan yang dinilai lebih menguntungkan, sehingga kegiatan tanam padi menjadi tertunda.

Selain itu, terdapat kecenderungan peralihan komoditas dari padi ke jagung di sejumlah kecamatan. Jagung dinilai memiliki harga jual yang lebih menjanjikan dan memberikan keuntungan yang lebih cepat bagi petani. Di sisi lain, bagi sebagian petani di Kabupaten OKU, padi bukan merupakan sumber pendapatan utama, melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. Sumber pendapatan utama petani umumnya berasal dari usaha perkebunan karet, sehingga minat untuk menanam padi relatif rendah.

Kendala Spesifik per Wilayah BPP/Kecamatan

Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, kendala pencapaian luas tambah tanam harian bervariasi di setiap wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Di wilayah BPP Tanjungan yang meliputi Kecamatan Ulu Ogan, Pengandonan, dan Muara Jaya, kegiatan tanam padi bertepatan dengan musim panen kopi, sehingga tenaga kerja dan operator alsintan beralih ke sektor perkebunan. Dampak banjir tahun 2024 juga menyebabkan sekitar 145,17 hektar lahan sawah tidak dapat ditanami akibat bendungan jebol dan akses jalan yang terputus.

Di wilayah BPP Raksa Jiwa, berkurangnya debit air sungai dan kerusakan bendungan serta jaringan irigasi yang seharusnya mengairi tiga desa menyebabkan lahan sawah seluas 94,5 hektar tidak dapat ditanami. Kondisi ini diperparah dengan kekurangan alsintan handtraktor, sehingga proses olah lahan dan tanam harus dilakukan secara bertahap.

Wilayah BPP Batu Marta 1 (Kecamatan Baturaja Timur dan Lubuk Raja) menghadapi kendala utama berupa pergeseran jadwal tanam akibat faktor alam. Mundurnya musim tanam rendengan menyebabkan keterlambatan panen dan berdampak pada tertundanya musim tanam berikutnya. Selain itu, keterbatasan alsintan, kekurangan tenaga kerja, serta peralihan petani ke komoditas jagung turut memengaruhi rendahnya realisasi LTT padi. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar petani di wilayah tersebut menjadikan usaha perkebunan karet sebagai sumber pendapatan utama.

Di wilayah BPP Belatung, faktor cuaca pada Bulan November–Desember menyebabkan jadwal tanam mundur hingga Januari–Februari, sehingga berdampak pada mundurnya panen dan terganggunya pola tanam berikutnya. Selain itu, di Desa Banuayu, terputusnya akses menuju lahan sawah menyebabkan sebagian petani tidak melakukan penanaman. Keterbatasan tenaga kerja dan alsintan di lahan rawa juga menyebabkan waktu tanam tidak dapat dilakukan secara tepat.

Sementara itu, wilayah BPP Kedaton menghadapi permasalahan berupa tidak berfungsinya beberapa saluran irigasi sekunder, kekurangan pompa air saat musim kemarau, serta genangan air berlebih saat musim hujan. Larangan pembakaran lahan menyulitkan petani dalam membersihkan lahan rawa, yang diperparah dengan kondisi tingkat keasaman tanah yang masih tinggi dan ketebalan gambut yang cukup dalam. Di wilayah ini, usaha tani padi juga bukan merupakan sumber pendapatan utama petani.

Adapun di wilayah BPP Karang Endah, mayoritas petani memilih menanam jagung dibandingkan padi. Penanaman padi umumnya dilakukan dengan menunggu curah hujan yang stabil, sehingga realisasi LTT padi sangat bergantung pada kondisi iklim.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rendahnya realisasi LTT padi di Kabupaten OKU Tahun 2025 merupakan akumulasi dari berbagai kendala yang saling berkaitan.

Faktor alam dan infrastruktur irigasi menjadi hambatan utama yang berdampak langsung pada keterlambatan tanam dan berkurangnya luas tanam. Keterbatasan alsintan dan tenaga kerja memperparah kondisi tersebut, terutama di wilayah dengan intensitas tanam yang tinggi.

Di sisi lain, faktor sosial ekonomi petani berperan signifikan dalam menentukan minat dan keputusan petani untuk menanam padi. Peralihan komoditas ke jagung, dominasi usaha perkebunan karet sebagai sumber pendapatan utama, serta tingginya biaya produksi menyebabkan kegiatan tanam padi kurang diminati. Kombinasi faktor-faktor tersebut secara keseluruhan berdampak pada rendahnya intensitas tanam, keterlambatan jadwal tanam, dan belum optimalnya pencapaian target LTT padi di Kabupaten OKU.

5.1.2 KABUPATEN LAHAT

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 645/Kpts/OT.050/M/11/2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Swasembada Pangan Provinsi Sumatera Selatan, dan berdasarkan Kepmentan Nomor 808/Kpts./KP.250/09/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 Tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota Pada Kegiatan Swasembada Pangan telah ditetapkan target luas tanam LTT Reguler di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 sebesar 1.006.112 hektar. Penetapan target ini merupakan bagian dari upaya percepatan pencapaian swasembada pangan nasional, khususnya komoditas padi sebagai bahan pangan pokok masyarakat Indonesia.

Dalam rangka mendukung target nasional swasembada pangan, Menteri Pertanian membentuk tim Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota Satuan Tugas Swasembada Pangan. Salah satu wilayah pendampingan dimaksud adalah Kabupaten Lahat, dengan target luas tanam padi reguler pada tahun 2025 sebesar 24.481 hektar dan Indeks Pertanaman (IP) 200.

Penetapan target tanam dengan IP 200 Kabupaten Lahat menegaskan bahwa lahan pertanian senantiasa didorong untuk dapat ditanami padi dua kali dalam setahun. Dengan demikian target 24.481 ha tidak semata-mata ditentukan oleh luas baku lahan yang ada, tetapi juga sangat bergantung pada kemampuan meningkatkan intensitas tanam melalui pengaturan pola tanam yang tepat, ketersediaan air yang mencukupi melalui dukungan sarana dan prasarana pertanian dan peningkatan kapasitas petani melalui pendampingan teknologi budidaya, percepatan tanam serempak, serta optimalisasi pemanfaatan alsintan dimana merupakan faktor penting dalam rangka mempercepat realisasi LTT yang dilakukan oleh tim swasembada pangan, penyuluh, dinas pertanian. Upaya kolaboratif lintas lembaga ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendorong terwujudnya swasembada pangan melalui peningkatan produktivitas dan kontinuitas penanaman padi di Kabupaten Lahat.

Berdasarkan hasil pemantauan hingga bulan Desember 2025, capaian Luas Tambah Tanam (LTT) reguler Kabupaten Lahat sebesar 18.567 hektar, atau baru 75,84% dari target yang ditetapkan dalam Kepmentan. Angka ini menunjukkan bahwa secara kumulatif, realisasi LTT masih berada di bawah dari target tahunan yang telah direncanakan (Tabel 1)

Tabel 8. Realisasi Luas Tambah Tanam Padi Kab. Lahat S.d Desember 2025

✚ Tabel 8. Realisasi Luas Tambah Tanam Padi Kab. Lahat S.d Desember 2025

No.	Kecamatan	LBS (Ha)	Realisasi LTT (Ha)
1.	Merapi Timur	748	447
2.	Merapi Barat	202	180
3.	Merapi Selatan	375	451
4.	Lahat	148	225
5.	Lahat Selatan	427	479
6.	Gumay Talang	31	83
7.	Pseksu	49	14
8.	Pulau Pinang	162	366
9.	Gumay Ulu	90	224
10.	Pagar Gunung	716	1.280
11.	Tanjung Tebat	1.112	1.573
12.	Kota Agung	1.327	1.502
13.	Mulak Ulu	814	430
14.	Mulak Sebingkai	428	560
15.	Tanjung Sakti Pumu	829	653
16.	Tanjung Sakti Pumi	804	680
17.	Pajar Bulan	595	1.570
18.	Suka Merindu	691	1.656
19.	Jarai	1.224	2.569
20.	Muara Payang	183	986
21.	Kikim Barat	85	100
22.	Kikim Tengah	235	269
23.	Kikim Selatan	1.258	1.857
24.	Kikim Timur	118	413
Total		12.652	18.567

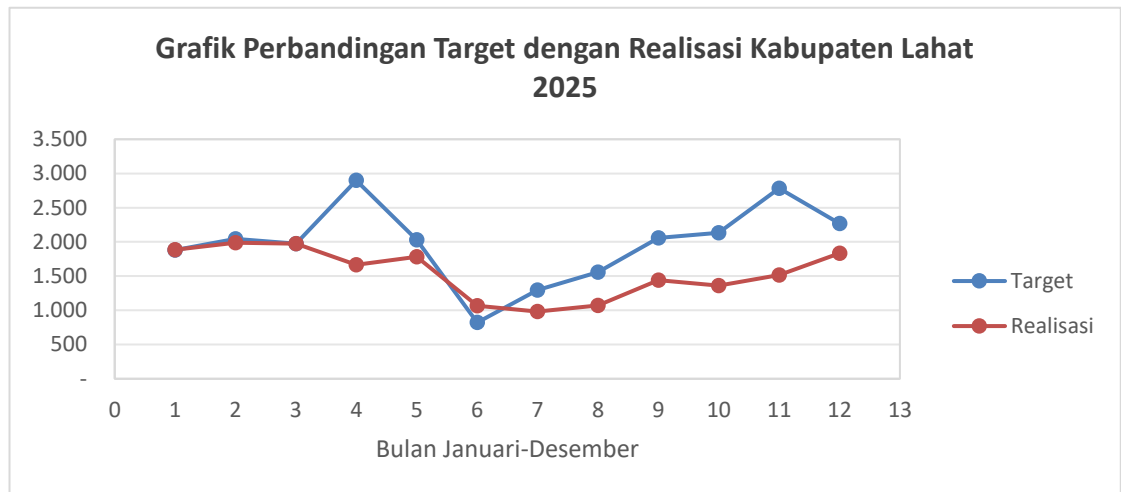
Sumber: data sekunder 2025

Jika melihat tabel 2, terlihat bahwa capaian realisasi tanam di Kabupaten Lahat mencapai 18.567 hektar, melampaui luas baku sawah (LBS) sebesar 12.652 hektar, yang menunjukkan peningkatan intensitas tanam dan efektivitas percepatan tanam di berbagai kecamatan. Beberapa kecamatan yang menonjol dengan realisasi jauh di atas LBS adalah Pajar Bulan (595 ha menjadi 1.570 ha), Suka Merindu (691 ha menjadi 1.656 ha), Jarai (1.224 ha menjadi 2.569 ha), serta Kikim Selatan (1.258 ha menjadi 1.857 ha), yang mengindikasikan optimalisasi lahan serta peningkatan frekuensi tanam. Selain itu, kecamatan seperti Pagar Gunung, Tanjung Tebat, dan Kota Agung juga menunjukkan capaian yang konsisten tinggi, sehingga berkontribusi signifikan terhadap total realisasi kabupaten. Sebaliknya, beberapa wilayah seperti Pseksu dan Merapi Timur masih berada di bawah potensi LBS, sehingga memerlukan penguatan pendampingan dan pemenuhan input. Secara

keseluruhan, data ini menegaskan

bahwa sebagian besar wilayah telah mampu meningkatkan IP menuju target IP 200, sekaligus memberi gambaran kecamatan prioritas yang perlu diperkuat untuk menjaga konsistensi capaian tanam ke depan.

Apabila ditinjau lebih jauh dengan membandingkan target LTT bulanan per Kecamatan yang ditunjukkan pada grafik 1, maka dapat dilihat:



Gambar 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kabupaten Lahat 2025

Dari Grafik perbandingan target dan realisasi Kabupaten Lahat tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian tanam pada sebagian besar bulan masih berada sedikit di bawah target yang ditetapkan, meskipun terdapat beberapa periode di mana tren realisasi mendekati atau hampir menyamai target, seperti pada bulan Maret hingga April. Penurunan signifikan terjadi pada bulan Juni, baik pada target maupun realisasi, yang dipengaruhi oleh faktor musim kopi dan keterbatasan sumber daya produksi. Setelah itu, realisasi berangsur meningkat secara stabil, namun tetap berada di bawah garis target hingga Desember, menandakan perlunya penguatan percepatan tanam, penyediaan input tepat waktu, dan koordinasi lintas wilayah agar momentum peningkatan LTT dapat terus dijaga. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan perlunya strategi lanjutan untuk mendekatkan realisasi bulanan dengan target menuju pencapaian LTT tahunan secara optimal. Beberapa faktor utama yang menjadi **kendala** belum optimalnya capaian LTT terhadap target tahunan antara lain adalah:

1. Saluran Irigasi banyak yang rusak dan belum diperbaiki akibat bencana alam dan alih fungsi lahan padi ke kelapa sawit di wilayah Kikim Barat. Irigasi rusak terjadi di wilayah:
 - a. Kecamatan Mulak Ulu 512 ha (Desa Geramat 101 ha, Desa Pengentaan 46 ha, Desa Datar 48 ha, Desa Pandan Arang 87 ha, Desa Keban Agung 67 ha, Desa Tanjung Kurung 55 ha, Desa Nanjungan 108 ha); dengan kondisi pintu air rusak berat dan saluran rusak sepanjang 300 m, dan kondisi bendungan rusak.

- b. Kec. Pulau Pinang 144 ha (Desa Pagar Batu 18 ha, Desa Kuba 60 ha, Desa Jati 45 ha, Desa Lubuk Sepang 21 ha), dengan kondisi pintu air tertutup material banjir dan saluran sebagian rusak sehingga air tidak naik ke lokasi sawah.
 - c. Kecamatan Kikim Selatan 311 ha (Desa Pagar Jati 9 ha, Desa Tanjung Baringin 96 ha, Desa Sirah Pulau 30 ha, Desa Jaga Baya 25 ha, Desa Penandingan 54 ha, Desa Sukajadi 27 ha, Desa Lubuk Nambulan 50 ha, Desa Gunung Karto 20 ha);
 - d. Kecamatan Pajar Bulan 271 ha (Desa Ulak Bandung 62 ha, Desa Pulau Luas 53 ha, Desa Gelung Sakti 65 ha, Desa Sukabumi 36 ha, Desa Bantunan 38 ha, Desa Tongkok 17 ha) dengan kondisi kerusakan bendungan dan saluran akibat banjir tahun 2023.
2. Indeks Pertanaman di beberapa daerah tadah hujan masih IP 100. dan beberapa wilayah saat ini kondisi kering, belum turun hujan.
 3. Posisi saat ini di beberapa wilayah sedang dilakukan perbaikan irigasi, sehingga penanaman menjadi terganggu dan belum bisa dilakukan. Perbaikan irigasi ini mengakibatkan tidak bisa dilakukan penanaman sampai pengerjaan irigasi selesai. Irigasi rusak mengakibatkan kondisi air kurang sehingga air tidak sampai ke lahan sawah. Jadwal tanam petani juga terganggu karena petani harus menunggu hujan untuk melakukan pertanaman.
 4. Bagi masyarakat di Kabupaten Lahat, kopi adalah komoditas yang menjanjikan, disamping harga kopi yang sedang naik. Saat musim kopi, hampir seluruh tenaga kerja keluarga tercurah untuk panen, pengolahan dan penjualan kopi sehingga penanaman padi bergeser bulan dari waktu yang seharusnya tanam untuk beberapa Kecamatan (Kecamatan Gumay Talang, Jarai, Kikim Selatan, Kikim Timur, Merapi Barat, Mulak Sebingkai, Mulak Ulu).

Rencana Tindak Lanjut

1. Sedang direncanakan dan sedang dilaksanakan perbaikan Jaringan Irigasi baik bersumber dana dari APBD maupun APBN pada tahun 2025.
2. Menunggu dropping benih tambahan.
3. Monitoring perkembangan kesiapan tanam dan upaya percepatan LTT di tingkat Kecamatan/kabupaten, dan lakukan evaluasi serta update realisasi capaian secara kontinu
4. Mengintensifkan koordinasi dengan dinas Pertanian, dan stakeholder terkait agar ketersediaan benih dan saprodi tepat waktu.
5. Perkuat peran penyuluh pertanian Lapangan (PPL) untuk mengawal LTT.
6. Mengingat betapa krusialnya data Luas Baku Sawah (LBS), maka hendaknya *update* data LBS 2025 yang ditetapkan ATR/BPN segera dikeluarkan. Data ini nantinya akan disinkronkan dengan KSA BPS, dan data LTT dari dinas pertanian serta penentuan target LTT Kabupaten Lahat.

Meskipun demikian, capaian LTT sebesar 68,04 % terhadap target yang ditetapkan Pemerintah dan meningkatnya LTT pada Januari-November dibandingkan dengan realisasi LTT Kabupaten Lahat tahun lalu (2024) menunjukkan adanya potensi besar yang masih dapat dioptimalkan. Dengan adanya intervensi program yang tepat, dukungan pendampingan yang intensif, serta perbaikan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan Indeks Pertanaman di Kabupaten Lahat masih sangat memungkinkan untuk terus didorong. Saat ini ada sebagian yang sedang dilakukan perbaikan irigasi, salah satunya yaitu Desa Nantal Kecamatan Lahat Selatan. Hal ini menunjukkan peran serius Pemerintah dalam mendorong peningkatan LTT di Kabupaten Lahat.

Upaya percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) di Kabupaten Lahat sepanjang tahun 2025 dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan oleh BRMP Sumatera Selatan melalui Tim Swasembada Pangan. Proses ini dimulai dari penguatan koordinasi antar *stakeholder*, dilanjutkan dengan pendampingan teknis di lapangan, hingga pelaksanaan strategi percepatan tanam melalui tanam serempak dan pemulihan lahan tidak aktif melalui penguatan sarana prasarana. Seluruh tahapan ini diarahkan untuk mencapai target nasional LTT padi Kabupaten Lahat sebesar 24.481 hektar serta mendukung pencapaian Indeks Pertanaman (IP) 200 dalam rangka mewujudkan Swasembada Pangan 2025.

1. Koordinasi dengan *stake holder* terkait

Koordinasi dilakukan melalui kunjungan resmi ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Lahat, yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas beserta jajarannya. Pada kesempatan tersebut, BRMP Sumsel menyampaikan dua fokus utama Kabupaten Lahat, yaitu LTT Padi Reguler dan Padi Gogo Tumpang Sisip. Dalam pembahasan ini juga dipaparkan kondisi sumber daya lahan di Kabupaten Lahat mulai dari luas baku sawah (12.652 ha), lahan aktif (11.902 ha), hingga lahan tidak aktif (750 ha) yang menjadi dasar penyusunan strategi tanam sepanjang tahun. Pemerintah daerah menegaskan dukungan penuh terhadap program ini, termasuk komitmen mempercepat perbaikan infrastruktur irigasi serta memastikan kesiapan sumber daya pertanian di setiap kecamatan.

2. Konsolidasi dengan Korluh BPP dan Penyuluh Pertanian sebagai Garda Terdepan

Setelah koordinasi tingkat kabupaten, BRMP melanjutkan konsolidasi dengan Koordinator Penyuluh (Korluh) dari seluruh BPP. Pertemuan ini menjadi titik penting untuk menyelaraskan data LBS per kecamatan, menetapkan target LTT bulanan, serta menyiapkan sistem pelaporan harian yang terintegrasi melalui grup *WhatsApp*. Setiap Korluh diminta menyampaikan kondisi masing-masing kecamatan secara lengkap, termasuk kendala aktual seperti kerusakan irigasi, keterlambatan distribusi benih, rendahnya IP pada sawah tadah hujan, hingga pergeseran pola tanam akibat musim panen kopi yang banyak terjadi di wilayah dataran tinggi. Kegiatan ini menjadi titik koordinasi yang

memungkinkan proses percepatan dilakukan secara terukur dan berbasis data lapangan yang akurat dan memetakan masalah yang menjadi kendala percepatan LTT Kabupaten Lahat.

3. Pendampingan Lapang yang Intensif

Tahapan berikutnya adalah pendampingan lapang yang dilakukan secara intensif oleh tim swasembada pangan BRMP Sumatera Selatan. Tim mengunjungi berbagai wilayah seperti Lahat, Lahat Selatan, Jarai, Kikim Timur, Pulau Pinang dan desa yang menjadi pusat produksi padi. Dari hasil pendampingan ditemukan permasalahan utama yang memengaruhi capaian tanam, antara lain saluran irigasi yang rusak akibat banjir dan tanah longsor, alih fungsi lahan yang mengurangi pasokan air, pompa air yang tidak dapat berfungsi optimal, hingga sawah tadah hujan yang belum mendapat curah hujan cukup untuk diolah. Selain itu, proses tanam di beberapa kecamatan tertunda karena sebagian petani sedang fokus panen kopi, sementara keterbatasan alsintan membuat proses olah tanah berjalan bergiliran. Semua temuan ini disusun menjadi justifikasi yang kemudian dilaporkan sebagai dasar penyusunan strategi percepatan pada bulan-bulan berikutnya.

4. Gerakan Tanam Serempak

Untuk mengejar target bulan berjalan dan menutup kesenjangan antara realisasi dan target tahunan, tim swasembada pangan BRMP Sumsel mendorong pelaksanaan gerakan tanam serempak di kecamatan-kecamatan yang capaian tanamnya masih rendah. Tanam serempak ini dilaksanakan bersama penyuluh, petani, perangkat kecamatan, dan unsur TNI/Babinsa sehingga percepatan terjadi secara terkoordinasi. Momentum panen serentak nasional yang diikuti Kabupaten Lahat pada April 2025 juga dimaksimalkan sebagai pengungkit percepatan tanam berikutnya, khususnya pada kecamatan yang memiliki peluang percepatan seperti Jarai, Pagar Gunung, dan Tanjung Tebat. Selain itu, BRMP juga memastikan percepatan distribusi benih tambahan 1.000 hektar, optimalisasi alsintan, serta penyusunan ulang rencana tanam Agustus–Desember berbasis ketersediaan air dan hasil evaluasi bulanan.

Seluruh rangkaian upaya yang dilakukan mulai dari koordinasi antar *stake holder* terkait, konsolidasi penyuluh, pendampingan teknis, pemetaan ulang LBS, hingga pelaksanaan tanam serempak dilakukan untuk memastikan upaya Kabupaten Lahat dalam memenuhi target nasional LTT 24.481 ha. Dengan dukungan penuh dari dinas terkait, peran aktif penyuluh pertanian lapangan, serta keterlibatan pemerintah kecamatan dan kelompok tani, percepatan LTT di Kabupaten Lahat pada tahun 2025 terus menunjukkan perkembangan menuju arah yang positif dalam rangka memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendukung agenda Swasembada Pangan Nasional.

5.1.3. KABUPATEN MUSI RAWAS

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 808/Kpts./KP.250/A/09/2025 tentang Penanggungjawab Provinsi dan Kabupaten /Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan, telah ditetapkan target luas tanam padi di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 sebesar 76.524 hektar. Penetapan target ini merupakan bagian dari upaya percepatan pencapaian swasembada pangan nasional, khususnya komoditas padi sebagai bahan pangan pokok masyarakat Indonesia.

Dalam rangka mendukung pencapaian target tersebut, Kepala Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan ditetapkan sebagai salah satu anggota Satuan Tugas Swasembada Pangan serta ditugaskan sebagai Penanggung Jawab Pendamping pada beberapa wilayah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Salah satu wilayah pendampingan dimaksud adalah Kabupaten Musi Rawas, dengan target luas tanam padi reguler pada tahun 2025 sebesar **28.920 hektar**.

Penetapan target dengan IP 200 menunjukkan bahwa lahan pertanian di Kabupaten Musi Rawas diharapkan mampu dimanfaatkan untuk penanaman padi sebanyak dua kali hingga tiga dalam satu tahun. Dengan demikian, pencapaian target 28.920 hektar tidak hanya bergantung pada luas baku lahan yang tersedia, namun juga pada keberhasilan peningkatan intensitas tanam melalui pengelolaan pola tanam yang optimal, ketersediaan air yang memadai, dan dukungan sarana prasarana pertanian yang memadai.

Berdasarkan hasil pemantauan realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Reguler di Kabupaten Musi Rawas di Tahun 2025 dengan total realisasi seluas 29.667 Hektare (102, 58 %). Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan dalam Kepmentan 808/Kpts./KP.250/A/09/2025.

Dengan angka capaian realisasi LTT padi lahan kering diatas memberikan dampak positif terhadap peningkatan potensi produksi padi di Kabupaten. Selain mendukung pencapaian target swasembada pangan di tingkat provinsi, keberhasilan ini juga membuka peluang baru bagi petani dalam memanfaatkan lahan kering sebagai sumber produksi pangan dan peningkatan pendapatan. Perbedaan persentase capaian terhadap target Kepmentan (102,54%) dan terhadap LBS (%) menggambarkan adanya kesenjangan antara target kebijakan dan kondisi riil di lapangan. Target yang ditentukan oleh pemerintah pusat mengandung asumsi bahwa seluruh lahan sawah dapat ditanami dua kali dalam setahun (IP 200), bahkan adanya tambahan perluasan areal tanam ke lahan-lahan potensial lainnya seperti lahan kering yang dapat dikembangkan untuk pertanaman padi.

Tabel 9. Realisasi Luas Tambah Tanam Padi Kab.Musi Rawas s.d Desember 2025

No.	Kecamatan	LBS (Ha)	LBS Aktif	LBS Tidak Aktif	Reals Jan-Des
1	STL Ulu Terawas	2.651	1.852	799	4.738
2	Selangit	18	0	18	-
3	Sumberharta	2.499	2.100	399	5.470
4	Tugumulyo	2.700	2.200	500	5.782
5	Purwodadi	1.522	1.410	112	3.274
6	Muara Beliti	1.462	1.250	212	2.890
8	Jayaloka	11	0	11	13
9	Suka Karya	100	0	100	4
10	Muara Kelingi	341	200	141	621
11	BTS Ulu	140	125	15	171
12	Tuah Negeri	532	200	332	429
13	Muara Lakitan	228	150	78	373
14	Megang Sakti	2.765	2.500	265	5.903
	Jumlah	14.969	11.987	2.982	29.667

Tabel 10. Capaian Luas Tambah Tanam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025

No	Kecamatan	LBS	LBS Aktif	LBS tdk Aktif	Realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) Tahun 2025												Jumlah
					Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	STLU Terawas	2.651	1.852	799	770	896	592	247	65	158	486	439	468	187	65	365	4.738
2	Selangit	18	0	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumberharta	2.499	2.100	399	839	973	490	329	291	181	639	1.015	490	115	13	96	5.470
4	Tugumulyo	2.700	2.200	500	656	596	519	628	490	510	517	520	293	270	359	455	5.782
5	Purwodadi	1.522	1.410	112	202	664	576	212	89	32	174	265	752	287	0,25	22	3.274
6	Muara Beliti	1.462	1.250	212	251	243	400	426	280	191	304	199	77	141	156	222	2.890
7	TP Kepungut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jayaloka	11	0	11	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
9	Suka Karya	100	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
10	Muara Kelingi	341	200	141	106	42	-	11	88	114	1	1	-	20	78	160	621
11	BTS Ulu	140	125	15	9	4	95	8	-	4	23	-	-	10	10	8	171
12	Tuah Negeri	532	200	332	152	53	4	8	68	63	10	2	0,50	3,75	58	7,25	429
13	Muara Lakitan	228	150	78	83	5	-	5	44	75	44	9	6,5	8,50	33	60	373
14	Megang Sakti	2.765	2.500	265	1.025	667	516	451	498	513	620	635	256,75	182,75	271,5	267	5.903
Jumlah		14.969	11.987	2.982	4.104	4.143	3.192	2.325	1.913	1.841	2.788	3.084	2.343,2	1.224,2	1.046,25	1.663,25	29.667

A. RAPAT KOORDINASI/PERTEMUAN

Untuk menciptakan sinergi antara BPRMP Sumsel dan Dinas Pertanian dilakukan Koordinasi Lapang Pencapaian LTT. BRMP Sumsel melakukan koordinasi strategi pencapaian target LTT Padi Reguler.

- Untuk Percepatan Swasembada Pangan, BPRMP pada bulan Juni 2025 , telah dilakukan pendampingan terhadap kegiatan LTT Padi Reguler di Kabupaten Musi Rawas melalui upaya koordinasi dengan Dinas Pertanian setempat serta penyuluh pertanian dan juga monitoring lapang. Kegiatan diawali dengan melakukan koordinasi di Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas yang disambut oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. Musi Rawas Dr. Ir. Hayatun Nofrida, M.P dan Kabid Tanaman jajarannya, perwakilan dari bidang PSP. Pada pertemuan beliau menyampaikan Kabupaten Musi Rawas dengan LBS 14.965 ha, dengan IP 100 dan IP 200.
- Hasil koordinasi bersama dengan Dinas Pertanian dan penyuluh pertanian Kabupaten Musi Rawas menyimpulkan bahwa sebagian besar dari Luas Baku Sawah (LBS) seluas 14.965 hektar dengan target tahun 2025 seluas 44.940 hektar. Pada bulan Juni 2025 target pusat 5.063 hektar, dan target kesanggupan Kabupaten 1.800 dengan realisasi Juni 1.841 hektar. Dilihat dari realisasi bulan Juni ini target pusat realisasi baru mencapai 36,36% dari target 5.063 hektare, dan target Kabupaten (PJ) sudah mencapai 102,28% dari target 1.800 hektare. Pencapaian target yang ditetapkan dari pusat belum tercapai hal ini disebabkan karena target terlalu tinggi dan juga adanya kerusakan saluran irigasi DI Kelingi Tugu Mulyoyang berlokasi di Desa Sukorejo Kecamatan STLU Terawas . kerusakan tersebut berdampak pada lahan sawah seluas 417 hektare di 3 desa yang berakibat jaringan irigasi adalah sbb;
 1. Desa Sukorejo Kecamatan STLU Terawas seluas 200 a (8 Kelompok)
 2. Desa Srimulyo kecamatan STLU Terawas seluas 142 a (6 kelompok)
 3. Desa Sukakarya kecamatan STLU Terawas seluas 76 a (3 kelompok)Mengalami keterlambatan tanam menindak lanjuti upaya yang sudah dilakukan :
 - a. Melakukan pompanisasi di areal yang memiliki sumber air cadangan
 - b. Melaporkan kerusakan ke BBWS VIII sesuai dengan surat Nomor 520.3/813/DTPHNAK-PSP/202520 Mei 2025.

Musim kemarau yang akan dimulai pada bulan Juli 2025 berdampak pada ketersediaan air untuk pertanian, beberapa lahan tadah hujan tidak bisa ditanam karena tidak ada air dan tidak bisa juga dilakukan pompanisasi karena sumber air tidak ada. Menanggapi hal tersebut, BPRMP siap untuk mendukung dalam upaya pencapaian swasembada pangan. Di akhir Mei sampai dengan awal Juni curah hujan hanya 20 mm dengan 5 hari hujan. Dampaknya pengolahan lahan mundur dan LTT di

15 hari pertama bulan Juni hanya sekitar 800 Hektare. Pada pertengahan bulan Juni, hujan mulai stabil sehingga pengolahan lahan bisa cepat dilaksanakan.

Perbedaan persentase capaian terhadap target Kepmentan (97,5%) dan terhadap LBS (%) menggambarkan adanya kesenjangan antara target kebijakan dan kondisi riil di lapangan. Target yang ditentukan oleh pemerintah pusat mengandung asumsi bahwa seluruh lahan sawah dapat ditanami dua kali dalam setahun (IP 200), bahkan adanya tambahan perluasan areal tanam ke lahan-lahan potensial lainnya seperti lahan kering yang dapat dikembangkan untuk pertanaman padi.

Permasalahan Pertanian di Kabupaten Musi Rawas :

Beberapa faktor utama yang diduga menjadi penyebab belum optimalnya capaian LTT terhadap target tahunan antara lain adalah:

- Keterbatasan ketersediaan air irigasi pada musim kemarau
- Kerusakan atau belum optimalnya fungsi jaringan irigasi
- Ketergantungan petani terhadap curah hujan
- Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah kondisi sosial dan kelembagaan petani
- Kurangnya minat pemuda untuk Bertani
- Sebagian petani khawatir dengan serangan OPT sehingga memilih untuk tidak melakukan penanaman pada musim tanam kedua atau menunda waktu tanam hingga kondisi dianggap lebih aman
- Banyak lahan baru selesai panen tidak segera melakukan pengolahan lahan/mengistirahatkan lahan
- Kekurangan alsintan untuk mengejar olah lahan
- Curah hujan tidak stabil sehingga menghambat pengolahan lahan

Tindaklanjut

Pengoptimalan target swasembada pangan di Kabupaten Musi Rawas untuk terus meningkatkan pendampingan dengan intervensi program yang tepat, dukungan pendampingan yang intensif, serta perbaikan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan Indeks Pertanaman. Peran BRMP Sumatera Selatan sebagai Penanggung Jawab Pendamping di Kabupaten Musi Rawas menjadi sangat strategis dalam mendorong percepatan capaian target tanam. ditingkatkan meliputi pendampingan teknis budidaya, penerapan inovasi teknologi pertanian, penggunaan varietas unggul berumur genjah, optimalisasi pemanfaatan sumber daya air, serta penguatan kapasitas petani dan kelembagaan kelompok tani.

Bentuk dukungan yang dilakukan dan perlu terus Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BRMP Sumatera Selatan, penyuluh pertanian, serta kelompok tani, diharapkan upaya peningkatan luas tambah tanam di Kabupaten Musi Rawas dapat terus diakselerasi. Kontribusi bulog dalam pembelian hasil produksi serta pembayaran tepat waktu.

Hal ini tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian target swasembada pangan di tingkat provinsi, namun juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi, ketahanan pangan daerah, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

5.1.4. KABUPATEN OKU SELATAN

Kebijakan dan kegiatan terobosan peningkatan luas tambah tanam (LTT) akan terus diintervensikan dalam sistem produksi pangan secara nasional. Sebagai upaya untuk konsistensi intervensi LTT dalam sistem produksi tersebut diperkuat dengan kebijakan pengawalan LTT. Selama lebih dari 3 tahun, pengawalan LTT oleh jajaran Kementerian Pertanian dan bekerjasama dengan TNI AD telah mewujudkan dampak terhadap gerakan tanam dan serapan produksi pangan petani. Pelaporan harian yang dilakukan oleh Tim Pokja UPSUS Pajale menjadi instrumen penting dalam upaya khusus percepatan peningkatan produksi dan pencapaian swasembada.

Dalam rangka mengakselerasi Luas Tambah Tanam di Kabupaten OKU Selatan untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional, maka dilakukan kegiatan Rapat Koordinasi dan Validasi Data Luas Tambah Tanam. Rapat koordinasi dan validasi ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten OKU Selatan.

Hadir pada Rapat Koordinasi ini Kepada Dinas Pertanian OKU Selatan, Sekretaris Dinas Pertanian OKU Selatan, Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian OKU Selatan, 7 petugas penginput data yang mewakili 19 kecamatan, dan Koordinator penyuluh dari kecamatan Mekakau Ilir, Banding Agung, Warkuk Ranau Selatan, BPR Ranau Tengah, Buay Pemaca, Simpang, Buana Pemaca, Muaradua, Buay Rawan, Buay Sandang Aji, Tiga Dihaji, Buay Runjung, Runjung Agung, Kisam Tinggi, Muaradua Kisam, Kisam Ilir, Pulau Beringin, SindangDanau, dan Sungai Are.

Pada Rapat Koordinasi dan Validasi Data Luas Tambah Tanam kabupaten OKU Selatan ini, dilakukan beberapa validasi terkait data yang disampaikan ke BRMP Sumsel, meliputi Data LBS, data target LTT untuk bulan Oktober, Nopember, dan Desember 2025, dan permasalahan atau kondisi yang terjadi di tiap kecamatan sehubungan dengan target LTT pada bulan Juli 2025 per kecamatan. Beberapa data yang dikumpulkan pada rapat tersebut diantaranya

Tabel 11. Luas Lahan Baku Sawah Kabupaten OKU Selatan (2024)

No	Kecamatan	Luas Lahan Sawah		Jumlah
		Irigasi	Tadah Hujan	
1	Mekakau Ilir	380,72	0	380,72
2	Banding Agung	318,01	6	324,01

3	Warkuk Ranau Selatan	291,17	35	326,17
4	BPR Ranau Tengah	749,60	3	752,60
5	Buay Pemaca	910,15	84	994,15
6	Simpang	0	520,92	520,92
7	Buana Pemaca	41,62	169	210,62
8	Muaradua	205,00	389,93	594,93
9	Buay Rawan	194,50	61,41	255,91
10	Buay Sandang Aji	202,71	217	419,71
11	Tiga Dihaji	157,81	54	211,81
12	Buay Runjung	595,81	0	595,25
13	Runjung Agung	133,58	0	133,58
14	Kisam Tinggi	245,13	0	245,13
15	Muaradua Kisam	1.062,85	0	1.062,85
16	Kisam Ilir	275,13	0	275,13
17	Pulau Beringin	835,90	0	835,90
18	Sindang Danau	554,48	0	554,48
19	Sungai Are	127,66	0	127,66
	Jumlah	7.281,27	1.540,26	8.821,53

Tabel 12. Prediksi LTT Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember Kab. OKUS

No	Kecamatan	LTT Bulan (2025)				
		Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Mekakau Ilir	50	138	140	60	50
2	Banding Agung	0	0	54	40	0
3	Warkuk Ranau Selatan	0	10	52	41	56
4	BPR Ranau Tengah	85	50	40	70	80
5	Buay Pemaca	0	15	85	316	213
6	Simpang	0	0	0	350	0
7	Buana Pemaca	88	97	0	0	0
8	Muaradua	80	125	320	185	55
9	Buay Rawan	32	0	0	130	189
10	Buay Sandang Aji	0	72	0	0	52
11	Tiga Dihaji	0	9	0	44	35
12	Buay Runjung	52	192	161	140	50
13	Runjung Agung	7	0	0	0	0
14	Kisam Tinggi	0	0	0	0	60
15	Muaradua Kisam	75	108	95	70	72
16	Kisam Ilir	0	50	0	0	0
17	Pulau Beringin	58	215	101	125	74
18	Sindang Danau	0	0	200	93	73
19	Sungai Are	0	22	27	32	7

Tabel 13. Justifikasi capaian LTT Juli-Oktober 2025 Kabupaten OKU Selatan

No	Kecamatan	Justifikasi
1	Mekakau Ilir	Karena Musim panen Kopi sehingga petani belum mengerjakan tanam Padi, sebagian tanaman padi mulai panen, dan kondisi lahan kekurangan air
2	Banding Agung	Karena Musim panen Kopi sehingga petani belum mengerjakan tanam Padi, sebagian lahan padi sedang dipanen, dan kekurangan alsintan
3	Warkuk Ranau Selatan	Belum mengerjakan olah Tanah karena lagi panen kopi, lahan kekeringan, dan terbatasnya tenaga alsintan
4	BPR Ranau Tengah	LBS tidak banyak lagi ditanam padi lagi karena banyak dialih fungsikan ditanam tanaman Hortikultura
No	Kecamatan	Justifikasi
5	Buay Pemaca	Keterbatasan Alsintan sehingga antrian pemakaian Alsintan, ditambah dengan tenaga kerja yang terbatas disebabkan memprioritaskan panen kopi
6	Simpang	Belum ada tanam padi karena musin panen jagung, sebanyak 20 Ha lahan bera disebabkan bendungan rusak, dan kondisi pertanaman padi mulai panen
7	Buana Pemaca	Belum ada tanam padi karena masih panen jagung, ditambah dengan kondisi lahan yang kekeringan
8	Muaradua	Belum panen (lagi bunting susu) karena cuaca menyebabkan mundur jadwal musim tanam
9	Buay Rawan	Musim tanam mundur karena musim kemarau
10	Buay Sandang Aji	Kekeringan
11	Tiga Dihaji	Sebagian dataran tinggi, dan masih musim kemarau, petani masih memprioritaskan pemanenan kopi, dan kondisi lahan yang kurang air, sehingga masih menunggu turun hujan
12	Buay Runjung	Karena banyak yang lagi panen kopi, belum olah tanah sehingga jadwal tanam dimundurkan MT : Agustus, september, dan sebagian irigasi kondisinya rusak
13	Runjung Agung	Masih kekurangan air akibat kemarau sehingga petani menunda tanam padi, dan ada sekitar 35 Ha alih fungsi lahan menjadi perkebunan kopi
14	Kisam Tinggi	Karena lahan tinggi, kondisi lahan kekeringan
15	Muara Kisam	Lagi pengolahan lahan, sebagian lahan belum panen, kondisi sebagian lahan kekeringan disebabkan irigasi rusak, dan sebagian petani sedang panen kopi
16	Kisam Ilir	Masih menunggu padi panen sehingga sawah belum bisa melakukan olah tanah kembali, petani juga masih memprioritaskan panen kopi, dan kondisi lahan yang kekeringan
17	Pulau Beringin	Masih menunggu padi panen sehingga sawah belum bisa melakukan olah tanah kembali, dan kurangnya tenaga kerja sebab memprioritaskan panen kopi
18	Sindang Danau	Karena Musim panen Kopi sehingga petani belum mengerjakan tanam Padi, sebagian tanaman padi sedang dipanen, sebagian kondisi lahan kekeringan, dan sebagian petani masih melakukan pemanenan kopi
19	Sungai Are	Karena Musim panen Kopi sehingga petani belum mengerjakan tanam Padi

Sampai dengan akhir bulan Desember 2025 (Triwulan IV), Luas Tambah Tanam Padi terhitung dari bulan Januari hingga Desember 2025 diperkirakan sebanyak 12.897 hektar. Data LTT tersebut memenuhi target yang ditetapkan pusat untuk LTT di wilayah kabupaten OKU Selatan, yaitu seluas 12.230 hektar. Data LTT per kecamatan di wilayah kabupaten OKU Selatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Data LTT Perkecamatan Di Kabupaten OKU Selatan

No.	Kecamatan	LBS (Ha)	LBS Aktif	LBS Tidak Aktif	Diluar LBS	Standing Crop per bulan November		PERFORMA MT			LTT Nov	LTT Des	Reals LTT Jan-Des25
						Padi	Non Padi	MT I	MT II	MT III			
	OKU Selatan	8.821	8.147	674	-	2.905	-	3.903	3.789	3.886	1.910	1.412	13.052
1	Banding Agung	324	305	19		15		160	237	101	100	4	572
2	Buana Pemaca	228	221	6		-		144	16	102	72	0	246
3	Buay Pemaca	997	859	138		175		877	249	424	137	370	1552
4	BPR Ranau Tengah	785	736	48		234		33	82	326	113	32	757
5	Buay Rawan	266	257	9		129		224	0	255	0	129	384
6	Buay Runjung	617	593	24		498		244	457	453	62	31	1160
7	Buay Sandang Aji	442	406	35		74		47	286	158	45	12	561
8	Kisam Ilir	267	216	51		62		119	180	108	80	63	528
9	Kisam Tinggi	255	231	25		149		86	155	149	106	0	496
10	Mekakau Ilir	379	373	6		130		121	122	130	207	42	501
11	Muara Dua	578	533	45		147		383	128	236	267	5	833
12	Muara Dua Kisam	1.044	1.043	1		471		226	332	554	198	88	1215
13	Pulau Beringin	841	767	74		407		125	379	308	125	133	1066
14	Runjung Agung	126	117	8		2		48	0	277	0	124	449
15	Simpang	522	516	6		144		520	485	56	268	100	1242
16	Sindang Danau	555	457	98		13		139	442	33	0	195	698
17	Sungai Are	127	66	61		12		35	84	3	18	2	144
18	Tiga Dihaji	189	180	10		166		139	17	176	22	2	258
19	Warkuk Ranau Selatan	278	270	9		77		233	138	37	90	80	390

5.1.5. KABUPATEN EMPAT LAWANG

A. RAPAT KOORDINASI/PERTEMUAN

Mengawali kegiatan pendampingan swasembada pangan di Kabupaten Empat Lawang, Kepala BRMP Sumatera Selatan bersama Tim Satgas Swasembada Pangan BRMP Sumatera Selatan melaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 19 Juni 2025 di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang, Bapak Hendra Lezi, S.P. yang didampingi Kepala Bidang Sarana Prasarana, Hadi Hermanto, S.E., Kasubag TU UPT Perbanyak Benih, Yusron Daroji, S.P., M.M., Kepala Bidang P4T dan Penyuluhan, serta Staf Bidang Perkebunan, Ahmad Zaiyadi, S.Pt. Adapun tujuan dari rakoor tersebut dalam rangka pendampingan percepatan pencapaian LTT reguler, padi gogo dan Cetak Sawah Rakyat di Kabupaten Empat Lawang.

Pada tanggal 24 Juli 2025, dilaksanakan koordinasi dan pertemuan dalam rangka validasi data Luas Tambah Tanam (LTT) reguler bulan Juli 2025 di Kabupaten Empat Lawang. Rapat koordinasi dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang, Ibu Yuli Yetti, S.P., M.M. yang didampingi Kepala Bidang TPH, Femi Besok, SP, MM; Kasubag TU UPT Perbanyak Benih, Yusron Daroji, SP, MM., Penanggung Jawab Swasembada Pangan Kabupaten Empat Lawang dan Tim, serta Koordinator BPP dan Penyulu Lapangan dari 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang.

Dalam pertemuan disampaikan target dan realisasi LTT s.d. tanggal 22 Juli 2025, dilanjutkan dengan membahas strategi percepatan LTT dan diminta kesanggupan untuk menambah luas tanam setiap

Kecamatan sampai dengan akhir Juli 2025. Seluruh peserta menyatakan komitmennya untuk menambah luas tanam hingga akhir Juli 2025. Mereka juga menyampaikan sejumlah kendala lapangan yang menghambat percepatan LTT, antara lain keterbatasan alat pengolah tanah, kerusakan jaringan irigasi, serta kekeringan di beberapa wilayah sentra produksi.

Koordinasi juga dilakukan dengan bidang Perkebunan dan Sarana Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang yang diwakilkan oleh Staf, Ahmad Zaiyadi, S.Pt, menyampaikan bahwa untuk padi gogo di Kabupaten Empat Lawang sudah tertanam 100% yaitu 60 ha. Bantuan herbisida sudah disalurkan ke kelompok tani pada bulan Mei 2025, sementara bantuan pestisida belum salur. Sementara Bidang Sarana Prasarana diwakilkan oleh Staf, Makin, S.Pt., menyampaikan kondisi topografi Kabupaten Empat Lawang berupa perbukitan sehingga untuk kegiatan Cetak Sawah Rakyat di Kabupaten Empat Lawang seluas 236 ha berupa spot-spot meliputi 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Pinang, Pasemah Air Keruh, Pendopo, Pendopo Barat, Saling, Sikap Dalam, dan Ulu Musi. Saat ini progres kegiatan cetak sawah masih dalam tahap penyelesaian SID.

B. PENDAMPINGAN LUAS TAMBAH TANAM (LTT) REGULER

Luas Baku Sawah Kabupaten Empat Lawang tahun 2025 seluas 9.432 Ha dengan rincian di setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 15. Rincian LBS di Kecamatan Kab. Empat Lawang Tahun 2025 (Hektar)

No	Kecamatan	LBS	LBS Aktif	LBS Tidak Aktif
1	Muara Pinang	884	882	2
2	Lintang Kanan	2.003	1.965	38
3	Pendopo Induk	1.888	1.843	45
4	Pendopo Barat	188	185	3
5	Pasemah Air Keruh	2.365	1.886	479
6	Ulu Musi	699	660	39
7	Sikap Dalam	329	310	19
8	Talang Padang	150	149	1
9	Tebing Tinggi	726	636	90
10	Saling	201	191	10
Total		9.432	8.707	725

Pelaksanaan kegiatan pendampingan luas tambah tanam (LTT) Reguler Padi di Kabupaten Empat Lawang dilaksanakan di 10 (sepuluh) Kecamatan, yakni Kecamatan Muara Pinang, Lintang Kanan, Pendopo Induk, Pendopo Barat, Pasemah Air Keruh, Ulu Musi, Sikap Dalam, Talang Padang, Tebing Tinggi, dan Saling. Dari target 19.000 hektar LTT Reguler Padi pada Tahun 2025, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terealisasi seluas 19.405,2 hektar (102%). (Tabel terlampir)

Capaian tersebut lebih besar 402,2 hektar apabila dibandingkan dengan target LTT tahun 2025 yaitu 19.000 hektar. Namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Kendala/Permasalahan Teknis

- a. Ketersediaan alsintan olah lahan (traktor roda 2) belum mampu meng-*cover* keseluruhan luas baku sawah, traktor roda 2 yang tersedia saat ini harus dilakukan pergiliran pakai oleh petani yang ingin mengolah lahan, sehingga menyebabkan jadwal tanam mundur dan luasan tambah tanam padi menjadi kecil.
- b. Terdapat jaringan irigasi sudah tua, rusak, dan kurang terawat. Hal ini menyebabkan aliran air tidak optimal, terutama di lahan pertanian yang jauh dari sumber air:
 - Kec. Muara Pinang: adanya kerusakan saluran irigasi sepanjang 1,42 km dengan lebar 1 m yang sumber air irigasi berasal dari Sungai Air Litap berdampak pada pengairan sawah seluas 80 hektar di Desa Sapa Panjang dan Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang;
 - Kec. Saling: Adanya kerusakan irigasi primer di Desa Tanjung Ning Jaya sepanjang 2-3 km yang menyebabkan berkurangnya debit air untuk pengairan sawah seluas 100 hektar, dan rusaknya irigasi sekunder sepanjang 30 meter tepatnya Di Desa Tanjung Ning Lama yang mana sebagai sumber air untuk pengairan sawah seluas 30 ha.
 - Kec. Sikap Dalam: Patahnya saluran irigasi primer menyebabkan sawah tidak bisa ditanami diantaranya, daerah Irigasi Rena Ubar sepanjang 25 meter luas sawah yang terdampak seluas 120 ha, Irigasi Nuruang Desa Karang Dapo Lama sepanjang 30 meter luas yang terdampak seluas 70 hektar, Irigasi Air Lung sepanjang 30 meter luas yang terdampak seluas 40 hektar dan Irigasi Air Kawung Desa Karang Anyar sepanjang 30 meter luas sawah yang terdampak seluas 30 hektar.
 - Kec. Talang Padang: Daerah irigasi Air selepah, adanya kerusakan pada pangkal sumber air patah sepanjang 30 meter yang menyebabkan sekitar 80 hektar sawah tidak bisa dialiri air dan hampir 2 tahun telah alih fungsi lahan ke perkebunan kopi dan sawit.
 - Kec. Pasemah Air Keruh: Rusaknya saluran irigasi di Desa Air Mayan hataran padang paku menyebabkan berdampak ke pengairan sawah seluas 125 hektar.
 - Kec. Pendopo: Kerusakan dinding saluran irigasi tersier di Desa Lubuk Layang yang bersumber dari Sungai Air Nibung sepanjang 500 m dengan lebar 50 cm mengakibatkan debit air kecil yang mengalir sawah seluas 70 hektar.
 - Kec. Pendopo Barat: Terjadi kekeringan pada sawah dengan luasan 5 Hektar (umur tanaman satu bulan), sehingga diharapkan adanya bantuan pompa air atau irigasi perpipaan pada sawah tersebut.

- Kec. Tebing Tinggi: Rusaknya saluran irigasi di beberapa desa di Kecamatan Tebing Tinggi menyebabkan 81,02 hektar sawah berdampak ke sistem pengairan sawah meliputi: Desa Batu Pance seluas 56,03 ha, Desa Aurgading seluas 6,02 ha, Desa Terusan Baru seluas 3,03 ha, dan Desa Terusan Lama seluas 21,04 ha.
- Kec. Ulu Musi: Dinding saluran irigasi rusak serta jaringan irigasinya belum memadai.

2. Kendala/Permasalahan Sosial Budaya

- Kondisi air atau irigasi yang pembagiannya tidak merata antara petani hulu dan hilir sehingga sering memicu konflik sosial antar petani.
- Petani lebih mengutamakan komoditas yang lebih menguntungkan seperti kopi, Karet, dan Kopi.
- Alih fungsi lahan ke perkebunan kopi dan sawit.

3. Kendala/Permasalahan lainnya

- Jadwal tanam yang tidak serentak menyebabkan umur antara tanaman padi petani yang satu dengan tanaman padi lain tidak sama, sehingga apabila tanaman padi terserang hama endemik seperti tikus dan wereng, maka tidak dapat dilakukan pengendalian secara serentak, hal ini akan berdampak pada penurunan hasil produksi petani di Kab. Empat Lawang.
- Perubahan iklim mengganggu pola hujan dan memperparah kekeringan atau banjir, sehingga membuat pengelolaan irigasi menjadi semakin sulit dan tidak terduga.
- Sebagian besar petani mengandalkan irigasi tadah hujan. Kondisi ini membuat produksi pertanian sangat rentan terhadap perubahan musim dan cuaca.

5.1.6. KABUPATEN PALI

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 645/Kpts/OT.050/M/11/2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Swasembada Pangan Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan target luas tanam padi di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 sebesar **76.524 hektar**. Penetapan target ini merupakan bagian dari upaya percepatan pencapaian swasembada pangan nasional, khususnya komoditas padi sebagai bahan pangan pokok masyarakat Indonesia.

Dalam rangka mendukung pencapaian target tersebut, Kepala Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan ditetapkan sebagai salah satu anggota Satuan Tugas Swasembada Pangan serta ditugaskan sebagai **Penanggung Jawab Pendamping** pada beberapa wilayah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Salah satu wilayah pendampingan dimaksud adalah **Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)**, dengan target luas tanam padi reguler pada tahun 2025 sebesar **12.840 hektar** dan **Indeks Pertanaman (IP) 200**.

Penetapan target dengan IP 200 menunjukkan bahwa lahan pertanian di Kabupaten PALI diharapkan mampu dimanfaatkan untuk penanaman padi sebanyak dua kali dalam satu tahun. Dengan demikian, pencapaian target 12.840 hektar tidak hanya bergantung pada luas baku lahan yang tersedia, namun juga pada keberhasilan peningkatan intensitas tanam melalui pengelolaan pola tanam yang optimal, ketersediaan air yang memadai, dan dukungan sarana prasarana pertanian yang memadai.

Berdasarkan hasil pemantauan hingga bulan Desember 2025, capaian Luas Tambah Tanam (LTT) reguler Kabupaten PALI tercatat sebesar 4.856,75 hektar, atau setara dengan 37,83% dari target yang ditetapkan melalui Kepmentan. Angka ini menunjukkan bahwa secara kumulatif, realisasi LTT masih berada di bawah dari target tahunan yang telah direncanakan (Tabel.16)

⊕ Tabel 16. Realisasi Luas Tambah Tanam Padi Kab. Pali S.d Desember 2025

No.	Kecamatan	LBS (Ha)	Realisasi (Ha)
1.	Talang Ubi	364	574,50
2.	Tanah Abang	3.364	2.216,25
3.	Abab	1.905	1.304,00
4.	Penukal	142	420,00
5.	Penukal Utara	624	342,00
Total		6.399	4.856,75

Apabila ditinjau lebih lanjut dengan membandingkan antara capaian LTT dan Luas Baku Sawah (LBS) Kabupaten PALI yang diketahui sebesar 6.399 hektar, maka realisasi LTT reguler hingga Desember 2025 telah mencapai sekitar 75,90% dari total LBS. Hal ini mengindikasikan bahwa dari sisi pemanfaatan lahan sawah yang tersedia, kegiatan budidaya padi di Kabupaten PALI telah berjalan cukup optimal. Sebagian besar lahan sawah yang ada telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanaman padi, baik pada musim tanam pertama maupun sebagian musim tanam berikutnya.

Perbedaan persentase capaian terhadap target Kepmentan (37,83%) dan terhadap LBS (75,90%) menggambarkan adanya kesenjangan antara target kebijakan dan kondisi riil di lapangan. Target yang ditentukan oleh pemerintah pusat mengandung asumsi bahwa seluruh lahan sawah dapat ditanami dua kali dalam setahun (IP 200), bahkan adanya tambahan perluasan areal tanam ke lahan-lahan potensial lainnya seperti lahan kering yang dapat dikembangkan untuk pertanaman padi.

Beberapa faktor utama yang diduga menjadi penyebab belum optimalnya capaian LTT terhadap target tahunan antara lain adalah keterbatasan ketersediaan air irigasi pada musim kemarau dan ketergantungan petani terhadap curah hujan. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah kondisi sosial dan kelembagaan petani, antara lain belum meratanya kesiapan petani untuk melakukan tanam dua kali dalam setahun, keterbatasan modal usaha tani, serta adanya kekhawatiran terhadap resiko gagal panen akibat perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Dalam kondisi demikian, sebagian petani memilih untuk tidak melakukan penanaman pada musim tanam kedua atau menunda waktu tanam hingga kondisi dianggap lebih aman.

Meskipun demikian, capaian LTT sebesar 75,90% terhadap luas baku sawah menunjukkan adanya potensi besar yang masih dapat dioptimalkan. Dengan adanya intervensi program yang tepat, dukungan pendampingan yang intensif, serta perbaikan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan Indeks Pertanaman di Kabupaten PALI masih sangat memungkinkan untuk terus didorong.

Peran BRMP Sumatera Selatan sebagai Penanggung Jawab Pendamping di Kabupaten PALI menjadi sangat strategis dalam mendorong percepatan capaian target tanam. Bentuk dukungan yang dilakukan dan perlu terus ditingkatkan meliputi pendampingan teknis budidaya, penerapan inovasi teknologi pertanian, penggunaan varietas unggul berumur genjah, optimalisasi pemanfaatan sumber daya air, serta penguatan kapasitas petani dan kelembagaan kelompok tani. Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BRMP Sumatera Selatan, penyuluh pertanian, serta kelompok tani, diharapkan upaya peningkatan luas tambah tanam di Kabupaten PALI dapat terus diakselerasi. Hal ini tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian target swasembada pangan di tingkat provinsi, namun juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi, ketahanan pangan daerah, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

5.1.7. KABUPATEN MURATARA

Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 mempunyai Luas baku sawah (LBS) seluas 2.201 ha dengan agroekosistem sebagian besar merupakan lahan tadah hujan dan sebagian kecil rawa lebak serta sawah irigasi. Dari total luas tersebut 1.860 ha merupakan LBS aktif yang biasa ditanami padi sedangkan 341 ha tidak pernah lagi ditanami padi selama 4 tahun terakhir, karena alih fungsi lahan menjadi tanaman perkebunan dan sebagian selalu tergenang air dalam (rawa lebak), sehingga tidak memungkinkan ditanami padi. Permasalahan selanjutnya adalah Kebiasaan Petani Berkebun yang belum terbiasa dengan bersawah sehingga sebagian besar petani belum tertarik untuk menanam padi. Kendala selanjutnya adalah terbatasnya ketersediaan benih bermutu. Kendala dan upaya pemecahannya disajikan dalam tabel berikut;

Tabel 17. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya.

No	Permasalahan	Upaya Pemecahan
1.	Alih Fungsi Lahan Sawah jadi perkebunan sawit/karet	Penanaman padi gogo pola tumpang sisip, diantara sawit/karet.
2.	Rawa Lebak Dalam	Diajukan Cetak Sawah, Normalisasi saluran sekunder dan Tersier
3.	Belum terbiasa bersawah	Sosialisasi, Demplot, pendampingan teknis budidaya
4.	Kurang Tersedia Benih Bermutu	Diajukan Penangkar benih

Pendampingan Percepatan Tanam Padi

Upaya Pendampingan percepatan tanam dilakukan melalui Pertemuan teknis dengan Kelompok Tani dan Dinas Pertanian Muratara serta Tenaga Ahli Menteri Pertanian (Rizky Adam), sosialisasi harga pembelian gabah pemerintah yang tinggi melalui Bulog sehingga meningkatkan minat dan semangat petani untuk bertanam, Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dengan bunga rendah (6%) dan kredit khusus untuk alsintan serta Kegiatan Panen Bersama yang dilakukan di Desa Bukit Langkap Kec Karang Jaya.

Realisasi tanam Padi Triwulan I

Realisasi tanam padi pada tujuh Kecamatan dengan target pada triwulan I (Januari - Maret) sebanyak 114 ha. Sedangkan Capaian Realisasi Luas Tambah Tanam dari Januari hingga akhir Maret 2025 sebanyak 117 ha, dengan kata lain target dapat tercapai sesuai rencana.

Tabel 18. Capaian Realisasi dan Target Kab. Musi Rawas Utara, Triwulan I 2025.

No	Kecamatan	Jan (Ha)	Feb (Ha)	Maret (Ha)	Capaian Reals (Ha)	Target (Ha)
1.	Kec. Ulu Rawas	12,5	3	0	15,5	14
2.	Kec. Karang Jaya	30	50,5	21	101,5	100
3.	Kec. Rawas Ulu	0	0	0	0	-
4.	Kec. Rupit	-	-	-	-	-
5.	Kec. Karang Dapo	-	-	-	-	-
6.	Kec. Rawas Ilir	-	-	-	-	-
7.	Kec. Nibung	-	-	-	-	-
Jumlah		42,5	53,5	21	117	114

Realisasi tanam Padi Triwulan II

Pada Triwulan II dengan target kesanggupan pada bulan April sebanyak 65 Ha pada capaian luas tanam 136 ha, pada bulan Mei kesanggupan seluas 50 ha dengan capaian Luas tanam 65 ha sedangkan pada bulan Juni sebanyak 422 ha. Sedangkan Capaian Realisasi Luas Tambah Tanam bulan Juni 2025 sebanyak 704,5 ha, dengan kata lain target dapat tercapai lebih dari 166 persen dari rencana, disebabkan oleh situasi lahan yang mayoritas sudah mengalami surut dari genangan, sehingga dilapangan petani pada tahap penyiapan lahan, persemaian dan sebagian besar sdh mulai tanam.

Tabel 19. Capaian Realisasi dan Target Kab. Musi Rawas Utara, Triwulan II 2025.

No	Kecamatan	April (Ha)	Mei (Ha)	Juni (Ha)	Capaian Reals (Ha)	Target (Ha)
1.	Kec. Ulu Rawas	88	56	0	144	65
2.	Kec. Karang Jaya	2	9,5	10	21,5	25
3.	Kec. Rawas Ulu	14,5	0	4,5	19	25
4.	Kec. Rupit	0	0	0	0	0
5.	Kec. Karang Dapo	0	0	0	0	0
6.	Kec. Rawas Ilir	32,5	0	690	722,5	422
7.	Kec. Nibung	0	0	0	0	
Jumlah		136,5	65	704,5	906	537

Realisasi dan Target Kab. Musi Rawas Utara, Triwulan III 2025.

Kegiatan lain yang digalakan Kementerian Pertanian yaitu Pemantauan Luas Tambah Tanam Reguler Padi Tadah Hujan/ Gogo, dalam Laporan berikut sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian no 458 tahun 2025 dimana Penulis bertanggung jawab pada Pelaporan Luas Tambah tanam Padi Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, pada tujuh Kecamatan, dimana Kondisi lahan pada saat ini sudah mulai ada pertanaman pada beberapa Kecamatan sementara di kec lain masih pada tahap persiapan, dikarenakan karakter pertanaman padi gogo di Musi Rawas Utara biasanya dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Oktober. Target Luas Tambah Tanam padi gogo di Kab Musi Rawas Utara tahun 2025 seluas 310 hektar, untuk realisasi tanam pada Bulan Juli hingga September sudah tertanam seluas 205 ha, dimana benih dan Herbisida sudah disalurkan kepada petani pada bulan Mei melalui provinsi dari Kementerian Pertanian.

No	Kecamatan	Padi Sawah	Padi Gogo	Jumlah (ha)	Target (Ha)
1.	Ulu Rawas	0,00	0	0,00	0
2.	Karang Jaya	51,00	0	51,00	100
3.	Rawas Ulu	0,00	0	0,00	5
4.	Rupit	0,00	0	0,00	0
5.	Karang Dapo	1,00	2	0,00	0
6.	Rawas Ilir	56,00	0	56,00	200
7.	Nibung	0,00	0	0,00	0
Jumlah		108	2	108	300

Tabel 20. Capaian Realisasi Tanam Padi Bulan Juli

Sebagian wilayah Muratara belum memasuki musim hujan, sehingga untuk pertanaman padi gogo yang sudah di support dengan benih Inpago 13 Fortiz maka dilakukan upaya khusus Gerakan tanam padi gogo, pompanisasi dan percepatan tanam dilahan sawit belum menghasilkan (TBM). dimulai dari Kecamatan Karang Dapo yang berada di Daerah Aliran Sungai.

Tabel 21. Capaian Realisasi Tanam Padi Bulan Agustus

No	Kecamatan	Padi Sawah (Ha)	Padi Gogo (Ha)	Jumlah (Ha)	Target (Ha)
1.	Ulu Rawas	2,50	-	2,500	0
2.	Karang Jaya	10,00	3.00	13,00	50,00
3.	Rawas Ulu	2,00	17.00	19,00	60,00
4.	Rupit	0,00	1.00	1,00	0
5.	Karang Dapo	0,00	4.00	4,00	10,00
6.	Rawas Ilir	4,00	-	4,00	30,00
7.	Nibung	0,00	-	0,00	0
Jumlah		18	25	43.00	150

Pada bulan Agustus sebagian wilayah Muratara sudah mulai memasuki musim hujan, ditambah juga dengan melalui upaya khusus Gerakan tanam padi gogo, pompanisasi dan percepatan tanam dilahan sawit belum menghasilkan (TBM) maka hingga akhir bulan September ini sudah terdapat pertanaman padi gogo yaitu di Kecamatan Karang Jaya, Rawas Ulu dan Kecamatan Karang Dapo.

Tabel 21. Capaian Realisasi Tanam Padi Bulan September

No	Kecamatan	Padi Sawah (Ha)	Padi Gogo (Ha)	Jumlah (ha)	Target (Ha)
1.	Ulu Rawas	40	29	69	10
2.	Karang Jaya	9	13	22	10
3.	Rawas Ulu	182	73	255	50
4.	Rupit	0	0	0	0
5.	Karang Dapo	0	10	10	10
6.	Rawas Ilir	2	0	2	0
7.	Nibung	0	53	53	10
Jumlah		233	178	411	90

Pada bulan September sebagian besar wilayah Muratara sudah mulai memasuki puncak musim hujan, ditambah juga dengan melalui upaya khusus Gerakan tanam padi gogo, pompanisasi dan percepatan tanam dilahan sawit belum menghasilkan (TBM) maka hingga akhir bulan September ini sudah terdapat pertanaman padi gogo hampir di semua Kecamatan potensial seperti Karang Jaya, Rawas Ulu dan Kecamatan Karang Dapo dan Nibung. Khusus Kecamatan Nibung dilakukan Gerakan Tanam bersama pemerintah setempat, Dinas pertanian dan Koramil Nibung sebagai upaya mendongkrak target tanam gogo secara serempak.

Tabel 22. Capaian Realisasi Padi Bulan Oktober

No	Kecamatan	Padi Sawah (Ha)	Padi Gogo (Ha)	Jumlah (Ha)	Target (Ha)
1.	Ulu Rawas	105	15	120	120
2.	Karang Jaya	2	16	18	20
3.	Rawas Ulu	234	7	241	240
4.	Rupit	0	6	6	6
5.	Karang Dapo	0	9	9	10
6.	Rawas Ilir	0	0	0	0
7.	Nibung	0	22	22	20
Jumlah		341	75	416	416

Tabel 23. Capaian Realisasi Padi Bulan November

No	Kecamatan	Padi Sawah (Ha)	Padi Gogo (Ha)	Jumlah (Ha)	Target (Ha)
1.	Ulu Rawas	56	0	10	50
2.	Karang Jaya	15	2	17	50
3.	Rawas Ulu	7	0	13	50
4.	Rupit	0	0	0	30
5.	Karang Dapo	0	21	21	50
6.	Rawas Ilir	7	10	40	60
7.	Nibung	0	5	19	66
Jumlah		85	38	123	356

Pada Bulan November Pencapaian Realisasi luas tanam padi reguler dan Gogo mencapai 123 ha dari target Kabupaten 356 ha, hal tersebut dikarenakan sudah dilaksanakannya percepatan tanam pada bulan sebelumnya.

Tabel 24. Capaian Realisasi Padi Bulan Desember

No	Kecamatan	Padi Sawah (Ha)	Padi Gogo (Ha)	Jumlah (Ha)	Target (Ha)
1.	Ulu Rawas	0	0	0	50
2.	Karang Jaya	162	3	165	50
3.	Rawas Ulu	86	0	86	50
4.	Rupit	22	0	22	30
5.	Karang Dapo	0	0	0	50
6.	Rawas Ilir	0	0	0	60
7.	Nibung	0	0	0	66
Jumlah		273	3	276	356

Capaian Realisasi Luas tambah tanam dibandingkan dengan Target Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu 2.059 ha dengan Capaian 2.076,5 ha, hingga akhir Desember 2025. Realisasi tanam padi pada tujuh Kecamatan dengan target pada triwulan I (Jan - Maret) sebanyak 114 ha. Sedangkan Capaian Realisasi Luas Tambah Tanam dari Januari hingga akhir Maret 2025 sebanyak 117 ha, dengan kata lain target dapat tercapai sesuai rencana.

5.1. 8. KOTA PALEMBANG

Pada SK menteri pertanian No 109/Kpts/PW.020/M/03.2025 tentang penanggung jawab provinsi dan Kabupaten kota pada kegiatan swasembada pangan tanggal 07 Maret 2025, BRMP Sumsel mendapat amanah sebagai Penanggung Jawab Swasembada Pangan di kota Palembang dengan target luas tanam padi regulerseluasr 3.273 ha , Target ini direvisi pada bulan Juni menjadi 6.273 ha. Dalam perkembangannya target ini diperbarui melalui SK Mentan No 808/Kpts/PW.020/M/03.2025. kenaikan target ini hampir 2 kali dari Luas Baku Sawah (LBS) dikota Palembang seluas 3.295 ha. Kondisi di lapangan pertanaman padi rata-rata masih satu kali tanam (IP 100), dan jika dilakukan penanaman dua kali (IP 200) terkendala oleh tipe lahan yang didominasi oleh rawa lebak. Pada tahun 2025 ini didominasi oleh curah hujan yang tinggi hampir sepanjang tahun, sehingga kondisi lahan hampir selalu tergenang.

Luas lahan baku sawah perkecamatan di kota Palembang menurut data ATR/BPN dapat dilihat pada Tabel 4. Wilayah lahan terluas ada di kecamatan Kertapati, Kalidoni dan Gandus. Desa/kelurahan yang dicakup wilayah Gandus adalah 36 ilir, Gandus, Karang anyar, Karang jaya dan Pulokerto. Kertapati meliputi desa Karya jaya, Kemang agung, Kemasrindo, Keramasan dan Ogan baru. Kecamatan Kalidoni meliputi desa Sei lais, Sei layur dan Selincah. Kecamatan Plaju meliputi Plaju darat, Talang Bubuk, dan Talang putri. Kecamatan Jakabaring meliputi 15 Ulu.

Pendampingan Swasembada Pangan di Kota Palembang

A. Rapat koordinasi

Rapat koordinasi dilakukan baik dengan dinas pertanian kota dan para penyuluh kota Palembang, rapat internal BRMP, rapat dengan PJ propinsi maupun rapat dengan koordinator tingkat pusat. Rapat dilakukan untuk membahas target, kendala dan upaya penyelesaian masalah. Rapat atau pertemuan dengan penyuluh dilakukan 4 kali bertempat di dinas pertanian Palembang. Rapat internal BRMP dan PJ dilakukan 3-4 kali per bulan untuk melaporkan progress capaian target bulanan, mensinkronkan data di Tingkat provinsi. Rapat dengan tim pusat dilakukan setiap bulannya 2-3 x secara virtual dan sekali offline.

1. Monitoring pelaporan harian

Petugas melakukan monitoring pelaporan harian dari penyuluh dan dinas serta melaporkannya kembali ke tim input data di grup PJ swasembada pangan Tingkat provinsi.

2. Kujungan Lapang

Untuk mengetahui progress dan permasalahan kegiatan LTT, Petugas dan tim melakukan kunjungan

lapang di BPP maupun ditingkat kelompok tani. Pada tahun ini kunjungan dilakukan di 5 lokasi berbeda. Berikut hasil kunjungan yang dilakukan :

a. Kunjungan di desa Purwokerto Gandus

Tim BRMP Sumsel bersama Kabid sarana prasarana dan penyuluhan serta PPL meninjau pertanaman padi di lahan lebak tengahan di Desa Pulokerto Gandus pada 11 Juni 2025. Jenis padi yang ditanam adalah padi lokal umur 4 bulan dan umur bibit satu bulan setelah semai. Di tempat ini juga telah tersedia pompa bantuan untukantisipasi kekeringan. Pada bulan Juni sebagian besar wilayah Gandus telah tertanami. Kendala yang dihadapi adalah pertanaman hanya bisa dilakukan satu kali karena lahan sering tergenang.

b. Kunjungan di Keramasan kec Kertapati

Penanggung jawab Kota Palembang beserta Tim menghadiri kegiatan Panen Raya serta Pelatihan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Combine Harvester Besar dari pihak produsen, di Lahan Kelompok Tani Harapan Makmur 1 Kelurahan Kramasan. Kelompok Tani Harapan Makmur 1 merupakan kelompok yang tergabung dalam Gapoktan Maju Bersama, tersedia lebih kurang seluas 572 ha potensi lahan sawah siap panen di Kel. Keramasan, yang tersebar di 14 Poktan dan 3 KWT.

- ✓ Kegiatan panen raya dihadiri oleh DKPP Kota Palembang, Komandan Rayon Militer (Danramil) Kertapati Bapak Zainal Arifin, Babinsa, BRMP Sumatera Selatan serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, Bapak Fahrurrozi.
- ✓ Mewakil Kepala DKPP, Bapak Sumarlin selaku Kabid TPH DKPP menyampaikan bahwa Gapoktan Maju Bersama sampai saat ini rutin IP200. Setelah kegiatan panen lebih kurang 2 minggu akan dilanjutkan tanam ke 2 (IP200). Kelompok ini di tahun 2021 sekitar 20 Ha berpotensi sebagai sumber bibit. Kota Palembang memperoleh bantuan benih sebanyak 25 ton untuk luas lahan 11.000 Ha akan tetapi informasi baru ada pada awal bulan Juli 2025. Akan tetapi mengingat sebagian besar petani telah tanam daripada jadi masalah kedepannya maka bantuan benih *dipending*. Lokasi panen saat ini juga termasuk dalam Segmen Kerangka Sampel Area (KSA), sehingga nanti akan dilakukan pengambilan sampel oleh perwakilan BPS yang hadir. Titik KSA dikeluarkan oleh tim BPS. Data sampel dari KSA kemudian diekstrapolasi untuk memperkirakan luas panen, produktivitas, dan produksi padi di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Program ketahanan pangan yaitu Padi dan Jagung. Untuk tanaman Padi pemda bersinergi dengan TNI khususnya dalam pengawasan dan penyaluran benih padi dan pupuk.
- ✓ Perwakilan BPS menyampaikan pengambilan sampel KSA digunakan untuk mengukur produktivitas. KSA diamati tiap bulan. Ukuran ubinan yakni 2.5x2.5m. Kota Palembang yang berpotensi titik KSA berlokasi di Kertapati, Gandus, Plaju dan Kalidoni. Salah satu kendala untuk mencapai titik KSA yaitu banjir. Pengambilan sampel tidak dilakukan dengan Combine karena banyak padi terbang dan batang masih masuk sehingga tidak mewakili. Pada bulan Juli, BPS juga ada Survei Konversi Gabah

ke Beras (SKGB), yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus dan September pada titik-titik KSA. Dari 34 segmen KSA, ada beberapa yang menjadi sampel untuk dilakukan pengamatan SKGB, dan kita minta kepada petani yang kena sampel untuk menyisihkan sedikit beras sebanyak lebih dari 200 kg, untuk diamati dari mulai gabah kering panen sampai gabah kering giling (dihitung selisih kadar air dan beratnya) dan menjadi beras.

- ✓ Setelah panen secara simbolis, acara dilanjutkan dengan Pelatihan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Combine Harvester Besar dari pihak produsen. Serta pengambilan data panen pada titik KSA. Hasil Pengambilan sampel di titik KSA tercatat 5,26 kg untuk ukuran luas 2,5 x 2,5 m. Padi hasil panen akan dijual ke perusahaan beras swasta buyung dengan harga 6500-6800.

c. Kunjungan di karyajaya 1

Tim BRMP Sumsel bersama PPL meninjau lokasi pertanaman padi pada 24 Juli di Kecamatan Kertapati yang baru melakukan pertanaman karena kondisi lahan yang termasuk dalam tipologi lebak dalam. Petani lahan lebak dalam bertanam setahun sekali dibulan kering karena menunggu air surut. Varietas yang ditanam adalah varitas lokal umur panen sekitar 6 bulan serta ciherang. Varitas genjah seperti ciherang terkendala jika air lama surut, bibit sudah tidak bisa beranak atau keburu berbunga. Tim juga meninjau lokasi sawah yang telah berubah fungsinya (alih fungsi lahan).

d. Kunjungan di Karya Jaya 2

Kelompok Tani Tunas Jaya Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati merupakan kelompok tani yang sebagian/beberapa petaninya telah melaksanakan tanam IP 200. di kelompok ini tim bertemu pengurus poktan dengan gapoktan Bapak Suhendro . Petani di wilayah ini telah menanam IP 200 sekitar 39,5 ha dan akan bertambah sekitar 5 ha dalam beberapa hari ini.

- ✓ Pelaksanaan IP 200 pada kelompok tani ini terbantu dengan adanya program Brigade Alsintan karena pengolahan lahan berlangsung lebih cepat. Kelompok mendapat pinjaman TR4 dari Brigade.
- ✓ Dilokasi ini memungkinkan tanam IP 200 karena Lokasi termasuk lebak dangkal . ketinggian air maksimal 15 cm. Pada Lokasi ini juga terdapat Irpom, sebagian petani mengandalkan curah hujan dan sumur dimusim kemarau. Penanaman yang dilakukan pada Oktober dengan perkiraan panen Desember-Januari dimungkinkan kondisi lahan dalam keadaan tergenang
- ✓ Petani menerapkan cara tanam system tabur untuk mengejar musim hujan. Untuk menangani rumput petani menggunakan cara penggunaan herbisida pra tumbuh Boral dan serendy untuk penyiangan di usia 14 HST.
- ✓ Kuota pupuk saat ini sudah dientry tinggal penebusan
- ✓ Varietas yang digunakan cukup variatif (Varietas Cibatu, MR 319, Sedayu, Senapi Genjah, Maharani dan Inpari 32. Petani tidak segan mencoba varietas baru untuk dikembangkan.
- ✓ Kendalanya belum semua anggota kompak melakukan tanam IP 200 dengan alasan takut gagal karena modalnya terbatas, Sebagian khawatir lahannya rusak jika diolah intensif. Namun petani

yang mulai menanam IP 200 saat ini lebih banyak dibanding tahun sebelumnya karena melihat contoh keberhasilan petani lainnya yang menerapkan IP 200.

- ✓ Untuk pelaksanaan IP 100 petani menginformasikan terdapat gagal panen sekitar 4 ha di poktan Karya Bersama 1 karena serangan patah leher.
- ✓ Untuk hasil panen IP 100, harga gabah sudah menguntungkan berada di kisaran Rp6.000-Rp6.400 tertinggi 6800 tahun sebelumnya hanya 4500. Pembelian gabah diambil oleh tengkulak langsung ke lokasi panen. Petani tidak jual ke Bulog karena sebagian besar modal bertani berasal dari tengkulak.
- ✓ Salah satu kendala yang dihadapi, yakni masalah kekompakan petani untuk pelaksanaan IP 200 belum semua termotivasi. Hal ini berpengaruh pada potensi serangan hama serta tikus yang cukup rentan apabila pertanaman tidak dilakukan secara serentak.

e. Kunjungan di Kalidoni dan Sematang Borang

- Berdasarkan informasi Penyuluh, ada lahan seluas 14 Ha tidak melakukan tanam IP 200 sejak tahun 2020 dikarenakan kondisi air dan saat ini semangat petani untuk tanam IP 200 mulai tumbuh kembali, dengan adanya bantuan benih.
- Untuk lokasi yang masih dipengaruhi air pasang penyuluh belum dapat melaporkan pertanaman meski telah semai/tabur karena bisa berdampak terendam.
- Kelompok ini merupakan salah satu kelompok yang memperoleh bantuan benih IP 200. Pembagian benih secara simbolis oleh Wamentan RI pada saat kunjungan ke Kota Palembang bulan lalu. Kota Palembang mendapatkan bantuan benih untuk luasan 160 Ha dari target tanam IP 200 seluas 200 Ha. Bantuan benih untuk 3 Kecamatan yakni; Kalidoni, Sematang Borang, dan Kertapati. Benih telah disemai dan menunggu tanam.
- Tim BRMP Sumsel juga melakukan peninjauan ke lokasi sawah di Desa Karya Mulya yang telah mengalami alih fungsi lahan menjadi perumahan, salah satu Lokasi bahkan merupakan titik KSA dan berdasarkan ATR BPN juga masuk titik sawah.
- Pada tahun 2022 lahan ini merupakan lahan pasang surut tetapi sekarang menjadi lahan tadah hujan dikarenakan beberapa titik saluran air tersumbat baik oleh rumput maupun jembatan yang dibuat perumahan, sehingga pertanaman mengandalkan curah hujan.
- Total keseluruhan tanam lebih kurang 18 Ha dalam Kelompok ini
- Petani melakukan olah tanah dengan sewa traktor, namun traktor bantuan tahun 2028 sudah mulai rusak dan kini telah difasilitasi penyuluh mengajukan bantuan.
- Untuk hasil panen IP 100 tertinggi harga beras tertinggi Rp.6200 sedangkan terendah Rp.5700 karena pengaruh kualitas gabah yang berbeda.
- Sebagian besar gabah dijual ke Buyung karena lebih menguntungkan dan untuk saat ini harga gabah stabil

Sementara untuk Kecamatan Kalidoni terdiri dari 5 Desa: Desa Bukit Sangkal, Kalidoni, Sei Lais, Sei Selayur dan Sei Selincah. Kunjungan ke Kelompok Tani Maju Bersama Desa Sei Lincah Kecamatan Kalidoni. Tim didampingi oleh Bu Maria dan Bu Windi.

- Sekarang luas total 169 Ha lokasi tepencar-pencar. Bulan ini baru semai rencana tanam lebih kurang 24 Ha, Sisanya pada bulan Desember kalau air tidak pasang.
- Lokasi merupakan lahan Garapan/sewaan
- Luas lokasi lebih kurang 31 Ha
- Kendala yang dihadapi Adalah kontrol air yang tidak bisa dikendalikan. Hal ini karena adanya Pembangunan jembatan pada bagian hulu dan munculnya spot-spot perumahan yang menghambat saluran air. Untuk memperbaiki saluran diperlukan biaya besar sedangkan tanah sawah kepemilikannya bukan oleh petani.

Realisasi Tanam Kota Palembang

Realisasi tanam Kota Palembang baru mulai di bulan April karena lahan pada bulan bulan sebelumnya masih tergenang, di Lokasi lainnya bahkan baru bisa tanam bulan Mei, Juni dan Juli.

Tabel 25. Realisasi Tanam Kota Palembang (Jan-Des) 2025

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Realisasi Tanam Padi (Ha)												Jumlah Realisasi Tanam Jan-Des 25
			Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025	Agu 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	
Sumatera Selatan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Palembang		0,50	3,20	1,40	137,84	755,72	1380,49	674,74	15,18	9,75	51,25	17,5	9,5	3057,1
	Lahan Baku Sawah	3295													3.057
		Alang-alang Lebar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bukit Kecil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gandus	0	0,5	0,15	25,09	210,8	305,82	5,35	3,6	2	0	0	0	553,30
		ilir Barat I	0	0	0	0	0,11	1,57	2,36	4,39	0	0	0	0	8,43
		ilir Barat II	0	0	0	0	0	5,68	2,22	0	0	0	0	0	7,9
		ilir Timur I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ilir Timur II	0	0	0	2,5	11,25	12,75	0,5	0	0	0	0	0	27
		ilir Timur III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jakabaring	0	0	0	0	2,5	15,05	7,45	0	0	0	0	0	25
		Kalidoni	0,5	0	0	1	211,78	390,28	43,85	0	0	1	5	5	658,41
		Kemunings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kertapati	0	1,5	1,25	55,75	268,65	546,9	565,95	2,5	7,75	50,25	4,5	0	1505
		Piaju	0	0	0	53,5	49,63	70,95	31,75	0	0	0	0	0	205,83
		Sako	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Seberang Ulu I	0	0	0	0	0	0	9,31	4,69	0	0	0	0	14
		Seberang Ulu II	0	0,2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4,20
		Sematang Borang	0	1	0	0	1	31,50	2	0	0	0	8	4,5	48,00
		Sukarami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pada Tabel diatas realisasi tanam padi regular kota Palembang selama tahun 2025 pada pertanaman IP100, Di desa ilir 2 tidak tertanam 1,75 ha karena penimbunan lahan sawah, di Seberang ulu 2 seluas 1,44 ha karena petani tidak ada modal, di Sematang borang tidak tertanami 39 ha juga karena tidak ada modal. Untuk di kertapati lahan tertanami namun tidak terlapor karena PPL terlambat melapor. Pada bulan akhir Oktober kota Palembang mendapat bantuan benih padi dari Kementerian pusat melalui jalur dana aspirasi untuk IP 200, dan oleh sebagian petani telah disemai dan dilakukan persiapan lahan, Namun hingga akhir Desember Sebagian tidak bisa tertanam karena kondisi air disawah masih tinggi.

Petani diwilayah Keramasan kecamatan Kertapati tahun ini tidak melakukan pertanaman IP 200 karena petani trauma dengan 2 kali gagal tahun-tahun sebelumnya dan kekurangan modal. Sementara bibit bantuan datang pada akhir Oktober dan petani khawatir jika dilakukan penanaman akan kebanjiran karena bulan-bulan akhir tahun curah hujan lebih tinggi. Demikian juga di wilayah Kalidoni dan Sematang borang yang menjadi target IP 200 mengalami kendala genangan air yang tinggi pada bulan November. Pada bulan Desember terdapat kegiatan tanam 9,5 ha sehingga akhir Desember realisasi tanam kota Palembang mencapai 3057 ha dari target awal 3273 atau 92,83 % atau jika dibanding dari target pusat revisi 6273 ha terealisasi 48,4%.

Realisasi Panen Kota Palembang

Realisasi panen pertanaman kota Palembang dari bulan Januari hingga Desember dapat dilihat di

No.	Kecamatan	Potensi Sawah Berdasarkan ATR BPN 2024 (Ha)	Potensi Sawah Berdasarkan Data Rekap BPP				Potensi Sawah Berdasarkan Data Rekap Poligon			
			Total Luas Sawah Berdasarkan Data BPP (Ha)	Jumlah Kelompok tani	Luas Sawah Kelompok tani (Ha)	Luas Sawah Non Kelompok tani (Ha)	Sawah Kelompok tani (Ha)	Sawah Non Kelompok tani (Ha)	Total (Ha)	Sawah Kelompok tani diluar Wilayah Administratif Kota Palembang (Ha)
1	Gandus	551	551.05	32	503.45	47.6	504.36	61.95	566.31	0
2	ilir Barat Dua	10	9.65	2	9.65	0	6.31	0	6.31	0
3	ilir Barat Satu	18	8.43	2	8.43	0	8.09	0	8.09	0
4	Jakabaring	96	25	1	12.30	12.7	12.3	12.4	24.7	0
5	Kertapati	1484	1480.04	23	1086.20	393.90	917.53	379.52	1297.05	12.5
6	Plaju	205	205.83	14	192.58	13.25	83.63	97.24	180.87	96.5
7	Seberang Ulu Dua	16	5.64	0	0	5.64	0	3.36	3.36	0
8	Seberang Ulu Satu	14	14	2	12	2.0	10.3	10.97	21.27	0
9	ilir Timur Dua	27	24	3	24	0	23.59	6.92	30.51	0
10	Kalidoni	777	516.85	27	502.85	14	476.658	239.647	716.305	60.63
11	Sematang Borang	97	74.5	5	49.30	25.20	50.74	24.34	75.17	0
Jumlah		3295	2915	111	2400.76	514.24	2093.508	836.347	2929.945	169.63
										3099.58

Gambar dibawah ini. Realisasi panen mencapai 3083,6 ha realisasi panen januari, februari dan maret berasal dari tanam tahun sebelumnya. Persentase laporan panen terhadap Target tanam IP 100 adalah 99% atau seluas 2948 ha. Pada tahun ini realisasi panen sangat baik karena tidak ada kendala yang berarti.

Tabel 26. Realisasi Panen Kota Palembang

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Realisasi Panen Padi (Ha)												Realisasi Panen Jan-Des 25
			Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025	Agu 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	
Sumatera Selatan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Palembang		79,0	34,0	12,2	1,0	0,0	0,8	61,3	428,1	1150,1	1304,8	12,5	0,0	3083,6
	Lahan Baku Sawah	3295	79	34	12	1	0	1	61	429	1.150	1.305	12	0	3.084
		Alang-alang Lebar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bukit Kecil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gandus	70	0	0	0	0	0	0,75	113,75	386,9	45,3	4,1	0	620,80
		Ilir Barat I	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	1,48	6,75	0	8,43
		Ilir Barat II	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4,3	1,6	0	7,9
		Ilir Timur I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ilir Timur II	0	0	0	0	0	0	0	0,5	20,5	6	0	0	27
		Ilir Timur III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jakabaring	0	0	0	0	0	0	0	0	17,5	7,5	0	0	25
		Kalidoni	0	0	4,2	0	0	0	0	45,5	315	284,41	0	0	649,11
		Kemuning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kertapati	9	32	0	0	0	0,75	7,25	210,15	318,05	901,85	0	0	1479,05
		Plaju	0	0	0	0	0		53	50,38	57,15	40,3	0	0	200,83
		Sako	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Seberang Ulu I	0	0	0	0	0	0	0	3,905	3,845	6,75	0	0	14,5
		Seberang Ulu II	0	0	0	0	0	0	0,3	0	2,3	1,9	0	0	4,50
		Sematang Borang	0	2	8	1	0	0	0	3,868	26,63	5	0	0	46,50
		Sukarami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Realisasi tanam padi regular kota Palembang pada tahun 2025 seluas 3.057 ha lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya namun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 6.273 ha. Realisasi panen tahun 2025 seluas 3.083,6 ha. LBS kota Palembang telah diverifikasi oleh penyuluh dan dinas pertanian tahun ini seluas 3.099,6 ha. Kendala yang dihadapi adalah genangan air, kekurangan modal, petani bukan pemilik lahan dan konversi lahan menjadi lahan pemukiman.

5.1.9. KOTA PRABUMULIH

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No 808 tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Kepmentan Nomor 109 Tentang Penanggung Jawab Propinsi dan Kabupaten/Kota Pada Kegiatan Swasembada Pangan, Kota Prabumulih menjadi salah satu wilayah yang ditetapkan target percepatan tanam padi reguler pada tahun 2025. Dan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No 808 tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Kepmentan Nomor 109 Tentang Penanggung Jawab Propinsi dan Kabupaten/Kota Pada Kegiatan Swasembada Pangan, target Luas Tambah Tanam (LTT) padi reguler Kota Parbumulih sebesar **319 ha**. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Penanggung jawab dan tim satuan tugas swasembada pangan Kota Prabumulih melakukan koordinasi, pendampingan teknis dan monitoring di Kota Prabumulih.

1. Capaian Realisasi LTT Reguler Kota Prabumulih hingga Desember 2025

Hingga bulan Desember 2025, realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi reguler Kota Prabumulih tercatat sebesar **164,72 ha**, atau **51,62%** dari target tahunan 319 ha. Meskipun realisasi ini masih berada di bawah target Kepmentan, namun capaian tersebut selaras dengan kondisi riil lahan sawah yang tersedia di Kota Prabumulih. Capaian LTT berdasarkan distribusi Luas Baku Sawah (LBS) ditunjukkan pada tabel berikut.

 **Tabel 27. Realisasi LTT Padi reguler Kota Prabumulih s.d. Desember 2025**

No	Lokasi/Kecamatan	LBS (ha)	Realsasi LTT (ha)
1	Prabumulih Barat	164	164, 72
2	Cambai	1	0
Total		165	164,72



Jika dibandingkan dengan **LBS** Kota Prabumulih yang hanya sebesar **165 ha**, maka realisasi LTT telah mencapai **hampir 100% pemanfaatan lahan**. Dengan demikian, dari sisi intensitas pemanfaatan lahan sawah yang tersedia, kegiatan pertanaman padi di kota tersebut telah berjalan optimal.

2. Permasalahan yang Mempengaruhi Capaian LTT Padi Reguler

Perbedaan signifikan antara capaian terhadap target Kepmentan (51,62%) dan capaian terhadap LBS (mendekati 100%) menggambarkan adanya kesenjangan antara kebijakan penetapan target dengan kondisi lahan di lapangan. Beberapa faktor utama penyebab rendahnya capaian LTT terhadap target antara lain sebagai berikut:

Perbedaan signifikan antara capaian terhadap target Kepmentan (51,62%) dan capaian terhadap LBS (mendekati 100%) menggambarkan adanya kesenjangan antara kebijakan penetapan target dengan kondisi lahan di lapangan. Beberapa faktor utama penyebab rendahnya capaian LTT terhadap target antara lain sebagai berikut:

a. Keterbatasan Luas Baku Sawah

LBS Kota Prabumulih hanya **165 ha**, yang seluruhnya berada pada dua kelurahan, yaitu Kelurahan Payuputat Kecamatan Prabumulih Barat (164 ha) dan Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai (1 ha). Dengan keterbatasan lahan yang sangat kecil, target LTT sebesar 319 ha hanya dapat dicapai apabila lahan ditanami dua kali setahun (IP 200). Namun, kondisi lahan tidak memungkinkan untuk ditanami dua kali.

b.Lahan di Sungai Medang Tidak Dapat Ditanami

Lahan sawah seluas **1 ha** di Kelurahan Sungai Medang tidak dapat diusahakan karena pemilik lahan mengalami sakit keras. Dengan kondisi ini, LBS di Kelurahan Payuputat yang hanya bisa diandalkan untuk ditanami padi.

c. Karakteristik Lahan Rawa Lebak di Kelurahan Payuputat

LBS Kelurahan Payuputat merupakan lahan **rawa lebak** yang hanya memungkinkan untuk **satu kali tanam (IP 100)** per tahun. Hal ini disebabkan antara lain:

- Terbatasnya kemampuan pengelolaan air oleh petani
- Lokasi sawah tersebar serta berbatasan langsung dengan Sungai Lematang
- Tidak adanya tanggul penahan banjir
- Pada musim hujan, air sungai sering meluap sehingga lahan tergenang

Kondisi tersebut menimbulkan risiko tinggi gagal panen apabila petani dipaksa menanam dua kali.

d. Faktor Sosial Ekonomi Petani

Sebagian besar petani di Kelurahan Payuputat Kecamatan Prabumulih Barat enggan melakukan tanam lebih dari satu kali, dikarenakan: 1) risiko tinggi kegagalan akibat penggenangan, dan 2) kegiatan usahatani padi bukan sumber pendapatan utama. Kedua faktor ini membuat peningkatan Indeks Pertanaman menjadi sulit dilakukan.

3. Tindak Lanjut Pendampingan ke Depan

Secara umum, capaian LTT Kota Prabumulih hingga Desember 2025 menunjukkan bahwa **pemanfaatan LBS telah optimal**, namun target tahunan sulit dicapai karena keterbatasan lahan dan karakteristik agroekosistem rawa lebak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pendampingan yang lebih adaptif, antara lain:

- a) Penerapan teknologi pengelolaan air sederhana untuk lahan lebak
- b) Penambahan sarana prasarana pengendali banjir seperti tanggul atau pintu air
- c) Pemilihan varietas unggul toleran genangan dan berumur genjah

A. Capaian Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Gogo Kota Prabumulih 2025

Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan di Provinsi Sumatera Selatan, program pengembangan padi gogo turut menjadi salah satu kegiatan strategis yang dilaksanakan di Kota Prabumulih pada tahun 2025. Melalui program ini, pemerintah mendorong pemanfaatan lahan-lahan potensial, khususnya lahan perkebunan sawit yang diremajakan, untuk ditanami padi gogo melalui pola tumpang sisisip. Upaya ini diharapkan dapat menambah luas tanam sekaligus meningkatkan produksi padi di luar lahan sawah eksisting.

. 1. Target dan Realisasi LTT Padi Gogo Tahun 2025

Pada tahun 2025, Kota Prabumulih ditetapkan target Luas Tambah Tanam (LTT) padi gogo sebesar **195 ha**. Namun demikian, berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian teknis yang dilakukan, hanya **50 ha** yang disetujui dalam daftar Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL). Penyesuaian ini dilakukan karena dari total **82 hektar** lahan sawit Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang tersedia, hanya **50 ha** yang memenuhi kriteria untuk dilakukan tumpang sisip padi gogo.

2. Permasalahan dan Tantangan di Lapangan

Berdasarkan hasil pendampingan di lapangan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyusutan luas lahan yang dapat ditanami padi gogo, antara lain:

a. Kelayakan Teknis Lahan

Meskipun tersedia 82 hektar lahan PSR, tidak seluruhnya memenuhi syarat teknis untuk tumpang sisip padi. Beberapa kendala yang ditemukan meliputi: 1) Kondisi lahan yang tidak cukup terbuka akibat kerapatan tanaman sawit muda, 2) ketersediaan cahaya matahari yang tidak merata, dan 3) tingkat kelembapan dan aerasi tanah yang kurang sesuai untuk pertumbuhan padi gogo.

b. Kesiapan Petani dan Dukungan Sarana

Kesiapan petani untuk melaksanakan tumpang sisip menjadi aspek penting. Beberapa kelompok tani masih terbatas dalam: 1) pengetahuan budidaya padi gogo di bawah tegakan sawit, dan 2) peralatan mekanisasi dan modal untuk pengolahan lahan yang terbatas.

c. Rencana Tindak Lanjut

Kegiatan pendampingan padi gogo di Kota Prabumulih memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi dan tantangan pengembangan padi di luar lahan sawah. Penetapan LTT sebesar 50 hektar yang disetujui CPCL merupakan evaluasi teknis atas kondisi lahan dan kesiapan petani.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan padi gogo sangat dipengaruhi oleh:

- a) **Kesesuaian lahan PSR untuk tumpang sisip**
- b) **Tingkat adaptasi petani terhadap sistem tanam padi gogo**
- c) **Kemampuan menerapkan teknologi budidaya yang tepat**

Informasi ini akan menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program padi gogo pada tahun berikutnya. BRMP Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah dan penyuluh pertanian akan terus memperkuat pendampingan, mulai dari penilaian kelayakan lahan, penyuluhan teknologi budidaya, hingga monitoring perkembangan tanaman di lapangan. Kolaborasi semua pihak

diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan lahan PSR dan memperluas cakupan penanaman padi gogo, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian swasembada pangan di Kota Prabumulih dan Sumatera Selatan secara keseluruhan.

5.10. KOTA PAGAR ALAM

A. RAPAT KOORDINASI/PERTEMUAN

Untuk menciptakan sinergi antara BRMP Sumatera Selatan dan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam telah dilakukan Koordinasi dengan Kepala Dinas, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Kabid Sarana Prasarana, Kabid Penyuluhan, dan koorluh dari 5 (lima) kecamatan, sebagai langkah awal dan upaya pencapaian kegiatan swasembada pangan. Selain koordinasi dengan Dinas Pertanian, juga dilaksanakan pertemuan dengan penyuluh/koorluh, dan petani baik di BPP maupun di lapangan dalam rangka pendampingan Percepatan Pencapaian LTT Reguler, program pengembangan padi gogo/tusip, maupun OPLAH dan Pembentukan Brigade Pangan (BP), serta monitoring/evaluasi di lapangan.

Mengawali kegiatan pendampingan swasembada pangan telah, Tim Satgas BRMP melaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 25 Juni 2025 di Ruang Rapat Kantor Dinas Pertanian Kota Pagar Alam. Adapun tujuan dari rakoor tersebut dalam rangka pendampingan percepatan pencapaian LTT reguler, program pengembangan padi gogo dan optimasi lahan (OPLAH) di Kota Pagaralam.

Rapat koordinasi dihadiri oleh Kadis Pertanian kota Pagaralam, Kabid Tanaman Pangan, Bagian pelaporan data dan koordinator penyuluh BPP di 5 Kecamatan Kota Pagaralam yakni Dempo Selatan, Dempo Tengah, Dempo Utara, Pagar Alam Selatan, dan Pagar Alam Utara, serta Tim Satgas BRMP Sumatera Selatan. Kepala BRMP Sumsel yang diwakili oleh Kasubbag Tata Usaha, Ibu Rosidah, SE, MM, menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk melakukan percepatan pelaksanaan LTT padi dan menjangring permasalahan dan mencari solusi sehingga target LTT dapat dimaksimalkan.

Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam, Dra. Suterimawati, MM, dalam arahannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pagar Alam sangat mendukung program nasional swasembada pangan. Program swasembada pangan telah berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di daerahnya. "Petani kini memiliki pemasukan sepanjang tahun. Setelah panen kopi, mereka menanam padi saat musim hujan dan sayur-sayuran di musim kemarau,".

Kota Pagar Alam memiliki potensi pertanian yang besar dengan luas baku sawah mencapai 3.088 hektare. Indeks Pertanaman (IP) yang bervariasi dari IP100 hingga IP300 menunjukkan keberagaman pola tanam. Namun demikian, pencapaian LTT kerap menghadapi tantangan, terutama saat musim panen kopi, karena petani lebih fokus ke kebun dan berkurangnya tenaga kerja untuk menggarap lahan padi dan padi gogo.

Menghadapi kondisi tersebut, BRMP dan Dinas Pertanian menyepakati sejumlah langkah strategis, antara lain penguatan peran penyuluhan, pemanfaatan alat mesin pertanian (alsintan), serta pengembangan varietas lokal unggul seperti Basemah Air Keruh Putih. Varietas padi ini memiliki umur

panen hanya 100 hari dengan rasa nasi yang lembut dan pulen, serta dinilai cocok dikembangkan lebih luas di daerah dataran tinggi seperti Pagar Alam.

Pada tanggal 25 Juli 2025, dilaksanakan koordinasi dan pertemuan dalam rangka percepatan kegiatan Program Strategis LTT Padi di Kota Pagar Alam. Rakoor dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pertanian Kota Pagar Alam, bidang TP, Saprass, Koordinator penyuluh beserta penyuluh lapangan dari 5 (lima) Kecamatan wilayah Kota Pagar Alam, bagian pelaporan LTT, serta penanggung jawab dan tim satgas swasembada pangan BRMP Sumatera Selatan.

Sebelum pertemuan terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian Kota Pagaralam Dra.Suterimawati, MM, beserta jajarannya dari bidang sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran, bidang produksi tanaman pangan, sekretaris dinas dan kepala BPP Dempo Selatan, bertempat di ruang kepala dinas pertanian kota Pagaralam.

Dalam pertemuan disampaikan target dan realisasi LTT sd tanggal 24 Juli 2025, dilanjutkan dengan membahas strategi percepatan LTT dan diminta kesanggupan untuk menambah luas tanam setiap Kecamatan sampai dengan akhir Juli 2025.

Dari ke-5 koorluh yang mewakili wilayah kecamatan kota Pagar Alam juga menyampaikan kendala di lapangan terkait LTT pada bulan Juli, diantaranya adalah, jaringan irigasi yang rusak, debit air yang berkurang, dan masih ada tenaga kerja yang melakukan panen kopi. Pada bulan Juli merupakan puncak panen kopi di wilayah Kota Pagar Alam, sehingga banyak lahan sawah yang sudah dipanen, belum diolah bahkan ada pertanaman padi yang sudah kelewat masa panen karena kurangnya tenaga harian, mereka lebih memilih panen kopi dibanding mengolah lahan sawah untuk pertanaman padi.

B. Pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT) Reguler

Pelaksanaan kegiatan pendampingan luas tambah tanam (LTT) Reguler Padi di Kota Pagar Alam dilaksanakan di 5 (lima) Kecamatan, yakni Kecamatan Dempo Selatan, Dempo Tengah, Dempo Utara, Pagar Alam Selatan dan Pagar Alam Utara). Dari target 6.050 hektar LTT Reguler Padi pada Tahun 2025, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi seluas 6.198 hektar (102,44 %). (Tabel terlampir)

Tabel 28. Realisasi Tanam LTT Reguler Kota Pagar Alam

NO	KECAMATAN	LBS (Ha)	LBS Aktif	LBS Non Aktif	Periode Januari-Desember Tahun 2025												JML
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Dempo Selatan	963	733	230	258	265	260	86	132	154	150	118	134	150	169	145	2.021
2	Dempo Tengah	357	350	8	102	108	115	14	16	34	45	38	24	66	43	39	643,5
3	Dempo Utara	611	602	9	187	128	120	53	107	78	103	94	90	123	93	102	1.277,5
4	Pagar Alam Selatan	555	535	20	132	174	155	25	65	75	85	58	87	80	67	78	1.080,5
5	Pagar Alam Utara	602	599	3	148	150	173	25	57	88	83	86	88	89	97	92	1.175,5
JUMLAH		3.088	2.818	270	827	825	823	203	377	429	466	394	423	508	469	454	6.198

Permasalahan Pertanian di Kabupaten Musi Rawas :

Beberapa faktor utama yang diduga menjadi penyebab belum optimalnya capaian LTT terhadap target tahunan antara lain adalah:

- Keterbatasan ketersediaan air irigasi pada musim kemarau
- Kerusakan atau belum optimalnya fungsi jaringan irigasi
- Ketergantungan petani terhadap curah hujan
- Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah kondisi sosial dan kelembagaan petani
- Kurangnya minat pemuda untuk Bertani
- Sebagian petani khawatir dengan serangan OPT sehingga memilih untuk tidak melakukan penanaman pada musim tanam kedua atau menunda waktu tanam hingga kondisi dianggap lebih aman
- Banyak lahan baru selesai panen tidak segera melakukan pengolahan lahan/mengistirahatkan lahan
- Kekurangan alsintan untuk mengejar olah lahan
- Curah hujan tidak stabil sehingga menghambat pengolahan lahan

Tindaklanjut

Pengoptimalan target swasembada pangan di Kabupaten Musi Rawas untuk terus meningkatkan pendampingan dengan intervensi program yang tepat, dukungan pendampingan yang intensif, serta perbaikan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan Indeks Pertanaman. Peran BRMP Sumatera Selatan sebagai Penanggung Jawab Pendamping di Kabupaten Musi Rawas menjadi sangat strategis dalam mendorong percepatan capaian target tanam. ditingkatkan meliputi pendampingan teknis budidaya, penerapan inovasi teknologi pertanian, penggunaan varietas unggul berumur genjah, optimalisasi pemanfaatan sumber daya air, serta penguatan kapasitas petani dan kelembagaan kelompok tani.

Bentuk dukungan yang dilakukan dan perlu terus Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BRMP Sumatera Selatan, penyuluh pertanian, serta kelompok tani, diharapkan upaya peningkatan luas tambah tanam di Kabupaten Musi Rawas dapat terus diakselerasi. Kontribusi bulog dalam pembelian hasil produksi serta pembayaran tepat waktu.

Hal ini tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian target swasembada pangan di tingkat provinsi, namun juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi, ketahanan pangan daerah, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

5.11. KOTA LUBUK LINGGAU

Luas Baku Sawah (LBS) Kota Lubuk Linggau pada tahun 2023 tercatat seluas 1.129 hektare. Angka ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil wilayah kota yang dimanfaatkan sebagai sawah mengingat karakter Lubuk Linggau sebagai kawasan perkotaan yang berkembang pesat. Meski skala lahannya tergolong terbatas, keberadaan 1.129 hektare baku sawah tersebut tetap memiliki peranan strategis dalam mendukung ketahanan pangan lokal, terutama untuk memenuhi kebutuhan komoditas padi dan hortikultura. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa tantangan utama sektor pertanian di Lubuk Linggau bukan sekadar peningkatan luas lahan, melainkan bagaimana melindungi dan mempertahankan sawah yang sudah ada di tengah tekanan konversi lahan ke permukiman atau komersial. Oleh karena itu, pendekatan yang paling realistis adalah optimalisasi produktivitas melalui intensifikasi pertanian, peningkatan indeks pertanaman, penyediaan irigasi, serta pemanfaatan teknologi pertanian. Dengan pengelolaan dan perlindungan tata ruang yang tepat, luas baku sawah 1.129 hektare ini tetap menjadi aset penting bagi ketahanan pangan kota dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap program swasembada pangan regional.

Program strategis Kementerian Pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan tahun 2025 berfokus pada optimalisasi dan perluasan lahan melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan (OPLAH), penyediaan alsintan, benih, pupuk, serta peningkatan indeks pertanaman sebagai percepatan produksi pangan. Pemerintah juga menjalankan kebijakan perluasan luas tambah tanam (LTT) dan ekstensifikasi lahan sebagai upaya menjaga ketersediaan stok pangan nasional, yang diperkuat melalui kolaborasi lintas kementerian seperti kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam penyediaan irigasi, air, dan infrastruktur pendukung lahan produktif. Modernisasi pertanian menjadi fokus lain melalui pompanisasi, irigasi, mekanisasi, serta pendampingan petani dalam memanfaatkan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas, termasuk bantuan traktor dan sarana produksi lain. Program ini juga diperkuat dengan pembentukan Satgas Swasembada Pangan, penyediaan benih dan pupuk bersubsidi, pemutakhiran data petani miskin/gurem agar bantuan tepat sasaran, serta mendukung diversifikasi pangan nasional.

Kota Lubuk Linggau pada kegiatan swasembada pangan memiliki tanggungjawab pada 1 (satu) kegiatan yakni Luas Tambah Tanam Reguler. Berdasarkan peraturan terbaru Kepmentan Nomor 808 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Kepmentan No 109 Tahun 2025 Tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten Kota Pada Kegiatan Sawsembada Pangan, target LTT reguler Kota Lubuk Linggau sebesar 2.159 Ha. Luas Baku Sawah Kota Lubuk Linggau seluas 1.129 Ha (BPS, 2024).

Tabel 29. Realisasi Tanam Padi di Kota Lubuk Linggau Tahun 2025

NO	Kec.	LBS	LBS Aktif	LBS Tidak Aktif	Target		Realisasi MT 2025 (HA)												Total Tanam	IP
					Dinas	SK 808	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Lubuk Linggau Barat I	134	134	0	278	292	44	0	19	30	15	4	0	100	4	1	42	4	263	196
2	Lubuk Linggau Barat II	60	60	0	35	37	11	0	4	8	6	6	3	0	1	5	2	0	45	75
3	Lubuk Linggau Selatan I	50	50	0	82	86	25	7	28	8	4	2	0	2	2	2	1	0	79	158
4	Lubuk Linggau Selatan II	595	560	35	1.237	1.298	140	155	43	115	32	101	121	49	35	140	80	148	1.158	207
5	Lubuk Linggau Timur I	16	16	0	46	48	7	8	4	3	2	2	4	1	2	1	4	1	40	247
6	Lubuk Linggau Timur II	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lubuk Linggau Utara I	246	246	0	356	374	41	0	51	48	60	42	33	3	1	132	19	11	441	179
8	Lubuk Linggau Utara II	27	27	0	23	24	10	1	0	1	3	0	0	2	0	4	3	0	24	90
TOTAL		1.129	1.092	37	2.057	2.159	278	171	149	213	121	157	160	156	46	284	151	164	2.049	188

Sumber : Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau

Berdasarkan Tabel di atas, luas tanam padi Kota Lubuk Linggau dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025 yakni seluas 2.049 hektare atau 95% dari target. LBS di Kota Lubuk Linggau mencapai 1.129 hektare dengan LBS aktif 1.092 hektare atau sekitar 96,7 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa infrastruktur pendukung pertanian telah berfungsi secara efektif pada sebagian besar kecamatan. Lubuk Linggau Selatan II menjadi wilayah dengan jumlah LBS terbesar yaitu 595 hektare, diikuti Lubuk Linggau Utara I sebanyak 246 hektare, dan Lubuk Linggau Barat I sebanyak 134 hektare. Dari sisi realisasi tanam, capaian tanam seluruh kecamatan mencapai 2.049 hektare, dengan kontribusi terbesar tetap berasal dari Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II. Nilai Indeks Pertanaman (IP) juga relatif tinggi dengan rata-rata mencapai 188.

Namun demikian, analisis lebih mendalam menunjukkan terdapat kesenjangan antara potensi infrastruktur dengan capaian realisasi di masing-masing wilayah. Kasus Kecamatan Lubuk Linggau Timur II menjadi perhatian khusus karena meskipun memiliki keberadaan LBS, kondisi LBS tersebut tercatat tidak aktif sehingga wilayah ini tidak memberikan kontribusi terhadap realisasi tanam maupun peningkatan IP. Berdasarkan penelusuran di lapangan LBS di Kota Lubuk Linggau telah beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan operasional seperti keterbatasan sumber air, kerusakan jaringan irigasi, atau kendala kelembagaan petani. Faktor ini membedakannya dengan kecamatan lain yang memiliki jumlah LBS lebih sedikit tetapi mampu mengoptimalkan fungsinya.

Dari hasil penelusuran di lapangan, masih terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat pertanaman antara lain :

- (1) Ketersediaan alsintan olah lahan (traktor roda 2) belum mampu meng-cover keseluruhan luas baku sawah, traktor roda 2 yang tersedia saat ini harus dilakukan pergiliran pakai oleh petani yang ingin mengolah lahan, berdasarkan data alokasi bantuan alsintan prapanen tahun 2023, jumlah traktor roda dua sebanyak 5 unit, dimana tahun 2024 Kota Lubuk Linggau tidak mendapat alokasi bantuan traktor;

Tabel 30. Alokasi Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian Prapanen untuk Kota Lubuk Linggau

Jenis Bantuan Alsintan														
Cultivator		Pompa Air				TR 2				TR 4				JUMLAH
2022	2023	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
-	1	3	-	6	-	2	3	-	-	-	1	-	-	16

- (2) Terdapat 10 titik jaringan irigasi jebol yang menyebabkan air tidak sampai ke lahan karena debit air kecil, petani di 4 (empat) kelompok tani tidak bisa optimal dan sering kali mundur tanam selama ini, lokasi di jaringan irigasi D.I. Air Malus-Batu Pepe Kota Lubuk Linggau, tepatnya di Kelurahan Petanang Ilir, Kecamatan Lubuk Linggau Utara I dengan panjang saluran keseluruhan 2.000 meter dan total lahan terdampak 110 Ha; Terkait laporan tanggung jebol di saluran primer dan sekunder D.I. Air Malus-Batu Pepe Kota Lubuk Linggau, tepatnya di Kelurahan Petanang Ilir, Kecamatan Lubuk Linggau Utara I, Dinas PUPR Kota Lubuk Linggau melakukan pengeringan saluran berupa penutupan pintu air untuk mendukung kegiatan peningkatan jaringan irigasi mulai dari 01 September s/d 31 Desember 2025. Total lahan sawah yang terdampak seluas 110 ha. Panjang saluran yang diperbaiki yaitu 1.175 m dengan dimensi 150 cm x 110 cm. Penurunan debit air irigasi selama proses pekerjaan rehabilitasi sehingga terdapat lahan sawah yang belum dapat dialiri air akibat pengeringan saluran.
- (3) Kondisi air atau irigasi yang tidak merata sehingga hal itu dapat memicu konflik sosial antar petani yang merasa bahwa air atau irigasi yang mereka terima tidak sama rata;
- (4) Jadwal tanam yang tidak serentak menyebabkan umur antara tanaman padi petani yang satu dengan tanaman padi lain tidak sama, sehingga apabila tanaman padi terserang OPT dominan seperti penggerek batang wereng, maka tidak dapat dilakukan pengendalian secara serentak, hal ini akan berdampak pada penurunan hasil produksi petani di Kota Lubuk Linggau.

Secara keseluruhan, berdasarkan data faktual di lapangan menunjukkan bahwa Kota Lubuk Linggau telah berada pada jalur yang positif dalam memanfaatkan infrastruktur pertanian, namun pemerataan keberhasilan di seluruh kecamatan perlu terus ditingkatkan melalui intervensi, pendampingan, alokasi bantuan, dan optimalisasi teknologi pertanian.

5.1.PENDAMPINGAN LUAS TAMBAH TANAM PADI GOGO

5.2.1. KABUPATEN GAN KOMERING ULU (OKU)

Kegiatan pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Gogo di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) merupakan bagian dari strategi peningkatan produksi pangan nasional melalui pengembangan padi lahan kering. Padi gogo dipilih karena memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap kondisi lahan kering dan tadah hujan, sehingga diharapkan dapat menjadi alternatif pengembangan komoditas pangan di wilayah dengan keterbatasan sumber air.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 458/Kpts./PW.020/M/06/2025, target luasan kegiatan LTT Padi Gogo di Kabupaten OKU Tahun 2025 ditetapkan sebesar 756 hektar. Selanjutnya, melalui SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 500.6.10/OS/KPTS/XXXVII/01/2025 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Budidaya Padi Lahan Kering, ditetapkan luasan CPCL sebesar 330 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten OKU.

Perkembangan Lokasi dan Luasan Kegiatan

Hasil evaluasi lapangan menunjukkan adanya penyesuaian dan pengalihan lokasi kegiatan LTT Padi Gogo. Pada awal perencanaan, kegiatan di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Lengkiti, direncanakan seluas 200 hektar. Namun, berdasarkan kesiapan lahan dan kondisi teknis di lapangan, luasan tersebut direalisasikan hanya sebesar 117 hektar. Sisa luasan sebesar 83 hektar dialihkan ke dua lokasi baru, yaitu Desa Tungku Jaya, Kecamatan Sosoh Buay Rayap seluas 25 hektar, dan Desa Air Wall, Kecamatan Lubuk Batang seluas 58 hektar.

Pengalihan lokasi ini dilakukan sebagai langkah penyesuaian untuk memastikan kegiatan penanaman padi gogo dapat dilaksanakan pada lahan yang lebih siap secara teknis dan agronomis. Adapun rincian luasan kegiatan pengembangan padi gogo di Kabupaten OKU tersebar pada lima kecamatan/desa dengan total luasan sebagaimana tercantum dalam Tabel 31.

Tabel 31. Rincian Luasan Kegiatan Padi Gogo Kab. OKU

No	Kecamatan	Desa	KUD	Luas
1	Lubuk Batang	Markisa (SP2)	KUD Perkasa Jaya	100
2	Lengkiti	Negeri Ratu	KUD Ambilan Maju Lestari	117
3	Peninjauan	Penilikan (SP4)	KUD Baru Makmur	30
4	Lubuk Batang	Air Wall (SP1)	KUD Keluarga Bahagia	58
5	Sosoh Buay Rayap	Tungku Jaya	Makarti Karya Makmur	25

Progres Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mendukung pelaksanaan LTT Padi Gogo, pada bulan Mei 2025 Dinas Pertanian Kabupaten OKU telah menerima sarana produksi berupa herbisida dari tim penyedia barang. Herbisida yang diterima berupa herbisida sistemik pra-tumbuh dan purna-tumbuh sebanyak 33 dus (CBA-6 865 SL) yang didistribusikan ke tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lubuk Batang sebanyak 10 dus, Kecamatan Lengkiti sebanyak 20 dus, dan Kecamatan Peninjauan sebanyak 3 dus. Seluruh herbisida tersebut telah disalurkan kepada kelompok tani melalui ketua kelompok atau KUD masing-masing.

Selain herbisida, pada bulan yang sama juga telah dilakukan distribusi benih padi gogo varietas Inpago 13 Portiz sebanyak 6.600 kg kepada petani penerima manfaat melalui ketua kelompok tani/KUD. Distribusi sarana produksi ini diharapkan dapat mendukung percepatan pelaksanaan tanam padi gogo di lokasi CPCL yang telah ditetapkan.

Realisasi Luas Tambah Tanam

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tahun 2025, realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Gogo di Kabupaten OKU tercatat sebesar 65 hektar, dengan sebaran realisasi di lima lokasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 4. Kecamatan Lengkiti dan Kecamatan Peninjauan masing-masing merealisasikan 18 hektar, Kecamatan Sosoh Buay Rayap sebesar 25 hektar, Kecamatan Lubuk Batang Desa Air Wall sebesar 4 hektar, sedangkan Desa Markisa (SP2) di Kecamatan Lubuk Batang belum terealisasi.

Tabel 32. Realisasi LTT Pengembangan Padi Lahan Kering Kab. OKU Tahun 2025

No	Kecamatan	Desa	KUD	Luas
1	Lubuk Batang	Markisa (SP2)	KUD Perkasa Jaya	0
2	Lengkiti	Negeri Ratu	KUD Ambilan Maju Lestari	18
3	Peninjauan	Penilikan (SP4)	KUD Baru Makmur	18
4	Lubuk Batang	Air Wall (SP1)	KUD Keluarga Bahagia	4
5	Sosoh Buay Rayap	Tungku Jaya	Makarti Karya Makmur	25
	Jumlah			65

Secara kumulatif, total capaian LTT Padi Gogo hingga Bulan Desember 2025 mencapai 65 hektar, 19,69% dari 330 ha target daerah atau sebesar 8,59% dari target nasional yang ditetapkan dalam Kepmentan sebesar 756 hektar. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi kegiatan masih jauh dari target yang telah direncanakan.

Rendahnya capaian realisasi LTT Padi Gogo di Kabupaten OKU dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, efektivitas herbisida yang dibagikan dinilai kurang optimal dalam mengendalikan gulma daun sempit, khususnya jenis lulan dan tekian. Meskipun telah dilakukan aplikasi herbisida setelah olah lahan dengan dosis 120–150 cc per kap, gulma tersebut tidak mati sempurna dan kembali tumbuh subur pada umur tanaman sekitar 21 hari setelah tanam (HST). Kondisi ini menyebabkan persaingan hara, air, dan cahaya yang cukup tinggi sehingga mengganggu pertumbuhan padi gogo.

Kedua, keterbatasan modal petani menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan kegiatan. Petani merasa keberatan untuk menambah biaya pengolahan lahan dan pembelian herbisida tambahan. Berdasarkan perkiraan di lapangan, kebutuhan herbisida untuk pengendalian gulma mencapai 5–7 liter per hektar, ditambah dengan biaya upah penyemprotan. Keterbatasan kemampuan finansial petani berdampak pada rendahnya minat dan kesiapan petani untuk melaksanakan tanam padi gogo sesuai rencana.

Ketiga, faktor iklim turut memengaruhi perkembangan tanaman. Pada periode Oktober hingga Desember 2025, curah hujan masih tergolong rendah meskipun frekuensinya mulai meningkat. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan air bagi tanaman padi gogo belum optimal, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi terhambat, terutama pada fase awal pertumbuhan.

Keempat, di beberapa lokasi kegiatan terdapat kondisi tanaman sawit yang telah berumur sekitar 32 bulan dan berukuran relatif besar. Kanopi tanaman sawit yang semakin menutup menyebabkan intensitas cahaya matahari yang sampai ke tanaman padi gogo berkurang. Keterbatasan cahaya ini berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman sisipan padi gogo, sehingga produktivitas dan keberhasilan pertanaman menjadi kurang optimal.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dan pembahasan perkembangan Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Gogo di Kabupaten Ogan Komering Ulu hingga Tahun 2025, diperlukan beberapa langkah perbaikan dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Perbaikan Dukungan Sarana Produksi

Perlu dilakukan evaluasi terhadap jenis dan efektivitas herbisida yang digunakan, khususnya untuk pengendalian gulma daun sempit seperti lulan dan tekian. Ke depan, disarankan penggunaan herbisida yang lebih spesifik dan sesuai dengan karakteristik gulma dominan di lahan padi gogo, serta didukung dengan rekomendasi dosis dan waktu aplikasi yang tepat.

2. Penguatan Pembiayaan dan Modal Petani

Diperlukan dukungan pembiayaan tambahan bagi petani, baik melalui bantuan sarana produksi lanjutan, subsidi herbisida, maupun fasilitasi akses petani terhadap kredit usaha tani. Penguatan modal ini penting agar petani tidak terbebani biaya tambahan dalam pengolahan lahan dan pengendalian gulma.

3. Peningkatan Pendampingan Teknis di Lapangan

Intensitas pendampingan oleh penyuluh pertanian dan petugas teknis perlu ditingkatkan, khususnya

pada tahap persiapan lahan, pengendalian gulma terpadu, dan pemeliharaan tanaman. Pendampingan yang lebih intensif diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan petani dalam mengembangkan padi gogo.

4. Penyesuaian Waktu Tanam dengan Kondisi Iklim

Penetapan waktu tanam padi gogo perlu lebih disesuaikan dengan pola curah hujan setempat. Koordinasi dengan instansi terkait dalam pemanfaatan informasi prakiraan iklim sangat diperlukan agar kegiatan tanam dapat dilakukan pada periode yang lebih mendukung pertumbuhan tanaman.

5. Penataan Lokasi dan Kesesuaian Lahan

Seleksi lokasi kegiatan perlu lebih difokuskan pada lahan yang memiliki tingkat keterbukaan cahaya yang cukup. Pada lahan tumpangsari dengan tanaman tahunan seperti kelapa sawit, disarankan agar kegiatan padi gogo diarahkan pada tanaman sawit dengan umur belum menghasilkan atau dilakukan pengaturan jarak tanam dan pemangkasan tajuk untuk mengurangi naungan berlebihan.

6. Penguatan Komitmen Kelompok Tani dan KUD

Perlu adanya penguatan komitmen kelompok tani dan KUD penerima melalui sosialisasi, kesepakatan bersama, serta monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sarana produksi dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan rencana kegiatan.

7. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Monitoring dan evaluasi kegiatan LTT Padi Gogo perlu dilakukan secara berkala dan berjenjang, mulai dari tingkat kelompok tani hingga kabupaten. Hasil monitoring tersebut dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, penyesuaian kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan kegiatan pada periode selanjutnya.

5.2..2. KABUPATEN LAHAT

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Kpts./OT.050/M/01/2025 tentang Satuan Tugas Pengembangan Padi Lahan Kering dalam rangka Mendukung Swasembada Pangan, telah ditetapkan target luas tanam padi lahan kering (padi gogo) di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, seluas 557,10 hektar. Dalam rangka mendukung pencapaian target tersebut, Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan ditunjuk sebagai anggota satuan tugas dan Penanggung Jawab Pendamping di Kabupaten Lahat. Tugas pendampingan yang dilakukan tim BRMP Sumsel meliputi: identifikasi lokasi, verifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), pendampingan teknis kepada petani, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanaman padi gogo di lapangan.

A. Pengusulan dan Penetapan SK CPCL

Dalam upaya mempercepat pelaksanaan program pengembangan padi lahan kering (padi gogo) di Kabupaten Lahat, tim Swasembada Pangan BRMP Sumatera Selatan melaksanakan pendampingan intensif terhadap proses identifikasi, verifikasi, dan pengusulan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL). Proses identifikasi, verifikasi, dan penyusunan usulan CPCL di Kabupaten Lahat dilakukan oleh Dinas Perkebunan yang berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Lahat, sementara Tim BRMP Sumsel mengawal pengusulan tersebut ke Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian untuk memastikan data yang diusulkan dapat ditetapkan secara resmi dan sesuai dengan ketentuan. Pendampingan ini menjadi langkah kunci untuk memastikan bahwa setiap lokasi dan petani yang diusulkan benar-benar memenuhi persyaratan teknis serta siap melaksanakan kegiatan penanaman sesuai target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, Kabupaten Lahat mengusulkan CPCL dengan total luasan 207 hektar, terdiri dari:

1. Desa Bunga Mas, Kecamatan Kikim Timur seluas 107 Ha.

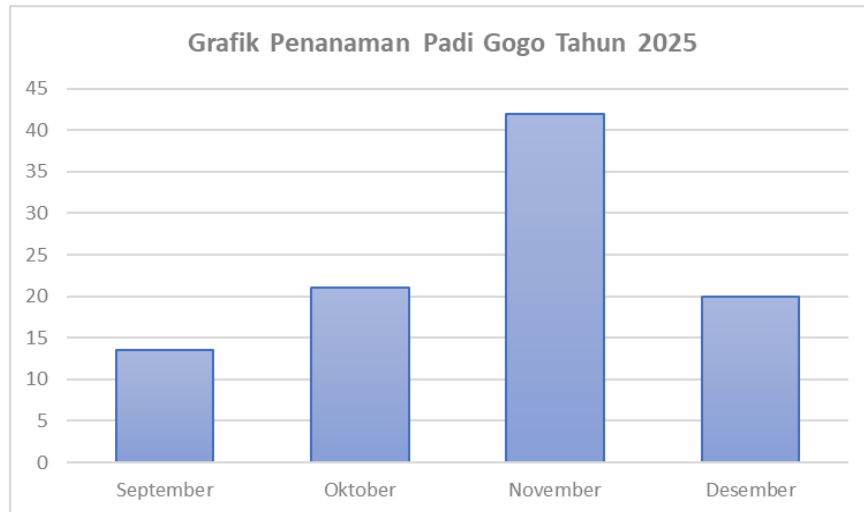
Petani yang diusulkan merupakan peserta program kredit bibit sawit bekerja sama dengan PT PCM. Program kredit ini memberikan akses pembiayaan bagi petani untuk memperoleh bibit kelapa sawit unggul, tetapi pada masa tanaman belum menghasilkan (TBM), petani belum memperoleh pendapatan sehingga membutuhkan sumber penghasilan alternatif.

2. Desa Kencana Sari, Kecamatan Kikim Timur seluas 100 Ha.

Petani merupakan anggota KUD Permai Jaya, sebuah kelembagaan yang aktif mendukung penguatan usaha tani dan koordinasi kelompok tani.

B. Capaian Realisasi LTT Padi Gogo

Berdasarkan hasil pemantauan dan pelaporan hingga bulan Desember 2025, realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi gogo di Kabupaten Lahat mencapai 96,50 hektar yang bisa dilihat pada Gambar 1 dengan rincian September (13,5 ha), Oktober (21 ha), November (42 ha) dan Desember (20 ha). Capaian ini bersumber dari kegiatan penanaman yang tersebar pada beberapa desa di Kecamatan Kikim Timur dan Kikim Barat, yaitu Bunga Mas, Kencana Sari, Gunung Karto, Batu Urip, Mekar Jaya, dan Marga Mulya. Seluruh data realisasi dihimpun melalui laporan penyuluh pertanian lapangan (PPL), diverifikasi oleh Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian Kabupaten Lahat, serta dikawal oleh Tim BRMP Sumsel sebelum diteruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Gambar 1)



Gambar 2. Realisasi LTT Padi Gogo Kab. Lahat Periode September-Desember 2025

Realisasi LTT menunjukkan adanya progres bertahap sepanjang bulan September hingga Desember 2025. Tahapan ini dapat dilihat dari peningkatan frekuensi penanaman serta distribusi luasan pada setiap titik lokasi. Pergerakan ini menggambarkan dinamika kesiapan petani, ketersediaan sarana produksi, serta kondisi lingkungan yang menjadi penentu utama keberhasilan penanaman padi lahan kering di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun realisasi LTT masih berada di bawah target keseluruhan usulan CPCL, perkembangan ini menunjukkan pergerakan positif. Pendampingan lanjutan serta peningkatan kesiapan sarana produksi diperkirakan dapat mendorong percepatan realisasi pada musim tanam berikutnya. Beberapa faktor utama berperan dalam menentukan besarnya capaian LTT, yaitu:

1. Ketersediaan benih tepat waktu

Kelancaran distribusi benih sangat mempengaruhi kecepatan tanam. Pada beberapa desa, penundaan distribusi menyebabkan penanaman baru dapat dilakukan pada pertengahan Oktober.

2. Kondisi cuaca dan ketersediaan air

Curah hujan yang fluktuatif pada periode September–Oktober menuntut petani untuk menyesuaikan waktu tanam. Padi gogo sangat bergantung pada kelembapan tanah di awal penanaman, sehingga sebagian desa memilih menunggu kondisi yang lebih stabil.

3. Kesiapan lahan dan kapasitas kelompok tani

Proses pembukaan lahan, pembersihan gulma, dan penataan area tanam membutuhkan waktu yang berbeda pada tiap desa. Hal ini mempengaruhi kecepatan capaian LTT harian.

4. Koordinasi lintas lembaga

Efektivitas koordinasi antara Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, penyuluh, pemerintah desa, dan Tim BRMP Sumsel menjadi faktor penting dalam memastikan pendataan, pengawalan teknis, serta pelaporan berjalan optimal.

C. Kendala Pelaksanaan Kegiatan LTT Padi Gogo Kab. Lahat Tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan penanaman padi gogo di Kabupaten Lahat tahun 2025 menghadapi berbagai kendala teknis, administratif, dan kelembagaan yang mempengaruhi kelancaran realisasi LTT. Kendala-kendala ini memberikan gambaran penting mengenai kondisi lapangan yang perlu menjadi perhatian dalam penyempurnaan program pada musim tanam berikutnya. Secara umum, beberapa kendala utama yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan Turunnya Hujan

Belum turunnya hujan pada awal pelaksanaan kegiatan menjadi kendala terbesar dalam proses tanam padi gogo. Kondisi tanah yang masih kering menyebabkan petani menunda kegiatan penugalan karena risiko gagal tumbuh meningkat apabila penanaman dilakukan sebelum tanah memperoleh kelembapan yang memadai. Situasi ini berdampak langsung pada keterlambatan jadwal tanam di beberapa desa, terutama yang mengandalkan curah hujan sebagai satu-satunya sumber air untuk budidaya lahan kering.

2. Pertumbuhan Gulma yang Tinggi pada Lahan Sawit

Pada sebagian besar lokasi, terutama di kawasan kebun sawit muda, ditemukan pertumbuhan gulma yang cukup tinggi. Gulma yang dominan berupa rerumputan dan semak liar menutupi area tanam, sehingga menyulitkan petani dalam proses penugalan. Kondisi ini membutuhkan tenaga kerja tambahan serta waktu lebih lama untuk pembersihan lahan. Namun demikian, bantuan herbisida yang diterima belum mencukupi, sehingga tidak semua lahan dapat dikendalikan gulmanya secara optimal. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan herbisida ini menjadi kendala signifikan dalam mempercepat proses pembukaan lahan.

3. Kendala Pemahaman Teknis dalam Pengambilan Foto Berkoordinat

Sebagian petani dan kelompok tani menghadapi kesulitan dalam melakukan pengambilan foto berkoordinat (*geotagging*) sebagai bukti tanam yang diwajibkan dalam pelaporan. Kurangnya pemahaman mengenai cara penggunaan aplikasi GPS pada telepon seluler, keterbatasan jenis perangkat yang dimiliki petani, serta lemahnya sinyal di beberapa lokasi menyebabkan proses dokumentasi lapangan tidak berjalan optimal. Akibatnya, beberapa laporan tanam perlu diverifikasi ulang, sehingga memperlambat alur pelaporan dari PPL ke dinas dan BRMP Sumsel.

4. Penundaan Penanaman di Desa Bunga Mas Karena Status Lahan karena Kendala Administrasi

Di Desa Bunga Mas dan beberapa lokasi lain, petani yang merupakan peserta program kredit bibit sawit bekerja sama dengan PT PCM masih menghadapi kendala administrasi terkait status lahan dan kesesuaian dokumen kredit. Status lahan yang belum sepenuhnya clean and clear menyebabkan kegiatan penanaman tertunda karena petani belum diperbolehkan melakukan olah lahan. Proses penyelesaian administrasi membutuhkan waktu, sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan LTT dan mengurangi jumlah realisasi yang seharusnya dapat dicapai lebih awal.

5. Petani Mengundurkan Diri Karena Tekanan Gulma dan Keterbatasan Sarana

Di Desa Kencana Sari terjadi kasus pengunduran diri petani dari program akibat kondisi gulma yang sudah terlalu tinggi dan tidak tersedianya herbisida yang cukup untuk melakukan pengendalian. Kondisi ini membuat petani merasa kesulitan untuk menyiapkan lahan secara efisien dan menilai bahwa risiko kegagalan lebih besar apabila tetap melanjutkan kegiatan tanam. Situasi ini menggambarkan pentingnya intervensi sarana produksi yang tepat waktu agar petani tidak kehilangan motivasi dalam mengikuti program.

D. Solusi dan Rekomendasi Perbaikan Pelaksanaan LTT Padi Gogo di Kabupaten Lahat

Untuk mengatasi kendala yang terjadi dan memastikan pelaksanaan kegiatan LTT padi lahan kering berjalan lebih optimal pada musim tanam berikutnya, diperlukan langkah-langkah penanganan yang sistematis dari berbagai pihak. Sejalan dengan evaluasi lapangan dan hasil koordinasi antarinstansi, beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Penetapan Lokasi Alternatif

Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat akan menindaklanjuti kendala lahan yang belum *clean and clear* dengan melakukan identifikasi lokasi alternatif, terutama di wilayah Kikim yang memiliki potensi lahan kering cukup luas. Lokasi alternatif akan menyasar petani yang telah menerima bantuan benih sawit dari Ditjen Perkebunan, sehingga lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih produktif sambil menunggu sawit memasuki fase menghasilkan. Langkah ini diharapkan dapat menambah realisasi LTT sekaligus memberikan solusi bagi petani sawit TBM yang membutuhkan penghasilan tambahan.

2. Penguatan Koordinasi Lintas Instansi

Dinas Perkebunan akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Lahat, khususnya dalam hal pengorganisasian kelompok tani. Penguatan ini penting mengingat petani peserta program harus terdaftar dalam Simluhtan agar proses penetapan CPCL, pendampingan, dan penyaluran bantuan dapat dilakukan sesuai ketentuan. Koordinasi intensif diperlukan untuk:

- Memastikan kelompok tani aktif dan memiliki struktur kepengurusan yang jelas,
- Menjamin keanggotaan petani yang terlibat telah valid dan tercatat di Simluhtan,
- Menyelaraskan data CPCL antara dinas dan penyuluh dengan data Ditjen Perkebunan.

3. Pendampingan Intensif dari BRMP Sumsel

BPRMP Sumsel akan terus mengawal pelaksanaan kegiatan melalui pendampingan teknis, verifikasi lapangan, dan koordinasi berkala dengan dinas dan penyuluh. Pendampingan akan diarahkan pada:

- Membantu petani memahami teknik budidaya padi gogo yang sesuai dengan kondisi lahan kering,
- Memastikan proses pengambilan foto berkoordinat dilakukan dengan benar,
- Memantau perkembangan penyiapan lahan dan kebutuhan sarana produksi,
- Memberikan rekomendasi teknis terkait pengendalian gulma, pengolahan lahan, dan penjadwalan tanam berdasarkan curah hujan.

4. Penyediaan dan Penyaluran Sarana Produksi yang Tepat Waktu

Untuk mengatasi tingginya pertumbuhan gulma serta keterbatasan herbisida, diperlukan perencanaan yang lebih baik dalam distribusi sarana produksi. Rekomendasi yang perlu diupayakan antara lain:

- Penyaluran bantuan agar dilakukan sebelum puncak musim tanam,
- Pengaturan jadwal distribusi berdasarkan tingkat kesiapan lapangan di setiap desa.

5. Pelatihan Teknis Pengambilan Foto Berkoordinat (*Geotagging*)

Untuk meningkatkan akurasi pelaporan, disarankan dilaksanakan pelatihan penggunaan aplikasi geotagging bagi petani dan ketua kelompok tani. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh penyuluh bersama BRMP, dengan cakupan:

- Cara mengambil foto berkoordinat,
- Cara memeriksa validitas titik koordinat,
- Pengiriman foto sebagai bukti tanam melalui grup komunikasi atau aplikasi pelaporan.

Pelatihan ini akan mengurangi kesalahan pelaporan dan mempercepat proses verifikasi.

6. Penyelesaian Kendala Administrasi Lahan

Bagi petani peserta program kredit bibit sawit, terutama yang bermitra dengan PT PCM, penyelesaian administrasi lahan perlu diprioritaskan agar status lahan menjadi clean and clear sebelum kegiatan dimulai. Rekomendasi untuk hal ini meliputi:

- Koordinasi formal antara PT PCM, petani, dan Dinas Perkebunan,
- Penyusunan daftar lahan siap tanam yang telah memenuhi persyaratan administrasi,
- Pendampingan petani dalam memahami dokumen dan aturan terkait kredit bibit sawit.

7. Peningkatan Motivasi dan Retensi Petani dalam Program

Untuk mengurangi kasus petani mundur akibat gulma atau keterbatasan sarana, diperlukan:

- Sosialisasi manfaat ekonomi padi gogo bagi petani sawit TBM,
- Intervensi awal berupa pembersihan gulma terkoordinasi,
- Pendekatan kelompok untuk memastikan dukungan antarpetani saat menghadapi kendala lapangan.

8. Penjadwalan Tanam yang Lebih Responsif terhadap Pola Hujan

Menghadapi tantangan cuaca, perlu diterapkan sistem kalender tanam berbasis prediksi curah hujan daerah (*climate smart agriculture*). Penyuluh dan BRMP dapat memberikan rekomendasi waktu tanam ideal berdasarkan:

- Awal musim hujan lokal,
- Kelembapan tanah,
- Ketersediaan air pada minggu-minggu pertama pascatanam.
-

5.2.3. KABUPATEN MUSIRAWAS

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 808/Kpts./KP.250/A/09/2025 tentang Penanggungjawab Provinsi dan Kabupaten /Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan, telah ditetapkan target luas tanam padi lahan kering (padi gogo) di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 sebesar **30.324 hektar**. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperluas areal tanam padi di luar lahan sawah irigasi, sekaligus sebagai langkah adaptif terhadap keterbatasan lahan sawah dan perubahan iklim.

Dalam rangka mendukung pencapaian target tersebut, Kepala Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan ditunjuk sebagai anggota Satuan Tugas Pengembangan Padi Lahan Kering sekaligus sebagai **Penanggung Jawab Pendamping** di beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya di **Kabupaten Musi Rawas**. Kabupaten **Musi Rawas** ditetapkan memperoleh target pengembangan padi lahan kering pada tahun 2025 seluas 1.368 **hektar**.

Progres Pelaksanaan Padi Gogo di Kab. Musirawas

A. Pengusulan dan Penetapan CPCL

Sebagai tindak lanjut percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam hal identifikasi, verifikasi, dan penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Kegiatan Tumpang Sisip Padi Gogo (Tusippago) oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas dan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.

Kabupaten Musi Rawas mengusulkan CPCL untuk kegiatan Tumpang sisip padi gogo seluas 575 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan sebagai berikut : BTS Ulu, Tuah Negeri, Sumber Harta, Sukakarya, dan Muara Lakitan. (Tabel 33)

Tabel 33. Rincian Usulan CPCL Tumpang Sisip Padi Gogo Kab. Musi Rawas 2025

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kel. Tani	Luas Lahan (Ha)
1.	Sumber Harta	1	1	14
2.	Suka Karya	6	9	100
3.	BTS Ulu	8	12	294
4.	Tuah Negeri	5	15	97
5.	Muara Lakitan	5	5	70
Total		25	42	575

Pelaksanaan kegiatan Tusippago seluas 575 hektar, petani dibantu benih varietas Inpago Fortis 13 sebanyak 20 Kg/Ha, Herbisida 2 Liter/Ha dan Insektisida 1 Liter/Ha.

Selain Program Kegiatan Tumpang Sisip Padi Gogo di Kabupaten Musi Rawas, petani melaksanakan pengembangan tanaman padi gogo secara swadaya dengan menanam padi gogo varietas local yaitu Dayang Rindu. Pada tahun 2025 tercatat 900 Ha yang tersebar di beberapa kecamatan, antara lain :

Tabel 34. Rincian Padi Gogo Swadaya Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025

No.	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)
1.	Jayaloka	
2.	Suka Karya	100
2.	Muara Kelingi	100
3.	BTS Ulu	175
4.	Tuah Negeri	200
5.	Muara Lakitan	200
6.	Megang Sakti	10
	Total	900

Tabel 35. Capaian Realisasi LTT Padi Gogo Kab. Musirawas Tahun 2025

No	Kecamatan	APBN	Non APBN	Total
1	STL Ulu Terawas	0	0	0
2	Selangit	0	6	6
3	Sumberharta	14	0	14
4	Tugumulyo	0	0	0
5	Purwodadi	0	0	0
6	Muara Beliti	0	0	0
7	TP Kepungut	0	0	0
8	Jayaloka	0	70	70
9	Suka Karya	101	63,5	164
10	Muara Kelingi	0	291,3	291,3
11	BTS Ulu	294	233,3	527,3
12	Tuah Negeri	98	165,5	263
13	Muara Lakitan	67	89,5	156,5
14	Megang Sakti	0	53	53
	Jumlah	573	972,0	1.549

Berdasarkan hasil pemantauan selama Tahun 2025, realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) Tumpang Sisip padi gogo APBN di Kabupaten Musi Rawas dengan total realisasi **seluas 1.549 ha**, dengan reals LTT pago APBN 574 **hektar**, Sedangkan padi gogo swadaya 976 ha. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditentukan dalam Kepmentan **seluas 1.368 ha (113,23%)**.

Dari data tersebut terlihat Kabupaten Musi Rawas berpotensi berkembangnya padi gogo baik dengan penanaman varietas lokal maupun varietas unggul baru. Dengan angka capaian realisasi LTT padi lahan kering diatas memberikan dampak positif terhadap peningkatan potensi produksi padi di Kabupaten. Selain mendukung pencapaian target swasembada pangan di tingkat provinsi, keberhasilan ini juga membuka peluang baru bagi petani dalam memanfaatkan lahan kering sebagai sumber produksi pangan dan peningkatan pendapatan.

B. Pendampingan Gerakan Tanam Padi Gogo Swadaya Petani

Dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional Pemerintah Daerah dan Pusat terus bersinergis hal ini dibuktikan dengan melakukan Gerakan Tanam padi gogo seluas 6 ha dilahan Kelompok Tani Mawar Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musirawas. Kegiatan pendampingan dilakukan 18-19 September 2025 yang dihadiri oleh PJ Swasembada Pangan Kabupaten Musi Rawas, Tim Satgas Swasembada Pangan BRMP Sumsel, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas, Kepala Bidang Tanaman Pangan, KJF Penyuluh, Ketua KTNA Kabupaten Musi Rawas, Camat Jayaloka, Kepala Desa Ngestiboga I, Kepala BPP, Para Penyuluh, serta Petani Anggota Poktan Mawar. Kegiatan dimulai dengan menggelar gerakan tanam padi gogo dengan sistem Tusip tanaman sawit. Kegiatan dirangkai dengan pertemuan diskusi bersama dilapangan. Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi pihak kabupaten, penyuluh dan petani dalam percepatan relaisai tanam Padi gogo di Kab. Musirawas dan Kecamatan Jayaloka khususnya. Relaisai tanam padi Gogo saat ini mencapai 31 ha, dan kecamatan Jayaloka 8 ha.

Saat diskusi disampaikan permasalahan dilapangan dan tindak lanjutnya. Ditegaskan juga dalam pencapaian target y ditetapkan peran aktif penyuluh sangat diperlukan dalam mendorong semangat petani dan pendampingan dilapangan, optimisme terhadap capaian LTT dan mengingatkan agar laporan LTT senantiasa dilaporkan dengan baik.

B. Pendampingan Benih Padi Gogo dan Percepatan Tanam Tahun 2025

- Tanam bersama padi gogo diantara tanaman sawit dengan varietas Inpago 13 Fortiz yang berlokasi di Kelompo tani Maju Bersama Desa Cipto di Kecamatan Suka Karya di lahan seluas lebih kurang 3 hektare. Sedangkan petani lainnya akan mulai melakukan pertanaman akhir Oktober 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Penanggung Jawab Kabupaten Musi Rawas dan Tim Swasembada BPRMP Sumsel, Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas dan tim, Penyuluh, Gapoktan dan Petani Kecamatan Sukakarya.
- Setelah melakukan tanam dilanjutkan dengan menggelar pertemuan sebagai langkah awal untuk menghidupkan kembali kegiatan kelompok. Pertemuan yang berlangsung di lokasi sawit ini berlangsung sangat antusias dengan membahas percepatan tanam padi gogo dimana benih inpago Fortiz 13 yang sudah diterima oleh petani agar segera ditanam. Selain itu juga disampaikan Varietas Inpago 13 Fortiz dipilih karena ketahanannya terhadap kondisi lahan kering serta potensi hasil yang menjanjikan. Sebagai salah satu varietas unggul baru (VUB), Inpago 13 Fortiz lebih toleran terhadap kekeringan pada fase vegetatif dan memiliki potensi hasil tinggi. Panen ini menjadi bagian dari strategi memperluas jangkauan produksi padi di luar lahan sawah irigasi.
- Dalam sesi tanya jawab, salah satu petani penggarap, mengeluhkan agar selain benih yang diterima, didukung dengan bahan pendukung lainnya seperti pupuk dan juga pemberian pestisida dan herbisida

sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sementara itu, pertanaman padi gogo ini sudah telah dilakukan di Kecamatan Suka Karya seluas 47 hektare dari target 100 hektare.

- Pendampingan percepatan padi gogo ke Kecamatan Tuah Negeri dengan melakukan pertemuan di BPP yang dihadiri oleh Penyuluh dan Petani penerima bantuan Benih Padi. Kegiatan ini membahas terkait perkeambangan percepatan tanam padi gogo dan permasalahan yang dihadapi oleh petani termasuk juga saluran irigasi. Pertanaman sudah dilakukan seluas 89 hektare dari target 97 hektare.
- Kegiatan dimulai dengan menggelar gerakan tanam padi gogo dengan sistem Tusip tanaman sawit. Kegiatan dirangkai dengan pertemuan diskusi bersama dilapangan. Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi pihak kabupaten, penyuluh dan petani dalam percepatan relaisai tanam Padi gogo di Kab. Musirawas dan Kecamatan Jayaloka khususnya. Relaisai tanam padi Gogo saat ini mencapai 31 ha, dan kecamatan Jayaloka 8 ha. Saat diskusi disampaikan permasalahan dilapangan dan tindak lanjutnya. Ditegaskan juga dalam pencapaian target y ditetapkan peran aktif penyuluh sangat diperlukan dalam mendorong semangat petani dan pendampingan dilapangan, optimisme terhadap capaian LTT dan mengingatkan agar laporan LTT senantiasa dilaporkan dengan baik.

C. Pengawalan Pendampingan dan Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT)

- Dalam rangka mendukung target nasional swasembada pangan, BRMP Sumsel melakukan percepatan tanam, Jumat 24 Oktober 2025. Penanggung Jawab Tim Swasembada Pangan BRMP Sumsel. Mengawali kegiatan dengan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan padi gogo di Kecamatan Sumber Harta. Lokasi ini merupakan salah satu lokasi yang mendapatkan bantuan benih padi gogo dari 5 Kecamatan di Kab. Musi Rawas. Target seluas 14 ha, aat ini sdh dilakulan penamaman 5 ha.
- Petani dilokasi ini biasa menanam padi gogo diantara tanaman sawit dengan menggunakan padi lokal yang berumur 5 - 6 bulan. Dengan adanya Inpago fortiz ini petani sangat antusias dengan berbagi keunggulan diantaranya mengandung kandungan zinc yang tinggi, umur 114 hari setelah tanam namun bisa sedikit bervariasi tergantung kondisi lingkungan dan produksi tinggi.
- Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke lapangan di dua lokasi pertanaman padi reguler di Poktan Primordia yang tanam seluas 24 hektare, dan di lokasi padi gogo di Poktan Karya Desa Jambu Rejo, dimana di lokasi ini benih padi gogo infortiz sudah ditanam dan sudah berumur 14 HHST seluas 5 ha. Benih akan selesai ditanam semua pada akhir bulan Oktober ini.
- Monitoring dilanjutkan dengan melakukan kunjungan ke Kecamatan BTS Ulu dengan target 294 ha, dan yang sudah tertanam 13 ha. Pada saat diskusi dengan penyuluh dan petani lambatnya penanaman dikarenakan terkendala dengan lamanya persiapan lahan. Pertanaman juga akan di tuntaskan pada akhir Oktober dan awal Nopember ini.

E. Permasalahan:

Selain mendukung pencapaian target swasembada pangan di tingkat provinsi, keberhasilan ini juga membuka peluang baru bagi petani dalam memanfaatkan lahan kering sebagai sumber produksi pangan dan peningkatan pendapatan. Namun beberapa Kendala Teknis :

1. Pembagian air DI Kelingi Tugumulyo kurang optimal antara petani ikan dan petani sawah. sehingga banyak sawah di hilir irigasi tidak mendapatkan air.
2. Kerusakan saluran sekunder DI Kelingi tugumulyo yang terletak di Desa Sukorejo, mengakibatkan 417 Ha sawah tidak bisa ditanam padi.
3. Sawah-sawah tadah hujan dan sawah irigasi yang tidak mendapat air, kebanyakan beralih komoditas ke jagung dan sawit
4. Sawah-sawah dengan pengairan baik, banyak yang beralih ke kolam ikan air deras.
5. Alsintan pra dan pasca panen masi minim sehingga menghambat pengolahan lahan
6. Pembukaan lahan yang lama karena keterbatasan alsintan

Kendala Sosial Budaya :

Di beberapa wilayah, proses tanam dan panen kebanyakan masih secara manual, karena masyarakat mengedepankan gotong royong dan juga memberikan penghasilan ke buruh tani lain. sehingga penggunaan tranplanter dan combine harvester belum optimal, dan berdampak pada proses tanam/panen yang memakan Waktu cukup lama.

Tindaklanjut:

Dengan ekstensifikasi pertanian maka lahan kering berkontribusi pencapaian target swasembada pangan ataupun pemenuhan gizi keluarga. Upaya-upaya tindakan untuk mempercepat penanaman adalah bentuk dukungan yang dilakukan dan perlu terus bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPRMP Sumsel, Penyuluh Pertanian, serta kelompok tani, diharapkan upaya peningkatan LTT di Kabupaten Musi Rawas dapat terus diakselerasi. Kontribusi bulog dalam pembelian hasil produksi serta pembayaran tepat waktu.

5.2.4. KABUPATEN EMPAT LAWANG

Pemanfaatan lahan kering merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan dalam mendukung gerakan antisipasi darurat pangan untuk dapat meningkatkan produksi pertanian nasional. Produktivitas lahan kering rata rata saat ini mempunyai tingkat produktivitas lebih rendah karena tingkat kesuburan yang rendah, namun potensi luasannya sangat tinggi. Selain produktivitas yang rendah indek pertanamannya juga belum maksimal karena ketersediaan air merupakan faktor pembatas dalam usahatani, sehingga tidak dapat dilakukan sepanjang tahun.

Potensi lahan kering dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan nasional khususnya padi bisa sangat signifikan apabila dikembangkan dan diberikan masukan sarana produksi yang tepat, sistem budidaya yang tepat dan pengelolaan serta manajemen air yang tepat karena kebutuhan air sangat berpengaruh pada lahan kering.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan lahan kering dengan penanaman padi gogo.

Dalam rangka mendukung program strategis Kementerian Pertanian, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan terus melakukan pendampingan sebagai salah satu upaya percepatan Luas Tambah Tanam (LTT), yaitu pendampingan pada tanggal 24 Juli 2025 ke lokasi yang menjadi target tambah tanam di bulan Juli 2025, memantau pertumbuhan padi gogo yang telah ditanam, serta mengecek kesiapan lokasi cetak sawah sebagai bagian dari perluasan areal tanam. Tim BRMP Sumatera Selatan didampingi Tim dari Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang, Koordinator BPP Kec. Muara Pinang, Penyuluh Pertanian Lapangan, dan Petani.

Berdasarkan Nomor 808/Kpts./KP.250/A/09/2025 tanggal 9 September 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts/PW.020/M/03/2025 tentang Penanggungjawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan, target padi gogo di Kabupaten Empat Lawang adalah 48 ha. Namun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang Nomor 520/04/KEP/PERTANIAN/2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang Usulan Kelompok Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Penerima Manfaat Bantuan Benih Padi Gogo dalam Program Pengembangan (Tumpang Sari/Intercropping) di Lahan Perkebunan Sawit, Perkebunan Karet atau Perkebunan Lainnya dalam rangka mendukung Swasembada Pangan Nasional di Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan semula target padi gogo di Kabupaten Empat Lawang adalah 48 ha menjadi 60 ha. Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) tersebut dapat dilihat pada Tabel 36.

Tabel 36. Calon Petani Calon Lokasi Penerima Manfaat Bantuan Benih Padi Gogo di Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2025

No	Lokasi	Kelompok Tani	Nama Ketua	Luas Lahan	Benih	Pestisida	Herbisida
1	Air Kelinsar Kec. Ulu Musi	Talang Lama	Afrizal	20 ha	Ciherang 400 kg	20 kg/ltr	40 kg/ltr
		Flamboyan	Hana	17 ha	Ciherang 340 kg	17 k g/ltr	34 kg/ltr
2	Talang Benteng Kec. Muara Pinang	Serasan Indah	Asnawi	23 ha	Ciherang 460 kg	23 kg/ltr	46 kg/ltr
	Jumlah			60 ha	1.200 kg	60 kg/ltr	20 kg/ltr

Bantuan benih padi telah didistribusikan ke masing-masing penerima sesuai dengan SK CPCL Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 12 Maret 2025 diterima Poktan Talang Lama dan Poktan Flamboyan di Desa Air Kelinsar Kec. Ulu Musi serta Poktan Serasan Indah di Desa Talang Benteng Kec. Muara Pinang.

Bantuan herbisida sudah disalurkan ke kelompok tani pada bulan Mei 2025, sementara bantuan pestisida belum salur.

Berikut adalah capaian luas tambah tanam padi gogo di Kabupaten Empat Lawang, yaitu:

a. Bulan April 2025 seluas 31 Ha

Permasalahannya waktu tanam padi gogo bersamaan dengan waktu panen padi dan kopi sehingga petani penerima bantuan lebih memilih untuk melakukan panen padi dan kopi. Serta beberapa lahan belum siap untuk ditanami, masih perlu dilakukan pembersihan lahan.

b. Bulan Mei 2025 seluas 22,8 Ha

Permasalahannya lahan yang seharusnya ditanami padi gogo masih tertanam tanaman jagung, curah hujan masih rendah, serta minimnya tenaga kerja.

c. Bulan Juni 2025 seluas 6,2 ha.

Kondisi pertanaman padi gogo di Kabupaten Empat Lawang pertumbuhannya lambat dikarenakan kondisi lahan kering tidak mendapat cukup air dan ada beberapa tanaman yang kondisi batangnya kuning dan mengering serta bagian akarnya habis, kemungkinan terkena hama tanaman berupa orong-orong.

5.2.5. KABUPATEN PENUKAL LEMATANG ABAB ILIR (PALI)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Kpts./OT.050/M/01/2025 tentang Satuan Tugas Pengembangan Padi Lahan Kering dalam rangka Mendukung Swasembada Pangan, telah ditetapkan target luas tanam padi lahan kering (padi gogo) di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 sebesar **30.324 hektar**. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperluas areal tanam padi di luar lahan sawah irigasi, sekaligus sebagai langkah adaptif terhadap keterbatasan lahan sawah dan perubahan iklim.

Dalam rangka mendukung pencapaian target tersebut, Kepala Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan ditunjuk sebagai anggota Satuan Tugas Pengembangan Padi Lahan Kering sekaligus sebagai **Penanggung Jawab Pendamping** di beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya di **Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)**. Kabupaten PALI ditetapkan memperoleh target pengembangan padi lahan kering pada tahun 2025 seluas **800 hektar**

Proses Pengusulan dan Penetapan CPCL

Sebagai tindak lanjut percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam hal identifikasi, verifikasi, dan penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), Kepala BRMP Sumatera Selatan melaksanakan pendampingan langsung terhadap proses pengusulan CPCL di Kabupaten PALI. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon lokasi yang diusulkan memenuhi persyaratan teknis pengembangan padi lahan kering dan siap untuk dilaksanakan kegiatan pembukaan lahan dan penanaman.

Kab. Pali mengusulkan CPCL untuk kegiatan padi gogo sebanyak 3 tahap usulan dengan total luasan 1.636 hektar. Kab. Pali mengusulkan kegiatan bantuan pemerintah padi lahan kering/ padi gogo TA. 2025 di lima kecamatan yakni: (1) Kecamatan Tanah Abang, (2) Kecamatan Abab, (3) Kecamatan Talang Ubi, (4) Kecamatan Penukal, (5) Kecamatan Penukal Utara. Sedangkan pada usulan tahap 3 hanya pada Kecamatan Talang Ubi (Tabel 37).

Tabel 37. Rincian Usulan CPCL Pengembangan Padi Lahan Kering Kab. Pali 2025

No.	Uraian	Luas Lahan (ha)	Jadwal Tanam
1.	Usulan ke-1	970	April – Juli 2025
2.	Usulan ke-2	601	September 2025
3.	Usulan ke-3	65	September 2025

Jumlah ini menunjukkan bahwa Kabupaten PALI mengusulkan luasan lebih dari **200% dari target awal yang ditetapkan (800 ha)**. Hal ini mencerminkan adanya antusiasme dan kesiapan yang tinggi dari pemerintah daerah maupun petani dalam mendukung program pengembangan padi lahan kering.

Capaian Realisasi LTT Padi Gogo

Berdasarkan hasil pemantauan hingga bulan Desember 2025, realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi gogo di Kabupaten PALI telah mencapai **2.131,49 hektar** atau sebesar **266,44% dari target yang ditetapkan (800 ha)**. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditentukan dalam Kepmentan. Distribusi realisasi LTT padi gogo di setiap kecamatan adalah sebagai berikut.

Tabel 38. Realisasi LTT Pengembangan Padi Lahan Kering Kab. Pali Tahun 2025

No.	Kecamatan	Total (Ha)
1	Talang Ubi	534,00
2	Tanah Abang	237,99
3	Abab	860,00
4	Penukal	244,50
5	Penukal Utara	255,00
Jumlah		2.131,49

Dari data tersebut terlihat bahwa Kecamatan Abab dan Kecamatan Talang Ubi menjadi kontributor terbesar terhadap capaian LTT padi gogo di Kabupaten PALI. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua wilayah tersebut memiliki potensi lahan kering yang cukup luas, dukungan petani yang kuat, serta kesiapan lahan yang lebih baik. Capaian yang melebihi target ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari beberapa faktor

1. **Efektivitas pendampingan yang dilakukan oleh BRMP Sumatera Selatan** dalam proses identifikasi lokasi, verifikasi CPCL, serta percepatan realisasi kegiatan di lapangan.
2. **Komitmen Pemerintah Kabupaten PALI dan Dinas Pertanian setempat** dalam mendukung program pengembangan padi lahan kering melalui penyusunan data, pengusulan CPCL, dan fasilitasi kegiatan di tingkat lapangan.
3. **Tingginya partisipasi petani dan kelompok tani**, khususnya pada lahan-lahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal.
4. **Momentum musim tanam yang relatif mendukung**, sehingga sebagian besar lokasi dapat langsung diolah dan ditanami setelah bantuan benih diterima.
5. **Adanya perluasan area di luar target awal**, yang menunjukkan potensi besar pengembangan padi lahan kering di Kabupaten PALI.

Capaian realisasi LTT padi lahan kering sebesar 2.028,50 ha memberikan dampak positif terhadap peningkatan potensi produksi padi di Kabupaten PALI. Selain mendukung pencapaian target swasembada pangan di tingkat provinsi, keberhasilan ini juga membuka peluang baru bagi petani dalam memanfaatkan lahan kering sebagai sumber produksi pangan dan peningkatan pendapatan.

Secara strategis, keberhasilan program ini menunjukkan bahwa Kabupaten PALI memiliki peluang besar untuk dijadikan sebagai salah satu daerah pengembangan padi lahan kering di Provinsi Sumatera Selatan. Apabila didukung dengan keberlanjutan program, pembinaan teknis, dan akses pasar yang memadai, maka pengembangan padi lahan kering dapat menjadi komponen penting dalam sistem pertanian daerah.

5.2.6. KOTA PRABUMULIH

Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan di Provinsi Sumatera Selatan, program pengembangan padi gogo turut menjadi salah satu kegiatan strategis yang dilaksanakan di Kota Prabumulih pada tahun 2025. Melalui program ini, pemerintah mendorong pemanfaatan lahan-lahan potensial, khususnya lahan perkebunan sawit yang diremajakan, untuk ditanami padi gogo melalui pola tumpang sisip. Upaya ini diharapkan dapat menambah luas tanam sekaligus meningkatkan produksi padi di luar lahan sawah eksisting.

1. Target dan Realisasi LTT Padi Gogo Tahun 2025

Pada tahun 2025, Kota Prabumulih ditetapkan target Luas Tambah Tanam (LTT) padi gogo sebesar **195 ha**. Namun demikian, berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian teknis yang dilakukan, hanya **50 ha** yang disetujui dalam daftar Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL). Penyesuaian ini dilakukan karena dari total **82 hektar** lahan sawit Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang tersedia, hanya **50 ha** yang memenuhi kriteria untuk dilakukan tumpang sisip padi gogo.

2. Permasalahan dan Tantangan di Lapangan

Berdasarkan hasil pendampingan di lapangan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyusutan luas lahan yang dapat ditanami padi gogo, antara lain:

a. Kelayakan Teknis Lahan

Meskipun tersedia 82 hektar lahan PSR, tidak seluruhnya memenuhi syarat teknis untuk tumpang sisip padi. Beberapa kendala yang ditemukan meliputi: 1) Kondisi lahan yang tidak cukup terbuka akibat kerapatan tanaman sawit muda, 2) ketersediaan cahaya matahari yang tidak merata, dan 3) tingkat kelembapan dan aerasi tanah yang kurang sesuai untuk pertumbuhan padi gogo.

b. Kesiapan Petani dan Dukungan Sarana

Kesiapan petani untuk melaksanakan tumpang sisip menjadi aspek penting. Beberapa kelompok tani masih terbatas dalam: 1) pengetahuan budidaya padi gogo di bawah tegakan sawit, dan 2) peralatan mekanisasi dan modal untuk pengolahan lahan yang terbatas.

3. Rencana Tindak Lanjut

Kegiatan pendampingan padi gogo di Kota Prabumulih memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi dan tantangan pengembangan padi di luar lahan sawah. Penetapan LTT sebesar 50 hektar yang disetujui CPCL merupakan evaluasi teknis atas kondisi lahan dan kesiapan petani.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan padi gogo sangat dipengaruhi oleh:

- **Kesesuaian lahan PSR untuk tumpang sisisip**
- **Tingkat adaptasi petani terhadap sistem tanam padi gogo**
- **Kemampuan menerapkan teknologi budidaya yang tepat**

Informasi ini akan menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program padi gogo pada tahun berikutnya. BRMP Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah dan penyuluh pertanian akan terus memperkuat pendampingan, mulai dari penilaian kelayakan lahan, penyuluhan teknologi budidaya, hingga monitoring perkembangan tanaman di lapangan. Kolaborasi semua pihak diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan lahan PSR dan memperluas cakupan penanaman padi gogo, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian swasembada pangan di Kota Prabumulih dan Sumatera Selatan secara keseluruhan.

5.2.7. KABUPATEN MURATA

Kegiatan lain yang digalakan Kementerian Pertanian yaitu Pemantauan **Luas Tambah Tanam** Reguler Padi Tadah Hujan/ Gogo, dalam Laporan berikut sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian no 458 tahun 2025 dimana Penulis bertanggung jawab pada Pelaporan Luas Tambah tanam Padi Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, pada tujuh Kecamatan, dimana Kondisi lahan pada saat ini sudah mulai ada pertanaman pada beberapa Kecamatan sementara di kec lain masih pada tahap persiapan, dikarenakan karakter pertanaman padi gogo di Musi Rawas Utara biasanya dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Oktober. Target Luas Tambah Tanam padi gogo di Kab Musi Rawas Utara tahun 2025 seluas 310 hektar, untuk realisasi tanam pada Bulan Juli hingga September sudah tertanam seluas 205 ha, dimana benih dan Herbisida sudah disalurkan kepada petani pada bulan Mei melalui provinsi dari Kementerian Pertanian. Pertanaman padi gogo di Kab. Musirawas baru ada pertanaman di bulan Juli 2025.

Tabel 39. Capaian Realisasi Tanam Padi Bulan Juli

No	Kecamatan	Padi Sawah	Padi Gogo	Jumlah (ha)	Target Kabupaten
1.	Ulu Rawas	0,00	0	0,00	0
2.	Karang Jaya	51,00	0	51,00	100
3.	Rawas Ulu	0,00	0	0,00	5
4.	Rupit	0,00	0	0,00	0
5.	Karang Dapo	1,00	2	0,00	0
6.	Rawas Ilir	56,00	0	56,00	200
7.	Nibung	0,00	0	0,00	0
		108	2	108	300

Sebagian wilayah Muratara belum memasuki musim hujan, sehingga untuk pertanaman padi gogo yang sudah di support dengan benih Inpago 13 Fortiz maka dilakukan upaya khusus Gerakan tanam padi gogo, pompanisasi dan percepatan tanam dilahan sawit belum menghasilkan (TBM). dimulai dari Kecamatan Karang Dapo yang berada di Daerah Aliran Sungai.

Tabel 40. Capaian Realisasi Tanam Padi Bulan Agustus

No	Kecamatan	Padi Sawah	Padi Gogo	Jumlah (ha)	Target Kabupaten
1.	Ulu Rawas	2,50	-	2,500	0
2.	Karang Jaya	10,00	3.00	13,00	50,00
3.	Rawas Ulu	2,00	17.00	19,00	60,00
4.	Rupit	0,00	1.00	1,00	0
5.	Karang Dapo	0,00	4.00	4,00	10,00
6.	Rawas Ilir	4,00	-	4,00	30,00
7.	Nibung	0,00	-	0,00	0
		18	25	43.00	150

Pada bulan Agustus sebagian wilayah Muratara sudah mulai memasuki musim hujan, ditambah juga dengan melalui upaya khusus Gerakan tanam padi gogo, pompanisasi dan percepatan tanam dilahan sawit belum menghasilkan (TBM) maka hingga akhir bulan September ini sudah terdapat pertanaman padi gogo yaitu di Kecamatan Karang Jaya, Rawas Ulu dan Kecamatan Karang Dapo.

Tabel 41. Capaian Realisasi Tanam Padi Bulan September

No	Kecamatan	Padi Sawah	Padi Gogo	Jumlah (ha)	Target Kabupaten
1.	Ulu Rawas	40	29	69	10
2.	Karang Jaya	9	13	22	10
3.	Rawas Ulu	182	73	255	50
4.	Rupit	0	0	0	0
5.	Karang Dapo	0	10	10	10
6.	Rawas Ilir	2	0	2	0
7.	Nibung	0	53	53	10
		233	178	411	90

Pada bulan September sebagian besar wilayah Muratara sudah mulai memasuki puncak musim hujan, ditambah juga dengan melalui upaya khusus Gerakan tanam padi gogo, pompanisasi dan percepatan tanam dilahan sawit belum menghasilkan (TBM) maka hingga akhir bulan September ini sudah terdapat pertanaman padi gogo hampir di semua Kecamatan potensial seperti Karang Jaya, Rawas Ulu dan Kecamatan Karang Dapo dan Nibung. Khusus Kecamatan Nibung dilakukan Gerakan Tanam bersama pemerintah setempat, Dinas pertanian dan Koramil Nibung sebagai upaya mendongkrak target tanam gogo secara serempak.

Tabel 42. Capaian Realisasi Padi Bulan Oktober

No	Kecamatan	Padi Sawah	Padi Gogo	Jumlah (ha)	Target Kabupaten
1.	Ulu Rawas	105	15	120	120
2.	Karang Jaya	2	16	18	20
3.	Rawas Ulu	234	7	241	240
4.	Rupit	0	6	6	6
5.	Karang Dapo	0	9	9	10
6.	Rawas Ilir	0	0	0	0
7.	Nibung	0	22	22	20
		341	75	416	416

Tabel 43. Capaian Realisasi Padi Bulan November

No	Kecamatan	Padi Sawah	Padi Gogo	Jumlah (ha)	Target Kabupaten
1.	Ulu Rawas	56	0	10	50
2.	Karang Jaya	15	2	17	50
3.	Rawas Ulu	7	0	13	50
4.	Rupit	0	0	0	30
5.	Karang Dapo	0	21	21	50
6.	Rawas Ilir	7	10	40	60
7.	Nibung	0	5	19	66
		85	38	123	356

Pada Bulan November Pencapaian Realisasi luas tanam padi reguler dan Gogo mencapai 123 ha dari target Kabupaten 356 ha, hal tersebut dikarenakan sudah dilaksanakannya percepatan tanam pada bulan sebelumnya.

Tabel 44. Capaian Realisasi Padi Bulan Desember

No	Kecamatan	Padi Sawah	Padi Gogo	Jumlah (ha)	Target Kabupaten
1.	Ulu Rawas	0	0	0	50
2.	Karang Jaya	162	3	165	50
3.	Rawas Ulu	86	0	86	50
4.	Rupit	22	0	22	30
5.	Karang Dapo	0	0	0	50
6.	Rawas Ilir	0	0	0	60
7.	Nibung	0	0	0	66
		273	3	276	356

Capaian Realisasi Luas tambah tanam dibandingkan dengan Target Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu 2.059 ha dengan Capaian 2.076,5 ha, hingga akhir Desember 2025.

5.2.8. KOTA PAGAR ALAM

Program padi gogo di Kota Pagar Alam dengan target 40 hektar (Kepmentan 808), dilaksanakan dengan 2 (dua) tahap usulan CPCL. Tahap pertama seluas 16 hektar ditanam bulan Maret-April di 10 (sepuluh) kelompok tani yang ada di Kecamatan Dempo Selatan, dan tahap kedua dengan luasan 31 hektar ditanam di Kecamatan Dempo Utara pada 1 (satu) poktan dan di Kecamatan Dempo Selatan pada 3 (tiga) poktan. Tahap kedua ditanam pada bulan September dan Oktober. Benih yang digunakan pada program padi gogo ini adalah varietas Inpari 32 dan merupakan benih bantuan. Selain benih padi pada program padi gogo ini juga dapat bantuan herbisida dan pestisida. Namun untuk bantuan pestisida sampai laporan ini dibuat belum tersalurkan. Dari target 40 hektar sudah terealisasi tanam seluas 47 hektar (Tabel terlampir).

Dalam rangka mendukung program strategis Kementerian Pertanian, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan terus melakukan pendampingan sebagai salah satu upaya percepatan Luas Tambah Tanam (LTT).

Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan Tim Satgas Swasembada Pangan BRMP Sumsel di Kota Pagaralam, pada tanggal 10-12 September 2025 yaitu pertemuan dengan para penyuluh dan kelompok tani di BPP Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan, dan dilanjutkan Gerakan Tanam Bersama Padi Gogo di kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan.

Pertemuan membahas capaian kegiatan Evaluasi Padi Gogo Tahap 1 dan Percepatan Tanam Padi Gogo Tahap 2 di Kota Pagaralam. Realisasi penanaman padi gogo CPCL tahap pertama seluas 16 hektar, pada 10 Poktan di wilayah Kecamatan Dempo Selatan telah dilaksanakan pada bulan Maret-April. Meskipun terdapat sejumlah kendala di lapangan, dimana saat tanam sudah masuk musim kemarau sehingga pertanaman banyak yang mati karena kekurangan air. Sedangkan untuk CPCL tahap kedua dengan luasan 31 hektar yang ditanam pada bulan September-Oktober, saat ini sudah berumur 1-2 bulan.

Gerakan tanam ini menjadi salah satu upaya pengembangan padi gogo di Kota Pagaralam yang merupakan bagian dari kontribusi daerah mendukung program strategis Kementan, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Tabel 45. Penetapan CPCL Tahap 1 Penerima Bantaun Padi Gogo Kota Pagar Alam

No	Kec.	Kel.	Kelompok Tani	Nama ketua	Luas Lahan (Ha)	Jenis lahan	Volume Benih (Kg)	Varietas benih	Pestisida (Kg/Liter)	Jenis OPT dominan	Herbisida (liter)	Jadwal tanam
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dempo Utara	Agung Lawangan	Sepakat	Ujang	5	Lahan Kering	100	Inpari 32		Ulat	10	Sept-Ok
2	Dempo Selatan	Kance Diwe	Bejuang Sesame	Hertonji	5	Lahan Kering	100	Inpari 32		Ulat,	10	Sept-Ok
3	Dempo Selatan	AtungKance Diwe	Padang Lebar	Kartoyo	8	Lahan Kering	160	Inpari 32		Ulat,	16	Sept-Ok
4	Dempo Selatan	Perjalang	Mufakat	Marlanto	13	Lahan Kering	260	Inpari 32		Ulat,	26	Sept-Ok
JUMLAH					31		620				62	

Tabel 46. Penetapan CPCL tahap 2 Penerima bantuan padi gogo kota pagaralam

No	Kec.	Kel.	Kelompok Tani	Nama ketua	Luas Lahan (Ha)	Jenis lahan	Volume Benih (Kg)	Varietas benih	Pestisida (Kg/Liter)	Jenis OPT dominan	Herbisida (liter)	Jadwal tanam
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dempo Selatan	Atung Bungsu	Betawi Mandiri	Sapuan Anwar	2	Lahan Kering	40	Inpari 32		Ulat, Babi, Wereng	4	Maret-April
2	Dempo Selatan	Atung Bungsu	Tani Bersatu	Hardianto	2	Lahan Kering	40	Inpari 32		Ulat, Babi, Wereng	4	Maret-April
3	Dempo Selatan	Atung Bungsu	KWT Tani Jaya	Henry	3	Lahan Kering	60	Inpari 32		Ulat, Babi, Wereng	6	Maret-April
4	Dempo Selatan	Atung Bungsu	Harapan Bersama	Sutini	2	Lahan Kering	40	Inpari 32		Ulat, Babi, Wereng	4	Maret-April
5	Dempo Selatan	Atung Bungsu	Atung Bungsu	Novamansyah	1	Lahan Kering	20	Inpari 32		Ulat, Babi, Wereng	2	Maret-April
6	Dempo Selatan	Atung Bungsu	Cinta Damai	Sumartan	1	Lahan Kering	20	Inpari 32		Ulat, Babi, Wereng	2	Maret-April
7	Dempo Selatan	Atung Bungsu	Sehase I	Sadarudin	1	Lahan Kering	20	Inpari 32		Ulat, Babi, Wereng	2	Maret-April
8	Dempo Selatan	Atung Bungsu	Mekar Wangi	Hasdi Romansyah	1	Lahan Kering	20	Inpari 32		Ulat, Babi, Wereng	2	Maret-April
9	Dempo Selatan	Atung Bungsu	KWT Padang Pangkul	Rani harmaini	1	Lahan Kering	20	Inpari 32		Ulat, Babi, Wereng	2	Maret-April
10	Dempo Selatan	Atung Bungsu	Berkah	Syahrul Efendi	2	Lahan Kering	40	Inpari 32		Ulat, Babi, Wereng	4	Maret-April
JUMLAH					16		320				32	

5.2. LUAS TAMBA TANAM (LTT) CETAK SAWAH RAKYAT (CSR)

5.3.1. KABUPATEN OKU

Kegiatan Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) merupakan bagian dari upaya peningkatan produksi pangan melalui perluasan lahan sawah. Berdasarkan hasil Survey Investigasi Design (SID), total ketersediaan lahan tercatat seluas 308 ha. Dari evaluasi di lapangan dan kesiapan lahan, total luasan lahan yang dapat diikuti sertakan dalam kegiatan CSR adalah seluas 288,32 ha dan telah direalisasikan dengan penandatanganan kontrak konstruksi pada 17 September 2025. Luasan tersebut tersebar di enam desa pada lima kecamatan, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 47. Rincian Luasan Kegiatan CSR Kab. OKU

No	Kecamatan	Desa	Luasan (ha)
1	Peninjauan	Mendala	24,18
2	Sinar Peninjauan	Karya Jaya	62,93
3	Sinar Peninjauan	Marga Bhakti	156,08
4	Kedaton Peninjauan Raya	Lubuk Kemiling	30,29
5	Lubuk Batang	Tanjung Dalam	8,91
6	Lubuk Raja	Batumarta 1	5,93
Jumlah			288,32

Berdasarkan hasil kompilasi data hingga Desember 2025, kegiatan Land Clearing sebagai tahap awal konstruksi telah mencapai realisasi fisik 106.026 ha, atau 36,77% dari total target kontrak. Capaian pada masing-masing desa adalah sebagai berikut:

1. Desa Mendala: 23,37 ha (96,63%)
2. Desa Karya Jaya: 36,29 ha (56,76%)
3. Desa Marga Bakti: 37,07 ha (23,75%)
4. Desa Lubuk Kemiling: -
5. Desa Tanjung Dalam: -
6. Desa Batumarta 1: -

Progres yang bervariasi antar-desa terutama dipengaruhi oleh ketersediaan alat berat dan karakteristik medan yang berbeda-beda. Untuk Desa Karya Jaya, saat ini pekerjaan konstruksi dihentikan sementara dikarenakan kondisi lahan yang banjir.

Kebutuhan alat berat merupakan faktor krusial dalam percepatan kegiatan CSR. Kondisi terbaru menunjukkan bahwa saat ini tersedia 13 unit alat berat, yang terdiri dari 11 unit excavator dan 2 unit bulldozer. kebutuhan ideal untuk mendukung percepatan kegiatan adalah 18 unit excavator, sehingga terdapat kekurangan 7 unit.

Keterbatasan tersebut berimplikasi langsung pada lambatnya mobilisasi pekerjaan terutama di desa yang belum memulai land clearing, seperti Lubuk Kemiling, Tanjung Dalam, dan Batumarta 1.

Penambahan unit alat berat diperlukan segera agar kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal dan target penyelesaian tahun 2025 dapat tercapai.

Selain ketersediaan alat yang masih kurang, medan yang berat juga menjadi kendala. Lahan rawa lebak yang dalam dan sulit ditebak kedalamannya menjadi kendala dalam pengoperasian alat. Tercatat sudah dua kali excavator terbenam dikarenakan terperosok ke lahan rawa dengan kedalaman yang tinggi. Hal ini dapat diatasi dengan menarik alat menggunakan alat lain yang tersedia, akan tetapi menjadi kendala dan memperlambat progres penyelesaian pekerjaan.

Pada Kamis, 11 Desember 2025, Kepala BRMP Sumsel menghadiri penyerahan Alsintan, Saprodi dan Sertifikat Penilaian Kelas Kelompok Tani secara simbolis serta tanam padi perdana program Cetak Sawah Rakyat (CSR) bertempat di Desa Mendala, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten OKU. Hadir pada acara ini Wakil Bupati Kabupaten OKU Ir. H. Marjito Bachri, ST, Dandim 0403/OKU Letkol Arh Yusuf Winarno, S.I.P., M.Han, Asisten II, Kepala Bapeda, Unsur Polres, Kejaksaan, dan forkopimda.

Acara dimulai dengan kegiatan penyerahan Alsintan, Saprodi dan Sertifikat penilaian kelas kelompok tani tersebut di serahkan langsung oleh Wakil Bupati OKU yang terdiri dari 5 unit traktor roda empat, 3 unit Rotavator, dan 1 unit Combine Harvester, diserahkan langsung kepada Brigade Pangan dari perwakilan Kecamatan Peninjauan dan Sinar Peninjauan, dan

Dalam Sambutannya Wakil Bupati menyampaikan program cetak sawah adalah Sesuatu yang sangat mengembirakan program ini adalah program merupakan Asta Cita Presiden RI Bapak Prabowo Subianto, dalam meningkatkan Swasembaga pangan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Wabup berharap agar para petani dapat menjaga dan memelihara bantuan yang telah diberikan sehingga nantinya dapat di maksimalkan dalam Brigade Pangan dan Kelompok tani untuk menunjang produktivitas pertanian secara maksimal.

Kegiatan dilanjutkan dengan Tanam perdana yang dilakukan di lahan cetak sawah tahun 2025 yang dikelola oleh Brigade Pangan Maju Bersama, dengan target Cetak sawah Kabupaten OKU seluas 288,31 hektar. Luas lahan yang ditanami adalah seluas 0,5 ha.

Ketersediaan dan Kebutuhan Alat Berat

Kebutuhan alat berat merupakan faktor krusial dalam percepatan kegiatan CSR. Kondisi terbaru menunjukkan bahwa saat ini tersedia 14 unit alat berat, yang terdiri dari 12 unit excavator dan 2 unit buldozer. Sementara itu, kebutuhan ideal untuk mendukung percepatan kegiatan adalah 18 unit excavator, sehingga terdapat kekurangan 8 unit.

Keterbatasan tersebut berimplikasi langsung pada lambatnya mobilisasi pekerjaan terutama di desa yang belum memulai land clearing, seperti Lubuk Kemiling, Tanjung Dalam, dan Batumarta 1. Penambahan unit alat berat diperlukan segera agar kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal dan target penyelesaian tahun 2025 dapat tercapai.

Selain ketersediaan alat yang masih kurang, medan yang berat juga menjadi kendala. Lahan rawa

lebak yang dalam dan sulit ditebak kedalamannya menjadi kendala dalam pengoperasian alat. Tercatat sudah dua kali excavator terbenam dikarenakan terperosok ke lahan rawa dengan kedalaman yang tinggi. Hal ini dapat diatasi dengan menarik alat menggunakan alat lain yang tersedia, akan tetapi menjadi kendala dan memperlambat progres penyelesaian pekerjaan.

5. 3.2. KABUPATEN MUSIRAWAS

Pelaksanaan kegiatan Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kabupaten Musi Rawas merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan luas baku sawah (LBS) serta memperluas luasan potensial untuk mendukung peningkatan produktivitas padi dan ketahanan pangan daerah. Program ini secara langsung mendukung target luas tanam dan produksi padi, baik ditingkat kabupaten maupun provinsi, sejalan dengan kebijakan percepatan swasembada pangan nasional.

Pelaksanaan CSR di Kabupaten Musi Rawas tahun 2025 dilaksanakan dengan **luasan 200 hektar** di Kecamatan BTS Ulu yang memiliki potensi pengembangan lahan pertanian baru, baik dari sisi ketersediaan lahan maupun infrastruktur, maka dilakukan pengusulan dari tingkat BPP ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas dan dilanjutkan ke Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan berjalannya waktu dan prosedur cetak sawah dengan melakukan SID, terdapat beberapa hal yang mengharuskan tahapan-tahapan cetak sawah dihentikan. Dengan demikian rencana Cetak sawah Rakyat di kabupaten Musi Rawas tidak berlanjut. (Tabel 38)

Tabel 48. Progres Pelaksanaan Cetak Sawah di Kabbupaten Musi Rawas

Kabupaten	Progres Kegiatan	Keterangan
Musirawas	Pelaksanaan Pengawasan Cetak Sawah	Target Konstruksi adalah seluas 200 Ha, telah dilakukan kontrak konstruksi seluas 200 Ha, yang dilaksanakan secara Swakelola seluas 200 Ha dan melalui Penyedia seluas 0 Ha.
	Percepatan Pelaksanaan Kontrak	KonstruksiSID tersedia saat ini adalah seluas 200 Ha, dari datatersebut, telah dilaksanakan kontrak konstruksi seluas200 Ha, sehingga masih terdapat SID Tersedia/telahselesai namun belum dilakukan kontrak Konstruksi yaituseluas 0 Ha. Namun sampai saat ini proses konstruksi belum berjalan

		karena disebabkan oleh: Dokumen lingkungan belum selesai karena saat dilakukan Pertek oleh Kantah setempat, ditemukan bahwa lokasi seluas 200 Ha tersebut masuk dalam Plasma PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari yang bekerja sama dengan KUD Tani Mandiri dan KUD Alpa Mandiri
	Percepatan Pelaksanaan Desain dan SI	Target desain yang dapat diselesaikan seluas 200 Ha, pada 200 dengan langkah percepatan:

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi pelaksanaan kontruksi di lokasi cetak sawah di desa Palawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas tidak bisa dilanjutkan lagi. Hal ini di tindak lanjuti melalui surat Sekretaris Daerah Nomor : 520.3/884/DTPHP/X/2025, tanggal 20 Oktober 2025 terkait pembatalan kegiatan cetak sawah di kabupaten Musi Rawas (surat terlampir)



Gambar 3. Pembatalan kegiatan cetak sawah di kab. Musi Rawas

6.3.3. KABUPATEN EMPAT LAWANG

Cetak Sawah adalah suatu usaha penambahan luas lahan baku sawah (sawah baru) pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan untuk pertanian dengan sistem sawah. Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63.6/KPTS/SR.040/B/11/2024 Tanggal 13 November 2024 Tentang Petunjuk Teknis Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025. Cetak Sawah perlu dilakukan sebagai upaya untuk menambah luas lahan baku sawah atau perluasan areal sawah baru dalam

rangka mencapai swasembada pangan nasional.

Ketentuan dalam cetak sawah yang tertuang di dalam Juknis, yaitu lokasi berada dalam satu hamparan minimal 5 ha dan sesuai untuk budidaya padi sawah. Lokasi tidak termasuk Lahan Baku Sawah (LBS) terkini. Kondisi lahan di Kabupaten Empat Lawang bukan berupa hamparan namun terpecah-pecah.

Pendampingan dalam rangka mengawal program CSR di Kabupaten Empat Lawang juga dilakukan oleh Tim Satgas Swasembada Pangan BRMP Sumatera Selatan, antara lain melakukan pendampingan pada tanggal 19 Juni 2025 dengan melakukan kunjungan lapangan ke calon Lokasi cetak sawah yang berlokasi di Desa Tanjung Ning Lama Kecamatan Saling. Serta tanggal 14 Oktober 2025 dengan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi cetak sawah yang terletak di Kecamatan Muara Pinang.

Koordinasi tingkat Nasional juga dilakukan dalam rangka mempercepat pelaksanaan program CSR Kementerian Pertanian, antara lain Rapat Koordinasi (Rakor) pada tanggal 4 Juli 2025 dan Bertempat di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550. Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian R.I., Dr. Andi Amran Sulaiman. Turut dihadiri pula oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan/Inspektur Jenderal/Staf Ahli Menteri/Staf Khusus Menteri Pertanian, Tenaga Ahli Menteri Pertanian, dan Sesditjen/Sesba/Direktur/Karo/Kapus/Kepala BB di Lingkungan Kementan.

Partisipasi BPRMP Sumatera Selatan dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen mendukung pencapaian target nasional swasembada pangan melalui sinergi dan percepatan program di lapangan. Partisipasi ini sekaligus menjadi bentuk penguatan koordinasi dengan penanggung jawab provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Selatan dalam pelaksanaan kegiatan seperti: LTT padi dan padi gogo, Optimasi lahan rawa, Cetak sawah baru di lokasi potensial, Validasi dan integrasi data lapangan dan Monitoring konstruksi infrastruktur pendukung pertanian.

Workshop Percepatan Konstruksi Cetak Sawah TA. 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 31 Juli - 1 Agustus 2025 secara hybrid di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan dipimpin langsung Menteri Pertanian R.I., Dr. Andi Amran Sulaiman. Tujuan workshop yang dihadiri perwakilan dari 11 provinsi, 53 kab/kota, 50 penyedia konstruksi, PJ Provinsi Kab/kota, dan pelaksana adalah memberikan pemahaman teknis tentang pelaksanaan cetak sawah. Salah satu langkah konkret adalah dengan memastikan kegiatan cetak sawah benar-benar menghasilkan lahan sawah yang fungsional dan mampu memproduksi secara berkelanjutan, bahkan dalam 10 hingga 20 tahun mendatang.

Daftar Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan Cetak Sawah Rakyat di kabupaten Empat Lawang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang Nomor: 520/867/II/SK/Pertanian/2025 Tanggal 17 Juni 2025 Tentang Penetapan Calon Petani Dan Calon Lokasi (CPCL) Kegiatan Cetak Sawah Rakyat Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 49. Daftar Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Kegiatan Cetak Sawah Rakyat Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025

No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Verifikasi Lahan (Ha)
1	Muara Pinang	Seleman Ilir	Tujuh Delapan	14,12
2	Muara Pinang	Muara Pinang Lama	Sawah Lebar	6,39
3	Muara Pinang	Talang Benteng	Tabling Jaya	13,12
4	Pasemah Air Keruh	Talang Padang	Suka Maju	19,36
5	Pasemah Air Keruh	Padang Bindu	Mulya Tani	5,99
6	Pasemah Air Keruh	Muara Aman	Mutiara	19,96
7	Pendopo	Tanjung Raman	Harapan Maju	4,54
8	Pendopo	Bayau	Senang Hati	4,6
9	Pendopo Barat	Karang Caya	Tani Mulya	2,25
10	Pendopo Barat	Lingge	Sinar Gesam	32,04
11	Saling	Tanjung Ning Jaya	Usaha Tani	8,99
12	Saling	Tanjung Ning Jaya	Saling Seni	4,63
13	Sikap Dalam	Tapa Lama	Serunting	44,04
14	Sikap Dalam	Tangga Rasa	Padang Tangga Jaya, Batubadak Jaya, Suban Jaya	34,57
Total			16	214,59

Pengecekan bersama kondisi awal (*Mutual Check 0* atau MC 0) terhadap lokasi-lokasi yang menjadi objek kesepakatan pekerjaan dilakukan setelah penandatanganan kontrak pelaksanaan antara PPK dengan Pelaksana Swakelola. MC 0 dilakukan bersama antara unsur dari Dinas Pertanian Kabupaten dan Pelaksana Swakelola.

Tanam padi perdana serentak di lahan CSR Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan secara virtual dengan pusat acara di Desa Batu Raja Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim pada tanggal 23 Oktober 2025. Kabupaten Empat lawang turut mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian tersebut dengan melaksanakan tanam Padi Perdana Program CSR di Empat Lawang yang dilaksanakan di Desa Seleman Ilir Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang dengan lahan yang ditanam seluas 11 ha.

Turut hadir Bupati Empat Lawang, Perwakilan Kejaksaan Negeri Empat Lawang, Kepala Dinas pertanian Kab. Empat Lawang, Dandim 0405 / Lahat, Danramil 405-06 Muara Pinang, Kapolres Empat Lawang, Tim Satgas Swasembada Pangan BRMP Sumatera Selatan, Kepala Desa di Kec. Muara Pinang, Penyuluh Lapangan, Poktan, dan Petani.

Sinergi antara Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, Instansi terkait, stakeholder, dan petani merupakan dukungan dan komitmen terhadap Program Swasembada Pangan untuk membangun pertanian yang tangguh dan mandiri di Sumatera Selatan. Pengecekan bersama kondisi awal (*Mutual Check 0* atau MC 0) terhadap lokasi-lokasi yang menjadi objek kesepakatan pekerjaan dilakukan setelah penandatanganan kontrak pelaksanaan antara PPK dengan Pelaksana Swakelola. MC 0 dilakukan bersama antara unsur dari Dinas Pertanian Kabupaten dan Pelaksana Swakelola.

Target CSR di kabupaten empat lawang seluas 236 ha, saat ini masih dalam proses pengerjaan Konstruksi yang baru mencapai 140 ha.

A. Pembentukan Brigade Pangan (BP)

Brigade Pangan adalah program yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern. Program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian.

Penumbuhkembangan Brigade Pangan diprioritaskan pada lokasi optimasi lahan (OPLAH) dan/atas Cetak Sawah berbasis tanaman padi. Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kabupaten Empat Lawang dengan luas 214 ha tersebar di 6 (enam) kecamatan, antara lain: 1) Muara Pinang; 2) Pasemah Air Keruh; 3) Pendopo; 4) Pendopo Barat; 5) Saling; dan 6) Sikap Dalam.

Pertemuan koordinasi dalam rangka pembentukan Brigade Pangan di Kabupaten Empat Lawang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2025 di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang, Bapak Hendra Lezi, S.P., yang didampingi Kepala Bidang Prasarana dan Pertanian Hadi Hermanto, S.E., M.M., dan Staf Rama Fajarwanto, S.P.

Dilanjutkan dengan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pembentukan Brigade Pangan di Kantor Desa Talang Benteng Kec. Muara Pinang. Pertemuan dihadiri oleh Ketua Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Sumatera Selatan, Penanggungjawab Swasembada Pangan untuk Kab. Empat lawang dan Tim, Kepala Desa Talang Benteng serta Perangkat Desa, Staf Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kab. Empat Lawang, dan petani.

Kegiatan sosialisasi dan pembentukan Brigade Pangan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2025 bertempat di Kantor Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang kabupaten Empat Lawang. Kegiatan dibuka oleh Kepala Desa Talang Benteng, Edy Irawan AH, S.H.I., yang menyampaikan sambutan selamat datang sekaligus membuka acara secara resmi. Peserta yang hadir meliputi perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang, perangkat desa, Koordinator BPP Muara Pinang, penyuluh pertanian, Gapoktan, Poktan, serta petani setempat.

Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian, Dr. Suwandi, S.P., M.Si., turut memberikan sambutan secara daring dan menyampaikan pandangannya mengenai prospek dan peran strategis Brigade Pangan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional

Peserta mendapatkan materi mengenai Motivasi, Manajemen, dan Tata Kelola Kelembagaan Brigade Pangan yang disampaikan oleh tim dari SMK PP Negeri Sembawa.

Dalam kegiatan tersebut berhasil dibentuk satu Brigade Pangan yang diberi nama "Madani Tani". berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Talang Benteng Nomor: 140/224/TB-MP/X/2025 Tanggal 14

Oktober 2025 Tentang Pembentukan dan Penetapan Kepengurusan Brigade Pangan Madani Tani

Yang dilanjutkan dengan penyusunan dan penandatanganan Berita Acara Pembentukan Brigade Pangan "Madani Tani".

Pada tanggal 25 November 2025, dalam rangka meningkatkan kemampuan Personil Brigade Pangan diselenggarakan Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Brigade Pangan dilaksanakan di Kantor Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang

Pinang kabupaten Empat Lawang tanggal 25 November 2025 yang dihadiri oleh Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang, Kepala Desa Talang Benteng Kec. Muara Pinang, Koordinator BPP Muara Pinang, Penyuluh Lapangan, dan anggota Brigade Pangan Madani Tani.

6. 3.4 KABUPATEN PENUKAL LEMATANG ABAB ILIR (PALI)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 458/Kpts/PW.020/M/06/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan di Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan target Cetak Sawah seluas seluas 48.000 ha. Kepala BRMP Sumatera Selatan bertanggung jawab melaksanakan pendampingan konstruksi cetak sawah di Kab. Pali dengan luasan target 3.200 ha. Berdasarkan Kepmentan yang telah ditetapkan, telah dilaksanakan tugas pendampingan cetak sawah rakyat di Kab. Pali pada tahun 2025 dengan capaian realisasi konstruksi CSR seluas 1.140,70 hektar atau sebesar (35,65%).

Total rencana pengembangan cetak sawah di Kab. Pali mencakup luasan yang cukup signifikan dan terbagi ke dalam **dua tahap pelaksanaan**, yaitu **Kontrak Tahap I** seluas 200 Ha dan **Kontrak Tahap II seluas 3.000 Ha**. Pembagian tahap ini mencerminkan strategi pelaksanaan bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, aspek administratif, serta dukungan sumber daya pelaksanaan serta realisasi pelaksanaan Survei Investigasi dan Desain (SID) di lapangan.

Pada **Kontrak Tahap I**, kegiatan terfokus di **Kecamatan Penukal Utara** dengan total luasan sekitar **200,10 hektare (100,00%)**. Luasan ini tersebar di tiga desa, yaitu: (1) **Desa Tempirai** seluas **80,40 ha**; (2) **Desa Tempirai Utara** seluas **32,10 ha**; dan (3) **Desa Tempirai Timur** seluas **87,65 ha**. Berbeda dengan Tahap I, **Kontrak Tahap II** mencakup luasan yang jauh lebih besar, yaitu sekitar **3.171,06 hektare**, yang tersebar di beberapa kecamatan dan desa di Kabupaten PALI. Seluruh lokasi pada Tahap II telah **berstatus kontrak aktif**, dengan progres realisasi fisik yang masih **bervariasi dan berjalan secara bertahap**. Capaian realisasi cetak sawah rakyat di Kabupaten Pali Tahun 2025 secara rinci disajikan pada Tabel

Tabel 50. Capaian Realisasi Cetak Sawah Rakyat di Kabupaten Pali Tahun 2025

No.	Kecamatan	Desa	Target (Ha)	Realisasi SID (Ha)	Realisasi Konstruksi (Ha)	Persentase Capaian (%)
Kontrak Tahap I			200	200	200	100,00
1	Kec. Penukal Utara	Desa Tempirai	80.40	80.3	80.30	100.00
2		Desa Tempirai Utara	32.10	32.05	32.05	100.00
No.	Kecamatan	Desa	Target (Ha)	Realisasi SID (Ha)	Realisasi Konstruksi (Ha)	Persentase Capaian (%)
3		Desa Tempirai Timur	87.60	87.65	87.65	100.00
Kontrak Tahap II			3.171		940,70	29,67
1	Kec. Abab	Desa Betung	70.13	70.13	0,00	0.00
2		Desa Betung Selatan	325.22	325.22	25.00	7.69
3		Desa Betung Barat	48.55	48.55	29.00	59.73
4		Desa Prambatan	213.24	213.24	76.70	35.97
5		Desa Tanjung Kurung	200.00	200	81.00	40.50
6		Desa Pengabuan Timur	171.06	171.06	17.00	9.94
1	Kec. Penukal	Desa Air Itam	400.35	400.35	100.00	24.98
2		Desa Air Itam Timur	458.92	458.92	50.00	10.90
3		Desa Gunung Menang	104.12	104.12	14.00	13.45
1	Kec. Penukal Utara	Desa Kota Baru	135.00	135	67.00	49.63
2		Desa Tanding Marga	45.50	45.5	15.00	32.97
3		Desa Tempirai	167.96	167.96	41.00	24.41
4		Desa Prabumenang	68.86	68.86	36.00	52.28
5		Desa Tempirai Selatan	367.69	367.69	90.00	24.48
6		Desa Tempirai Timur	203.00	203	201.00	99.01
7		Desa Lubuk Tampui	191.46	191.46	98.00	51.19

Berdasarkan angka pada tabel, dari sisi pelaksanaan, seluruh lokasi pada Tahap I dilaporkan telah **menyelesaikan pekerjaan konstruksi**, yang tercermin dari keterangan progres fisik mencapai **100%** dan dapat diinterpretasikan sebagai **tahap percontohan yang berhasil**, baik dari aspek teknis, pengendalian waktu, maupun koordinasi pelaksanaan. Jumlah alat berat yang digunakan pada Tahap I

relatif terbatas, namun cukup proporsional dengan luasan masing-masing desa. Efektivitas penggunaan alat berat ini terlihat dari capaian pekerjaan yang dapat diselesaikan tepat waktu tanpa adanya penambahan alat secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa **perencanaan kebutuhan alat berat telah dilakukan secara realistis dan efisien**, serta kondisi lapangan mendukung kelancaran pekerjaan.

Capaian realisasi fisik Tahap II menunjukkan rentang progress sekitar **0% hingga 99%**, yang menggambarkan perbedaan tahapan pelaksanaan antar lokasi. Beberapa capaian konstruksi pada lokasi dengan luasan lahan terluas antara lain:

- **Desa Air Itam Timur** dengan luasan **458,92 ha** telah mencapai progres sekitar **10,90%**, menunjukkan bahwa kegiatan konstruksi masih berada pada tahap awal–menengah.
- **Desa Air Itam** seluas **400,35 ha** mencatat progres sekitar **24,98%**, yang mengindikasikan pekerjaan pembukaan lahan masih berlangsung dan memerlukan waktu lanjutan untuk penyelesaian.
- **Desa Betung Selatan** dengan luasan **325,22 ha** telah mencapai progres sekitar **7,69%**, yang menunjukkan perlu adanya percepatan pekerjaan.
- **Desa Tempirai Timur** seluas **203,00 ha** mencatat progres sangat tinggi, yaitu sekitar **99%**, sehingga secara teknis dapat dikategorikan mendekati tahap penyelesaian.
- **Desa Lubuk Tampui** seluas **191,46 ha** mencapai progres sekitar **51,19%**, mencerminkan pekerjaan telah memasuki tahap menengah.

Variasi capaian progres ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Tahap II dipengaruhi oleh **perbedaan kondisi lahan, luasan pekerjaan, jumlah dan distribusi alat berat, serta tingkat kompleksitas lapangan**. Lokasi dengan jumlah alat berat lebih banyak cenderung menunjukkan progres yang lebih cepat, terutama pada desa-desa dengan luasan besar.

Secara agregat, jika dilihat dari total luasan dan realisasi fisik, Tahap II menunjukkan **progres konstruksi yang masih dalam koridor wajar** untuk kegiatan berskala besar. Capaian progres rata-rata yang masih berada di bawah 60% pada sebagian lokasi menunjukkan bahwa Tahap II masih membutuhkan **penguatan pengendalian waktu dan sumber daya** agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal kontrak. Namun demikian, adanya lokasi dengan progres mendekati 100% menjadi indikator positif bahwa secara teknis metode pelaksanaan telah berjalan efektif dan dapat direplikasi pada lokasi lain yang progresnya masih rendah. Secara keseluruhan, perkembangan realisasi konstruksi Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kab. Pali menunjukkan bahwa:

1. **Tahap I telah selesai 100% dan dapat dinilai berhasil.**
2. **Tahap II telah berkontrak dan sedang berjalan**, dengan progres fisik yang bervariasi namun menunjukkan tren kemajuan.
3. Skala pekerjaan Tahap II yang besar menuntut pengendalian pelaksanaan yang lebih intensif, khususnya pada lokasi dengan progres di bawah rata-rata.

Dengan keberlanjutan pelaksanaan Tahap II, kegiatan Cetak Sawah Rakyat di Kabupaten PALI memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan luas baku sawah dan ketahanan pangan daerah, sepanjang didukung dengan percepatan pelaksanaan dan pengelolaan risiko lapangan yang memadai.

Salah satu indikator penting dalam pelaksanaan kegiatan CSR adalah dukungan alat berat. Berdasarkan data, pada masing-masing titik lokasi telah direncanakan penggunaan alat berat dengan jumlah yang bervariasi, berkisar antara **2 hingga 8 unit** per desa. Ketersediaan alat berat ini menunjukkan:

- a. Tingkat kesiapan teknis yang relatif baik,
- b. Potensi percepatan pekerjaan konstruksi pada lahan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi,
- c. Adanya penyesuaian jumlah alat dengan tingkat luasan dan kompleksitas lahan.

Penggunaan alat berat dalam jumlah yang memadai sangat menentukan kualitas dan kecepatan pekerjaan cetak sawah. Apabila dikelola dengan baik, hal ini akan berdampak langsung pada efektivitas progress pelaksanaan konstruksi Tahap II.

Pelaksanaan CSR di Kabupaten PALI, khususnya apabila dapat terealisasi penuh hingga Tahap II, berpotensi menambah Luas Baku Sawah (LBS) hingga **3.200 hektar**. Penambahan ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap:

1. **Peningkatan peluang Luas Tambah Tanam (LTT)** pada tahun berjalan dan tahun berikutnya,
2. **Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)** di wilayah yang sebelumnya hanya dapat ditanami satu kali atau bahkan belum diusahakan,
3. **Peningkatan kapasitas produksi padi daerah**, serta
4. **Penguatan ketahanan pangan lokal dan regional.**

Jika seluruh lahan CSR dapat ditanami minimal satu kali saja, maka tambahan luas tanam yang dihasilkan sudah cukup besar. Apabila didukung oleh ketersediaan air dan penerapan teknologi budidaya yang tepat, maka potensi IP 200 bahkan IP 300 sangat mungkin dicapai di sebagian lokasi tertentu. Program CSR ini juga berkorelasi langsung dengan keberhasilan program LTT reguler dan LTT padi gogo yang sebelumnya telah menunjukkan capaian yang baik di Kabupaten PALI. Dengan bertambahnya lahan sawah baru, maka peluang pencapaian target luas tanam tahunan di masa mendatang akan semakin realistis dan berkelanjutan.

Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, pelaksanaan CSR Kabupaten PALI tetap menghadapi beberapa tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain:

1. **Keterlambatan proses kontrak Tahap II**, yang dapat mengakibatkan mundurnya jadwal pekerjaan di lapangan.
2. **Kondisi lahan, dengan vegetasi berat sehingga memperlambat pengerjaan konstruksi.**
3. **Kesiapan Brigade Pangan**, yang perlu dipastikan sejak awal agar sawah yang sudah dicetak tidak terbengkalai dan segera dimanfaatkan.

4. **Perlu pengamanan lahan pascakonstruksi**, guna mencegah alih fungsi atau konflik pemanfaatan lahan.

Oleh karena itu, diperlukan pengawalan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BRMP, penyuluh pertanian, hingga kelompok tani agar sawah yang telah dicetak benar-benar produktif dan berkelanjutan.

Apabila dikaitkan dengan perkembangan Luas Tambah Tanam (LTT) di lokasi cetak sawah rakyat, hingga saat ini realisasi LTT pada areal hasil kegiatan CSR di Kabupaten PALI baru mencapai **85 hektar**. Angka ini masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan total luasan CSR yang telah selesai maupun yang telah direncanakan, yaitu sebesar 3.200 hektar. Namun demikian, capaian tersebut masih dapat dipahami mengingat **pelaksanaan kontrak konstruksi Tahap II baru dimulai pada awal Oktober 2025**.

Keterlambatan waktu pelaksanaan konstruksi Tahap II secara otomatis berdampak pada mundurnya jadwal tanam di lahan hasil cetak sawah. Sebagian besar lokasi pada Tahap II baru memasuki tahap pembukaan lahan, pembentukan pematang, dan perataan lahan, sehingga belum seluruhnya berada pada kondisi siap tanam (siap olah dan siap air). Dengan demikian, waktu yang tersedia untuk segera dilanjutkan ke tahap penanaman pada tahun berjalan menjadi relatif terbatas.

Sementara itu, realisasi LTT sebesar 85 ha berasal dari lokasi **CSR Tahap I** yang telah selesai lebih awal, khususnya di Kecamatan Penukal Utara (Desa Tempirai, Tempirai Utara, dan Tempirai Timur) yang telah lebih dahulu siap untuk dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika proses konstruksi selesai tepat waktu, pemanfaatan lahan untuk kegiatan tanam dapat segera dilakukan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan luas tanam.

Apabila pelaksanaan Tahap II dapat diselesaikan tepat waktu dan diikuti dengan percepatan pengolahan tanah, penyediaan sarana produksi, serta pendampingan intensif kepada Brigade Pangan (BP), maka **potensi peningkatan LTT dari lahan CSR masih sangat terbuka pada musim tanam berikutnya**. Bahkan, apabila seluruh lahan seluas 3.000 ha pada Tahap II dapat ditanami secara bertahap, maka kontribusinya terhadap capaian LTT Kabupaten PALI akan sangat signifikan dan mampu mendorong pencapaian target tahunan maupun target jangka menengah.

Dengan demikian, realisasi LTT saat ini sebesar 85 ha lebih tepat dipandang sebagai **capaian awal (*initial achievement*)** dari pemanfaatan lahan hasil CSR, dan belum mencerminkan keseluruhan potensi sesungguhnya dari program cetak sawah yang sedang berjalan di Kabupaten PALI.

Hal ini sekaligus menegaskan bahwa **keberhasilan program CSR tidak hanya diukur dari penyelesaian konstruksi fisik, tetapi juga dari keberlanjutannya dalam bentuk peningkatan luas tanam, produksi padi, dan kesejahteraan petani**. Oleh sebab itu, pengawalan pascakonstruksi menjadi sama pentingnya dengan tahapan pembangunan fisik di lapangan.

5.3.4. KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA

Pembentukan Brigade Pangan di Desa Bukit Langkap dan desa Embacang baru yang merupakan penerima manfaat dari kegiatan Cetak Sawah Rakyat (CSR) tahun 2025 seluas 150 ha yang tengah dalam proses Konstruksi Land Clearing Total se Kabupaten Muratara ,Mseluas 46,07 ha, artinya pada kawasan tersebut bisa dibentuk satu unit Brigade Pangan, yang akan mengelola kegiatan proses produksi dan pengelolaan kawasan pertanaman pangan berupa budidaya padi. Setelah melau proses sosialisasi selama 2 kali dan pelatihan makan pada tanggal 18 November 2025 telah terbentuk satu unit Brigade Pangan “KARYA LESTARI” yang merupakan kolaborasi antara Tim BRMP Sumsel, Dinas Pertanian dan Perikanan Muratara, Kepala Desa serta Penyuluh Pertanian Lapangan. Kelengkapan yang tidak terpisahkan dari Proses Berdirinya Brigade Pangan adalah Berita Acara Pembentukan, Susunan Pengurus sebanyak 15 orang serta Surat Perjanjian Kerjasama antara Brigade Pangan dan Petani Pemilik Lahan. Setelah Pembentukan Brigade Pangan maka langkah selanjutnya adalah pengusulan Alat mesin Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian untuk pelaksanaan pengelolaan lahan.

Total luas baku sawah (LBS) 1.860 ha hingga Akhir bulan November ter realisasi pertanaman 2.004 ha dan diprediksi hingga akhir desember seluas 2.110 ha, yang diperoleh dari pertanaman padi sawah reguler dan padi tadah hujan/gogo. Realisasi tanam padi gogo dari APBN 310 ha (100%) dilahan perkebunan sawit dan daerah aliran sungai yang potensial ditanami padi, Pendampingan dilakukan melalui percepatan gerakan tanam berkolaborasi dengan Pemerintah desa dan Koramil setempat serta upaya pompanisasi. Cetak sawah Rakyat dari 365 ha kontrak kontruksi sudah pada fase Land Clearing dan Land Levelling seluas 67 ha, dengan 2 Brigade Pangan sudah terbentuk.

5.3. OPTIMALISASI LAHAN RAWA (OPLA)

5.4.1. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (OKU)

Kegiatan Optimasi Lahan (Opla25) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) merupakan salah satu program strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan kondisi lahan serta peningkatan indeks pertanaman. Pada tahun 2025, Kabupaten OKU memperoleh alokasi areal seluas 250 ha berdasarkan hasil Survey Investigasi Design (SID). Seluruh luasan tersebut telah dikontrakkan, namun dalam proses implementasinya terdapat sejumlah dinamika di lapangan yang perlu ditangani secara khusus.

Permasalahan Areal Sengketa

Dari total luasan 250 ha, terdapat 190 ha di Desa Tanjung Makmur, Kecamatan Sinar Peninjauan, yang terdampak permasalahan sengketa batas wilayah. Lokasi ini berbatasan langsung dengan Kabupaten OKU Timur sehingga menimbulkan ketidakpastian status areal untuk pelaksanaan konstruksi. Menyikapi hal tersebut, dilakukan langkah administratif melalui pengajuan Adendum/Change Contract Order (CCO) guna penyesuaian kembali lokasi kegiatan serta penyeselarasan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini sudah ditindaklanjuti dan tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan program.

Pelaksanaan Kegiatan Opla25

Seiring dengan penyesuaian lokasi, kegiatan Opla25 yang dapat berjalan hingga saat ini mencakup 140 ha, tersebar pada dua desa di Kecamatan Sinar Peninjauan, yaitu:

Tabel 51. Rincian Luasan Kegiatan Opla25 Kab. OKU

No	Kecamatan	Desa	Luasan (ha)
1	Sinar Peninjauan	Karya Jaya	57
2	Sinar Peninjauan	Marga Bhakti	83
	Jumlah		140

Progres Konstruksi dan Realisasi Tanam

Pelaksanaan konstruksi Opla25 menunjukkan capaian yang sangat baik. Hingga November 2025, seluruh area seluas 140 ha telah mencapai 100% penyelesaian konstruksi, sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak. Hal ini menandakan bahwa seluruh lokasi yang dapat dikerjakan telah selesai dan siap dimanfaatkan.

Dari total luasan tersebut, telah terealisasi tanam seluas 105 ha, atau 75%. Realisasi tanam ini mencerminkan progres yang signifikan dan selaras dengan timeline pemanfaatan lahan yang direncanakan.

Tabel 52. Rincian Luasan Tambah Tanam Kegiatan Opla25 Kab. OKU

No	Kecamatan	Desa	Tanggal Tanam	Luasan (ha)
1	Sinar Peninjauan	Karya Jaya	30 Okt 2025	12,0
2	Sinar Peninjauan	Marga Bhakti	30 Okt 2025	25,0
3	Sinar Peninjauan	Marga Bhakti	4 Nov 2025	13,5
4	Sinar Peninjauan	Marga Bhakti	5 Nov 2025	6,0
5	Sinar Peninjauan	Marga Bhakti	12 Nov 2025	10,0
6	Sinar Peninjauan	Karya Jaya	12 Nov 2025	10,0
7	Sinar Peninjauan	Marga Bhakti	27 Nov 2025	28,5
	Jumlah			105,0

Sementara itu, masih terdapat 35 ha lahan di Desa Karya Jaya yang belum dapat ditanami karena kondisi pH tanah yang rendah. Upaya penanganan telah dilakukan melalui pengajuan bantuan dolomit sebagai amelioran. Apabila dolomit telah tersedia, maka keseluruhan lahan Opla25, yakni 140 ha akan dapat ditanami 100%.

Dampak Program terhadap Peningkatan IP dan Produktivitas

Pelaksanaan Opla25 di Kabupaten OKU diharapkan membawa dampak langsung terhadap peningkatan Indeks Pertanian (IP) di wilayah tersebut. Dengan optimalisasi lahan yang dilakukan, IP diproyeksikan meningkat dari IP150 menjadi IP200, yang berarti lahan yang sebelumnya hanya dapat ditanami satu kali dalam setahun kini dapat ditanami dua kali.

Peningkatan IP ini berimplikasi pada:

- Meningkatnya intensitas tanam dan produksi pangan,
- Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian,
- Kontribusi langsung terhadap ketahanan pangan daerah dan nasional,
- Peningkatan pendapatan petani melalui siklus tanam yang lebih produktif.

5.4.2. KABUPATEN PALI

Program Optimasi Lahan (OPLAH) rawa merupakan salah satu instrumen kebijakan strategis Kementerian Pertanian dalam rangka percepatan pencapaian swasembada pangan nasional. Di tengah keterbatasan lahan sawah eksisting, pemanfaatan lahan rawa melalui pendekatan optimasi menjadi alternatif yang tidak hanya relevan, tetapi juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan luas tanam dan produksi padi secara berkelanjutan.

Dalam konteks Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), pelaksanaan OPLAH Tahun 2025 menjadi bagian integral dari implementasi Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 458/Kpts/PW.020/M/06/2025 tentang Satuan Tugas Swasembada Pangan. Penugasan pendampingan optimasi lahan seluas 650 hektar kepada BRMP Sumatera Selatan menempatkan penyuluh pertanian sebagai aktor kunci dalam menjembatani kebijakan nasional dengan realitas lapangan.

Salah satu faktor fundamental yang menentukan keberhasilan pelaksanaan OPLAH di Kabupaten PALI adalah kesiapan perencanaan teknis melalui penyusunan Survey Investigasi dan Desain (SID). Seluruh lokasi OPLAH telah memiliki SID dengan capaian 100 persen, yang menunjukkan bahwa proses perencanaan telah dilaksanakan secara komprehensif dan sistematis.

SID berfungsi sebagai landasan utama dalam menentukan desain tata air, pola saluran, serta kebutuhan konstruksi yang sesuai dengan karakteristik lahan rawa. Tanpa perencanaan teknis yang matang, optimasi lahan berpotensi menimbulkan permasalahan baru, seperti genangan berlebih, kekeringan musiman, atau konflik pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, keberadaan SID tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi instrumen mitigasi risiko dalam pelaksanaan program.

Pelaksanaan konstruksi OPLAH di Kabupaten PALI Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat optimal dengan realisasi fisik mencapai 100 persen dari target luasan 650 hektar. Seluruh kegiatan konstruksi telah dikontrakkan dan diselesaikan tepat waktu tanpa adanya penundaan signifikan. Hal ini mencerminkan tata kelola kegiatan yang efektif, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan fisik di lapangan.

Konstruksi OPLAH yang dilaksanakan mencakup perbaikan dan pembangunan jaringan tata air yang menjadi kunci utama dalam pengelolaan lahan rawa. Dengan sistem tata air yang lebih baik, lahan rawa yang sebelumnya bersifat marginal dapat diubah menjadi lahan produktif yang siap ditanami.

Dampak langsung dari keberhasilan konstruksi ini adalah meningkatnya kesiapan lahan dan kepercayaan petani untuk melakukan tanam.

Sebaran lokasi konstruksi di beberapa kecamatan utama, seperti Tanah Abang, Abab, dan Penukal Utara, menunjukkan bahwa program OPLAH tidak bersifat parsial. Pemerataan lokasi kegiatan menjadi indikator bahwa pendekatan pembangunan dilakukan secara inklusif dan berbasis potensi wilayah. Dari sudut pandang evaluasi kinerja, keberhasilan konstruksi ini menjadi prasyarat utama dalam pencapaian target LTT dan peningkatan indeks pertanaman.

Realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) optimasi lahan rawa di Kabupaten PALI mencapai sekitar 647,5 hektar atau setara dengan 99,62 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dan mendekati target maksimal, serta mencerminkan keberhasilan implementasi program OPLAH di tingkat lapangan.

Tingginya capaian LTT menunjukkan bahwa petani merespons program OPLAH secara positif. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran penyuluh pertanian dalam melakukan pendampingan intensif, memberikan bimbingan teknis, serta memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan. Penyuluh menjadi pihak yang memastikan bahwa kesiapan lahan diikuti oleh kesiapan petani dalam melaksanakan tanam.

Dari sisi temporal, realisasi LTT cenderung meningkat pada pertengahan tahun, terutama pada bulan Mei hingga Juni. Pola ini menunjukkan adanya adaptasi petani terhadap kondisi agroklimat dan ketersediaan air di lahan rawa. Fleksibilitas waktu tanam ini menjadi keunggulan tersendiri dari optimasi lahan rawa, sekaligus menunjukkan bahwa program OPLAH bersifat adaptif terhadap dinamika lapangan.

Capaian LTT OPLAH di Kabupaten PALI menunjukkan variasi antar kecamatan. Kecamatan dengan alokasi awal menjadi kontributor utama capaian, namun terdapat pula kecamatan yang mampu merealisasikan tanam melebihi alokasi yang direncanakan. Fenomena ini menunjukkan bahwa potensi lahan rawa di Kabupaten PALI masih cukup besar dan belum sepenuhnya terakomodasi dalam perencanaan awal.

Realisasi yang melebihi alokasi awal mencerminkan adanya efek pengganda dari keberhasilan konstruksi dan pendampingan teknis. Ketika infrastruktur lahan telah tersedia dan petani memperoleh pendampingan yang memadai, muncul inisiatif untuk memanfaatkan lahan secara lebih optimal. Kondisi ini menjadi indikator bahwa program OPLAH memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan luas tanam.

Dari perspektif evaluasi program, dinamika spasial ini memberikan pembelajaran penting bahwa perencanaan ke depan perlu lebih berbasis potensi riil dan data lapangan. Penyuluh pertanian memiliki peran strategis dalam menyediakan data dan informasi lapangan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan.

Meskipun capaian LTT OPLAH Tahun 2025 tergolong sangat baik, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian. Peningkatan luas tanam perlu diimbangi dengan peningkatan produktivitas

dan kualitas hasil. Tanpa penguatan pendampingan pasca-tanam, peningkatan luas tanam berpotensi tidak memberikan dampak optimal terhadap produksi.

Selain itu, keberlanjutan hasil konstruksi OPLAH memerlukan pemeliharaan yang konsisten. Sistem tata air yang telah dibangun perlu dikelola secara bersama oleh petani dan pemangku kepentingan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Penyuluh memiliki peran strategis dalam mendorong kesadaran kolektif petani terhadap pentingnya pemeliharaan infrastruktur lahan.

Kegiatan Optimasi Lahan (OPLA) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang telah ada melalui perbaikan infrastruktur, penyediaan sumber air, serta peningkatan efisiensi pengelolaan lahan. Program ini berfokus pada peningkatan daya dukung lahan agar dapat ditanami secara lebih optimal, baik dari segi luas tanam maupun intensitas tanam.

Berdasarkan data pada dokumen OPLA Kabupaten PALI tahun 2025, tercatat bahwa total luasan yang menjadi sasaran kegiatan optimasi lahan adalah **650 hektar**, yang tersebar pada beberapa kecamatan dan desa, yaitu:

1. **Kecamatan Abab – Desa Prambatan**
Luas lahan : **206 ha**
Luas terealisasi : **198 ha**
Tingkat capaian : **96,12%**
2. **Kecamatan Penukal Utara – Desa Tempirai**
Luas lahan : **200 ha**
Luas terealisasi : **189 ha**
Tingkat capaian : **94,50%**
3. **Kecamatan Tanah Abang – Desa Pandan**
Luas lahan : **129 ha**
Luas terealisasi : **105 ha**
Tingkat capaian : **81,40%**
4. **Kecamatan Tanah Abang – Desa Modong**
Luas lahan : **115 ha**
Luas terealisasi : **102 ha**
Tingkat capaian : **88,70%**

Secara kumulatif, dari target optimasi lahan seluas **650 ha**, telah terealisasi sekitar **636,50 ha**, dengan rata-rata tingkat keberhasilan sekitar **97,92%**. Angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan optimasi lahan di Kabupaten PALI tergolong **tinggi dan cukup berhasil**.

Berdasarkan data per lokasi, dapat dilihat bahwa capaian optimasi lahan telah mendekati target di seluruh desa sasaran. Capaian tertinggi tercatat di **Desa Prambatan (96,12%)**, sedangkan capaian terendah berada di **Desa Pandan (81,40%)**. Meskipun demikian, seluruh lokasi masih berada pada

kategori capaian baik (di atas 80%), yang menunjukkan bahwa hampir seluruh lahan sasaran telah berhasil dioptimalkan. Perbedaan tingkat capaian di masing-masing lokasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Kondisi topografi lahan yang berbeda
- Tingkat kesulitan penggalian dan pengeboran
- Akses menuju lokasi kegiatan
- Ketersediaan alat berat dan tenaga kerja
- Waktu pelaksanaan di lapangan

Desa Prambatan dan Desa Tempirai menunjukkan capaian yang sangat baik karena didukung oleh kondisi lahan yang lebih mudah diakses serta ketersediaan sarana penunjang yang relatif memadai. Salah satu komponen utama dalam kegiatan OPLA adalah penyediaan sumber air melalui **pembuatan sumur bor** dan **normalisasi/pembuatan saluran**. Dari data yang tersedia, tercatat beberapa capaian penting, antara lain:

- Di Desa Prambatan, terealisasi **25 titik sumur bor** dari target 26 titik.
- Di Desa Pandan, terealisasi **18 titik sumur bor** dari target 22 titik.
- Di Desa Modong, terealisasi **16 titik sumur bor** dari target 18 titik.
- Di Desa Tempirai, dilakukan **normalisasi saluran, pembuatan saluran baru, serta pembuatan bedengan** di beberapa titik.

Dukungan infrastruktur air ini sangat berperan besar dalam meningkatkan kesiapan lahan untuk ditanami, terutama pada lahan tadah hujan atau lahan yang sebelumnya memiliki keterbatasan sumber air. Dengan adanya sumur bor dan perbaikan saluran air, lahan yang semula hanya dapat ditanami satu kali dalam setahun, berpotensi ditingkatkan menjadi dua kali (IP 200) bahkan lebih, tergantung pada manajemen pengairan dan teknologi budidaya yang diterapkan.

5.3.7. KOTA PAGAR ALAM

Target Oplah di Kota Pagar Alam seluas 315 hektar, dilaksanakan pada 15 kelompok tani yang ada di 3 (tiga) Kecamatan (Dempo Selatan, Dempo Tengah dan Dempo Utara). Kontrak SID dan kontrak kontruksi sudah 100%. Saat ini masih dalam proses pengerjaan fisik yang baru mencapai 50% (Terlampir)

Pembentukan Brigade Pangan (BP)

Brigade Pangan dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat kelembagaan petani muda dalam menggerakkan dan mendukung keberhasilan program Optimasi Lahan (OPLAH) di Kota Pagar Alam, sehingga mampu meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan produktivitas lahan secara berkelanjutan satu target Brigade Pangan (BP) di Kota Pagar Alam sudah terbentuk dengan nama "Basemah Serame "

Sosialisasi dan pembentukan Brigade Pangan (BP) tanggal 23 Oktober 2025

Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Pertanian Kota Pagaralam, Diki Herlambang, STP., M.Si. Dalam sambutannya Beliau menyampaikan arahan mengenai pentingnya peran generasi muda dalam mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian daerah. Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan paparan mengenai konsep Brigade Pangan sebagai penggerak utama kegiatan Opla, termasuk strategi penguatan kelembagaan, penerapan teknologi modern, serta peningkatan kapasitas petani muda melalui pelatihan dan pendampingan. Dalam kegiatan tersebut berhasil dibentuk satu Brigade Pangan yang diberi nama "Besemah Serame". Nama ini mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat Besemah dalam mewujudkan kemandirian pangan daerah.

Brigade Pangan Besemah Serame terdiri dari petani muda milenial yang berasal dari tiga kecamatan sasaran Opla, yaitu Dempo Utara, Dempo Tengah, dan Dempo Selatan. Para anggota BP memiliki jiwa wirausaha (entrepreneurship), semangat inovatif, serta komitmen untuk menggerakkan pertanian modern di wilayahnya.

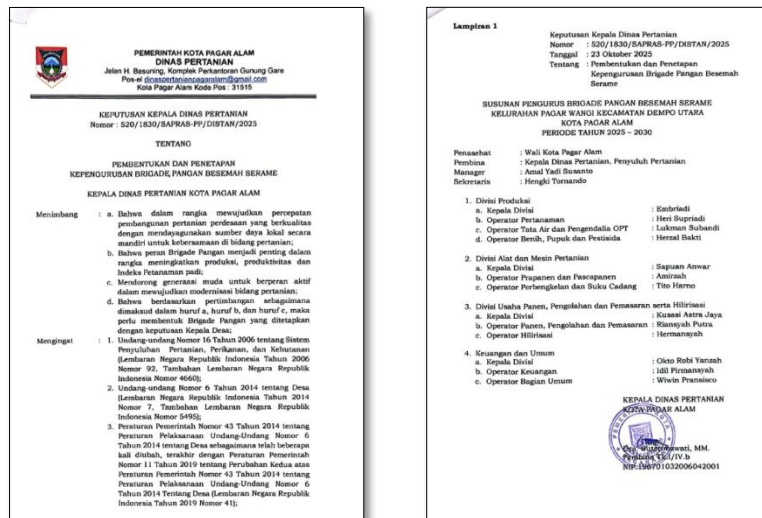
Struktur organisasi Brigade Pangan Besemah Serame mencakup manajer, sekretaris, divisi produksi, divisi alsintan, divisi panen dan pemasaran, serta divisi keuangan. Pembentukan struktur ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan Opla di lapangan dapat berjalan efektif, terkoordinasi, dan berorientasi hasil. Melalui keberadaan BP ini, diharapkan kegiatan Opla tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga memperluas kesempatan ekonomi bagi petani muda serta mempercepat peningkatan indeks pertanaman (IP) di wilayah Kota Pagaralam.

Hasil dari kegiatan pendampingan dan sosialisasi ini meliputi dua poin utama. Pertama, terbentuknya secara resmi Brigade Pangan "Besemah Serame" sebagai lembaga penggerak petani muda di tiga kecamatan pelaksana Opla. Kedua, dilakukannya pembahasan lanjutan mengenai dukungan teknis dan finansial bagi pelaksanaan kegiatan Opla. Dalam diskusi tersebut disepakati beberapa hal penting, antara lain:

- a. Mekanisme ketersediaan BBM untuk alsintan akan diupayakan agar lebih mudah diakses oleh petani melalui dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Kota Pagaralam
- b. Brigade Pangan Besemah Serame dapat mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai modal awal pengembangan usaha tani dan kegiatan Opla di lapangan

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan ini berjalan lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Para petani muda menunjukkan semangat dan komitmen kuat untuk terlibat aktif dalam kegiatan Opla melalui wadah Brigade Pangan Besemah Serame. Ke depan, diharapkan pendampingan lanjutan dalam bentuk pelatihan teknis, manajemen kelembagaan dan inovasi usaha tani dapat terus dilakukan

guna memperkuat peran BP sebagai motor penggerak pertanian modern di kota pagaralam.



Gambar 4. SK Brogade Pangan yang telah dibentuk

Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2025 dilaksanakan Pertemuan teknis dengan agenda tindak lanjut pembentukan BP yang bertempat di BPP Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam. Pertemuan teknis dihadiri oleh Tim satgas swasembada pangan dari BRMP Sumsel, SMK PP Sembawa, Penyuluh Pertanian Lapangan, anggota Brigade Pangan Besemah Serame, serta Babinsa dari Koramil setempat.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pembentukan Brigade Pangan Besemah Serame yang telah dilaksanakan sebelumnya. Fokus utama diskusi adalah pembahasan langkah-langkah operasional setelah pembentukan BP, terutama terkait mekanisme penyusunan proposal pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta sarana produksi (saprodi), pengelolaan kegiatan Optimasi Lahan (Opla) oleh Brigade Pangan. Dalam pembahasan, BRMP Sumatera Selatan menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, penyuluh pertanian, dan kelompok petani muda dalam mengoptimalkan pelaksanaan program Opla di lapangan. SMK PP Sembawa memberikan arahan teknis mengenai format dan mekanisme penyusunan proposal bantuan alsintan dan saprodi, yang akan diajukan melalui koordinasi antara Brigade Pangan dan penyuluh pertanian setempat, kemudian disahkan oleh Dinas Pertanian Kota Pagar Alam. Proposal tersebut diharapkan berisi rencana kebutuhan alsintan, saprodi yang terukur dan sesuai dengan kondisi luasan lahan di lapangan.

Selanjutnya, anggota Brigade Pangan Besemah Serame akan berperan aktif dalam pengelolaan lahan Opla seluas 299 hektare yang tersebar di Kecamatan Dempo Utara, Dempo Tengah, dan Dempo Selatan. SMK PP Sembawa juga menyampaikan kesiapan mereka dalam memberikan pendampingan teknis serta pelatihan kewirausahaan pertanian untuk meningkatkan kapasitas anggota Brigade Pangan. Babinsa dalam kesempatan tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan Opla yang merupakan salah

satu program strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Babinsa akan turut mendampingi dan mengawal pelaksanaan kegiatan di lapangan. Diharapkan dengan adanya pertemuan teknis ini menciptakan komitmen dari seluruh peserta untuk terus bersinergi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Opla dan pemberdayaan petani muda melalui Brigade Pangan Besemah Serame

Pada tanggal 25 Oktober 2025, kegiatan dilanjutkan dengan monitoring lokasi Opla di Kota Pagaralam yang telah berjalan pada tahap konstruksi dengan kontrak konstruksi yaitu swakelola. Program Opla di Kota Pagaralam awalnya direncanakan seluas 315 hektar, namun setelah proses verifikasi lapangan dan penyesuaian lokasi, luas lahan yang siap dioptimalkan menjadi 299 hektar dengan. Pada Kelurahan Kance Diwe seluas 12 ha telah dimulai MC 0 dan saat ini tahap pembuatan saluran cacing. Kegiatan Opla tersebut tersebar di tiga wilayah utama, yaitu Kecamatan Dempo Utara, Dempo Tengah, dan Dempo Selatan. Ketiga kecamatan ini memiliki potensi sumber daya lahan dan air yang baik, sehingga menjadi prioritas pelaksanaan kegiatan Opla.

V.KESIMPULAN

1. Pendampingan Program Strategis Kementan di Prov. Sumsel dilaksanakan secara terarah dan terpadu melalui koordinasi intensif dengan pemda dan stakeholder terkait, pendampingan serta sosialisasi kepada petani, dan monev berkelanjutan terhadap program Oplah, Cetak Sawah, LTT Padi Reguler, dan LTT Padi Gogo.
2. Capaian LTT Per 30 November 2025 , Reguler : 65.724 ha dari target 128.125 ha (51,29%), Capaian LTT Pago 2.639 ha dari target 3.983 (66,27%).
3. Capaian relasisai kegiatan Opa25 (PALI, OKU, Pagar Alam)
SID : target seluas 2.114 ha realisasi seluas 1.546 ha (73%),
Kontruksi target seluas 1.546 ha, realisasi seluas 1.546 (100%)
Realisasi fisik seluas 825 ha (53%)
4. Capaian realisasi keg. CSR25 (PALI, OKU, Muratata, Empat Lawang dan Musirawas)
SID : Target seluas 5.044 ha realisasi seluas 5.004 ha (110,5%),
Kontrak kontruski seluas 4.287 ha realisasi seluas 4.068 (95%), realisasi fisik seluas 951 ha (22%)

5.2 Produksi Benih Sumber Padi (150 Ton Benih Padi SS)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan teknologi standardisasi yang merupakan komponen utama agribisnis akan meningkatkan kebutuhan sarana produksi untuk efisiensi produksi, distribusi dan pemasaran hasil. Pembangunan sistem dan usaha agribisnis membuka peluang bagi berkembangnya industri sarana produksi dan jasa pelayanan. Salah satu komponen produksi yang dibutuhkan petani adalah benih bermutu. Ketersediaan benih bermutu dinilai strategis karena akan sangat menentukan keberhasilan budidaya tanaman. Peran benih sangat menentukan kapasitas produksi yang akan dihasilkan dan berkembangnya agribisnis, maka penggunaan varietas unggul yang sesuai dengan preferensi konsumen dan sistem produksi benih secara berkelanjutan menjadi sangat penting.

Benih sumber menempati posisi strategis dalam industri perbenihan nasional, karena menjadi sumber bagi produksi benih kelas di bawahnya yang akan digunakan petani. Kementerian Pertanian telah banyak melepas varietas unggul tetapi sebagian kurang berkembang. Namun beberapa permasalahan yang masih dihadapi saat ini adalah: 1) belum semua varietas unggul yang dilepas dapat diadopsi oleh petani atau pengguna benih, 2) ketersediaan benih sumber dan benih sebar secara "enam tepat" (varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi, dan harga) belum dapat dipenuhi, 3) belum optimalnya kinerja lembaga produksi dan pengawasan mutu benih, dan 4) belum semua petani menggunakan benih unggul bermutu/bersertifikat. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa salah satu penyebab rendahnya produksi karena kualitas benih yang ditanam sudah kurang baik, berasal dari pertanaman yang sudah ditanam berkali-kali. Oleh karena itu ketersediaan dan upaya pengendalian mutu benih sumber perlu ditingkatkan. Benih Sumber harus mampu mencerminkan sekaligus menjamin tersedianya benih bermutu, yakni secara genetik murni, secara fisiologik bervigor, dan secara fisik bersih, seragam serta sehat.

Preferensi petani terhadap varietas unggul padi berkembang mengikuti perkembangan zaman, dari yang sebelum berdaya hasil tinggi namun saat ini preferensi itu juga berkembang menjadi berdaya hasil tinggi, toleran cekaman abiotik, toleran naungan, umur genjah bahkan juga mempertimbangkan mutu beras dan mutu tanak (Nugraha dan Sayaka, 2004).

Kegiatan perbenihan padi tidak hanya bertujuan menghasilkan benih bermutu untuk kebutuhan petani, tetapi juga untuk membangun kemandirian kelompok tani atau penangkar dalam memproduksi dan mendistribusikan benih. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan petani lebih mudah memperoleh benih unggul dengan harga terjangkau, sehingga produktivitas padi dapat ditingkatkan dan ketahanan pangan daerah maupun nasional dapat terjamin

1.2. Dasar Pertimbangan

Salah satu target Presiden dalam Asta Citanya tahun 2025 adalah mewujudkan sawsembada pangan dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun mendatang, dengan berbagai kebijakan pendukung diantaranya melakukan perعتakan lahan sawah, peningkatan IP dan hal lainnya. Menyokong sawsembada pangan tersebut, BPMP sebagai lembaga teknis bertanggung jawab dalam melakukan penyediaan benih unggul terutama untuk lahan sawah, lahan kering dan lahan rawa. Pemanfaatan benih unggul salah satu faktor pengungkit yang dapat meningkatkan produksi pertanian secara nasional.

Benih sumber menempati posisi strategis dalam industri perbenihan nasional, karena menjadi sumber bagi produksi benih kelas di bawahnya yang akan digunakan petani. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi saat ini adalah: 1) belum semua varietas unggul yang dilepas dapat diadopsi oleh petani atau pengguna benih, 2) ketersediaan benih sumber dan benih sebar secara "enam tepat" (varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi, dan harga) belum dapat dipenuhi, 3) belum optimalnya kinerja lembaga produksi dan pengawasan mutu benih, dan 4) belum semua petani menggunakan benih unggul bermutu/bersertifikat. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa salah satu penyebab rendahnya produksi karena kualitas benih yang ditanam sudah kurang baik, berasal dari pertanaman yang sudah ditanam berkali-kali. Oleh karena itu ketersediaan dan upaya pengendalian mutu benih sumber perlu ditingkatkan. Benih Sumber harus mampu mencerminkan sekaligus menjamin tersedianya benih bermutu, yakni secara genetik murni, secara fisiologik bervigor, dan secara fisik bersih, seragam serta sehat.

Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 memiliki luas panen padi 521,09 ribu hektar mengalami peningkatan sebesar 16,95 ribu ha atau 3,36 persen dibandingkan luas panen padi di 2023 yang sebesar 504,14 ribu Ha (BPS Sumsel 2024), kedepan tentunya pertanaman padi Provinsi Sumsel membutuhkan benih berkualitas untuk menjadi penghasil beras nasional yang diperhitungkan. Dengan agroekosistem yang beragam, maka luas tanam padi di sawah lebak 301.432 ha, pasang surut 231.998 ha, irigasi 107.385 ha, tadah hujan 112.578 ha dan lainnya 35.082 ha yang merupakan peluang dan juga tantangan dalam

menghasilkan benih bermutu. Produksi benih dapat saja dihasilkan dari berbagai agroekosistem tersebut. Dari kegiatan ini diharapkan keluaran yang dicapai sesuai target yaitu 150 Ton benih padi SS.

1.3. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah menghasilkan benih sumber padi kelas *Stock Seed* (SS) sebanyak 150 ton yang bermutu, tersertifikasi, dan sesuai standar perbenihan nasional

1.4. Keluaran yang diharapkan

Tersedianya benih sumber padi kelas SS sebanyak 150 ton yang siap digunakan sebagai sumber perbanyakan benih di tingkat berikutnya.

1.5 Perkiraan Manfaat dan Dampak Manfaat

1. Tersedianya benih padi bermutu dan terstandar.
2. Meningkatnya kapasitas kelompok tani penangkar.

Dampak

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas padi.
2. Penguatan ketahanan pangan daerah dan nasional

II. PROSEDUR KERJA

2.1 Pendekatan

Kegiatan Perbenihan Padi dilakukan melalui pendekatan agroekosistem dengan memperhatikan kesesuaian kondisi bio-fisik lokasi yang meliputi aspek sumber daya lahan, air, wilayah, dan komoditas yang dominan/ diusahakan. Arah dan strategi perakitan dan penyediaan varietas unggul padi tetap bertitik tolak pada tujuan perakitan varietas, yaitu untuk meningkatkan daya hasil sesuai isu utama kendala produksi padi serta memperbaiki ketahanan terhadap cekaman lingkungan (Las *et al.*, 2004). Untuk menjamin ketersediaan benih bermutu dari varietas unggul serta meningkatkan penggunaannya di kalangan petani maka program pengembangan perbenihan dari hulu sampai hilir harus lebih terarah dan terpadu. Hal ini penting mengingat alur produksi benih melibatkan berbagai institusi. Kegiatan produksi benih sebar menggunakan teknologi baku/ standar agar mutu benih yang dihasilkan terjamin. Secara garis besarnya ada empat tingkatan benih yaitu: *Breeder Seed* (BS) atau benih sumber/benih penjenis, *Foundation Seed* (FS) atau benih tetua/dasar, *Stock Seed* (SS)

atau benih pokok, dan *Extension Seed* (ES) atau benih sebar. Benih sumber padi yang akan diproduksi adalah benih Pokok (SS). Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Sumatera Selatan dalam pelaksanaannya, menggunakan Benih Dasar dari BRMP Padi Sukamandi. Kegiatan Pebenihan Padi juga akan berkoordinasi dengan Balai Pengawas dan Sertifikasi benih (BPSB), Balai Benih Induk (BBI), dan institusi produsen benih sebar untuk kelancaran produksi dan penyaluran benih sumber.

Kegiatan ini juga menggunakan pendekatan partisipatif aktif petani/ kelompok tani dan keterkaitan dengan pihak penentu kebijakan (Dinas Pertanian Kabupaten dan instansi terkait), yang akan berpengaruh pada percepatan pembangunan pertanian daerah. Pendampingan, bimbingan dan pengawalan penerapan teknologi akan dilaksanakan oleh BPMP Sumatera Selatan serta penyuluh dari dinas instansi terkait, agar benih yang dihasilkan terjamin mutunya.

2.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan meliputi koordinasi, implementasi perbenihan terstandar, sertifikasi, serta pengemasan dan pelabelan benih. Ruang lingkup kegiatan secara rinci tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Ruang Lingkup Kegiatan Perbenihan Padi Tahun 2025

No.	Tahapan Kegiatan	Uraian Singkat
1.	Persiapan	Menyusun personalia, koordinasi <i>stakeholder</i> (Dinas Pertanian, BPSB, BRMP Padi, institusi produsen benih padi, BPP), penetapan lokasi dan petani
2.	Budidaya terstandar	1. Persiapan lahan 2. Persemaian 3. Penanaman 4. Pemeliharaan (pemupukan, pengairan, pengendalian OPT secara terpadu) 5. Roguing
3.	Panen dan pasca panen terstandar	Panen, pengeringan, prosesing
4.	Sertifikasi	Pemeriksaan lapang & laboratorium

2.3 Tempat dan Waktu

Kegiatan dilaksanakan di Poktan Suka Maju Desa Sukanegara dan Poktan Mekar Jaya Desa Ganti Warno Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur menggunakan lahan petani, serta IP2SIP Karang Agung yang secara rinci disajikan pada Tabel 2. Penetapan lokasi di lahan petani ditentukan berdasarkan pertimbangan lokasi eksisting/ sentra produksi padi di lahan sawah irigasi Sumatera Selatan dengan petani pelaksana yang responsif dan kooperatif.

Tabel 2. Lokasi Kegiatan Perbenihan Padi di Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Lokasi	Luasan (Ha)
1.	Poktan Suka Maju Desa Sukanegara	30
2.	Poktan Mekar Jaya Desa Ganti Warno	28
3.	IP2SIP Karang Agung	2
	Total luasan	60

2.4 Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan adalah; benih sumber padi yang berasal dari UPBS BRMP Padi Sukamandi dan mitra binaan, pupuk (urea, NPK, SP36 dan bahan organik), pestisida, tali rafia, papan nama kegiatan, kantong plastik, dan bahan penolong lainnya. Sedangkan alat yang digunakan adalah: alat pengolahan tanah (traktor), cangkul, sabit, *hand-sprayer*, meteran, timbangan, alat tulis dan alat pendukung lainnya.

2.4.1. Koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi Terkait

Koordinasi dilakukan dengan dinas instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan meliputi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten/Kota, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, serta Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi. Koordinasi dilakukan untuk menggali informasi awal dan menyelaraskan pelaksanaan kegiatan.

2.4.2 Penentuan Lokasi dan Petani

Lokasi dan petani ditentukan berdasarkan koordinasi dengan Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten terkait. Penentuan calon lokasi dengan kriteria: 1) Pemilihan penempatan calon lokasi dengan prioritas luasan areal dalam satu hamparan/kawasan yang strategis dan mudah dijangkau petani atau disesuaikan dengan kondisi lapangan, 2) Produktivitas dan indeks pertanamannya masih berpotensi untuk ditingkatkan, 3) petaninya kooperatif dan responsif terhadap teknologi, dan 3) Diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit.

2.3.5 Pembenihan Padi Terstandar

- a. Varietas Unggul (VU) Spesifik Lokasi. Penggunaan varietas unggul yang adaptif dan spesifik lokasi disesuaikan dengan karakteristik lahan (irigasi/tadah hujan), kondisi agroklimat, ketahanan terhadap OPT utama, serta preferensi petani terhadap bentuk gabah dan kualitas rasa nasi. Varietas unggul merupakan komponen teknologi utama dalam sistem perbenihan karena memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas, stabilitas hasil, dan efisiensi usaha tani, serta relatif lebih cepat diadopsi oleh petani apabila sesuai dengan kebutuhan dan preferensi setempat.
- b. Benih Bermutu. Penggunaan benih bermutu sesuai standar SNI perbenihan padi, yang ditandai dengan kemurnian varietas tinggi, daya kecambah $\geq 80-85\%$, kadar air sesuai ketentuan, serta bebas dari campuran varietas lain dan benih gulma. Benih bermutu menjamin pertumbuhan tanaman yang seragam, vigor awal yang baik, dan mendukung pencapaian produktivitas optimal serta kemurnian varietas dalam produksi benih.
- c. Populasi dan Sistem Tanam. Pengaturan populasi tanaman dilakukan melalui penerapan sistem tanam jarak legowo 2:1 atau 4:1, dengan jumlah populasi minimum ± 250.000 rumpun per hektar. Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi pemanfaatan cahaya matahari, sirkulasi udara, dan ruang tumbuh tanaman, sekaligus mempermudah pemeliharaan, pengendalian OPT, dan pelaksanaan roguing pada kegiatan perbenihan.
- d. Pemupukan Berimbang. Pemupukan dilakukan secara berimbang dan spesifik lokasi berdasarkan kebutuhan tanaman, status hara tanah, serta rekomendasi pemupukan setempat (hasil uji tanah atau perangkat rekomendasi). Pemupukan berimbang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara makro dan mikro tanaman padi secara optimal, meningkatkan efisiensi pupuk, serta mendukung pertumbuhan vegetatif dan generatif yang seimbang.
- e. Pemberian Bahan Organik. Aplikasi bahan organik berupa pupuk kandang matang, kompos, atau bahan organik lainnya dilakukan untuk meningkatkan kesuburan tanah,

kandungan bahan organik, kapasitas tukar kation (KTK), serta aktivitas mikroorganisme tanah. Pemberian bahan organik juga berperan dalam memperbaiki struktur tanah dan mendukung keberlanjutan sistem produksi benih padi.

- f. Ameliorasi Lahan. Ameliorasi lahan dilakukan melalui aplikasi kapur pertanian (kaptan) atau dolomit sebanyak 1–2 ton/ha, khususnya pada lahan dengan pH masam. Tindakan ini bertujuan meningkatkan pH tanah, menekan kelarutan unsur beracun, serta meningkatkan ketersediaan unsur hara esensial sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi secara optimal.
- g. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Terpadu. Pengendalian OPT dilakukan secara Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dengan mengutamakan tindakan pencegahan, monitoring rutin, pemanfaatan musuh alami, serta penggunaan pestisida secara selektif dan bijaksana sesuai ambang kendali. Pendekatan ini bertujuan menjaga kesehatan tanaman, meminimalkan kehilangan hasil, dan memastikan mutu serta kemurnian benih yang dihasilkan.
- h. Roguing (Seleksi Tanaman). Roguing merupakan kegiatan seleksi dan pembuangan tanaman yang tidak sesuai varietas, menyimpang secara morfologi, terserang penyakit sistemik, atau menunjukkan pertumbuhan tidak normal. Roguing dilakukan secara bertahap pada fase vegetatif, pembungaan, hingga menjelang panen sesuai standar perbenihan padi.
- i. Panen dan Pascapanen. Panen dilakukan tepat waktu pada saat tanaman mencapai masak fisiologis untuk menjamin mutu benih, diikuti dengan perontokan gabah segera setelah panen. Penanganan panen dan pascapanen yang tepat bertujuan menjaga daya kecambah, viabilitas, dan mutu fisik benih, serta mencegah kerusakan akibat penundaan perontokan dan pengeringan.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

1.4. Karakteristik Wilayah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) memiliki luas sebesar 3.370 km², dimana sebagian besar dari wilayah tersebut adalah dataran rendah dan cenderung rata kecuali di wilayah Kecamatan Martapura dan sekitarnya yang cenderung berbukit. Secara geografis terletak pada 1030 40' Bujur Timur – 1040 33' Bujur Timur dan 30 45' Lintang Selatan – 40 55' Lintang Selatan.

Secara administrasi wilayah Kabupaten OKU Timur memiliki batas-batas sebagai berikut: di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kecamatan Tanjung Lubuk dan Lempuing) dan Kabupaten Ogan Ilir (Kecamatan Muara Kuang), di sebelah

Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kecamatan Lempuing dan Kecamatan Mesuji), di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung (Kabupaten Way Kanan) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Kecamatan Simpang) dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Kecamatan Lengkiti, Sosoh Buay Rayap, Baturaja Timur dan Peninjauan).

Topografi dan ketinggian di wilayah Kabupaten OKU TIMUR berkisar antara 35 – 67 meter di atas permukaan laut. Bentuk lapangan (topografi), keadaan tanah di wilayah Kabupaten dapat digolongkan ke dalam wilayah datar (*penepain zone*), bergelombang (*piedmont zone*) dan berbukit (*hilly zone*). Curah hujan yang terjadi dapat dipengaruhi oleh kondisi iklim, kondisi geografis dan perputaran arus udara. Akibatnya jumlah curah hujan yang tercatat dimasing-masing stasiun pengamatan ataupun BPP/BIP tidak sama. Sebagai akibat dari letak geografis dan kondisi topografis wilayah yang berbukit–bukit, maka berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Ferguson, daerah Kabupaten OKU TIMUR tergolong tipe iklim C dengan tingkat kelembapan 60 – 70 %. Jumlah bulan basah 3,6 dan bulan kering 3,2 dengan rata – rata dimulai dari bulan Oktober dan berakhir pada bulan Juli.

Kondisi iklim di Kabupaten OKU TIMUR termasuk tropis basah dengan variasi curah hujan antara 2.554-3.329 mm/tahun. Bulan terkering adalah bulan Juli dengan curah hujan sekitar 280 mm. Periode kering antara bulan Mei-Agustus dengan curah hujan antara 113 – 175 mm. Suhu bervariasi dengan rata-rata 22-31°C.

1.5. Peran Penangkar Dalam Menunjang Perbenihan

Usaha penangkaran benih padi menjadi salah satu usaha produktif dari beberapa kegiatan yang dilakukan kelompok tani. Dalam memproduksi benih padi, kelompok tani penangkar bekerjasama dengan anggota dan UPTD Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih Provinsi Sumatera Selatan dengan menerapkan teknologi PTT padi antara lain: 1) olah tanah sempurna, 2) bibit muda kurang dari 21 hari, 3) 1-3 bibit per lubang, 4) pemupukan yang berimbang, 5) pengairan basah kering dan 6) pengendalian gulma dan OPT yang optimal, dan 7) adanya kegiatan roguing oleh kelompok tani atas bimbingan BPSB dan BPSIP Sumsel. Salah satu syarat benih bermutu adalah tingkat kemurnian genetik yang tinggi, oleh karena itu roguing perlu dilakukan dengan tujuan membuang rumpun-rumpun tanaman yang ciri-ciri morfologisnya menyimpang dari ciri-ciri varietas yang diproduksi benihnya.

Benih sumber yang digunakan untuk pertanaman produksi benih satu kelas lebih tinggi dari kelas benih yang akan diproduksi. Untuk memproduksi benih kelas FS (*Foundation Seed/* Benih Dasar/ BD) atau label putih, maka benih sumbernya adalah benih padi kelas BS

(*Breeder Seed*/ Benih Penjenis/ BS) atau Label Kuning, sedangkan untuk memproduksi benih kelas SS (*Stock Seed*/ Benih Pokok/ BP) atau benih sumbernya Label Ungu, maka benih sumbernya boleh FS atau boleh BS dan untuk memproduksi benih kelas ES (*Extension Seed*/ Benih Sebar/ BR) benih sumbernya dari benih kelas FS (*Foundation Seed*/ Benih Dasar/ BD) atau SS (*Stock Seed*/ Benih Pokok/ BP). Prosedur kegiatan penangkaran VUB padi, mulai dari persemaian, tanam, pemeliharaan sampai panen dan pasca panen selalu berkoordinasi dengan BPSB (Tabel 3)

Tabel 3. Prosedur Penangkar Benih Padi

	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	Mengajukan permohonan dengan kelas benih untuk penangkaran (SS)	Koordinasi BPSB, lampirkan sertifikasi benih
2.	Menentukan tanggal semai, tanggal tanam	Koord BPSB dan petani penangkar
3.	Pemeriksaan I (Umur 1 bulan)	BPSB + Kelompok tani + BRMP
4.	Pemeriksaan II (Umur Primordia)	BPSB + Kelompok tani + BRMP
5.	Pemeriksaan III (Keluar Malai) + Rouging	BPSB + Kelompok tani + BRMP
6.	Penentuan Waktu Panen	BPSB + Kelompok tani
7.	CBKS (Calon Benih Kering Sawah)	Kelompok tani
8.	Proses menjadi calon benih	Kelompok tani
9.	Uji Laboratorium	BPSB
10.	Keluar Draft Sertifikat	BPSB
11.	Cetak Label + Packing	Kelompok tani

Benih pokok diproduksi oleh produsen atau penangkar benih. Pengendalian mutunya melalui sertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB). Pengawasan mutu benih memiliki peranan utama dalam produksi benih. Semua tahapan dari perbanyakan benih, pengolahan dan penyimpanan sampai kepada distribusi dan pemasaran harus dilakukan pengawasan, meliputi (1) pengujian mutu, (2) pengawasan, (3) peraturan dan (4) sertifikasi.

Keberhasilan pengembangan varietas unggul ditentukan oleh berbagai aspek, terutama ketersediaan benih dan mutu benih itu sendiri. Penggunaan benih bermutu tinggi merupakan prasyarat utama dalam budi daya padi. Oleh karena itu, pengembangan varietas unggul menuntut penyediaan benih yang bermutu tinggi dalam jumlah yang cukup dan tersedia tepat waktu. Sehingga risiko menurunnya daya tumbuh benih dapat dihindari dan sumber benih dekat dengan lokasi pengembangan padi. Untuk memenuhi kebutuhan benih

padi yang tepat varietas, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, dan tepat waktu, sistem Jabalsim perlu dikembangkan melalui pembinaan para penangkar benih atau dalam sistem produksi benih berbasis komunitas (*community-based seed production*).

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan melalui Unit Penangkaran Benih Sumber yang melakukan pertanaman di lokasi petani ini sudah menginisiasi terbentuknya kelompok penangkar benih. Beberapa upaya pembinaan telah dilakukan ke kelompok tersebut melalui pertemuan kelompok yang dihadiri juga oleh penyuluh dan petugas BPSB.

3.3 Pelaksanaan Kegiatan Perbenihan Padi

3.3.1 Penentuan Varietas Unggul

Kegiatan Perbenihan Padi BRMP Sumatera Selatan dilaksanakan secara partisipatif dengan Kelompok Tani Suka Maju Desa Sukanegara dan Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Ganti Warno Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari bulan April sampai dengan Desember 2025 pada lahan irigasi seluas 60 ha dengan varietas Inpari 32, Inpari 42, Inpari 50, dan Padjajaran. Sebaran varietas dan luasan lahan Kegiatan Perbenihan secara rinci disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Sebaran Varietas dan Luasan Lahan

No.	Lokasi	Varietas	Luas (Ha)
1.	Desa Sukanegara	Inpari 42	10
		Inpari 50	10
		Padjajaran	10
2.	Desa Ganti Warno	Inpari 32	20
		Inpari 42	8
3.	IP2SIP Karang Agung	Inpari 42	2
Total Luas			60

3.3.2 Koordinasi Keinstansi Terkait

Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan perbenihan padi, koordinasi dengan berbagai instansi terkait telah dilakukan secara intensif. Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan kegiatan mulai dari penentuan lokasi, penentuan petani, penyiapan lahan, kegiatan produksi, sertifikasi, hingga distribusi benih berjalan sesuai dengan ketentuan dan akan mencapai target yang telah ditetapkan.

Kegiatan diawali dengan melakukan koordinasi ke BB Padi, Dinas Pertanian Provinsi, dan BPSB Provinsi. Pada awal kegiatan Tim Perbenihan melaksanakan koordinasi ke Kabupaten OKI tepatnya di Desa Rantau Durian 2 Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan

Komering Ilir. Setelah Tim Perbenihan melaksanakan verifikasi lahan di calon lokasi kegiatan tersebut, disimpulkan bahwa lahan yang dikunjungi belum dapat memenuhi syarat teknis untuk kegiatan perbenihan (Gambar 1).

Selanjutnya Tim Perbenihan melakukan koordinasi ke Dinas Pertanian Kabupaten OKU Timur dan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Kabupaten OKU Timur. Hasil koordinasi kegiatan perbenihan ini dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kecamatan Belitang



Gambar 1. Koordinasi di Kab. OKI



Gambar 2. Koordinasi di Kab. OKU Timur

3.3.3. Pertemuan Kelompok dan CPCL

Berdasarkan hasil koordinasi dengan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Kabupaten OKU Timur diperoleh rekomendasi Kelompok Tani Suka Maju di Desa Sukanegara dan Kelompok Tani Mekar Jaya di Desa Gantiwarno, Kecamatan Belitang III BK 12 Kabupaten OKU Timur sebagai calon pelaksana kegiatan perbenihan. Selanjutnya dilakukan survey lokasi di lahan tersebut dengan total luasan 60 hektar. Benih yang akan digunakan dalam kegiatan ini berasal dari 4 varietas antara lain INPARI 32, INPARI 50, INPARI 42, dan Padjajaran.

Benih padi INPARI 32 dan INPARI 42 termasuk dalam varietas unggul untuk budidaya padi di Indonesia. INPARI 32 dikenal dengan produktivitasnya yang tinggi, mampu menghasilkan lebih kurang 8 ton gabah kering panen (GKP) per hektar. Varietas ini cocok ditanam di sawah irigasi dataran rendah hingga ketinggian 600 mdpl dengan umur panen

sekitar 120 hari. Keunggulan lainnya adalah ketahanannya terhadap wereng batang cokelat dan penyakit blas, sehingga mengurangi risiko gagal panen.

Sedangkan INPARI 42 memiliki kelebihan yang lebih spesifik, terutama dalam hal efisiensi waktu dan adaptasi di kondisi lahan yang kurang optimal, umur panennya lebih singkat (112 hari) dibandingkan varietas lain. INPARI 42 juga tahan terhadap kekeringan dan serangan wereng batang cokelat serta blas daun, meskipun rentan terhadap virus tungro. Keunggulan ini membuatnya cocok untuk ditanam di lahan irigasi dengan ketinggian 0–600 mdpl.

Benih INPARI 50 merupakan varietas yang tahan terhadap serangan wereng cokelat (WBC), hawar daun bakteri (HDB), blas, umur genjah, dan mutunya terbilang baik. Memiliki potensi hasil setara dengan Ciherang, yakni dengan rata-rata 7,56 ton/hektar dengan keunggulan padi berumur sangat genjah yaitu 105 HSS.

Varietas Padjajaran juga memiliki keunggulan agak tahan terhadap WBC biotipe 1 dan 2 serta agak tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri strain III

3.3.4 Bimbingan Teknis / Sosialisasi Kegiatan Perbenihan

Untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, serta keterampilan petani dalam menjalankan proses produksi benih sesuai standar mutu dan aturan sertifikasi, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) sekaligus sosialisasi program kepada petani penangkar dan kelompok tani peserta. Hadir dalam sosialisasi ini adalah Perwakilan dari BPSB TPH Ogan Komering Ulu Timur, Kelompok Tani dan petani yang akan menjadi pelaksana langsung kegiatan perbenihan. Bimtek ini memberikan perspektif praktis dari lapangan serta para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai ujung tombak pendampingan teknis bagi petani. Keterlibatan aktif dari semua pihak sangat vital untuk menyelaraskan persepsi dan langkah-langkah, memastikan setiap tahapan persiapan tanam berjalan sesuai rencana.

Selama koordinasi yang berlangsung, beberapa agenda krusial dibahas secara mendalam untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan kegiatan perbenihan: Pertama, mengenai penetapan jadwal tanam, diskusi intensif dilakukan untuk menentukan waktu yang paling optimal. Pertimbangan utama mencakup analisis faktor musim, ketersediaan air di sistem irigasi, dan siklus tanam sebelumnya di wilayah Belitang III. Hasil dari diskusi ini adalah kesepakatan jadwal tanam yang terpadu, yang diharapkan dapat meminimalkan risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem atau serangan hama/penyakit.

Kedua, fokus pada verifikasi ketersediaan dan mutu benih. Proses pengecekan

dilakukan terhadap kesiapan dan kualitas benih yang akan digunakan. Dipastikan bahwa benih yang tersedia adalah varietas unggul dan telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan untuk perbenihan. Melalui verifikasi ini, teridentifikasi secara spesifik kebutuhan benih dan langkah-langkah konkret untuk memastikan pasokan benih berkualitas tinggi tersedia tepat waktu bagi para petani pelaksana.

Ketiga, pembahasan mengenai kesiapan lahan dan irigasi. Diskusi mencakup kondisi terkini lahan yang akan digunakan untuk perbenihan, termasuk aspek pengolahan tanah dan fungsi sistem irigasi yang ada. Ditekankan kembali pentingnya perbaikan dan pemeliharaan saluran irigasi untuk menjamin pasokan air yang memadai sepanjang musim tanam. Hasilnya, terkoordinasi rencana detail persiapan lahan serta identifikasi area spesifik yang memerlukan perbaikan saluran irigasi.

Keempat, optimalisasi distribusi dan penggunaan pupuk. Mekanisme distribusi pupuk, baik yang bersubsidi maupun non-subsidi, dibahas agar dapat menjangkau petani pelaksana perbenihan secara efisien. Selain itu, ditekankan pula pentingnya pemupukan berimbang untuk efektivitas penyerapan nutrisi oleh tanaman. Kesepakatan dicapai mengenai mekanisme koordinasi distribusi pupuk yang lebih efektif, disertai rencana edukasi bagi petani tentang teknik pemupukan yang tepat.

Kelima, penguatan peran dan pendampingan teknis PPL. PPL diakui sebagai ujung tombak dalam pendampingan teknis kepada petani. Diskusi juga mencakup kebutuhan akan pelatihan tambahan bagi PPL serta pengembangan strategi komunikasi yang efektif dengan petani. Sebagai hasilnya, ditetapkan jadwal pendampingan rutin oleh PPL, mencakup bimbingan teknis mulai dari tata cara tanam, pemeliharaan tanaman, hingga strategi pengendalian hama dan penyakit terpadu.

Terakhir, penetapan mekanisme monitoring dan evaluasi. Disepakati pentingnya sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur progres dan mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul di lapangan secara dini. Hasilnya, ditetapkan mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala, memastikan setiap tahapan kegiatan perbenihan dapat dipantau dan dievaluasi secara efektif untuk perbaikan berkelanjutan.

Dengan adanya koordinasi yang solid dan implementasi yang terencana dari seluruh pihak, diharapkan kegiatan perbenihan padi di Belitang III dapat berjalan optimal. Ini tidak hanya akan menghasilkan benih berkualitas tinggi, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi padi dan penguatan ketahanan pangan di Sumatera Selatan secara keseluruhan.



Gambar 3. Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Kegiatan

3.3.5 Persiapan Lahan

Pendampingan dan pengawalan pengolahan lahan dan persemaian kegiatan perbenihan padi dilakukan dengan olah tanah sempurna menggunakan traktor kemudian diratakan sehingga memudahkan pada saat bibit ditanam.



Gambar 4. Pengolahan Lahan

3.3.6 Persemaian

Pelaksanaan kegiatan persemaian dilakukan dengan cara tanam pindah pada petakan lahan yang sudah disiapkan sebelumnya. Dilakukan seleksi benih dengan cara memisahkan benih yang tenggelam dan mengapung di atas air pada saat perendaman. Perendaman dilakukan dengan tujuan untuk merangsang perkecambahan dan dianjurkan menggunakan Fungi dan ZPT, untuk mencegah benih dari penyakit serta merangsang lebih cepat pertumbuhan akar. Perlakuan perendaman dilakukan selama 12 jam. Setelah direndam kemudian benih diperam selama 24 jam atau jika sudah terlihat berkecambah, kemudian dilakukan semai benih padi pada lahan yang sudah disiapkan. Lama penyemaian sekitar 15-20 hari sebelum ditanam pindahkan ke lahan atau ke pertanaman.

Keragaan pertanaman padi di persemaian menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik untuk ke empat varietas (Inpari 32, Inpari 42, Inpari 50 dan Padjajaran), dimana daunnya berwarna hijau dan pertumbuhannya cukup seragam. Pengamatan persentase tumbuh dilakukan 15 hari setelah benih ditanam. Secara rata-rata semua varietas memberikan persentase tumbuh yang baik yaitu di atas 95%.



Gambar 5. Persemaian Padi

3.3.7 Penanaman

Pengaturan populasi tanaman dilakukan melalui penerapan sistem tanam jajar legowo 4:1, dengan jumlah populasi minimum ± 250.000 rumpun per hektar. Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi pemanfaatan cahaya matahari, sirkulasi udara, dan ruang tumbuh tanaman, sekaligus mempermudah pemeliharaan, pengendalian OPT, dan pelaksanaan roguing pada kegiatan perbenihan. Pelaksanaan tanam dilakukan secara bertahap mulai dari 15 Juni 2025.



Gambar 6. Pelaksanaan Cabut Bibit Padi



Gambar 8. Pelaksanaan Tanam Perbenihan Padi di Desa Sukanegara

3.3.8 Pemeliharaan

Pada usia 15–20 hari setelah tanam, tanaman padi berada pada fase vegetatif awal, yaitu fase pembentukan anakan. Pemeliharaan yang tepat pada fase ini sangat penting untuk menunjang pertumbuhan anakan yang maksimal, yang akan menentukan produktivitas hasil panen. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada pertanaman padi usia 15–20 hari setelah tanam:

1. Penyulaman dan Pengairan

- Penyulaman: Jika ada bibit yang mati atau pertumbuhannya kurang baik, segera lakukan penyulaman dengan bibit cadangan yang sudah disiapkan. Waktu yang tepat untuk penyulaman adalah 15–20 hari setelah tanam.

- Pengairan: Ketinggian air perlu dijaga pada level 5–7 cm, dengan kondisi tergenang yang tidak terlalu dalam.

2. Pengendalian gulma

- Penyiangan: Lakukan penyiangan gulma untuk membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman padi. Gulma akan menjadi pesaing dalam perebutan unsur hara, sehingga penyiangan dapat mendukung pertumbuhan anakan secara optimal.
- Waktu penyiangan: Penyiangan sebaiknya dilakukan pada 15–20 hari setelah tanam jika tidak menggunakan herbisida pra-tumbuh.
- Metode:
 - Manual: Mencabut gulma dengan tangan.
 - Mekanik: Menggunakan alat seperti landak atau gasrok, yang juga dapat membantu aerasi (pertukaran udara) pada tanah.
 - Kimiawi: Penyemprotan herbisida dapat dilakukan saat gulma masih kecil (tahap 3-4 daun).

3. Pemupukan

Pada usia 15–20 hari, tanaman padi memasuki tahap pemupukan susulan pertama. Hal ini bertujuan untuk merangsang pembentukan anakan dan pertumbuhan tanaman secara keseluruhan.

- Jenis pupuk: Biasanya menggunakan pupuk majemuk NPK cair yang mengandung unsur nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K), yang disemprotkan ke daun. Kombinasi pupuk Urea, SP-36, dan KCl juga umum digunakan untuk pemupukan tanah.
- Waktu pemupukan:
 - Pupuk cair NPK: Dapat disemprotkan pada daun pada usia 20 hari setelah tanam.
 - Pupuk Urea: Dosis pupuk susulan pertama adalah sekitar 100 kg Urea/ha.
- Manfaat: Pemupukan pada fase ini akan meningkatkan kehijauan daun, memperkuat akar, dan memicu pertumbuhan anakan yang banyak.



Gambar 9. Pelaksanaan Pemupukan

4. Pengendalian hama dan penyakit

Pada fase vegetatif, serangan hama dan penyakit bisa menghambat pertumbuhan dan pembentukan anakan.

- Penyemprotan:
 - Jika sudah ada serangan hama atau penyakit, lakukan penyemprotan insektisida dan/atau fungisida.
 - Penyemprotan pencegahan juga dapat dilakukan, yaitu pada usia 15 atau 20 hari setelah tanam.
- Waktu penyemprotan: Sebaiknya dilakukan pada pagi hari (sebelum jam 9) atau sore hari (setelah jam 3) untuk menghindari sinar matahari terik dan meningkatkan penyerapan oleh tanaman.
- Hama yang perlu diwaspadai:
 - Hama penggerek batang: Menyebabkan anakan layu dan mati



Gambar 10. Pelaksanaan Penyemprotan Hama dan Penyakit

Dalam rangka pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tikus yang mulai menyerang areal persawahan di awal musim tanam, telah dilaksanakan Gerakan Pengendalian (Gerdal) Tikus di Desa Sukanegara, Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hamparan lahan seluas 30 hektar, dengan cakupan pengendalian aktif di lahan seluas 5 hektar, sementara sisanya dilakukan secara swadaya oleh petani. Serangan tikus terpantau cukup signifikan, terutama pada tanaman padi usia 1–15 hari setelah tanam (HST), dengan intensitas serangan mencapai rata-rata 7–10 lubang aktif per hektar. Gerdal ini dihadiri oleh 26 orang petani dari Poktan Suka Maju, dan dipimpin

langsung oleh Kepala BRMP Sumsel beserta tim, POPT Ira Indrayani, S.P., serta PPL wilayah setempat.



Gambar 11. Pelaksanaan Gerda

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pengendalian hama pratanam, bertujuan untuk menekan populasi tikus sedini mungkin sebelum memasuki fase tanam aktif. Kolaborasi antara petani dan petugas lapangan menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan pengendalian OPT secara terpadu.

3.3.9 Panen dan Pasca Panen

Panen dilakukan pada saat tanaman mencapai masak fisiologis, ditandai dengan sekitar 90–95% gabah telah menguning, guna menjamin viabilitas dan daya kecambah benih. Setelah panen, gabah segera dirontokkan untuk menghindari kerusakan mekanis, pemanasan, serta penurunan mutu akibat keterlambatan perontokan.

Kegiatan panen perbenihan padi di Desa Ganti Warno dan Desa Suka Negara, Kecamatan Belitang 3 mencakup varietas unggul Pajajaran, Inpari 32, Inpari 42, dan Inpari 50 Marem. Setelah panen, benih akan melalui proses penjemuran, pengolahan, hingga uji laboratorium untuk sertifikasi. Hasil ubinan masing-masing varietas disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Ubinan Kegiatan Perbenihan Padi

Kelompok Tani	Varietas	Hasil Ubinan (ton/ha)
Mekar Jaya	Inpari 42	4,62
Mekar Jaya	Inpari 32	5,02
Suka Maju	Inpari 42	4,89
Suka Maju	Inpari 50	4,75
Suka Maju	Padjajaran	3,25
IP2SIP Karang Agung	Inpari 42	3,52

Hasil ubinan menunjukkan potensi produksi yang cukup baik dan mendukung pencapaian target produksi benih sumber.



Gambar 12. Pengawasan Kegiatan Panen

Proses panen dan pasca panen merupakan faktor krusial dan sangat menentukan pada tahapan perbenihan, kesalahan pada tahapan ini bisa mejadikan calon benih tidak lolos uji seperti uji daya tumbuh, kemurnian dan uji kadar air. Tahapan yang perlu dicermati dan menjadi titik kritis nya adalah pada saat panen dipastikan tidak terjadi percampuran dengan varietas lain, saat panen dengan alat combine harvester seluruh bagian mesin harus dibersihkan dari sisa gabah sebelumnya, karung pertama sebaiknya tidak dijadikan benih, selanjutnya padi yang sudah dipanen harus segera dikeringkan, atau kalau tidak memungkinkan harus dikering anginkan di udara terbuka dan terlindung, pada proses selajutnya penjemuran harus menggunakan alas terpal agar tidak tercampur dengan padi sebelumnya atau benda lain dan tidak terpapar panas berlebih dari lantai semen. Kadar air yang di rekomendasikan untuk calon benih adalah 10-11 % untuk hasil akhir, atau selama 3 hari penjemuran pada cuaca cerah. Setelah tahapan pengeringan maka dilakukan pembersihan biji dengan seed cleaner untuk memisahkan gabah hampa, dan benda lain nya.



Proses Pengangkutan



Proses Penjemuran



Pengukuran Kadar Air GKP



musyawarah dengan petani kooperator

Gambar 13. Pengawasan Pasca Panen

3.3.9 Sertifikasi

Tujuan Sertifikasi adalah untuk menjamin kemurnian dan kebenaran varietas serta menjamin ketersediaan benih bermutu secara berkesinambungan. Sertifikasi dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pemeriksaan lapangan, pemeriksaan laboratorium dan pengawasan pemasangan label. Kegiatan pengawasan dan sertifikasi ini dilakukan oleh BPSB Provinsi Sumatera Selatan. Sertifikasi ini menjadi jaminan mutu agar benih yang dihasilkan memenuhi standar nasional dan siap didistribusikan kepada petani, sehingga dapat mendukung peningkatan hasil panen, daya saing, dan keberlanjutan pertanian.

Pengambilan Sampel Benih Uji Laboratorium

Pendampingan kegiatan pasca panen dilakukan melalui pengambilan sampel benih. Pengambilan Sampel Benih untuk dilakukan observasi proses penanganan hasil panen petani mitra, termasuk kegiatan pengeringan, dan penyimpanan gabah. Tim memberikan arahan teknis untuk memastikan mutu hasil panen tetap terjaga dan memenuhi standar kualitas untuk dapat digunakan sebagai benih. Kegiatan dilanjutkan dengan pengambilan sampel benih di

gudang petani mitra. Sampel benih yang diambil akan diuji di laboratorium untuk memastikan pemenuhan standar mutu benih bersertifikat. Selain itu dilakukan juga verifikasi terhadap pelaksanaan teknologi budidaya yang diterapkan penangkar agar sesuai ketentuan perbenihan yang berlaku.



Gambar 14. Pengambilan Sampel Uji Laboratorium

Pengemasan dan Pelabelan

Pengemasan dan pelabelan merupakan tahap penting dalam kegiatan perbenihan untuk menjaga mutu dan keaslian benih. Pengemasan dilakukan agar benih terlindungi dari kerusakan fisik, pengaruh lingkungan seperti kelembapan dan suhu, serta untuk mempertahankan kadar air dan daya kecambah selama penyimpanan maupun distribusi. Sementara itu, pelabelan berfungsi memberikan identitas dan informasi penting mengenai jenis, varietas, asal-usul, serta mutu benih. Label juga menjadi bukti keaslian dan memudahkan pengawasan oleh pihak berwenang. Dengan pengemasan dan pelabelan yang baik, benih yang dihasilkan tetap bermutu tinggi, aman, dan siap disalurkan kepada pengguna dengan kepercayaan penuh.



Gambar 15. Pengemasan dan Pelabelan Benih

V. KESIMPULAN

Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi 150 Ton SS Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan standar teknis perbenihan. Seluruh tahapan kegiatan, mulai dari persiapan, pelaksanaan di lapangan, hingga pasca panen dan sertifikasi, telah dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

Produksi benih sumber padi dilaksanakan secara bertahap mengikuti jadwal tanam dan kondisi agroklimat setempat. Hingga akhir periode pelaporan, sebagian calon benih telah memperoleh Sertifikat Benih Kelas *Stock Seed* (SS) dari BPSB, sementara sisa produksi masih berada dalam proses pengeringan, pengolahan akhir, dan tahapan sertifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian produksi benih sumber padi tetap berada dalam kerangka pencapaian target kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan akan diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.

Kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas kelompok tani penangkar, penguatan sistem perbenihan padi berbasis wilayah, serta mendukung penyediaan benih bermutu dalam rangka peningkatan produksi padi dan ketahanan pangan nasional.

5.3 Penguatan Kapasitas Penerapan Standar Dalam Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanian merupakan entitas dasar yang memiliki peran strategis dalam menopang kehidupan dan keberlanjutan bangsa. Indonesia sebagai negara agraris memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber penghidupan yang layak bagi masyarakat. Pengelolaan sektor pertanian perlu dilakukan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).

Dinamika pertumbuhan penduduk yang terus meningkat yang diikuti dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan industri, telah menyebabkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan. Kondisi ini menjadi ancaman nyata terhadap daya dukung wilayah dan berpotensi melemahkan kemandirian, ketahanan, serta kedaulatan pangan nasional. Kementerian Pertanian (2023) mencatat bahwa alih fungsi lahan produktif mencapai lebih dari 90.000 hektar per tahun, yang berdampak pada menurunnya kapasitas produksi pangan nasional.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Kementerian Pertanian menginisiasi Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan dan Perluasan Tanam Padi dan Jagung sebagai program transformatif yang berorientasi pada peningkatan produksi pangan nasional secara berkelanjutan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020–2024). Dalam konteks pelaksanaan UPSUS, penerapan standar pertanian menjadi elemen fundamental untuk menjamin hasil produksi yang berkualitas, aman, dan berdaya saing tinggi.

Penerapan standar pertanian mencakup aspek teknis budidaya, efisiensi penggunaan sumber daya, penerapan prinsip ramah lingkungan, serta keseimbangan ekologis sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Pertanian dan pedoman

sistem jaminan mutu hasil pertanian. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan juga sejalan dengan kebijakan Good Agricultural Practices (GAP) untuk meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar nasional maupun global (FAO, 2020).

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program UPSUS dan penguatan kapasitas penerap standar pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, BRMP memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perakitan inovasi, mekanisasi, digitalisasi, dan modernisasi pertanian. BRMP berperan penting dalam menjembatani proses penerapan standar pertanian dengan upaya peningkatan produksi dan efisiensi di tingkat lapangan. Sebagai lembaga yang berorientasi pada transformasi pertanian modern, BRMP berkontribusi dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui kegiatan bimbingan teknis, pendampingan teknis, dan penyebarluasan inovasi pertanian berbasis standar mutu. Selain itu, BRMP juga berperan dalam mengintegrasikan inovasi teknologi, mekanisasi, dan sistem digital pertanian guna mempercepat proses adopsi standar di kalangan petani dan pelaku usaha tani. Upaya ini diarahkan agar proses budidaya, panen, dan pascapanen di sektor tanaman pangan berjalan lebih efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip standardisasi nasional.

BRMP juga menjadi katalis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penelitian, serta sektor swasta, guna memastikan penerapan standar pertanian dapat diterjemahkan dalam kebijakan dan tindakan nyata di lapangan. Sinergi ini menjadi pondasi dalam membangun sistem pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, kebutuhan pasar, dan perkembangan teknologi modern.

Keberhasilan UPSUS tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama petani sebagai pelaku utama di lapangan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas penerap standar menjadi strategi penting dalam mendukung percepatan tanam dan peningkatan produksi tanaman pangan. Melalui kegiatan ini, petani didorong untuk mengasah pengetahuan, meningkatkan keterampilan, serta memperluas akses terhadap teknologi dan informasi agar mampu menerapkan praktik pertanian yang sesuai dengan standar mutu dan kelestarian lingkungan (Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, 2022).

Program ini juga berlandaskan pada filosofi kesetaraan dan keadilan sosial, yang menekankan pentingnya akses yang adil bagi semua petani terhadap sumber daya, bimbingan teknis, dan kesempatan ekonomi tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi. Prinsip inklusivitas ini mendorong terbentuknya komunitas pertanian yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing (Kementerian Pertanian, 2022). Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap

Standar dalam Mendukung UPSUS Percepatan Tanam dan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dilaksanakan melalui pendekatan sosiologis yang cermat dan sensitif terhadap dinamika sosial di masyarakat. Program ini menekankan pentingnya kolaborasi antara petani, pemerintah, lembaga penelitian, dan sektor swasta sebagai katalis dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas.

Kegiatan penguatan kapasitas penerap standar mengedepankan pendidikan yang transformatif, partisipasi aktif, serta inovasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan teknologi, sehingga diharapkan dapat memperkuat daya saing komoditas pertanian Indonesia, sekaligus mewujudkan sistem pertanian yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

1.2. Dasar Pertimbangan

Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar dalam Mendukung UPSUS Percepatan Tanam dan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan memiliki dasar pertimbangan yang kuat, baik dari aspek kebijakan nasional maupun landasan kelembagaan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, ditetapkan bahwa dalam struktur organisasi Kementerian Pertanian dibentuk Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) sebagai unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. BRMP memiliki tugas menyelenggarakan perakitan, penerapan, serta modernisasi pertanian yang meliputi kegiatan perekayasaan, inovasi teknologi, penerapan standar, serta diseminasi hasil perakitan dan teknologi pertanian. Pembentukan badan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat sistem pertanian nasional yang berbasis inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan.

Arah kebijakan pembangunan pertanian nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, pembangunan nasional lima tahun ke depan diarahkan pada delapan prioritas nasional, termasuk memperkuat swasembada pangan sebagai bagian dari prioritas ketahanan pangan. Dalam visi pembangunan jangka menengah tersebut, transformasi sektor pertanian melalui modernisasi, peningkatan produktivitas, serta mutu dan nilai tambah produk pertanian menjadi sangat penting agar Indonesia dapat menyongsong tujuan Indonesia Emas 2045 dengan pondasi pangan yang kokoh.

Tindak lanjut dari kebijakan tersebut adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mengatur pelaksanaan fungsi BRMP di tingkat operasional. Dalam

peraturan ini dijelaskan bahwa BRMP memiliki sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan kegiatan penerapan, pengujian, diseminasi, serta pengendalian efektivitas penerapan teknologi dan standar pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi kelembagaan BRMP mencakup seluruh rantai proses mulai dari perakitan inovasi hingga penerapan di lapangan.

Dengan dasar hukum tersebut, kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar menjadi sangat relevan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi petani, penyuluh, dan pelaku pertanian dalam memahami serta menerapkan standar pertanian modern. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, mempercepat transfer teknologi, dan memastikan efektivitas penerapan standar dalam mendukung percepatan tanam dan peningkatan produksi tanaman pangan.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian melalui kegiatan ini berperan aktif sebagai motor penggerak modernisasi pertanian dengan menekankan penerapan praktik terbaik (best practices), efisiensi sumber daya, dan penerapan teknologi tepat guna. Penerapan standar menjadi jaminan mutu dan daya saing produk pertanian, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam mewujudkan sistem pertanian yang produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian, kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar dalam Mendukung UPSUS Percepatan Tanam dan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dilaksanakan sebagai bentuk implementasi nyata dari mandat kelembagaan BRMP serta kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan pertanian nasional yang modern dan berkelanjutan.

1.3. Tujuan

Tujuan

1. Memperkuat dan meningkatkan kapasitas penerap standar pertanian (SNI 6233:2015 Benih Padi Inbrida) sebanyak 149 penerap;
2. Melaksanakan display standar pertanian (SNI 6233:2015 Benih Padi Inbrida) seluas 2 ha;
3. Meningkatkan produktivitas padi pada penerap standar.

1.4. Sasaran

1. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi penerap standar pertanian
2. Terselenggaranya kegiatan display penerapan standar pertanian berbasis teknologi modern
3. Meningkatnya produktivitas dan kualitas hasil padi pada lokasi penerapan standar

II. PROSEDUR

2.1. Pendekatan

Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar dalam Mendukung UPSUS Percepatan Tanam dan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dilaksanakan dengan pendekatan yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, penerapan standar mutu, dan modernisasi sistem produksi pertanian.

Daya saing produk andalan subsektor pertanian menjadi faktor strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi wilayah. Keunggulan komparatif dan kompetitif suatu komoditas menjadi tolok ukur penting dalam menjaga posisi produk pertanian domestik agar tetap kompetitif di tengah meningkatnya liberalisasi perdagangan global. Menurut Kariyasa (2003), pengukuran daya saing suatu komoditas dilakukan melalui analisis keunggulan komparatif dan kompetitif, yang relevan digunakan dalam merancang strategi pembangunan sektor pertanian yang adaptif dan berorientasi hasil.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian memberikan landasan hukum bahwa penerapan standar merupakan instrumen penting dalam peningkatan mutu, efisiensi produksi, kelancaran perdagangan, serta pembentukan sistem pertanian yang transparan dan berdaya saing. Dalam konteks pembangunan pertanian nasional, penerapan standar mutu seperti *SNV 6233:2015 tentang Benih Padi Inbrida* merupakan bagian integral dari upaya mendorong modernisasi sistem produksi pertanian yang terukur dan berorientasi kualitas.

Sejalan dengan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Pertanian, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) memiliki peran strategis sebagai motor penggerak penerapan inovasi dan teknologi modern di sektor pertanian. BRMP berfungsi dalam perakitan teknologi inovatif, pengujian dan validasi teknologi tepat guna, pengembangan mekanisasi pertanian, serta pendampingan penerapan teknologi di tingkat petani dan pelaku usaha. Melalui fungsi ini, BRMP menjadi penghubung antara

inovasi hasil penelitian dengan implementasi nyata di lapangan.

Pendekatan kegiatan ini juga mengintegrasikan konsep modernisasi pertanian sebagai kunci utama peningkatan daya saing nasional. Modernisasi pertanian mencakup mekanisasi, digitalisasi, dan penerapan teknologi presisi yang mampu mentransformasi sistem produksi tradisional menjadi sistem yang efisien, berbasis data, serta adaptif terhadap perubahan iklim dan pasar. Penerapan mekanisasi dan teknologi modern bukan hanya mempercepat proses tanam dan panen, tetapi juga memastikan mutu hasil pertanian sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mengedepankan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, di mana petani, penyuluh, pemerintah daerah, dan lembaga teknis seperti BRMP berperan aktif dalam setiap tahapan — mulai dari perencanaan, penerapan, hingga evaluasi kegiatan. Pendampingan teknis dan penyediaan model penerapan standar dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, *field school*, dan demonstrasi teknologi (display) di lapangan.

2.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Penguatan kapasitas penerap standar pertanian dilakukan kepada sasaran kegiatan dengan memberikan pendampingan berupa Good Agriculture Practice (GAP), Good Handling Practices (GHP), proses produksi tanaman pangan yang dapat menghasilkan benih terstandar yaitu SNI benih Inbrida. Ruang lingkup tertuang pada aktivitas dibawah ini :

- Penguatan kapasitas penerap standar melalui pendampingan penerapan budidaya terstandar (GAP, GHP, SNI Benih Inbrida) kepada penerap standar yaitu petani, penangkar, dan penyuluh untuk menghasilkan tanaman terstandar.
- Pengumpulan umpan balik terhadap hasil penyelenggaraan kegiatan penguatan penerap standar pertanian
- Pengumpulan informasi terhadap hasil pendampingan penerapan budidaya terstandar komoditas padi.

2.3. Pelaksanaan Kegiatan

2.3.1. Tempat Dan Waktu

Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2025 akan dilaksanakan pada lahan Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP) Karang

Agung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2025, dengan waktu pelaksanaan menyesuaikan dengan kondisi musim tanam lokasi kegiatan.

2.3.2. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan pada kegiatan ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat percontohan demplot padi dan bahan yang digunakan untuk bimbingan teknis yaitu materi-materi presentasi berupa softcopy sebagai bahan tayang atau hard copy untuk dibagikan kepada peserta.

2.3.3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2025 terdiri dari beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana dan Persiapan Kegiatan

a) Identifikasi calon peserta dan lokasi kegiatan

Identifikasi calon lokasi demplot dan peserta serta narasumber bimbingan teknis merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan, agar tepat sasaran dan mendapatkan keluaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Identifikasi calon lokasi dapat berdasarkan informasi lokus penerima bantuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, lokasi pendampingan kegiatan UPSUS yang menjadi tanggung jawab BRMP, serta lokasi yang menjadi arahan pimpinan sesuai dengan kondisi terkini. Identifikasi calon peserta ditentukan berdasarkan lokasi BRMP yang memperoleh mandat komoditas (Padi).

Identifikasi narasumber berdasarkan bidang keahlian serta instansi yang terkait dengan komoditas sebagai materi kegiatan.

Peserta kegiatan secara umum terdiri dari penyuluh/PPL, petani penangkar dan petani. Narasumber berasal dari institusi yang kompeten di bidang komoditas padi mencakup perbenihan padi inbrida, GAP, GHP dan penerapan standar lainnya yang dibutuhkan di lokasi.

Kriteria khusus untuk peserta dari penyuluh adalah sebagai berikut:

- Memiliki perangkat teknologi baik HP atau komputer untuk mengakses dan menyebarluaskan materi;

- Aktif mendampingi petani di wilayah binaan;
- Motivasi tinggi untuk bekerja bersama petani memajukan pertanian wilayah;
- Memiliki hubungan interpersonal yang baik dengan petani di wilayah binaannya sehingga memungkinkan terjadinya transfer knowledge dari penyuluh ke petani lainnya.
- Memiliki hubungan interpersonal yang baik dengan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian sehingga memudahkan transfer informasi.

b) Koordinasi

Koordinasi dilakukan dengan stakeholder terkait baik internal (BRMP) dan eksternal (dinas, badan, pemda) dalam rangka identifikasi peserta, persiapan pelaksanaan kegiatan meliputi tempat dan waktu. Jumlah peserta 149 orang atau disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Tempat pelaksanaan kegiatan mempertimbangkan akses peserta, keterkaitan dengan kegiatan lain dan/atau kunjungan lapangan

c) Identifikasi Kebutuhan Materi

Alternatif materi yang disampaikan dalam kegiatan ini diantaranya:

- Pengenalan SNI benih padi inbrida (SNI 6233:2015);
- *Good Agricultural Practices* padi pada agroekosistem (lahan sawah, lahan kering, lahan pasang surut, lahan lebak) dan terintegrasi (tanaman perkebunan, tanaman hortikultura, ternak);
- *Good Handling Practices* padi;
- Hama dan penyakit pada tanaman padi;
- Sertifikasi benih padi.

d) Persiapan Alat dan Bahan

Bahan kegiatan bimbingan teknis melalui pertemuan tatap muka adalah materi-materi presentasi berupa softcopy sebagai bahan tayang atau hard copy untuk dibagikan kepada peserta. Sedangkan bahan pendukungnya adalah seminar kit, LCD projector, alat tulis kantor dan Sertifikat. Bahan kegiatan demplot dapat berupa bahan pendukung budidaya padi seperti benih, pupuk, pestisida.

2. Pelaksanaan Kegiatan

a) Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis dilakukan melalui pemberian materi dilaksanakan oleh narasumber yang ditugaskan oleh instansi terkait. Durasi materi yang disampaikan berkisar 2 jam dengan metode presentasi dan diskusi partisipatif

para peserta. Materi bimbingan teknis pada pertemuan tatap muka disampaikan dengan (i) metode ceramah (presentasi menggunakan alat bantu LCD) dan tanya jawab dalam ruangan pertemuan, (ii) praktek, dan (iii) kunjungan lapangan.

b) Demplot Tanaman Padi

Kegiatan Demplot Penguatan Kapasitas Penerap Standar dilaksanakan sebagai bentuk penerapan langsung dari Standar Nasional Indonesia (SNI) Benih Padi Inbrida (SNI 6233:2015) pada tingkat lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan contoh nyata (best practice) penerapan standar pertanian, sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi penerap standar dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip budidaya padi yang sesuai standar mutu nasional.

Demplot dilaksanakan di lahan seluas 2 hektar yang berlokasi di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Karang Agung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi ini dipilih karena memiliki kondisi agroekosistem yang representatif untuk pengujian dan penerapan inovasi teknologi budidaya padi, serta telah memiliki fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran dan pengamatan teknis.

Pada lahan demplot tersebut dilakukan percontohan budidaya padi yang menerapkan prinsip-prinsip SNI 6233:2015, meliputi seluruh tahapan proses produksi, antara lain:

- Persiapan Lahan

Lahan yang akan diolah terlebih dahulu disemprot menggunakan herbisida untuk mematikan gulma dan sisa anak padi. Pengolahan lahan dilakukan secara sempurna dengan teknik 2 kali pengolahan lahan. Pertama, lahan dibajak untuk membalik tanah, mengangkat akar gulma dan membuka pori-pori tanah. Kemudian lahan digenangi selama 20-25 hari. Pengolahan lahan kedua untuk melunakkan permukaan tanah agar siap ditanami. Pengolahan kedua menggunakan garu/gelebeg/rotary untuk melumpurkan dan meratakan tanah. Selanjutnya untuk membasmi gulma yang masih tumbuh, lahan disemprot dengan herbisida kontak.

- Pemilihan dan Penyiapan Benih

Benih yang digunakan merupakan benih padi inbrida bersertifikat yang memenuhi persyaratan mutu sesuai SNI 6233:2015, mencakup kemurnian

varietas, daya tumbuh, kadar air, dan bebas dari hama penyakit. Benih yang digunakan yaitu varietas Cakrabuana dan Padjajaran.

- Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman

Penanaman dilakukan dengan tabur benih langsung. Benih direndam dengan campuran air dan insektisida selama 1 malam sebelum dilakukan penanaman. Pemeliharaan meliputi pemupukan berimbang, pengairan teratur, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) ramah lingkungan, serta penerapan teknologi pertanian modern untuk efisiensi tenaga kerja dan peningkatan hasil.

Pengendalian gulma dilakukan mulai dari tahap persiapan lahan. Pada tahap persiapan lahan (sebelum olah), gulma dikendalikan dengan cara penyemprotan herbisida. Pada saat umur tanaman 15-20 HST, gulma dikendalikan secara kimiawi menggunakan herbisida dan secara mekanis melalui penyiangan sebelum aplikasi pupuk agar penyerapan unsur hara oleh tanaman budidaya lebih optimal karena tidak terjadi persaingan dengan gulma disekitar pertanaman.

Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi dilakukan secara terpadu. Dalam penerapan PHT, dilakukan kombinasi antara tindakan kimiawi dan mekanis yang tepat sasaran dan ramah lingkungan. Salah satu upaya yang diterapkan adalah penggunaan insektisida pada fase persemaian, yang bertujuan untuk melindungi benih dari serangan awal hama seperti wereng, penggerek batang, atau serangga lainnya.

Gropyokan tikus dilakukan secara serentak pada area persawahan saat lahan bera dan pengolahan lahan. Pemberian rodentisida dilakukan selama masa pertumbuhan tanaman. Gropyokan ini efektif memutus siklus hidup tikus dan mengurangi populasi secara signifikan tanpa dampak lingkungan. Sinergi antara penggunaan insektisida pada tahap awal dan gropyokan sebagai pengendalian fisik mencerminkan prinsip PHT yang mengutamakan pencegahan, efisiensi, serta keberlanjutan dalam menjaga mutu benih padi dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

- Pemupukan

Rekomendasi pemupukan berdasarkan pada hasil analisis tanah yang dilakukan dengan pengujian sampel tanah di laboratorium. Selain itu juga menggunakan rekomendasi pemupukan berdasarkan buku Rekomendasi Pupuk Spesifik Lokasi

khusus Sumatera Selatan yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian (2021). Pemupukan pertama diberikan saat tanaman berumur 1-7 hari, pemupukan kedua saat umur tanaman 21-30 hari, dan pemupukan ketiga saat umur tanaman 40-45 hari.

- Roguing

Roguing bertujuan untuk membuang tanaman yang memiliki ciri-ciri morfologis menyimpang dari ciri-ciri varietas tanaman yang diproduksi benihnya. Pelaksanaan rouging yang harus diketahui:

1. Deskripsi varietas yang diusahakan
2. Karakteristik tipe simpang
3. Penyakit terbawa benih dan sulit dikendalikan
4. Gulma berbahaya, kurang berbahaya dan lazim tumbuh
5. Tanaman lain yang biasa ditemukan
6. Ketidaknormalan tanaman
7. Pengambilan contoh cara perhitungan

Stadia vegetatif awal

1. Tanaman yang tumbuh di luar jalur/barisan
2. Tanaman/rumpun yang tipe pertunasan awalnya menyimpang dari sebagian besar rumpun lainnya.
3. Tanaman yang bentuk dan ukuran daunnya berbeda dengan sebagian besar rumpun-rumpun lainnya
4. Tanaman yang warna kaki atau daun pelepahnya berbeda dengan sebagian besar rumpun yang lain
5. Tanaman/rumpun yang tingginya sangat berbeda.

Stadia vegetatif akhir/anakan maksimum

1. Tanaman yang tumbuh diluar jalur/barisan
2. Tanaman/rumpun yang tipe pertunasan menyimpang dari sebagian besar rumpun-rumpun yang lain
3. Tanaman yang bentuk dan ukuran daunnya berbeda dengan sebagian besar rumpun-rumpun lainnya
4. Tanaman yang warna kaki atau helai daun dan pelepahnya berbeda dengan sebagian besar rumpun- rumpun yang lain

5. Tanaman/rumpun yang tingginya sangat berbeda (mencolok)
6. Stadia generatif awal/berbunga
7. Tanaman/rumpun yang tipe tumbuhnya menyimpang dari sebagian besar rumpun-rumpun yang lain
8. Tanaman yang bentuk dan ukuran daun benderanya berbeda dari sebagian besar rumpun-rumpun lainnya
9. Tanaman yang berbunga terlalu cepat atau terlalu lambat dari sebagian besar rumpun-rumpun yang lain
10. Tanaman/rumpun yang memiliki tampilan malai berbeda
11. Tanaman/rumpun yang memiliki bentuk dan ukuran gabah berbeda, warna gabah, dan ujung gabah (rambut atau tidak berambut) berbeda

- Panen dan pascapanen benih

Panen dilakukan saat tanaman telah mencapai fase pematangan atau masak fisiologis yaitu bila malai sudah mulai menguning hingga mencapai 95 persen. Setelah pemanenan dilakukan tahapan pengolahan benih dengan cara membuang kotoran serta memisahkan benih baik dan benih kurang baik. Kemudian dilanjutkan dengan pengeringan, pembersihan dan pengemasan benih.

Pengeringan benih dilakukan sampai kadar air 11% dengan cara dijemur di atas lantai jemur yang telah dialasi terpal. Pembersihan calon benih dapat menggunakan *air screen cleaner* dengan tujuan untuk membuang benih hampa, kotoran benih seperti tanah, jerami dan daun padi yang ikut terbawa. Selanjutnya proses pengemasan dilakukan berdasarkan varietas yang sama untuk mempermudah saat dilakukan uji sertifikasi benih.

III.Tenaga Dan Organisasi Pelaksanaan

3.1 Tenaga Yang Terlibat dalam Aktifitas

Tabel 1. Tenaga yang Terlibat dalam Aktivitas

Tenaga yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri atas fungsional, penyuluh pertanian, Pengelola Mutu Hasil Pertanian (PMHP), dan Pengawas Benih Tanaman (PBT) dengan latar belakang pendidikan yang beragam, antara lain bidang agronomi, sumberdaya, teknologi pertanian, dan sosial ekonomi pertanian. Data tenaga pelaksana kegiatan pengkajian

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Rustam, S.P.,M.Si NIP. 196906071999031001	Pembina
2	Susilawati, S.P.,M.Si NIP. 197008102003122001	Penanggung Jawab
3	Rosidah, SE NIP. 198803022011012012	Anggota
4	Johanes Amirullah, S.P.,M.Si NIP.	Anggota
5	Ir. Dedeh Hadiyanti, S.P.,M.Si NIP. 196703051994032001	Anggota
6	Suri Emma, S.P NIP. 1965090119931031001	Anggota
7	Yanto Pandu AP, S.P NIP. 1968012719991031001	Anggota
8	Maya Dhanisa Sari, S.P NIP. 198306292009122005	Anggota
9	Buaniyah Honorita, S.P.,M.Si NIP. 198905302011012009	Anggota
10	Siti Khusniyati, S,P NIP. 197104242005012001	Anggota
11	Sarni, S.TP NIP. 198106192009012007	Anggota
12	Anissa, S.P NIP. 197811182011012005	Anggota
13	Maulida Surayya, S.P NIP. 198711142015032001	Anggota
14	Yayan Suryana, SST NIP. 198405092015031001	Anggota
15	Nur Wahyu Sariningtias, S.P NIP. 199203142019022001	Anggota
16	Anita Karlina, SE NIP. 198301102007102001	Pengadministrasi Keuangan

disajikan pada Tabel 1.

2.3.4. Jangka Waktu Aktifitas

Tabel 2. Jadwal Waktu Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2025

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Bulan Ke												Indikator Kinerja
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Persiapan													
Penelusuran literatur (<i>desk study</i>)													penyusunan proposal
Penyusunan proposal, rencana operasional													Proposal kegiatan teknis dan rencana operasional
Pertemuan internal tim													Jadwal palang kegiatan, data hasil inventarisir, kuesioner <i>pretest</i> - <i>posttest</i>
Pelaksanaa													
Identifikasi awal													Calon lokasi dan calon peserta bimtek
Koordinasi													Penentuan lokasi dan peserta bimtek
Identifikasi kebutuhan materi													Materi bimtek sesuai kebutuhan petani
Pelaksanaan Bimtek													Laporan Bimbingan teknis
Pelaksanaan Demplot													Persiapan,
Evaluasi dan Pelaporan													
Penyusunan laporan perkembangan bulanan													Laporan perkembangan bulanan
Penyusunan laporan akhir tahun													Laporan akhir tahun

3.2 Pembiayaan

Anggaran Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2025 adalah Rp. 59.500.000,- (Lima puluh juta lima ratus ribu rupiah). Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara rinci disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pembiayaan Kegiatan

Akun	Jenis Belanja	Vol	Satuan	Jumlah
521211	Belanja Bahan			11.432.000
	- Jilid, fotocopy dan dokumentasi	1	Keg	1.232.000
	- Makan Rapat Biasa Sumatera Selatan	150	OK	7.950.000
	- Snack Rapat Biasa Sumatera Selatan	150	OK	2.250.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			1.010.000
	- ATK dan Komputer Supplies	1	KALI	1.010.000
521821	Belanja Barang Peresediaan Bahan Baku			20.108.000
	- Urea	500	Kg	5.500.000
	- Insektisida	2	botol	520.000
	- Karbofuran	8	bungkus	368.000
	- Rodentisida	2	botol	170.000
	- NPK	500	Kg	11.000.000
	- Benih Padi	80	Kg	1.600.000
	- Herbisida	10	botol	950.000
522121	Belanja Jasa Profesi			2.700.000
	- Honorarium Moderator	1	ORKAL	700.000
	- Honorarium Narasumber (pejabat eselon II)	2	OJ	2.000.000
524111	Biaya Perjalanan Dinas Biasa			24.250.000
	- Satuan biaya transportasi darat	17	OK	4.250.000
	- Uang harian perjalanan dinas luar kota (Sumatera Selatan)	40	OH	20.000.000
TOTAL				59.500.000,-

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bimbingan Teknis Padi Terstandar Mendukung Swasembada Pangan Di Sumatera Selatan

3.1.1 Lokasi Dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Bimbingan Teknis Padi Terstandar Mendukung Swasembada Pangan Di Sumatera Selatan dilaksanakan sebanyak 1 kali pertemuan yaitu pada tanggal 20 November 2025 bertempat di Aula Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi

Pertanian (IP2MP) Jalan P2 Desa Suka Mulya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin. Perencanaan dan persiapan dilaksanakan mulai bulan September 2025.

Untuk mengetahui efektivitas terhadap pelaksanaan Bimtek dan peningkatan kapasitas petani dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan baik terkait waktu, metode, narasumber, sarana prasarana dan lain sebagainya. Sedangkan untuk mengetahui peningkatan kapasitas petani dan penyuluh terhadap materi bimtek yang disampaikan juga dilakukan evaluasi sebelum dan sesudah pelaksanaan bimtek melalui metode skoring dari tingkat pengetahuan masing-masing peserta yang diambil melalui kuesioner yang diisi peserta.

3.1.2 Bahan Dan Metode Pelaksanaan kegiatan

a. Bahan Dan Alat

Bahan yang digunakan berupa materi diseminasi yakni demplot, materi PPT, maupun video partisipatif petani.

b. Pengumpulan dan Analisa Data

Menurut Sugiono (2013) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian atau kegiatan. Dalam kegiatan Bimtek perbenihan Padi Terstandar ini pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara, yaitu dengan cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden atau stakeholder terkait.
2. Kuesioner yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan yang diisi oleh responden.
3. Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi kegiatan baik berupa sumber tertulis, gambar (foto) yang bertujuan memberikan informasi lebih lengkap.

Untuk mengetahui jenis umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan peserta Bimtek digunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisa data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiono, 2013).

Pada Bimbingan Teknis ini juga diukur peningkatan pengetahuan dalam pelaksanaan Bimtek padi terstandar melalui alat ukur *pre-test* (tes awal) dan *post-test* (tes akhir) sesuai dengan materi Bimtek yang diberikan narasumber.

Tahap berikutnya yaitu menguji nilai *pretest* dan *post test* menggunakan uji wilcoxon. Uji wilcoxon signed test merupakan uji nonparametris yang digunakan untuk mengukur

perbedaan 2 kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi data tidak berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dalam uji wilcoxon signed test yaitu:

- ✓ Ketika nilai probabilitas Asym.sig 2 tailed < 0,05 maka terdapat perbedaan rata-rata
- ✓ Ketika nilai probabilitas Asym.sig 2 tailed > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan rata-rata.

c.Pelaksanaan Bimtek

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perbenihan Padi Terstandar Mendukung Swasembada Pangan di Sumatera Selatan pada Kamis, 20 November 2025 bertempat di Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP) Jalan P2 Desa Suka Mulya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin berlangsung dengan baik, lancar dan komprehensif dalam mendukung kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Upsus Percepatan Tanam dan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala BRMP Sumatera Selatan yang menekankan pentingnya perbaikan kualitas perbenihan sebagai fondasi pencapaian target program swasembada pangan. Sambutan dilanjutkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin yang secara resmi membuka acara dan menegaskan urgensi keterlibatan pemerintah daerah dalam mendampingi petani agar mampu menerapkan standar perbenihan dan teknik budidaya yang tepat. Acara kemudian dilanjutkan dengan pengambilan *pre test* yang berfungsi untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta sebagai dasar evaluasi peningkatan kompetensi setelah pelaksanaan Bimtek.

Pengisian kuesioner *pre test* oleh peserta dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis Perbenihan Padi Terstandar Mendukung Swasembada Pangan di Sumatera Selatan sangat penting karena berfungsi untuk memetakan pengetahuan dasar peserta sebelum mengikuti materi. *Pre test* membantu mengetahui sejauh mana pemahaman awal petani terkait perbenihan, budidaya, dan standar mutu, sehingga penyelenggara dapat melihat kesiapan peserta dalam menerima materi teknis. Selain itu, *pre test* menjadi tolok ukur awal untuk mengetahui kompetensi petani sebelum pelaksanaan Bimtek berlangsung, sehingga hasilnya dapat dibandingkan dengan kondisi setelah bimtek selesai.

Materi disampaikan oleh para narasumber sesuai bidang keahlian masing-masing. Paparan pertama disampaikan oleh **Dr. Yeni Eliza, S.TP., M.Si.** dari BRMP Sumatera Selatan yang membahas ***Good Agricultural Practices (GAP) Tanaman Pangan***, mulai dari persiapan lahan, penggunaan input secara efisien, pengelolaan lingkungan, hingga peningkatan produktivitas melalui praktik budidaya yang terstandar.

Pada kesempatan ini dijelaskan terkait menjelaskan pentingnya penerapan standar budidaya padi melalui *GAP* untuk menjamin ketelusuran dan mutu produk tanaman pangan. Penjelasan dimulai dengan komponen dasar budidaya padi seperti penggunaan varietas unggul baru (VUB), pemakaian benih bermutu berlabel, pemberian bahan organik, pengaturan populasi tanaman (termasuk sistem jajar legowo), pemupukan sesuai kebutuhan tanaman, serta pengendalian hama terpadu (PHT). Dijelaskan pula komponen teknologi pilihan seperti pengolahan tanah sesuai musim, penggunaan bibit muda, tanam bibit 1–3 batang, pengairan efektif, penyiangan mekanis, dan panen tepat waktu. Materi juga menguraikan proses produksi benih padi bersertifikat mulai dari pemilihan lokasi, persemaian, persiapan lahan, penanaman, pemupukan, pengendalian OPT, *rouging* pada berbagai fase pertumbuhan, panen, pengeringan, pengemasan, hingga penyimpanan di gudang yang memenuhi standar. Secara keseluruhan, materi menekankan bahwa penerapan standar budidaya dan penggunaan benih bermutu merupakan kunci peningkatan produktivitas, pendapatan, dan keberlanjutan pertanian.

Materi kedua yaitu perwakilan Dinas TPH Kabupaten Banyuasin, **Bapak David Purwandi, S.P., M.Si** mengenai **Peran Pemerintah Daerah dalam Pendampingan Perbenihan Padi Terstandar**, yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, ketersediaan benih bermutu, serta pembinaan kelompok tani dalam mendukung swasembada pangan. Materi ketiga disampaikan oleh narasumber dari **BPTPH Provinsi Sumsel, Bapak Febri Hariyanto, S.P sebagai koordinator POPT Kabupaten Banyuasin** mengenai **Pengendalian Terpadu Hama dan Penyakit Tanaman Padi**, yang menekankan urgensi identifikasi dini, pengelolaan organisme pengganggu tanaman secara ramah lingkungan, serta strategi pengendalian berkelanjutan untuk mencegah penurunan hasil.

Narasumber pada kesempatan ini menguraikan jenis-jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) utama pada padi, meliputi hama, penyakit, dan gulma, serta dampaknya terhadap pertumbuhan dan kehilangan hasil. OPT penting yang dibahas mencakup penggerek batang (PBP), wereng batang coklat (WBC), tikus, walang sangit, keong mas, serta penyakit blas. Setiap OPT dijelaskan karakteristiknya, siklus hidup, gejala serangan, serta strategi pengendalian yang dianjurkan. Untuk PBP, ditonjolkan upaya monitoring, pengambilan kelompok telur, dan pemanfaatan parasitoid. Untuk WBC, dijelaskan penyebab ledakan populasi, kemampuan adaptasi biotipe, serta ambang pengendalian. Pengendalian tikus difokuskan pada aksi serentak hamparan, LTBS, sanitasi, dan pemanfaatan musuh alami. Pengendalian walang sangit dan keong mas dibahas mulai dari sanitasi, perangkap, pengaturan pola tanam, hingga penggunaan pestisida yang tepat. Penyakit blas dijelaskan gejalanya pada daun hingga malai, faktor pendorong, dan upaya pengendalian melalui

varietas tahan, pemupukan berimbang, serta fungisida. Materi menegaskan perlunya pendekatan PHT secara terpadu, reguler, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, narasumber dari **BPSB Provinsi Sumsel**, memaparkan materi mengenai **Sertifikasi Benih Padi, Bapak Muli Apriansyah, S.TP., MP** yang menjelaskan proses sertifikasi, persyaratan mutu, mekanisme pengawasan, serta pentingnya benih bersertifikat untuk menjamin produktivitas dan hasil panen yang stabil. Materi kali ini membahas landasan hukum dan alur lengkap proses sertifikasi benih padi yang dilaksanakan oleh UPTD BPSB TPH Provinsi Sumatera Selatan. Tahapan sertifikasi diawali dari pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pertanaman pada fase vegetatif, fase berbunga, dan fase masak, dilanjutkan pemeriksaan pasca panen, pengambilan contoh benih, pengujian mutu di laboratorium (kadar air, kemurnian, daya kecambah), hingga penerbitan sertifikat dan pelabelan. Dijelaskan pula persyaratan produsen benih mencakup penguasaan lahan, fasilitas pengolahan dan penyimpanan, kemampuan teknis produksi benih, serta kewajiban mematuhi seluruh petunjuk BPSB TPH. Parameter pemeriksaan lapangan sangat detail, mulai dari warna kaki tanaman, bentuk daun bendera, tipe malai, hingga karakter gabah. Materi juga menjelaskan klasifikasi benih bina (BS, BD, BP, BR) sesuai jalur produksi inbrida maupun hibrida. Secara keseluruhan, sertifikasi bertujuan menjaga kemurnian varietas, mutu benih, memberikan jaminan legalitas, dan memastikan benih yang beredar memenuhi standar nasional.

Pada sesi berikutnya, **Ani Karlana Sari, ST.** dari Laboratorium Kimia Tanah dan Mutu Beras BRMP Sumatera Selatan menyampaikan **Sosialisasi E-book "Mengenal Mutu Beras Berdasarkan SNI 6128:2020"**, yang memberikan pemahaman mendalam mengenai klasifikasi mutu beras, parameter pengujian, serta bagaimana standar mutu tersebut menjadi indikator penting dalam rantai pasok beras nasional. E-book ini disusun untuk menjembatani kebutuhan tersebut, dengan bahasa yang lebih ringan dan dilengkapi ilustrasi. Tujuan pembuatan E-book diantaranya yaitu untuk : 1) Memberikan penjelasan dasar mengenai parameter mutu beras secara ringkas namun tetap sesuai SNI 6128:2020; 2) Mempermudah masyarakat, pelaku usaha, serta stakeholder untuk memahami standar mutu beras tanpa kebingungan; 3) Mendukung kegiatan edukasi pertanian melalui bahan informasi digital yang mudah dibagikan; 4) Menjadi referensi pembelajaran mandiri yang praktis, jelas, dan mudah dipahami kapan pun dan di mana pun.

Sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung setelah materi berjalan dinamis dan menunjukkan tingginya antusiasme peserta, khususnya terkait penerapan teknik perbenihan serta penanganan hama dan penyakit di lapangan dan petani membutuhkan peran Pemerintah

untuk memaksimalkan lahan sawah dengan bantuan infrastruktur yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah.

Acara ditutup dengan pelaksanaan *post test* sebagai alat evaluasi untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian Bimtek. Tahapan ini menjadi langkah penting dalam memastikan efektivitas pelatihan sekaligus menilai tingkat pemahaman peserta terhadap standar perbenihan, GAP, pengendalian hama, sertifikasi benih, serta pemahaman mutu beras. Secara keseluruhan, kegiatan Bimtek ini memiliki urgensi besar dalam memperkuat kapasitas petani, penyuluh, dan perangkat daerah dalam mendukung percepatan tanam serta pencapaian swasembada pangan di Sumatera Selatan melalui penerapan standar perbenihan dan budidaya yang terukur dan berkualitas.

Post test memiliki urgensi sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Melalui posttest, penyelenggara dapat melihat sejauh mana materi yang disampaikan selama bimtek mampu dipahami dan dikuasai oleh peserta. Hasil *post test* juga menjadi indikator keberhasilan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan petani menerapkan standar perbenihan dan praktik budidaya yang benar di lapangan. Dengan demikian, *post test* memberikan gambaran nyata tentang efektivitas pelaksanaan bimtek sekaligus menjadi dasar perbaikan program pembinaan pada kegiatan berikutnya.

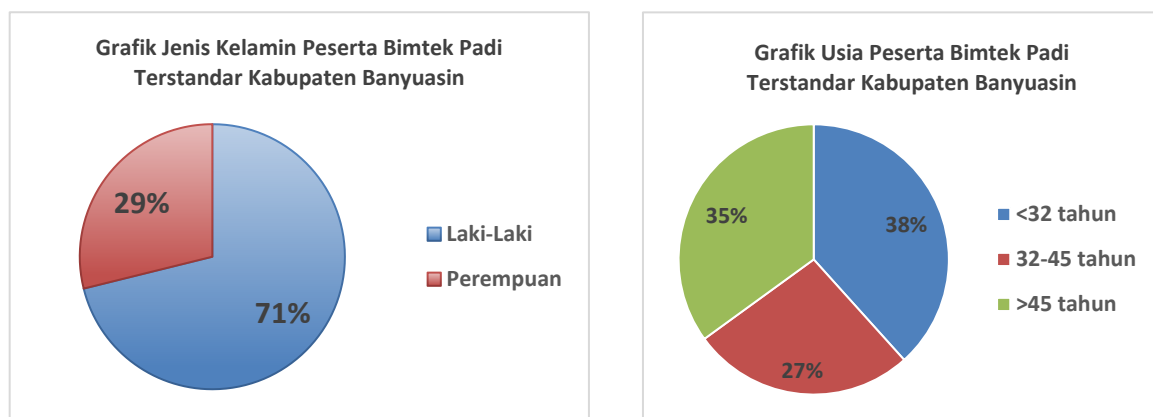
d. Evaluasi Pelaksanaan Bimtek Padi Terstandar

Peserta Evaluasi pelaksanaan Bimbingan Teknis Perbenihan Padi Terstandar menjadi langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peserta maupun program penguatan kapasitas di lapangan. Melalui evaluasi, penyelenggara dapat mengidentifikasi profil peserta secara lebih jelas, termasuk latar belakang, pengalaman, serta tingkat keterlibatan mereka dalam kegiatan perbenihan dan budidaya padi. Evaluasi juga diperlukan untuk menilai peningkatan pengetahuan peserta dengan membandingkan kemampuan sebelum dan sesudah bimtek, sehingga dapat diketahui efektivitas materi, metode penyampaian, serta kesesuaian dengan kebutuhan petani. Selain itu, evaluasi memungkinkan pengukuran dampak langsung maupun tidak langsung dari bimtek terhadap penerapan standar perbenihan, perubahan perilaku budidaya, serta kontribusinya dalam mendukung peningkatan produktivitas dan swasembada pangan daerah. Dengan demikian, evaluasi bukan hanya menjadi alat penilaian, tetapi juga dasar perbaikan untuk penyelenggaraan bimtek berikutnya agar semakin tepat sasaran dan berkualitas.

3.2 Identifikasi Peserta Bimtek

Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Penerap Standar dalam rangka peningkatan kapasitas petani, calon petani penangkar dan penyuluh dilaksanakan pada tanggal 20 November 2025 yang berlokasi di IP2MP Karang Agung, Kabupaten Banyuasin dan diikuti oleh 150 peserta.

Mendeskripsikan data peserta seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, status lahan, dan luas lahan menjadi sangat penting dalam pelaksanaan Bimtek Padi Terstandar karena informasi tersebut membantu penyelenggara memahami karakteristik dan kebutuhan riil petani secara lebih akurat. Data demografis dan sosial-ekonomi ini memungkinkan analisis kesesuaian materi dengan kapasitas peserta, mengidentifikasi kelompok yang membutuhkan pendampingan khusus, serta memastikan bimtek menjangkau sasaran yang tepat. Selain itu, informasi mengenai status dan luas lahan memberi gambaran potensi penerapan teknologi serta skala dampak yang dapat dihasilkan setelah bimtek, sehingga hasil evaluasi lebih terukur dan dapat digunakan untuk perencanaan program lanjutan yang lebih efektif dan berbasis kebutuhan lapangan.



Grafik 1. Karakteristik Jenis Kelamin dan Usia Responden Peserta Bimtek Padi Terstandar Mendukung Swasembada Pangan di Sumsel

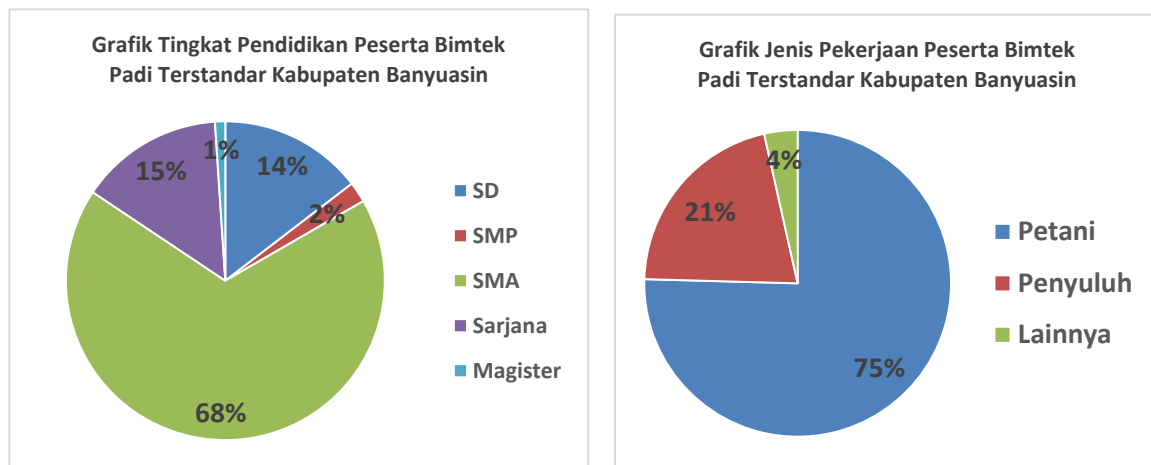
Dari grafik 1. dapat dilihat bahwa peserta Bimtek Padi Terstandar di IP2MP Karang Agung Kabupaten Banyuasin didominasi oleh laki-laki, yaitu sebesar 71%, sementara peserta perempuan hanya 29%. Komposisi ini menggambarkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan pelatihan teknis pertanian masih relatif rendah, meskipun peran perempuan dalam kegiatan usaha tani sering kali signifikan. Dominasi peserta laki-laki ini mengindikasikan bahwa kegiatan penyuluhan dan bimtek masih lebih banyak diikuti oleh kelompok petani pria yang

secara umum lebih terlibat langsung dalam aktivitas teknis di lapangan.

Dari grafik 1. juga menggambarkan terkat usia peserta di bawah 32 tahun mencapai 38%, yang menunjukkan keterlibatan generasi muda dalam penerapan teknologi pertanian mulai meningkat. Kelompok usia 32–45 tahun menyumbang 27%, sementara kelompok usia di atas 45 tahun mencapai 35%. Komposisi ini menunjukkan bahwa bimtek diikuti oleh berbagai rentang usia, dengan keterlibatan signifikan dari kelompok usia produktif dan kelompok petani senior yang sudah berpengalaman. Keterlibatan beragam usia ini mencerminkan kebutuhan pengetahuan yang merata di kalangan petani untuk meningkatkan pemahaman terkait penerapan padi terstandar.

Komposisi peserta yang berimbang antara kelompok usia muda (<32 tahun), usia menengah (32–45 tahun), dan usia senior (>45 tahun) memberikan keuntungan strategis bagi keberhasilan pelaksanaan bimtek. Keterlibatan peserta muda yang mencapai 38% merupakan modal penting karena mereka cenderung lebih cepat memahami teknologi baru, lebih adaptif terhadap inovasi, dan memiliki potensi menjadi penggerak utama dalam penerapan padi terstandar di tingkat lapangan. Kehadiran generasi muda juga memperkuat regenerasi petani dan memastikan keberlanjutan pelaksanaan standar budidaya padi di masa depan.

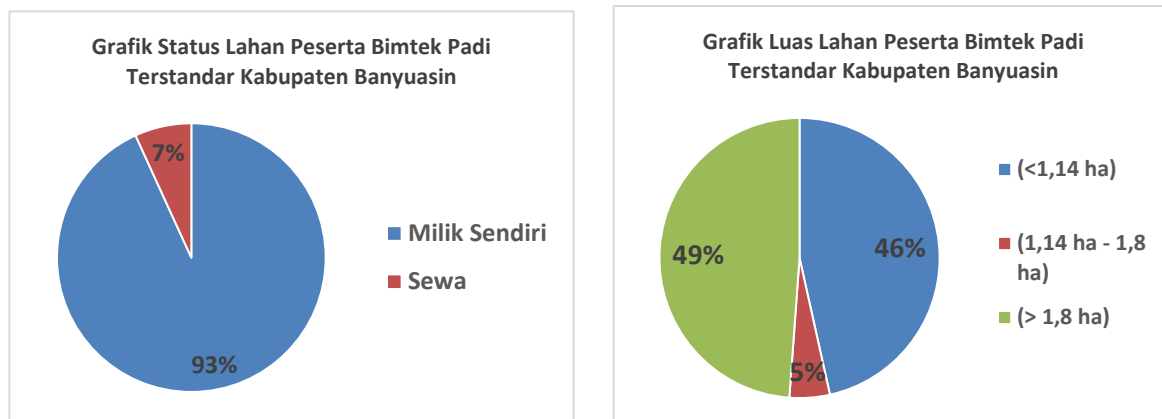
Di sisi lain, kelompok usia menengah dan senior yang mencapai 62% secara keseluruhan membawa pengalaman praktis dan pengetahuan lokal yang sangat berharga dalam proses adopsi teknologi. Petani berusia di atas 45 tahun, misalnya, biasanya memiliki jam terbang yang tinggi dan memahami kondisi agroekosistem setempat sehingga mampu memberikan konteks lapangan yang lebih realistis ketika teknologi baru diperkenalkan. Kombinasi antara pengetahuan tradisional dan inovasi baru ini menciptakan sinergi yang mempercepat proses adaptasi dan mengurangi kesalahan penerapan teknik budidaya terstandar



Grafik 2. Karakteristik Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Responden Peserta Bimtek Padi Terstandar Mendukung Swasembada Pangan di Sumsel

Pada Grafik 2. dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan peserta menunjukkan bahwa mayoritas peserta Bimtek Padi Terstandar di Kabupaten Banyuasin merupakan lulusan SMA dengan persentase mencapai 68%. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar peserta memiliki kemampuan dasar yang cukup baik untuk memahami materi teknis, terutama terkait standar budidaya dan penggunaan teknologi pertanian. Sementara itu, lulusan SD dan SMP hanya 14% dan 2%, sedangkan lulusan sarjana dan magister masing-masing 15% dan 1%. Komposisi ini menunjukkan bahwa meskipun latar belakang pendidikan peserta beragam, mayoritas tetap berada pada kategori pendidikan menengah yang siap menerima materi berbasis praktik dan teori sederhana.

Grafik juga menunjukkan bahwa dari sisi jenis pekerjaan, 75% peserta petani, sementara 21 % (penyuluh). dan 4% (profesi lainnya) diantaranya guru. Dominasi petani sebagai peserta utama merupakan hal yang positif karena mereka adalah pelaku langsung di lapangan yang akan menerapkan standar budidaya padi. Pelaksanaan bimtek ditujukan kepada kelompok sasaran yang tepat, yaitu petani dengan tingkat pendidikan menengah serta didukung oleh penyuluh yang memiliki peran strategis dalam transfer teknologi. Keragaman tingkat pendidikan memungkinkan adanya dinamika pembelajaran yang saling melengkapi, sementara dominasi petani menjamin bahwa materi yang diberikan dapat langsung diimplementasikan. Dengan keterlibatan penyuluh diharapkan keberlanjutan penerapan padi terstandar di lapangan memiliki peluang lebih tinggi karena ada pendampingan berkelanjutan setelah pelatihan.



Grafik 3. Karakteristik Status Lahan dan Luas Lahan Responden Peserta Bimtek Padi Terstandar Mendukung Swasembada Pangan di Sumsel

Pada grafik 3. terkait status lahan menunjukkan bahwa 93% peserta Bimtek Padi Terstandar di Kabupaten Banyuwasin memiliki status lahan milik sendiri, sementara hanya 7% yang berstatus sewa. Proporsi kepemilikan lahan yang sangat dominan ini mengindikasikan tingkat komitmen dan keberlanjutan implementasi hasil Bimtek yang tinggi. Peserta dengan lahan milik sendiri cenderung lebih berinvestasi pada peningkatan kualitas dan standar budidaya jangka panjang, karena mereka memiliki kendali penuh atas manajemen lahan. Keterlibatan peserta dengan komitmen kepemilikan yang kuat ini sangat strategis bagi IP2MP Karang Agung untuk memastikan bahwa standar perbenihan padi yang diajarkan dapat diterapkan secara berkelanjutan, yang merupakan kunci keberhasilan Bimtek.

Sedangkan terkait gambaran distribusi luas lahan didapatkan data bahwa peserta didominasi oleh dua kelompok besar: 49% peserta menguasai lahan di atas 1,8 hektar (>1,8 ha), dan 46% menguasai lahan di bawah 1,14 hektar (<1,14 ha). Kelompok dengan lahan luas (49%) mewakili potensi skala usaha yang besar untuk produksi benih padi terstandar dan bersertifikat. Kelompok ini adalah target utama untuk mencapai volume produksi yang signifikan. Di sisi lain, kelompok dengan lahan sempit (46%) memerlukan perhatian khusus dalam hal efisiensi dan intensifikasi teknologi.

Dari analisis data juga diperoleh data bahwa rata-rata produktivitas petani pada musim hujan yaitu 3,9 ton/ha dan pada musim kering 4,15 ton/ha. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan dan penerapan teknologi budidaya relatif lebih optimal saat musim kering. Selisih produktivitas sekitar ini mengindikasikan adanya tantangan pada musim hujan, seperti serangan hama-penyakit yang lebih tinggi, cekaman kelembapan, atau penerapan pemupukan dan pengendalian gulma yang kurang efektif. Implikasi dari hasil ini adalah perlunya penguatan materi bimtek yang lebih spesifik untuk menghadapi tantangan musim hujan, termasuk penggunaan varietas tahan, perbaikan drainase lahan, serta strategi pengendalian

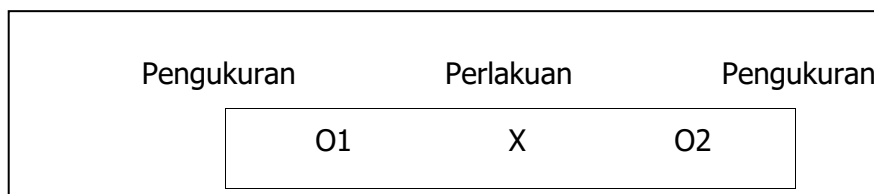
organisme pengganggu tanaman yang lebih adaptif. Tindak lanjut yang dapat dilakukan meliputi pendampingan teknis intensif pada musim hujan, demonstrasi plot perbaikan teknologi budidaya basah, serta evaluasi rutin untuk memastikan transfer teknologi benar-benar terimplementasi dan berdampak pada peningkatan produktivitas.

1. Peningkatan Pengetahuan Peserta Bimtek

Untuk menguji efektivitas bimtek yang dilaksanakan, dilakukan penilaian terhadap pengetahuan petani, penyuluh peserta bimtek sebelum maupun sesudah mengikuti bimtek sehingga diketahui perubahan pengetahuannya mengenai materi dan teknologi yang disampaikan. Dengan melakukan pretest sebelum pelatihan, maka pengetahuan awal peserta bimbingan teknis dapat diukur. Sedangkan posttest dapat memberikan gambaran sejauh mana pengetahuan peserta telah meningkat setelah mengikuti bimbingan teknis. Dengan adanya post test dan pretest dapat membantu melakukan pengukuran efektivitas transfer pengetahuan yang diterima peserta.

Pengujian keefektifan model dilakukan terhadap model konseptual yang dikembangkan sehingga dapat menghasilkan model empirik. Pemilihan design ini dilakukan dengan membandingkan hasil *pretest* dan *posttest* dari petani peserta bimtek sebagai responden.

Model eksperimen yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. *One Group Pretest-Posttest Design*

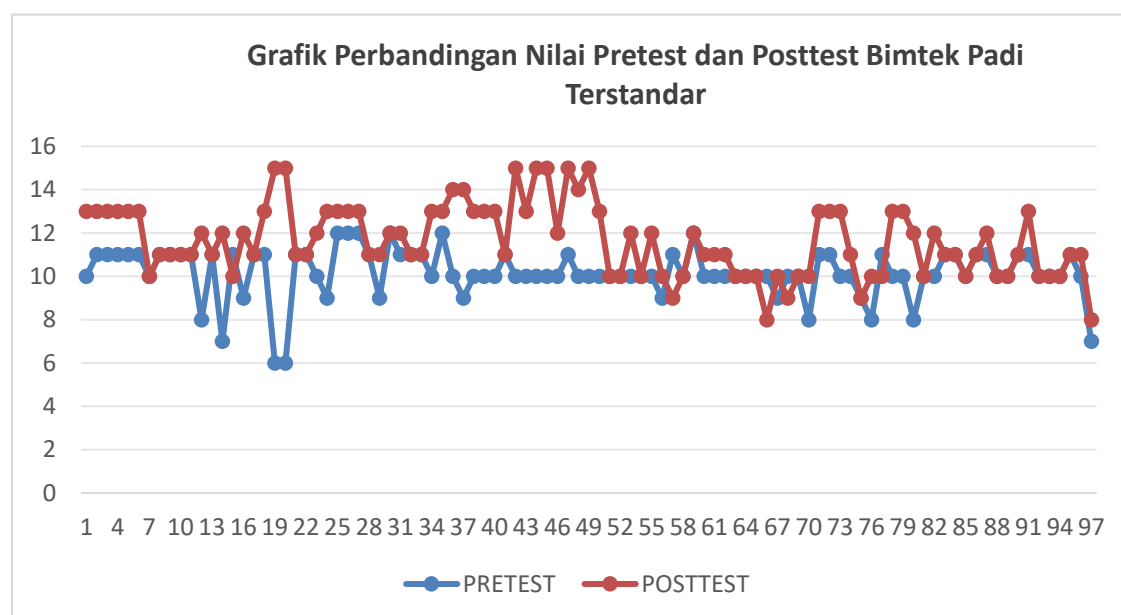
Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner tertutup terhadap 150 orang responden peserta bimtek. Pengisian kuesioner *pretest* oleh responden dilakukan sebelum bimtek dimulai dan pengisian kuesioner *posttest* dilakukan setelah bimtek selesai dilaksanakan.

Pre test dan *post test* memiliki peran krusial sebagai alat evaluasi dalam Bimtek Penerapan Padi Terstandar. *Pre test* berfungsi untuk mengukur tingkat pengetahuan awal dan pemahaman peserta mengenai materi terkait standar budidaya dan perbenihan padi sebelum bimtek dimulai. Hasil *pre test* ini sangat penting untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan menyesuaikan materi Bimtek agar lebih fokus pada area yang paling dibutuhkan oleh peserta. Dengan demikian, *pre test* memastikan Bimtek menjadi efisien dan

tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan spesifik peserta terkait penerapan standar pertanian.

Sementara *pre test* menentukan titik awal, *post test* adalah alat utama untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan Bimtek. Dengan membandingkan skor *post test* dengan skor *pre test* dapat diukur secara kuantitatif sejauh mana peningkatan pengetahuan dan transfer teknologi telah terjadi. Peningkatan skor yang signifikan menunjukkan bahwa metode dan materi Bimtek berhasil mentransformasi pengetahuan peserta, yang merupakan langkah awal penting menuju adopsi praktik terstandar di lapangan.

Data skoring *pre test* dan *post test* kemudian ditabulasi untuk melihat nilai peserta sebelum dan setelah mengikuti Kegiatan penguatan kapasitas penerap standar. Penentuan skoring nilai yang benar 1, untuk nilai yang salah 0.



Grafik 4. Perbandingan Nilai Pre Test dan Post Test Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan grafik perbandingan nilai pretest dan posttest, terlihat bahwa sebagian besar peserta mengalami peningkatan pemahaman setelah mengikuti bimtek penerapan padi terstandar. Nilai *post test* umumnya berada di atas nilai pretest, menunjukkan adanya transfer pengetahuan yang cukup efektif. Grafik 3. menunjukkan bahwa materi bimtek telah memberikan dampak positif bagi sebagian besar peserta.

Grafik juga memperlihatkan variasi yang cukup signifikan antar peserta, baik pada tahap *pre test* maupun *post test*. Pada *pre test* terdapat peserta dengan nilai sangat rendah, yang mengindikasikan adanya perbedaan dasar pengetahuan awal yang cukup lebar. Setelah bimtek, meskipun banyak yang meningkat, masih ada sebagian peserta yang nilainya stagnan atau meningkat sangat sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa metode penyampaian mungkin

belum sepenuhnya optimal bagi peserta dengan kemampuan awal yang lebih rendah.

Secara keseluruhan, pola posttest yang lebih tinggi menunjukkan bahwa materi bimtek cukup relevan dan mampu meningkatkan pemahaman peserta. Namun, terjadinya fluktuasi nilai pada beberapa titik menunjukkan bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap cara penyampaian materi, terutama pada topik-topik yang dianggap kompleks. Beberapa peserta yang nilainya turun atau hanya sedikit meningkat setelah bimtek juga dapat menjadi indikator bahwa metode pembelajaran kurang adaptif untuk kebutuhan pembelajaran orang dewasa yang memiliki latar belakang beragam.

Hasil ini juga menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan sudah terjadi, namun peningkatan tersebut belum merata sehingga berdampak pada potensi pelaksanaan penerapan padi terstandar di lapangan. Peserta yang sudah memahami dengan baik berpotensi menjadi penggerak implementasi, sementara peserta yang kurang memahami mungkin mengalami kendala ketika menerapkan standar teknis. Oleh karena itu, analisis grafik ini menjadi dasar bahwa bimtek selanjutnya perlu lebih terstruktur, terfokus, dan memastikan seluruh peserta benar-benar mencapai kompetensi minimal.

Agar pelaksanaan bimtek penerapan padi terstandar berikutnya lebih sesuai kebutuhan, disarankan untuk melakukan pre-assessment yang lebih rinci untuk memetakan kemampuan awal peserta sehingga materi bisa disesuaikan. Selain itu, pendekatan pembelajaran berbasis praktik lapangan perlu ditingkatkan agar peserta lebih mudah memahami penerapan teknis. Pengelompokan peserta berdasarkan tingkat pemahaman awal juga dapat membantu agar penyampaian materi lebih efektif. Terakhir, perlu disediakan sesi pendampingan lanjutan pascabimtek guna memastikan peserta benar-benar mampu menerapkan standar yang diajarkan di lapangan.

Data selanjutnya dianalisis dengan aplikasi SPSS 25.0 menggunakan analisis statistik nonparametrik *Wilcoxon Match Pairs Test* (Siegel, 1997 dan Sugiyono, 2010) untuk mengetahui perbedaan antara sebelum dan sesudah diberikan bimtek. Analisis uji Wilcoxon Match Pairs Test merupakan analisis pengujian efektivitas (Narbuko, 2004). Analisis tersebut dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini: (i) hasil nilai skor aspek pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan pelatihan, (ii) nilai total dan rata-rata dari aspek pengetahuan, (iii) perbedaan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan serta jenjang nilai dari masing-masing peserta pelatihan (Sugiyono 2010). Uji Wilcoxon merupakan bagian dari uji statistik nonparametrik, yang dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel saling berpasangan. Uji wilcoxon digunakan sebagai alternatif dari uji paired t test, jika data penelitian tidak berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansi < 0.05 maka hipotesis diterima dan jika nilai signifikansi > 0.05 maka hipotesis

ditolak.

Pada pelaksanaan bimtek padi terstandar analisis wilcoxon hanya dilakukan pada 97 peserta bimtek, karena data tersebut yang memiliki pretest dan posttest yang terisi semua. Dalam uji Wilcoxon, keberadaan pasangan data yang utuh merupakan syarat utama, sehingga peserta yang tidak mengisi salah satu dari dua instrumen, mengisi tidak lengkap, atau jawabannya tidak memenuhi kriteria kelayakan secara statistik harus dikeluarkan dari analisis untuk menjaga akurasi hasil. Dengan membatasi analisis pada 97 peserta yang datanya lengkap dan konsisten, hasil uji Wilcoxon menjadi lebih reliabel dalam menggambarkan perubahan pengetahuan peserta secara nyata, sekaligus menghindari bias yang dapat muncul.

Hasil pengisian kuesioner *pretest* dan *posttest* disajikan pada Tabel 2, dan hasil dari analisis data disajikan pada Tabel 1. Hasil analisis Statistik Uji Wilcoxon Match Pairs Test Penguatan Kapasitas Penerap Padi Terstandar

Tabel 4. Hasil analisis Statistik Uji Wilcoxon

Ranks		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Post Test - Pre Test	Negative Ranks	5 ^a	16.20	81.00
	Positive Ranks	56 ^b	32.32	1810.00
	Ties	36 ^c		
	Total	97		

a. Post Test < Pre Test

b. Post Test > Pre Test

c. Post Test = Pre Test

Test Statistics^a

	Post Test - Pre Test
Z	-6.255 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Uji Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Hasil dari uji Wilcoxon Match Pairs Test menggunakan SPSS 25 terhadap 97 responden yang mengisi kuesioner menunjukkan hasil:

- Negative Ranks untuk melihat penurunan nilai peserta dari pretest ke post test. Dari tabel 1 dapat dilihat terdapat 5 peserta yang mengalami penurunan dari nilai *pre test* ke post test,
- Positive rank digunakan untuk melihat peningkatan nilai pretest ke post test. Dari tabel 1 diketahui sebanyak 56 peserta mengalami kenaikan nilai pretest ke *post test* dengan rata-

rata peningkatan nilai 32.32 dan 36 peserta memiliki nilai sama antara pretest dan posttest.

- Berdasarkan analisis Uji Wilcoxon diketahui nilai Asymp Sig (2-tailed) bernilai 0.000
- Karena nilai $0.000 < 0.05$, maka terdapat perbedaan antara pengetahuan petani untuk *pre test* dan *post test*, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh Kegiatan Pelaksanaan Bimtek Padi Terstandar pada Tingkat pengetahuan peserta.

Hasil analisis Wilcoxon menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimtek Padi Terstandar memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan peserta. Dari total responden yang dianalisis, hanya 5 peserta yang mengalami penurunan nilai dari pretest ke posttest, sementara 56 peserta menunjukkan peningkatan skor dengan rata-rata kenaikan 32,32 poin. Selain itu, 36 peserta memiliki nilai yang tetap sama antara pretest dan posttest, yang mengindikasikan stabilitas pemahaman meskipun tidak terjadi peningkatan. Nilai signifikansi Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0.000, yang lebih kecil dari 0.05, menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan bahwa bimtek tersebut berpengaruh nyata dalam meningkatkan pengetahuan peserta.

Sebagai tindak lanjut, hasil ini dapat dijadikan dasar untuk memperkuat metode pelatihan melalui Bimtek yang terbukti efektif, sekaligus mengevaluasi bagian materi atau metode penyampaian yang mungkin belum optimal bagi peserta yang tidak mengalami peningkatan atau mengalami penurunan nilai. Peserta dengan nilai menurun maupun tidak meningkat perlu mendapat pendampingan tambahan melalui sesi penguatan materi atau bimbingan teknis lanjutan yang lebih terfokus. Selain itu, penyelenggara dapat mempertimbangkan penyempurnaan mekanisme pembelajaran, seperti peningkatan interaksi, pemanfaatan media yang lebih aplikatif, atau penyesuaian materi agar lebih sesuai dengan kebutuhan real lapangan. Dengan tindak lanjut yang tepat, capaian peningkatan pengetahuan peserta dapat lebih merata dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap penerapan standar perbenihan dan budidaya padi di wilayah petani sekitar IP2MP Karang Agung, Kabupaten Banyuasin.

c) Respon Peserta Terhadap Pelaksanaan Bimtek

Melihat respon peserta terhadap pelaksanaan Bimtek Padi Terstandar menjadi sangat penting karena penilaian mereka terhadap materi bimtek, metode penyampaian, kualitas narasumber, fasilitas yang disediakan, serta tingkat kemudahan penerapan di lapangan memberikan gambaran langsung tentang efektivitas kegiatan ini. Masukan peserta membantu mengidentifikasi apakah materi sudah relevan dan mudah dipahami, apakah metode pembelajaran cukup interaktif, serta apakah narasumber mampu menyampaikan materi secara jelas dan aplikatif. Evaluasi terhadap fasilitas bimtek juga memastikan kenyamanan dan kelancaran proses belajar, sedangkan penilaian pada aspek kemudahan penerapan menunjukkan sejauh mana materi dapat diimplementasikan oleh

petani dalam praktik budidaya dan perbenihan. Oleh karena itu, respon peserta menjadi komponen penting untuk perbaikan dan penyempurnaan bimtek ke depan agar semakin tepat sasaran dan berdampak nyata.

Setelah pelaksanaan bimtek, selain diberikan pertanyaan dalam *post test*, responden (petani) juga diminta untuk memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan bimtek untuk mengetahui respon selanjutnya. Penilaian yang diberikan terkait dengan: materi bimtek, metode bimtek, narasumber bimtek, dan fasilitas bimtek (Tabel 4).

Tabel 4. Respon Peserta Terhadap Pelaksanaan Bimtek Padi Terstandar

Pernyataan	STS (%)	TS (%)	Respon RR (%)	S (%)	SS (%)
Materi Bimtek					
Materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta	1,03	0,00	1,03	38,14	59,79
Materi yang diberikan dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap peserta dalam perbenihan padi secara terstandar	1,03	0,00	2,06	36,08	60,82
Materi disampaikan dengan menarik dan dibahas secara mendalam	1,03	4,12	4,12	45,36	45,36
Metode Bimtek					
Metode yang digunakan sesuai dengan materi yang disampaikan	1,03	0,00	1,03	45,36	52,58
Pelaksanaan bimtek sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan tepat waktu	1,03	4,12	5,15	52,58	37,11
Panitia memiliki kesigapan dalam membantu para peserta bimtek	1,03	0,00	6,19	48,45	44,33
Bahasa yang digunakan selama pelatihan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti	1,03	0,00	2,06	40,21	56,70
Narasumber Bimtek					
Narasumber dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik kepada peserta	1,03	0,00	2,06	41,24	55,67
Narasumber memberikan kesempatan kepada saya dan peserta lainnya untuk bertanya	1,03	0,00	2,06	43,30	53,61
Narasumber menyampaikan materi pelatihan dengan jelas dan mudah dipahami	1,03	0,00	2,06	49,48	47,42
Narasumber menguasai materi yang diajarkan/ disampaikan	1,03	0,00	1,03	51,55	46,39
Narasumber dapat mendorong saya dan para peserta lainnya aktif dalam kegiatan pelatihan	0,00	0,00	4,12	57,73	38,14
Narasumber berpenampilan sopan dan menarik	0,00	0,00	1,03	41,24	57,73

Pernyataan	STS (%)	TS (%)	Respon		SS (%)
			RR (%)	S (%)	
Fasilitas Bimtek					
Ruangan/tempat pelatihan terdapat meja serta kursi yang layak untuk digunakan mendukung proses pembelajaran	3,09	1,03	1,03	55,67	39,18
Semua peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan tersedia lengkap (seperti: LCD, pena, buku, brosur, dll)	0,00	1,03	2,06	39,18	57,73
Modul yang diberikan dapat membantu saya dalam belajar dan memahami materi bimtek	1,03	0,00	2,06	51,55	45,36
Lokasi dan ruangan pelaksanaan bimbingan teknis bersih dan nyaman	0,00	0,00	3,09	29,90	67,01
Konsumsi yang diberikan sangat layak	2,06	1,03	4,12	38,14	54,64
Tingkat Kemudahan Penerapan					
Materi yang disampaikan lebih mudah diterapkan di lahan petani	0,00	0,00	5,15	52,58	42,27
Materi yang disampaikan lebih mudah menerapkan dan menguntungkan dibandingkan cara biasa	0,00	0,00	2,06	54,64	43,30
Hasil penerapan materi mudah diamati	0,00	0,00	7,22	48,45	44,33

Analisis Data Primer, 2025

Pada pelaksanaan Bimtek Padi Terstandar Tanggal 20 November 2025, Dalam hal materi yang disampaikan pada saat bimtek, mayoritas responden memberikan respon yang sangat baik yaitu setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan mengenai materi yang diterima selama bimtek yaitu materi sesuai dengan kebutuhan dengan nilai persentase tertinggi pada jawaban SS (59.79%), S (38.14%). Penilaian terhadap materi menunjukkan bahwa peserta sangat merasakan relevansi dan manfaat dari materi yang diberikan. Pada aspek "materi sesuai kebutuhan peserta", jawaban **S** dan **SS** mencapai lebih dari **97.94%**, sehingga dapat disimpulkan bahwa konten pelatihan sudah tepat sasaran. Kemampuan materi dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap peserta juga direspons sangat positif, tercermin dari jawaban **S (36,08%)** dan **SS (60,82%)** atau sekitar **96,91%**. Terkait dengan aspek penyampaian materi yang menarik dan mendalam, persentase SS sebesar **45.36%** dengan **S (45.36%)**, menunjukkan bahwa peserta menganggap materi bermanfaat dan disertai metode penyampaian maksimal. Untuk kedepannya, perlu dilakukan peningkatan metode penyampaian materi melalui media visual, simulasi lapangan, contoh kasus nyata, dan penggunaan alat bantu yang lebih menarik.

Respon yang sangat baik juga ditunjukkan responden dalam metode pelaksanaan bimtek. Mayoritas peserta bimtek memiliki respon yang tinggi terhadap pelaksanaan bimtek, Metode bimtek dinilai cukup baik, dengan item "metode sesuai dengan materi" memperoleh **S (45.36%)** dan **SS (52.58%)**, sehingga **97,94%** peserta menyatakan puas. Namun pada aspek ketepatan waktu pelaksanaan, penilaian cenderung lebih bervariasi; meskipun **S (52.58%)** masih dominan, SS hanya **37.11%**, dan terdapat **TS (4,12%)** serta **RR (5,15%)** yang menunjukkan sebagian kecil peserta merasakan ketidaktepatan. Panitia dinilai cukup sigap dalam membantu peserta dengan **S (48,45%)** dan **SS (44,33%)**, tetapi adanya **RR (6.19%)** mengindikasikan masih perlu peningkatan respons cepat. Hal ini menjadi evaluasi untuk kedepan jumlah panitia pendamping dapat ditambah dan dilakukan pengarahan intensif sebelum acara terutama pada saat sesi praktik dan pengisian kuesioner. Panitia perlu diposisikan pada titik-titik strategis untuk memberi bantuan cepat kepada peserta yang membutuhkan dukungan teknis. Sementara itu penggunaan bahasa selama pelatihan mendapat apresiasi tinggi dengan **S (40.21%)** dan **SS (56,70%)**, membuktikan bahwa penyampaian instruksi dan penjelasan selama bimtek dapat diterima dengan mudah oleh peserta.

Narasumber memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Bimtek, maka dari itu respon peserta terhadap narasumber pada pelaksanaan bimtek perbenihan padi terstandar juga dilakukan pengukuran. Narasumber merupakan aspek yang paling stabil dan konsisten memperoleh penilaian tinggi. Kemampuan komunikasi dan interaksi ditunjukkan melalui nilai **S (41.2167%)** dan **SS (55.67%)**, menunjukkan lebih dari **96.91%** peserta merasa narasumber sangat baik dalam membangun hubungan dengan peserta. Kesempatan bertanya difasilitasi dengan baik (**S 43.30%**, **SS 53.61%**), begitu juga dengan kejelasan penyampaian materi (**S 49.48%**, **SS 47.42%**). Penguasaan materi oleh narasumber mendapat nilai paling kuat, yaitu **S (51,55%)** dan **SS (46.39%)**, sehingga total penilaian positif mencapai **97,94%**. Namun, pada aspek mendorong peserta untuk aktif, meskipun **S (57,73%)** cukup tinggi, persentase SS hanya **38,14%**, menunjukkan perlunya peningkatan strategi untuk membangun suasana bimtek yang lebih partisipatif.

Selain itu, responden juga diminta responnya untuk penilaian terhadap fasilitas bimtek. Fasilitas bimtek mendukung kelancaran pelaksanaan Bimtek, agar bimtek berjalan dengan lancar maka sarana prasarana dan fasilitas harus disiapkan dengan baik. Respon terhadap ruangan bimtek sebesar sebanyak 55.67% peserta S dan diikuti SS (39.18%), respon terhadap kelengkapan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan (LCD, pena, buku, brosur) mendapatkan nilai respon sebesar 57.73% pada kategori SS dan diikuti nilai 39.18% pada kategori S. Fasilitas modul yang diberikan dapat membantu dalam belajar dan memahami

materi mendapatkan nilai respon S (51.55%) dan SS (45.36%). Penyelenggaraan bimtek pada IP2MP Karang Agung juga dinilai pada item pertanyaan lokasi dan ruangan pelaksanaan bimtek yang bersih dan nyaman dengan persentase 67.01% pada kategori SS dan 29.90% pada kategori S. Dan pertanyaan terakhir untuk respon terhadap kelayakan konsumsi yang diberikan selama pelaksanaan bimtek mendapatkan nilai 54.64% pada kategori SS, dan 38.14% pada kategori S.

Selain itu, responden juga diminta responnya untuk penilaian terhadap tingkat kemudahan penerapan. Pada pertanyaan terkait kemudahan materi yang disampaikan diterapkan pada lahan petani persentase tertinggi yaitu pada Setuju (52.58%) diikuti Sangat Setuju (42.27%). Kemudahan materi yang disampaikan dan keuntungan yang didapat dibandingkan dengan cara biasa mendapatkan respon S (54.64%) diikuti SS (43.30%). Serta hasil penerapan materi mudah diamati mendapatkan nilai persentase yang sama pada respon S (48.45%) dan SS sebesar 44.33%.

Pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas penerap standar pertanian berjalan dengan lancar. Kegiatan terlaksana dengan baik tanpa gangguan yang berarti. Narasumber dan undangan yang datang juga antusias terhadap pelaksanaan Bimtek. Materi terkait budidaya padi terstandar sangat dibutuhkan petani di daerah lokasi bimtek, mengingat wilayah petani merupakan wilayah yang memiliki potensi untuk dilakukan perbenihan padi.

Secara keseluruhan, hasil analisis kuesioner terkait respon peserta menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Teknis padi Terstandar telah mencapai tingkat kepuasan peserta yang sangat tinggi di semua aspek, dengan persentase Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS) yang konsisten berada di atas 95% dan ada yang melampaui 98%. Aspek Narasumber mendapatkan respons yang paling positif, khususnya dalam hal penguasaan materi, kemampuan komunikasi, dan motivasi kepada peserta. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas SDM pengajar adalah kekuatan utama dalam Bimtek ini. Kualitas materi yang relevan dan fasilitas yang memadai juga berkontribusi besar pada keberhasilan Bimtek, didukung oleh persepsi positif peserta terhadap kemudahan penerapan materi di lapangan.

4.1. Demplot Budidaya Padi Terstandar Mendukung Swasembada Pangan di Sumatera Selatan

Kegiatan Demplot Penguatan Kapasitas Penerap Standar dilaksanakan sebagai bentuk penerapan langsung dari Standar Nasional Indonesia (SNI) Benih Padi Inbrida (SNI 6233:2015) pada tingkat lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan contoh nyata (best practice) penerapan standar pertanian, sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi penerap standar dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip budidaya padi

yang sesuai standar mutu nasional.

Demplot dilaksanakan di lahan seluas 2 hektar yang berlokasi di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Karang Agung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi ini dipilih karena memiliki kondisi agroekosistem yang representatif untuk pengujian dan penerapan inovasi teknologi budidaya padi, serta telah memiliki fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran dan pengamatan teknis.

Pada lahan demplot tersebut dilakukan percontohan budidaya padi yang menerapkan prinsip-prinsip SNI 6233:2015, meliputi seluruh tahapan proses produksi, antara lain persiapan lahan, Pemilihan dan Penyiapan Benih, penanaman dan Pemeliharaan, Rouging, Panen dan pasca panen. Kegiatan yang sudah dilaksanakan saat adalah :

1. Pengolahan Tanah

- Menggunakan herbisida untuk mematikan gulma dan sisa anak padi.
- Pengolahan lahan dilakukan secara sempurna dengan teknik 2 kali pengolahan lahan. Pertama, lahan dibajak untuk membalik tanah, mengangkat akar gulma dan membuka pori-pori tanah.
- lahan digenangi selama 20-25 hari. Pengolahan lahan kedua untuk melunakkan permukaan tanah agar siap ditanami.
- Pengolahan kedua menggunakan garu/gelebeg/rotary untuk melumpurkan dan meratakan tanah. Selanjutnya untuk membasmi gulma yang masih tumbuh, lahan disemprot dengan herbisida kontak



2. Pemilihan dan Penyiapan Benih

Benih yang digunakan merupakan benih padi inbrida bersertifikat yang memenuhi persyaratan mutu sesuai SNI 6233:2015, mencakup kemurnian varietas, daya tumbuh, kadar air, dan bebas dari hama penyakit. Benih yang digunakan yaitu varietas Cakrabuana dan Padjajaran.



3. Penanaman

Penanaman dilakukan dengan tabur benih langsung. Benih direndam dengan campuran air dan insektisida selama 1 malam sebelum dilakukan penanaman, seluas 1 ha dengan Varietas Cakrabuana tanam per tanggal 30 November tanaman sudah berumur 13 HST.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

- a. Terlaksananya penguatan dan peningkatan kapasitas 149 penerap standar pertanian melalui bimtek perbenihan padi terstandar
- b. Terealisasinya display penerapan standar pertanian SNI 6233:2015 Benih Padi Inbrida seluas 2 ha sebagai sarana pembelajaran lapang. Adanya Peningkatan pengetahuan dan sikap peserta bimtek terhadap standarisasi instrumen pertanian padi.
- c. Peserta Bimtek memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan bimtek, baik dari materi, metode, narasumber, dan fasilitas. Benih bermutu merupakan salah satu komponen produksi yang dibutuhkan petani. Ketersediaan benih sumber dan benih sebar secara "enam tepat" (varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi, dan harga) belum dapat dipenuhi, hal ini merupakan permasalahan yang masih dihadapi saat ini. Oleh karena itu, ketersediaan dan upaya pengendalian mutu benih sumber perlu ditingkatkan. Penumbuhan kelompok tani penangkar untuk memenuhi kebutuhan benih, terutama di Sumsel sebagai salah satu lumbung pangan nasional sangat diperlukan

4.2 Saran

Dengan dilaksanakannya kegiatan Bimtek dan demplot display penerapan standar pertanian SNI 6233:2015 Benih Padi Inbrida ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani dan penyuluh dalam memproduksi benih terstandar, serta terwujudnya mandiri benih di Desa Sukamulya Kecamatan Tungkal Ilir khususnya dan petani pada umumnya.

5.4 LAYANAN PENERAPAN SIP DAN PENGELOLAHAN PRODUK HASIL STANDARISASI

II. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Modernisasi pertanian tidak hanya menekankan mekanisasi, tetapi juga mencakup pengembangan standar kerja yang dirakit berdasarkan hasil kajian ilmiah dan kebutuhan lapangan untuk memastikan proses usahatani berjalan efektif, efisien, dan menghasilkan produk bermutu tinggi. Salah satu upaya strategis modernisasi tersebut adalah penerapan Standar Instrumen Pertanian (SIP). SIP merupakan seperangkat pedoman teknis yang dirakit untuk menjadi acuan pelaksanaan kegiatan usaha tani, termasuk perbenihan, sehingga proses produksi dilakukan secara konsisten, terukur, dan sesuai kaidah ilmiah yang berlaku (Sutoro et al., 2020).

Pengelolaan produk hasil standardisasi menjadi tahapan strategis untuk memastikan bahwa produk yang telah memenuhi standar dapat dikenali, diuji, dipromosikan, dan dijadikan model oleh pemangku kepentingan lainnya. Pengelolaan ini mencakup dokumentasi teknis, penandaan (labeling), publikasi, dan penyajian hasil standardisasi dalam bentuk materi pembelajaran atau model penerapan standar (BSN, 2016). Dengan demikian, layanan SIP dan pengelolaan hasil standardisasi saling melengkapi dan berperan penting dalam meningkatkan kualitas penerapan standardisasi pertanian di Sumatera Selatan.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan penerapan standar di sektor pertanian, adalah 1) kesadaran masyarakat, pelaku utama, dan pelaku usaha terhadap standar dan mutu produk masih relatif rendah; 2) jumlah standar nasional yang dapat mendukung produk pertanian masih belum mencukupi dan umumnya bukan berasal dari usulan pelaku utama dan pelaku usaha (*bottom up*); 3) standar-standar yang sudah dirumuskan dan dikonsensuskan belum dipahami dan diterapkan secara konsisten; dan 4) regulasi yang mendorong terwujudnya penerapan standar yang efektif juga masih belum memadai.

Tingkat keberhasilan kegiatan penerapan standar instrumen pertanian tentunya memerlukan suatu strategi khusus dalam mencapai output sesuai standar yang telah ditetapkan (BBPSIP, 2023), salah satunya ialah melalui layanan penerapan SIP dan

pengelolaan produk hasil pertanian. Tahun 2025 kegiatan ini berfokus pada komoditas padi, komoditas utama penyokong ketahanan pangan daerah dan nasional. Perbaikan sistem perbenihan merupakan fondasi penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan benih bermutu mampu meningkatkan hasil 10–20% dibandingkan benih non-standar (Suprihatno et al., 2020). Namun demikian, ketersediaan benih padi bermutu di Sumatera Selatan masih menghadapi beberapa tantangan.

Pertama, tingkat adopsi benih bersertifikat oleh petani masih tergolong rendah. Kebutuhan benih unggul bersertifikat belum sepenuhnya dapat dipenuhi, dan sebagian besar petani masih mengandalkan benih simpanan atau benih tidak bersertifikat. Kedua, kapasitas penangkar dalam menerapkan standar produksi benih, seperti SNI 6233:2015, belum merata. Banyak penangkar yang belum memahami teknik isolasi, seleksi tanaman (*roguing*), kemurnian varietas, hingga penanganan pascapanen yang benar (Kementan, 2017). Ketiga, dokumentasi proses perbenihan belum dilakukan secara rutin sehingga upaya evaluasi mutu sulit dilaksanakan.

Dalam konteks tersebut, layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi sangat relevan diterapkan oleh BRMP Sumatera Selatan. BBPSIP (2023) menyatakan bahwa kolaborasi dan komunikasi dengan membangun kerja sama yang baik antara petani, pemerintah, dan pihak terkait lainnya seperti asosiasi pertanian, lembaga penelitian, perguruan tinggi, *stakeholder* terkait, petani dan pasar dapat membantu dalam penerapan standar. Komunikasi yang efektif dan pertukaran informasi antara semua pihak terlibat sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk pertanian. Melalui kegiatan Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi, pendampingan dilakukan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha tani yang sedang melaksanakan perbenihan padi terstandar tahun ini, baik dari sisi pengetahuan maupun keterampilan dalam menerapkan SIP.
2. Mengevaluasi penerapan SIP secara langsung mulai dari tahap awal hingga akhir kegiatan, sehingga kesenjangan (GAP) antara pelaksanaan di lapangan dengan standar ideal dapat diidentifikasi sejak dini.

Kegiatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan perbenihan sehingga memungkinkan perbaikan secara cepat dan tepat. Pendampingan seperti ini sangat sesuai dengan prinsip modernisasi pertanian yang mendorong penggunaan standar teknis untuk meningkatkan kualitas proses dan output. Dengan evaluasi yang dilakukan pada tahun pelaksanaan kegiatan, kelompok tani dapat mengetahui tingkat penerapan standar instrumen

secara akurat dan segera melakukan penyesuaian pada musim tanam berikutnya. Kegiatan ini juga secara langsung mendukung capaian kinerja organisasi, khususnya sasaran: "Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian."

Melalui pendampingan SIP dan pengelolaan produk hasil standardisasi, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan benih bermutu, tetapi juga meningkatkan kualitas penerapan standar di lapangan, memperbaiki manajemen perbenihan kelompok tani, dan memperkuat posisi daerah sebagai wilayah dengan potensi besar untuk pengembangan perbenihan padi modern berbasis standar. Dengan demikian, penerapan SIP dalam kegiatan perbenihan padi yang dilaksanakan tahun ini merupakan langkah strategis dalam modernisasi dan peningkatan kualitas pertanian berbasis standar di Sumatera Selatan.

1.2. Tujuan Dan Saran

1.2.1 Tujuan

Tujuan Tahun 2025

1. Mengidentifikasi kapasitas pelaku usahatani yang menerapkan standar perbenihan padi.
2. Mengevaluasi penerapan standar perbenihan padi mendukung tercapainya perjanjian kinerja BRMP Sumatera Selatan.

Tujuan Akhir

1. Terwujudnya pelaku usaha tani yang mandiri, kompeten, dan mampu menerapkan standar instrumen pertanian secara konsisten.
2. Tersedianya sistem evaluasi standar instrumen pertanian yang berkelanjutan untuk mendukung penguatan standardisasi pertanian secara menyeluruh mendukung tercapainya perjanjian kinerja BRMP Sumatera Selatan.

1.3.2 Sasaran, Indikator dan Target

Sasaran

1. Meningkatnya kapasitas pelaku usaha tani
2. Terlaksananya evaluasi penerapan standar instrumen pertanian.
3. Tersedianya produk hasil standardisasi.
4. Tercapainya perjanjian kinerja BRMP Sumatera Selatan.

Indikator

1. Tingkat kapasitas pelaku usahatani yang menerapkan standar instrumen pertanian.
2. Jumlah usaha tani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian.

Target

Pelaku UsahaTani Penerap Standar Instrumen Pertanian.

1.3. Keluaran

1.4.1. Keluaran

Keluaran Tahun 2025

1. Diperolehnya data tingkat kapasitas pelaku usahatani yang menerapkan standar perbenihan padi.
2. Tersedianya data penerapan standar perbenihan padi mendukung tercapainya perjanjian kinerja BRMP Sumatera Selatan

Keluaran Akhir

1. Mewujudkan pelaku usaha tani yang mandiri, kompeten, dan mampu menerapkan standar instrumen pertanian secara konsisten.
2. Menyediakan sistem evaluasi standar instrumen pertanian yang berkelanjutan untuk mendukung penguatan standardisasi pertanian secara menyeluruh mendukung tercapainya perjanjian kinerja BRMP Sumatera Selatan.

1.4.2 KRO,RO,Komponen dan Subkomponen

KRO : Layanan Dukungan Manajemen Internal.
RO : Layanan Umum.
Komponen : Layanan Kerumahtanggaan dan Umum.
Subkomponen : Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi.

1.4 Manfaat , Lokasi dan Dampak Manfaat

1. Mendukung pencapaian sasaran kinerja BRMP Sumatera Selatan.
2. Terbentuknya ekosistem standar instrumen pertanian yang modern.
3. Penguatan ketahanan pangan Sumatera Selatan.

Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan.

Perkiraan Dampak

- 1.Efektivitas pelaksanaan program meningkat melalui evaluasi berbasis data.
- 2.Potensi gratifikasi menurun melalui penerapan pelaporan aktif.
- 3.Kepercayaan publik dan mitra terhadap BRMP Sumatera Selatan meningkat.
- 4.Terbangunnya model kelembagaan pertanian yang bersih dan transparan.

II. PROSEDUR KERJA

2.1.Kerangka Pemikiran

Kegiatan Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi dalam perbenihan padi terstandar dilandasi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas proses produksi benih melalui penerapan standar teknis yang tersusun secara ilmiah, sistematis, dan teruji di lapangan. Pada era modernisasi pertanian, penggunaan standar teknis bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk menjamin konsistensi mutu, efisiensi proses, dan kemampuan menelusur (*traceability*) kegiatan budidaya dan perbenihan. SIP dirakit melalui kajian ilmiah, pengalaman praktis, dan pembelajaran lapangan sehingga mampu menjadi pedoman yang relevan bagi pelaku usaha tani dan kelompok tani dalam menghasilkan benih bermutu.

Perbenihan padi merupakan kegiatan strategis karena benih merupakan faktor produksi yang menentukan produktivitas, daya adaptasi tanaman, dan stabilitas hasil. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan benih bermutu dapat meningkatkan produktivitas hingga 10–20% dibandingkan benih non-standar (Suprihatno et al., 2020). Karena itu, tahapan teknis perbenihan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Mulai dari pemilihan varietas unggul, penentuan sumber benih, pengolahan lahan, isolasi tanaman, pemurnian varietas, roguing, pengairan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, panen pada tingkat kematangan optimal, sortasi pascapanen, pengeringan hingga kadar air standar, serta penyimpanan dalam kondisi yang tepat — semuanya membutuhkan standar teknis yang dapat dijadikan acuan.

Dalam praktiknya, banyak petani atau kelompok tani yang telah berpengalaman dalam budidaya padi, namun belum semuanya memiliki kemampuan untuk melakukan perbenihan yang sepenuhnya terstandar. Ketidakkonsistenan penerapan standar, minimnya dokumentasi teknis, serta kurangnya pengetahuan detail tentang tahapan kunci seperti roguing, pemurnian varietas, dan teknik pengeringan sering menjadi penyebab mutu benih tidak stabil atau tidak memenuhi persyaratan SNI 6233:2015.

Oleh karena itu, pelaksanaan Layanan Penerapan SIP menjadi intervensi strategis untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas dan kualitas penerapan standar di tingkat kelompok tani. SIP memberikan kerangka kerja operasional untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kerja mengikuti prosedur baku yang mendukung mutu benih. Penerapan SIP tidak hanya meningkatkan kualitas proses, tetapi juga membangun budaya kerja petani yang lebih disiplin, sistematis, dan berbasis bukti ilmiah.

Selain penerapan SIP, kegiatan ini juga menekankan pada pengelolaan produk hasil pertanian, yaitu dokumentasi menyeluruh terhadap seluruh proses penerapan standar instrumen. Dokumentasi ini penting sebagai bukti bahwa SIP diterapkan pada setiap tahapan kegiatan perbenihan. Produk hasil standardisasi meliputi: foto tahap kegiatan, catatan teknis SIP, hasil pengukuran kadar air benih, hasil sortasi, laporan roguing, hingga uji mutu benih pascapanen. Dokumentasi ini dapat dijadikan rujukan untuk evaluasi internal kelompok, bahan perbaikan pada musim tanam berikutnya, serta contoh praktik baik (*best practices*) bagi kelompok tani lain.

Pendekatan layanan SIP dan pengelolaan hasil standardisasi dilakukan secara terpadu dengan analisis kesenjangan (GAP) antara standar ideal dengan praktik lapangan. Analisis GAP memberikan gambaran sejauh mana petani telah menerapkan standar dan pada bagian mana terjadi ketidaksesuaian. Dengan mengetahui akar masalah, rekomendasi perbaikan dapat disusun secara lebih akurat dan kontekstual.

Kegiatan ini juga sejalan dengan prinsip modernisasi pertanian yang menekankan pentingnya standarisasi teknis, validasi proses produksi, dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Modernisasi tidak hanya berbentuk mekanisasi, tetapi juga perubahan cara kerja menuju praktik terstruktur dan efisien melalui standar teknis yang jelas (BB Padi, 2020). Dengan demikian, penerapan SIP dan pengelolaan hasil standardisasi tidak hanya menghasilkan benih bermutu tahun ini, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang dalam penguatan sistem perbenihan berbasis standar instrumen di tingkat kelompok tani. Kegiatan ini juga mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi, yaitu meningkatnya jumlah pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian berdasarkan instrumen yang telah dirakit.

Dengan demikian, kerangka pemikiran kegiatan ini menunjukkan bahwa penerapan SIP dan pengelolaan produk hasil standardisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu perbenihan padi, memperkuat kapasitas petani, membangun budaya kerja berbasis standar, serta mendukung modernisasi pertanian yang berkelanjutan.

2.2. Ruang Lingkup Aktivitas

1. Evaluasi tingkat pemahaman pelaku usahatani atau penerap standar pertanian.
2. pengukuran tingkat keterampilan pelaku usahatani atau penerap standar pertanian.
3. Penilaian penerapan standar berdasarkan kriteria kepatuhan prosedur dan mutu hasil.
4. Penyusunan dokumen produk hasil standardisasi (analisis GAP dan akar masalah).
5. Sosialisasi dan pelaporan.

2.3. Prosedur Pelaksanaan

2.3.1. Tempat dan Waktu

Kegiatan Layanan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi dilaksanakan di Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025.

2.3.2. Tahapan Pelaksana Kegiatan

Tahapan kegiatan Layanan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi terdiri dari:

(1) Studi dokumen

Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar teknis penerapan SIP dan kondisi awal kegiatan perbenihan padi terstandar.

Kegiatan

1. Menelaah Standar Instrumen Pertanian (SIP) untuk perbenihan padi.
2. Memeriksa pedoman teknis, SOP, SNI 6233:2015, dan dokumen regulasi terkait.
3. Menyusun daftar variabel yang akan dinilai dalam survei kepatuhan SIP.

(2) Tahapan Wawancara, FGD dan Observasi Lapangan

Bertujuan untuk mengidentifikasi pemahaman, kapasitas, dan praktik aktual petani dalam menerapkan SIP.

Kegiatan

1. Wawancara mendalam dengan petani, ketua kelompok, dan penyuluh untuk mengidentifikasi pemahaman dan keterampilan petani dalam standar perbenihan padi.
2. FGD bersama kelompok tani mengenai:
 - o pengalaman penerapan SIP,
 - o kendala teknis,
 - o dampak penerapan SIP,
 - o minat petani untuk menerapkan SIP kedepan.
3. Observasi lapang pada lokasi perbenihan.

(3) Survei Kepatuhan Penerapan SIP

Survei ini bertujuan untuk menilai tingkat penerapan standar instrumen di lapangan secara objektif dan terukur.

Kegiatan

1. Melakukan survei kepatuhan menggunakan checklist standar instrumen pertanian.
2. Mengukur kesesuaian setiap tahapan perbenihan:
 - isolasi,
 - pemurnian,
 - roguing,
 - panen,
 - sortasi,
 - pengeringan,
 - penyimpanan.
3. Mengidentifikasi komponen yang memenuhi standar, belum memenuhi standar, dan tidak diterapkan.

(4) Sosialisasi Penerapan SIP

Kegiatan sosialisasi penerapan SIP bertujuan untuk menyampaikan temuan hasil identifikasi tingkat pemahaman, keterampilan dan kepatuhan petani secara terbuka kepada petani serta menjangking umpan balik (*feedback*) yang konstruktif mengenai aspek-aspek yang sudah sesuai standar dan aspek yang perlu diperbaiki dalam penerapan standar instrumen pertanian.

Kegiatan

1. Menyampaikan materi tentang hasil identifikasi tingkat pemahaman, keterampilan dan kepatuhan penerapan standar instrumen pertanian secara struktural.
2. Menjangking umpan balik (*feedback*) yang konstruktif.

(5) Analisis Data

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis hasil survei, observasi, dan wawancara untuk mengetahui efektivitas penerapan SIP.

Kegiatan

1. Analisis kualitatif tingkat pengetahuan dan keterampilan petani.
2. Analisis kuantitatif tingkat kepatuhan SIP (%).
3. Analisis GAP antara standar ideal dan praktik aktual.

4. *Root Cause Analysis* menggunakan:
 - Metode 5 Why;
 - Tabel RCA (*Man, Method, Machine, Material, Environment*).
5. Menyusun rekomendasi peningkatan penerapan SIP.

Output

- Analisis komprehensif penerapan dan tingkat kepatuhan SIP.
- GAP Analysis Report.
- RCA dan rekomendasi perbaikan.

(6). Tahap Penyusunan Laporan

Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan laporan komprehensif yang memuat hasil kegiatan layanan penerapan SIP.

Kegiatan

1. Menyusun laporan teknis kegiatan lengkap.
2. Validasi laporan bersama internal tim.
3. Diseminasi hasil melalui seminar hasil.

Output

- Laporan final *Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi*.
- Paparan hasil pada seminar hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mengidentifikasi Kapasitas Pelaku Usaha Tani Yang Menerapkan Standar Perbenihan Padi

Pendampingan pada usahatani dalam Penerapan standar pertanian merupakan upaya penting yang dilakukan, salah satunya yaitu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teknis dan adopsi praktik standar, peningkatan keterampilan (pengetahuan, sikap, perilaku) petani dalam usahatani berdasarkan acuan terstandar, diantaranya SNI, IndoGAP dimana di dalamnya dimuat sejumlah acuan teknis, mulai dari seleksi benih, pengaturan jarak tanam, pengendalian hama terpadu, hingga praktik panen dan pasca-panen yang belum familiar bagi banyak petani. Pendampingan langsung oleh pemerintah terkait serta penyuluh dan tenaga teknis mengakibatkan adopsi standar menjadi nyata dan berkelanjutan. Pendekatan ini

dibuktikan efektif dalam meningkatkan kompetensi petani dan tingkat penerapan teknologi pertanian.

Tujuan lain dari pendampingan pada perbenihan padi yaitu menurunkan risiko kesalahan yang dilakukan petani, diantaranya penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Dengan pendampingan, petani lebih tepat dalam penggunaan input (benih, pupuk, pestisida), manajemen irigasi, dan praktik pasca-panen sehingga produktivitas dan mutu gabah meningkat sementara residu kimia dan risiko pangan menurun. Intervensi teknis yang disertai monitoring juga membantu memastikan kepatuhan terhadap parameter mutu dan keamanan yang diperlukan pasar atau sertifikasi — yang pada gilirannya membuka akses pasar bernilai lebih tinggi.

BRMP Sumatera Selatan secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan pendampingan salah satunya yakni pendampingan perbenihan padi yang meliputi koordinasi teknis dengan dinas pertanian kabupaten/kota, sosialisasi penerapan standar (SNI/IndoGAP), serta monitoring dan evaluasi lapang untuk memastikan praktik budidaya sesuai standar dan target produksi tercapai. Tim BRMP rutin melakukan pembinaan petani penangkar melalui rapat koordinasi, pertemuan, diskusi, sosialisasi, kunjungan lapang serta demonstrasi lapang. Selain itu BRMP mendampingi proses sertifikasi dan penerapan standar dengan membantu dokumentasi, pencatatan, dan pemetaan lokasi agar kelompok tani dapat memenuhi persyaratan sertifikasi dan akses pasar. Upaya ini juga mencakup kolaborasi lintas-sektor (Dinas, BPSB dan penyuluh pertanian) untuk penyediaan benih, input dan infrastruktur sehingga intervensi lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Pada upaya untuk melihat hasil nyata dari pendampingan usahatani yang telah dilakukan selama ini, dilakukan pengambilan data dengan wawancara terstruktur dan mendalam menggunakan kuesioner terhadap petani penangkar yang telah diberikan pendampingan terkait standar perbenihan padi.

3.1.1 Karakteristik Petani Yang Mendapatkan Pendampingan Penerapan Standar Perbenihan Padi.

Pengambilan data dilakukan di Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur. Distribusi anggota cukup beragam yaitu ketua, bendahara dan anggota. Kelompok tani memiliki struktur kepengurusan yang relatif lengkap dan pembagian peran di kelompok sudah dilakukan sehingga fungsi kelompok berjalan baik.

Pengambilan data selanjutnya dilakukan pada data luas lahan petani. Pengambilan data ini sangat penting dilakukan karena sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pertanian yang efektif dari hulu ke hilir di tingkat kelompok tani. Tujuannya yaitu untuk

mengidentifikasi skala usaha tani setiap individu yang secara langsung berkaitan dengan potensi pendapatan serta modal yang diperlukan. Dan juga data luas lahan yang lebih luas digunakan sebagai dasar untuk alokasi sumber daya dan subsidi pupuk yang dilakukan pemerintah.

Tabel 1. Sebaran Luas Lahan Petani

No.	Kategori Luas Laha(ha)	Presentase (%)
1	<1,3	38.46
2	1,3-2,2	30.77
3	>2,2	30.77
Total		100.00

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis data di atas, luas lahan petani didominasi petani berlahan sempit. Kategori <1,3 ha sebesar 38,46% dari total populasi. Persentase tertinggi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota kelompok sangat bergantung pada peningkatan efisiensi budidaya. Sedangkan, dua kategori lahan yang lebih besar, yaitu 1,3 – 2,2 ha dan >2,2 ha memiliki jumlah persentase yang identik, yakni sebesar 30,77%. Distribusi ini mengindikasikan bahwa kelompok juga memiliki anggota dengan kapasitas produksi yang cukup besar, yang dapat menjadi penggerak utama dalam adopsi teknologi dan inovasi pertanian.

Tabel 2. Sebaran Produktivitas

No.	Kategori Produktivitas (kg/ha)	Persentase (%)
1.	<4,147	15,38
2.	4,147 – 5,718	46,15
3.	>5,718	38,46
Total		100,00

Sumber: Data primer diolah, 2025

Pengambilan data produktivitas petani (kg/ha) adalah langkah penting yang dapat dijadikan sebagai salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kinerja sektor pertanian. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur efisiensi penggunaan lahan dan praktik budidaya yang diterapkan oleh petani. Data ini berfungsi sebagai indikator usahatani, menunjukkan seberapa efektif input yang digunakan (benih, pupuk, tenaga kerja) diubah menjadi output berupa hasil panen. Tanpa data produktivitas yang akurat, *stakeholder* terkait akan kesulitan dalam mengidentifikasi masalah mendasar (misalnya, terkait serangan hama, tanah yang tidak subur, atau penggunaan varietas yang kurang unggul dan merumuskan solusi yang tepat,

seperti program pelatihan spesifik atau rekomendasi penggunaan teknologi.

Distribusi produktivitas menunjukkan bahwa mayoritas petani berada dalam kategori menengah (4,147 - 5,718 ton/ha) sebanyak 6 orang (46,15%). Tingginya persentase di kategori menengah ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anggota kelompok masih memiliki ruang besar untuk peningkatan, maka dari itu diperlukan upaya lebih lanjut untuk pendampingan usahatani agar produktivitas meningkat. Sementara itu, kelompok dengan produktivitas tinggi (>5,718 ton/ha) mencapai 5 orang (38,46%). Hal ini menunjukkan adanya petani telah berhasil menerapkan praktik budidaya yang optimal. Data produktivitas petani memiliki fungsi untuk panduan dalam merancang intervensi yang tepat, memastikan bahwa upaya pendampingan yang dilakukan fokus pada yang membutuhkan.

Petani dengan produktivitas rendah memerlukan pendampingan yang intensif dan spesifik, sedangkan untuk petani dengan produktivitas sedang merupakan target utama agar hasilnya meningkat dan petani dengan produktivitas tinggi didorong untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada petani lainnya.

3.1.2 Tingkat Kapasitas Petani yang Menerapkan Standar Pembenihan Padi

Pengetahuan Petani dalam penerapan Standar Perbenihan Padi

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan petani terhadap perbenihan padi terstandar, dilakukan analisis data terhadap instrumen pengetahuan yang terdiri atas 13 indikator. Setiap jawaban diberi skor, yaitu 1 untuk jawaban benar/tahu dan 0 untuk jawaban salah/tidak tahu. Skor dari seluruh butir pertanyaan kemudian dijumlahkan dan dibandingkan dengan skor maksimum yang diperoleh, sehingga menghasilkan nilai persentase tingkat pengetahuan masing-masing responden.

Selanjutnya, tingkat pengetahuan petani diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kategori tinggi ditetapkan pada persentase $\geq 80\%$, kategori sedang pada persentase 60–79%, dan kategori rendah pada persentase $< 60\%$. Hasil pengelompokan tingkat pengetahuan petani berdasarkan perhitungan tersebut disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Tingkat Pengetahuan Petani Terhadap Standar Perbenihan Padi

Indikator	Nilai Rata-rata (%)	Kategori
Pemilihan lokasi	95,80	Tinggi
Varietas	95,80	Tinggi
Benih	91,70	Tinggi
Persemaian	100,00	Tinggi
Olah lahan	100,00	Tinggi
Penanaman	100,00	Tinggi
Pemupukan	83,30	Tinggi
Pengairan	100,00	Tinggi
Pengendalian gulma	100,00	Tinggi
Pengendalian HPT	91,70	Tinggi
Roguing	91,70	Tinggi
Panen	62,50	Sedang
Pasca panen	61,90	Sedang

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis tingkat pengetahuan petani untuk setiap indikator perbenihan padi terstandar, diperoleh bahwa sebagian besar indikator berada pada kategori tinggi. Dari total 13 indikator yang dianalisis, sebanyak 11 indikator (84,6%) termasuk dalam kategori pengetahuan tinggi, yaitu indikator pemilihan lokasi, varietas, benih, persemaian, olah lahan, penanaman, pemupukan, pengairan, pengendalian gulma, pengendalian HPT, dan roguing. Sementara itu, terdapat 2 indikator (15,4%) yang masih berada pada kategori sedang, yaitu indikator panen dan pasca panen. Tidak terdapat indikator yang berada pada kategori pengetahuan rendah.

Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum petani telah memiliki tingkat pemahaman yang baik hingga sangat baik terhadap tahapan awal hingga tahap pemeliharaan tanaman dalam kegiatan perbenihan padi. Tingginya nilai pada indikator pemilihan lokasi, varietas, dan benih menunjukkan bahwa petani telah memahami pentingnya faktor awal dalam menentukan mutu dan keberhasilan produksi benih padi, sebagaimana dijelaskan dalam pedoman teknis perbenihan padi (Balitbangtan, 2018; Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 2020). Selain itu, tingginya skor pada indikator persemaian, olah lahan, penanaman, serta pemeliharaan tanaman (pemupukan, pengairan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman) mencerminkan bahwa petani telah terbiasa menerapkan praktik budidaya yang baik dan sesuai dengan prinsip dasar pertanian (Soekartawi, 2002).

Namun demikian, tahapan panen dan pasca panen masih menjadi bagian yang relatif paling lemah dalam penguasaan pengetahuan petani. Hal ini diduga karena pada praktiknya, banyak petani yang masih memperlakukan hasil panen benih sama seperti hasil panen gabah konsumsi, sehingga standar waktu panen, metode pemanenan, kadar air, sortasi,

pengeringan, serta penyimpanan belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan sesuai kaidah perbenihan (Kartasapoetra, 2006; Wibowo & Purwanto, 2019).

Padahal, tahapan panen dan pasca panen merupakan fase yang sangat menentukan mutu fisik, mutu fisiologis, dan daya tumbuh benih (FAO, 2011). Jika penanganan panen dan pasca panen tidak dilakukan sesuai standar, maka benih berpotensi mengalami penurunan viabilitas, kehilangan kemurnian varietas, serta lebih rentan terhadap kerusakan dan serangan hama gudang (Permentan No. 12/2021).

Oleh karena itu, meskipun pengetahuan petani pada tahap budidaya relatif sudah tinggi, kelemahan pada tahap panen dan pasca panen perlu menjadi fokus utama dalam program penyuluhan dan pendampingan berikutnya. Penguatan kapasitas petani melalui pelatihan teknis, demonstrasi lapangan, dan penyediaan sarana pasca panen diharapkan mampu meningkatkan pemahaman sekaligus keterampilan petani dalam menghasilkan benih padi bermutu dan bersertifikat.

Keterampilan Petani dalam Penerapan Standar Perbenihan Padi

Untuk mengetahui sejauh mana keterampilan petani dalam menerapkan standar perbenihan padi di lapangan, dilakukan pengumpulan data melalui instrumen observasi dan kuesioner yang memuat berbagai tahapan kegiatan perbenihan, mulai dari persiapan lahan hingga penanganan pasca panen. Setiap tahapan dinilai berdasarkan kemampuan petani dalam melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Skor yang diberikan mencerminkan tingkat keterampilan petani dalam menerapkan teknik-teknik perbenihan padi terstandar secara nyata di lapangan.

Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menjumlahkan seluruh skor keterampilan dari masing-masing responden dan dibandingkan dengan skor maksimum yang mungkin dicapai. Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh indeks keterampilan petani sebesar 0,75 atau setara dengan 75,0%. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum keterampilan petani dalam menerapkan standar perbenihan padi berada pada kategori sedang, namun mendekati kategori tinggi.

Petani sudah memiliki keterampilan yang cukup baik dalam menerapkan standar perbenihan padi di lapangan. Sebagian besar tahapan teknis seperti: pemilihan lokasi, penggunaan varietas, perlakuan benih, persemaian, olah tanah, penanaman, pengairan, serta pengendalian gulma dan hama telah mampu diterapkan oleh petani secara praktik. Namun, keterampilan tersebut belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat teknik-teknik yang belum dilakukan secara konsisten, dilakukan belum sesuai standar atau masih mengikuti kebiasaan lama (tradisional).

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara pengetahuan (yang tadi mencapai >82%) dengan keterampilan praktik di lapangan (yang masih 75%). Petani sudah tahu secara teori, tetapi belum seluruhnya mampu menerapkan secara teknis dengan tepat di lapangan. Secara kognitif (pengetahuan) petani sudah menguasai konsep perbenihan padi terstandar. Namun secara psikomotorik (keterampilan praktik), masih ada kendala aplikasi di lapangan. Menurut teori pembelajaran pertanian, keterampilan membutuhkan: latihan berulang, pendampingan langsung, serta pengalaman praktik di lapangan (Soekartawi, 2002). Jika aspek ini kurang mendapat perhatian, maka walaupun pengetahuan tinggi, hasil penerapan tetap belum optimal.

Berapa faktor yang diduga mempengaruhi gap nilai pengetahuan dan keterampilan petani diantaranya adalah:

1. Sarana dan prasarana terbatas
 - Tidak semua petani memiliki alat pengering, alat sortasi, atau tempat penyimpanan benih yang standar.
2. Kebiasaan lama masih dominan
 - Beberapa petani masih menggunakan cara tradisional yang dianggap lebih praktis dan murah.
3. Pelatihan lebih banyak bersifat teori
 - Kurang praktik langsung di lapangan.
4. Tahap panen dan pasca panen kurang dikuasai
 - Inilah tahapan yang paling kompleks dan menentukan kualitas benih (FAO, 2011).

Hal ini sesuai dengan pendapat Kartasapoetra (2006) yang menyatakan bahwa keterampilan petani dalam pengolahan dan penanganan benih sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas, pengalaman praktik, dan pendampingan teknis yang berkesinambungan. Jika keterampilan belum maksimal, maka dampaknya terhadap mutu benih antara lain: mutu benih tidak seragam, daya tumbuh menurun, potensi tercampur varietas dan tidak lolos standar sertifikasi. Berdasarkan hasil ini, diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Fokus pada pelatihan praktek lapangan (*hands-on training*)
2. Membuat demonstration plot (demplot) khusus perbenihan padi
3. Memperkuat materi panen & pasca panen benih
4. Memberikan pendampingan langsung pada petani dengan skor terendah
5. Memfasilitasi alat pasca panen sederhana (terpal, rak jemur, karung benih, dll)

Dengan demikian diharapkan nilai keterampilan dapat meningkat dari 75% → >85% (tinggi).

3.2 Mengevaluasi Penerapan Standar Pembenihan Padi Mendukung Tercapainya Perjanjian Kinerja BRMP Sumatera Selatan

3.2.1 Tingkat Kepatuhan Petani dalam Penerapan Standar Perbenihan Padi

Hasil analisis tingkat kepatuhan pada setiap responden menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan berada pada kategori sedang dengan kecenderungan tinggi, yaitu sebesar 77,97%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar petani telah berupaya mematuhi standar perbenihan padi, meskipun masih terdapat beberapa tahapan yang belum diterapkan secara konsisten sesuai ketentuan. Nilai kepatuhan sebesar ini menunjukkan bahwa:

1. Sebagian besar petani telah mematuhi standar perbenihan padi, baik pada tahap persiapan, penanaman, pemeliharaan, hingga sebagian proses panen.
2. Namun, masih terdapat sekitar 22,03% praktik yang belum sepenuhnya sesuai standar.
3. Angka ini mengindikasikan bahwa meskipun pengetahuan petani tinggi (82,35%) dan keterampilan cukup baik (75%), kepatuhan aktual di lapangan belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kepatuhan petani pada setiap indikator perbenihan padi, diperoleh bahwa sebagian besar indikator berada pada kategori tinggi. Dari total 13 indikator yang dianalisis, terdapat 11 indikator yang termasuk dalam kategori kepatuhan tinggi, yaitu pemilihan lokasi, varietas, benih, persemaian, olah lahan, penanaman, pemupukan, pengairan, pengendalian gulma, roguing, dan panen (Tabel 4).

Tabel 4. Tingkat Kepatuhan Petani dalam Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Indikator	Persentase (%)	Kategori
Pemilihan lokasi	84,62	Tinggi
Varietas	100,00	Tinggi
Benih	84,62	Tinggi
Persemaian	84,62	Tinggi
Olah lahan	84,62	Tinggi
Penanaman	88,46	Tinggi
Pemupukan	100,00	Tinggi
Pengairan	100,00	Tinggi
Pengendalian gulma	100,00	Tinggi
Pengendalian HPT	53,85	Sedang
Roguing	80,77	Tinggi
Panen	80,77	Tinggi
Pasca panen	73,50	Sedang

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil analisis data menunjukkan sebuah fenomena menarik sekaligus realistis di tingkat lapangan, yaitu bahwa petani secara umum sudah memiliki pengetahuan yang tinggi tentang standar perbenihan padi (82,35%) dan memiliki keterampilan yang cukup baik dalam penerapannya (75%). Bahkan, jika dilihat dari sisi indikator teknis, tingkat kepatuhan petani mencapai 85,83% dan termasuk dalam kategori tinggi. Namun demikian, apabila dianalisis lebih dalam berdasarkan individu petani, tingkat kepatuhan riil hanya 77,97% dan masih berada pada kategori sedang (mendekati tinggi).

Temuan ini menegaskan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan yang konsisten dalam penerapan standar di lapangan. Dengan kata lain, petani sudah tahu caranya, sudah bisa melakukannya, tetapi belum selalu disiplin dan konsisten menjalankan seluruh standar yang ditetapkan. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan ini juga dilakukan *Root Cause Analysis* (RCA) yang secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. *Root Cause Analysis* Tingkat Kepatuhan Petani

Faktor	Akar Penyebab	Hasil Observasi/ Wawancara
<i>Man</i> (Petani)	• <i>Overconfidence</i> (terlalu percaya diri dengan pengalaman) • Tingkat disiplin terhadap waktu aplikasi • Mengandalkan intuisi/ kebiasaan lama	Pengetahuan tinggi (82,35%) tetapi kepatuhan individu 77,97%. Adanya penundaan pada tahapan pemupukan & pengendalian HPT
<i>Method</i> (Metode)	• SOP dianggap rumit • Standar tidak dijadikan kebiasaan tertulis • Campuran cara tradisional & standar	Indikator pengendalian HPT 53,85% dan pasca panen 73,50%
<i>Material</i> (Input)	• Ketersediaan pestisida alami terbatas • Benih sumber terbatas	Penundaan aplikasi
<i>Machine</i> (Alat)	• Keterbatasan alat pengering, sortasi • Gudang tidak standar	Tahap pasca panen 73,50%
<i>Money</i> (Ekonomi)	• Penghematan biaya jangka pendek menjadi prioritas • Input dianggap beban	Petani menunda atau mengurangi dosis
<i>Environment</i> (Lingkungan & Sistem)	• Tidak ada reward/sanksi • Cuaca tidak menentu	Kepatuhan meningkat saat ada pendampingan, turun saat tidak diawasi

Fenomena ini terlihat jelas pada beberapa tahapan kritis, terutama pada pemupukan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (HPT). Meskipun petani mengetahui pentingnya pemupukan tepat waktu dan pengendalian hama secara teratur, dalam praktiknya sering terjadi penundaan atau pengunduran waktu aplikasi. Penundaan ini umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan waktu, kondisi cuaca, maupun pertimbangan ekonomis. Akibatnya, tindakan yang seharusnya dilakukan pada waktu optimal justru dikerjakan mendekati batas akhir atau bahkan setelah melewati waktu yang dianjurkan.

Hal tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan "overconfidence" atau rasa terlalu percaya diri pada sebagian petani. Ketika petani merasa sudah paham dan berpengalaman, muncul anggapan bahwa keterlambatan satu atau dua hari tidak akan berdampak signifikan terhadap tanaman. Inilah yang kemudian memunculkan perilaku asal-asalan dalam pelaksanaan, bukan karena tidak tahu, tetapi karena menganggap dirinya sudah cukup menguasai kondisi lapangan.

Menurut Soekartawi (2002), dalam adopsi inovasi pertanian terdapat fase di mana petani yang sudah berpengalaman sering kali tidak lagi mengikuti standar baku secara ketat, melainkan lebih mengandalkan kebiasaan dan intuisi. Padahal, dalam sistem perbenihan padi, setiap tahapan memiliki standar waktu dan prosedur yang sangat menentukan mutu benih, terutama berkaitan dengan keseragaman varietas, daya tumbuh, dan kesehatan benih (Kartasapoetra, 2006).

Kondisi ini juga diperkuat oleh fakta bahwa indikator pengendalian HPT pada penelitian ini hanya mencapai 53,85%, yang merupakan nilai terendah dibandingkan indikator lainnya. Sementara itu, indikator pasca panen juga hanya mencapai 73,50%, menunjukkan bahwa pada tahap-tahap yang dianggap "teknis dan merepotkan", kepatuhan petani cenderung menurun. Padahal, menurut FAO (2011), tahapan pengendalian organisme pengganggu serta penanganan pasca panen merupakan dua titik paling kritis dalam menjaga mutu benih.

Dengan demikian, hasil ini memperlihatkan adanya gap perilaku antara tahu, bisa, dan mau menerapkan secara konsisten. Petani sudah berada pada tingkat "*aware*" (sadar dan paham), sudah berada pada tingkat "*able*" (mampu melakukan), tetapi belum sepenuhnya berada pada tingkat "*committed*" (berkomitmen patuh secara berkelanjutan). Inilah tantangan utama dalam penerapan standar perbenihan padi terstandar.

Implikasinya, peningkatan mutu perbenihan padi ke depan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tetapi harus diarahkan pada pembentukan sikap disiplin, kebiasaan patuh, dan kontrol sosial di tingkat petani. Pendekatan melalui pendampingan intensif, pengawasan partisipatif, insentif benih bermutu, serta penetapan

petani teladan sebagai role model perlu ditingkatkan agar kepatuhan tidak lagi bersifat situasional, melainkan menjadi budaya kerja dalam kegiatan perbenihan padi.

Dengan kata lain, tantangan pembangunan pertanian saat ini bukan lagi sekadar menjawab pertanyaan “apakah petani tahu dan bisa?”, melainkan lebih jauh: “Apakah petani mau melakukannya secara konsisten sesuai standar, setiap saat, tanpa kompromi?”

Hasil analisis akar masalah menunjukkan bahwa rendahnya konsistensi kepatuhan petani terhadap standar perbenihan padi bukan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau keterampilan, melainkan lebih dipengaruhi oleh aspek perilaku, kebiasaan kerja, dan lemahnya sistem pengawasan serta motivasi kepatuhan. Oleh karena itu, solusi yang dirumuskan harus difokuskan pada perubahan perilaku, penguatan komitmen, serta penciptaan sistem yang mendukung kepatuhan berkelanjutan.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengubah pola pikir petani dari sekadar “tahu dan bisa” menjadi “tahu, bisa, dan patuh secara konsisten”. Hal ini dapat dicapai dengan memperkuat pemahaman bahwa standar perbenihan bukan sekadar aturan administrasi, melainkan merupakan penentu utama mutu benih, daya tumbuh, dan nilai ekonomi hasil panen. Petani perlu diyakinkan bahwa kepatuhan bukan bentuk pemaksaan, tetapi merupakan investasi jangka panjang terhadap keberlanjutan usahatani.

Selanjutnya, diperlukan penyederhanaan standar ke dalam bentuk yang lebih praktis dan mudah diingat. Standar yang bersifat teknis dan panjang perlu diterjemahkan menjadi SOP singkat dan visual, misalnya dalam bentuk poster, leaflet, atau papan panduan yang dipasang di lahan atau di gudang. Media ini berfungsi sebagai pengingat harian bagi petani agar selalu mengacu pada prosedur yang benar, terutama pada tahapan kritis seperti pemupukan, pengendalian HPT, dan pasca panen.

Untuk mengatasi kebiasaan menunda pekerjaan, khususnya dalam pemupukan dan pengendalian HPT, maka perlu diterapkan pendekatan kedisiplinan berbasis waktu. Petani dapat diberikan kalender tanam dan kalender kegiatan pemeliharaan yang berisi tanggal-tanggal penting aplikasi pupuk dan pestisida. Pendamping lapangan atau penyuluh dapat melakukan pengingat secara berkala, baik melalui kunjungan langsung maupun media komunikasi kelompok seperti WhatsApp. Dengan adanya pengingat waktu yang jelas, kecenderungan menunda diharapkan dapat diminimalkan.

Selain itu, upaya peningkatan kepatuhan juga harus dibarengi dengan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Keterbatasan alat pengering, dan fasilitas penyimpanan yang sesuai standar menjadi salah satu penyebab petani tidak selalu patuh, terutama pada tahap pasca panen. Oleh karena itu, perlu dilakukan fasilitasi alat pasca panen

sederhana secara bertahap, baik melalui bantuan pemerintah, kelompok tani, maupun sistem pinjam pakai antar anggota.

Solusi yang tidak kalah penting adalah penerapan sistem *reward* dan *punishment* yang bersifat edukatif. Petani yang konsisten menerapkan standar dapat diberi penghargaan berupa prioritas akses benih sumber, bantuan alat, atau pengakuan sebagai petani teladan. Sebaliknya, petani yang berulang kali mengabaikan standar dapat diberikan pendampingan khusus, atau dikurangi prioritasnya dalam program. Mekanisme ini bertujuan bukan untuk menghukum, tetapi untuk membangun kebiasaan patuh melalui konsekuensi yang nyata.

Untuk menjaga keberlanjutan perubahan perilaku, diperlukan pula penguatan pengawasan partisipatif. Pengawasan tidak hanya berasal dari penyuluh atau pemerintah, tetapi juga melalui sesama petani dalam kelompok. Dengan adanya kontrol sosial yang positif, muncul rasa saling mengingatkan dan tanggung jawab bersama terhadap mutu benih yang dihasilkan. Budaya saling mengawasi dan saling mendukung ini akan lebih efektif dibandingkan pengawasan formal semata.

Melalui penerapan solusi-solusi tersebut secara terpadu dan berkelanjutan, diharapkan tingkat kepatuhan petani terhadap standar perbenihan padi dapat meningkat, sekaligus mempersempit kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan, dan kepatuhan. Dengan demikian, kegiatan perbenihan padi tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga secara disiplin, sistematis, dan berorientasi pada mutu jangka panjang.

3.2.2 Dampak Pendampingan yang dilakukan BRPM Sumatera Selatan

Pengambilan data dampak pendampingan penerapan perbenihan padi terstandar oleh BRMP Sumsel dilakukan untuk mengukur efektivitas dari pelaksanaan pendampingan yang telah dilakukan. Data ini mencakup provitas dan kualitas hasil panen. Peningkatan provitas menunjukkan keberhasilan pendampingan dalam adopsi teknologi, transfer pengetahuan dan praktek budidaya sesuai standar. Disamping itu, data dampak pendampingan juga memperlihatkan nilai tambah ekonomis bagi petani.

Selain dampak teknis (provitas dan kualitas), data pendampingan juga menangkap faktor sosial dan ekonomi yang terlihat pada efisiensi sarana produksi (saprodi). Peningkatan efisiensi saprodi menunjukkan bahwa petani dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Selanjutnya, data akses pasar berfungsi untuk mengukur keberhasilan pendampingan dalam memutus rantai pasok yang panjang dan memberdayakan petani secara mandiri. Data ini membuktikan bahwa pendampingan tidak hanya meningkatkan hasil panen,

tetapi juga memperbaiki posisi tawar petani yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri.

Petani dengan produktivitas hasil panen tinggi diminta untuk melanjutkan atau mengadopsi teknologi baru, dimana hal ini menunjukkan adanya transfer pengetahuan yang sukses dan kepercayaan terhadap metode yang diajarkan. Data ini penting untuk memproyeksikan potensi pengembangan program ke wilayah lain atau kelompok tani yang belum terjangkau. Secara keseluruhan, data dampak (provitas, kualitas, efisiensi penggunaan input, pasar, dan minat) memungkinkan BRMP mendapatkan data berbasis bukti di lapangan, mengalokasikan sumber daya secara optimal, dan memastikan bahwa setiap program pendampingan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian petani padi di Sumatera Selatan.

Tabel 6. Sebaran Dampak Pendampingan

No.	Kategori Dampak Pendampingan	Presentase (%)	
		Ya	Tidak
1	Provitas hasil panen	100.00	0,00
2	Kualitas produk pertanian	100.00	0,00
3	Efisiensi Saprodi (pupuk, pestisida, air)	100.00	0,00
4	Akses pasar/harga jual produk	100.00	0,00
5	Minat untuk menerapkan standar pertanian di musim berikutnya	100.00	0,00

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Lima kategori dampak yang dipilih dalam survei ini mencerminkan dimensi keberhasilan pendampingan usaha tani sesuai standar. Provitas hasil panen dan kualitas produk pertanian merupakan indikator teknis yang mengukur output fisik, yaitu seberapa banyak (kuantitas) dan seberapa baik hasil panen padi (kualitas) yang dihasilkan. Dari data di atas, 100% petani memberikan jawaban setuju terhadap dampak yang diberikan di sektor ini. Hal ini menggambarkan bahwa pendampingan yang di lakukan BRMP Sumatera Selatan cukup efektif untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian.

Sementara itu, efisiensi penggunaan input (pupuk, pestisida, air) dan akses pasar (terkait dengan harga jual produk) merupakan indikator ekonomi yang sangat penting. Peningkatan efisiensi saprodi menunjukkan keberhasilan petani dalam menekan biaya operasional, dan perbaikan akses pasar menunjukkan kemampuan petani untuk memperoleh harga jual yang lebih baik. Dari hasil yang ditunjukkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa 100% petani menjawab terdapat peningkatan efisiensi penggunaan input dan akses pasar dengan

adanya pendampingan yang diberikan BRMP Sumatera Selatan.

Pendampingan BRMP Sumatera Selatan sangat penting karena membantu petani menggunakan pupuk, pestisida, dan air dengan cara yang tepat sehingga tidak boros, tanaman lebih sehat, dan biaya produksi bisa ditekan. BRMP juga membantu membuka akses pasar agar hasil panen petani bisa dijual dengan harga yang lebih baik dan lebih stabil. Ke depannya, pendampingan ini semakin dibutuhkan karena pertanian terus berkembang dan petani perlu dibimbing agar mampu mengikut teknologi dan cara kerja yang lebih efisien dan juga untuk mendukung program swasembada pangan Pemerintah. Dengan mengukur keempat aspek ini pada setiap petani, BRMP Sumatera Selatan dapat memastikan bahwa keberhasilan yang dicapai tidak hanya berfokus pada hasil panen tetapi juga pada peningkatan keuntungan dan posisi tawar petani.

Kategori minat untuk melanjutkan penerapan standar perbenihan padi di musim tanam berikutnya yang ditunjukkan pada Tabel 6 sebesar 100% petani, merupakan indikator dampak yang memiliki bobot penting dalam aspek keberlanjutan sosial program pendampingan. Minat mengukur kemauan petani untuk melanjutkan atau mereplikasi inovasi yang telah diajarkan. Hasil minat untuk melanjutkan penerapan standar pertanian di musim tanam berikutnya yang mencapai 100% mengindikasikan bahwa intervensi pendampingan telah diterima baik oleh semua petani, karena mereka melihat adanya manfaat nyata (baik peningkatan provitas, efisiensi, maupun akses pasar). Tingginya minat ini adalah prasyarat utama agar program pendampingan dapat dilanjutkan secara mandiri oleh kelompok tani, tanpa bergantung terus-menerus pada pihak luar. Kesimpulannya, tabel ini menunjukkan bahwa data telah berhasil dikumpulkan secara lengkap untuk seluruh indikator penting, memberikan dasar kuat bagi analisis dampak sesungguhnya dari program pendampingan.

IV KESIMPULAN

Pelaksanaan Kegiatan Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi Tahun 2025 telah memberikan hasil yang signifikan dalam mendukung modernisasi pertanian berbasis standar serta pencapaian kinerja BRMP Sumatera Selatan. Berdasarkan rangkaian kegiatan, analisis data, dan hasil evaluasi lapang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kapasitas pelaku usaha tani dalam penerapan standar perbenihan padi berada pada kategori baik. Tingkat pengetahuan petani berada pada kategori tinggi, terutama pada tahapan budidaya. Meskipun demikian, aspek panen dan pasca panen masih memerlukan penguatan. Keterampilan petani berada pada kategori sedang, menunjukkan bahwa kemampuan teknis sudah baik tetapi membutuhkan latihan praktik lebih intensif.
2. Tingkat kepatuhan petani terhadap penerapan standar perbenihan padi menunjukkan hasil yang cukup baik. Rata-rata kepatuhan mencapai 77,97% dengan kecenderungan menuju kategori tinggi. Sebagian besar indikator teknis telah diterapkan sesuai standar, namun kepatuhan pada pengendalian HPT dan pasca panen masih perlu ditingkatkan. Gap antara pengetahuan–keterampilan–kepatuhan terutama disebabkan oleh kebiasaan lama, keterbatasan fasilitas, serta konsistensi perilaku.

Secara keseluruhan, kegiatan tahun 2025 ini berhasil memenuhi tujuan yang ditetapkan, yaitu meningkatkan kapasitas dan kepatuhan petani dalam menerapkan standar perbenihan padi serta menyediakan data evaluatif untuk memperkuat standardisasi pertanian. Ke depan, diperlukan penguatan pada aspek panen–pascapanen, pendampingan intensif berbasis praktik, peningkatan fasilitas pendukung, serta mekanisme insentif untuk mewujudkan penerapan standar yang konsisten dan berkelanjutan di tingkat kelompok tani.